



DOKUMEN MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

# KEJAYAAN LADA HINGGA PRAKTEK PERBURUHAN DI LAMPUNG ABAD KE XVI-XX

KARSIWAN, M. Pd



THE PEPPER-PLANT, PIPER NIGRUM.  
Illustrated by H. Blandin 1891.

DIREKTORAT SEJARAH

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019



**KEJAYAAN LADA HINGGA PRAKTEK  
PERBURUHAN DI LAMPUNG ABAD KE XVI-XX**

**DIREKTORAT SEJARAH  
DIREKTORAT JENDRAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2019**

# **KEJAYAAN LADA HINGGA PRAKTEK PERBURUHAN DI LAMPUNG ABAD KE XVI-XX**

## **Penulis:**

Karsiwan, M.Pd

## **Penyunting:**

Drs. Syaiful M, M.Si.

Lisa Retno Sari, M.Pd

## **Layout:**

Lisa Retno Sari, M.Pd

## **Perancang Sampul:**

M. Nafis Mahya

## **Penerbit:**

Direktorat Sejarah

Direktorat Jendral Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 9,  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270,  
Telp: 0215725540

Cetakan Tahun 2019

ISBN

**978-623-7092-39-1**

## **Katalog Dalam Terbitan**

### **KEJAYAAN LADA HINGGA PRAKTEK PERBURUHAN DI LAMPUNG ABAD KE XVI-XX**

Karsiwan, M.Pd

Jakarta: Direktorat Sejarah

Direktorat Jendral Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(xxiv+ 376 hlm; 15,5 x 24 cm)

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Dilindungi Undang-Undang

Milik Negara  
Tidak Diperdagangkan

## **SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH**

Penerbitan buku ini merupakan *out put* dari program bantuan pemerintah fasilitasi penulisan buku sejarah tahun anggaran 2019. Penulisan buku sejarah menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui, mengenal, mewarisi, dan mengakarkan sejarah dalam kehidupannya. Melalui penanaman nilai-nilai sejarah dan pemberian pemahaman sejarah kepada masyarakat, maka akan memperkuat rasa nasionalisme, identitas, dan nilai-nilai kebangsaan.

Buku yang ada ditangan pembaca ini mengulas tentang “Kejayaan Lada Hingga Praktek Perburuhan di Lampung Abad XVI-XX” mampu merekonstruksi keterkaitan antara kejayaan lada dengan praktek perburuhan di Lampung dalam tiga fase pemerintahan yakni fase mandiri, dibawah kesultanan Banten, hingga pemerintah Kolonial Belanda menguasai wilayah ini. Kejayaan lada Lampung pada abad ke XVI-XVII telah menjadikan wilayah ini menjadi perebutan pengaruh hegemoni kekuasaan Kesultanan Banten dan Palembang. Pun demikian bagaimana kemudian kebutuhan akan produksi lada, tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga kerja, serta bagaimana peralihan komoditas lada ke komoditas karet dan kopi di

Lampung dalam hubungannya dengan ketersediaan buruh sebagai tenaga kerja pada masa Kolonial Belanda.

Kami memberikan apresiasi sekaligus menyambut baik buku ini. Semoga substansi tulisan ini memberikan manfaat bagi para penikmat, pelaku, dan pecinta sejarah, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif bangsa untuk semakin mencintai sejarah dan budaya bangsanya. Serta semakin memperdalam rasa cinta dan bangga terhadap warisan sejarah bangsa, dan dirawat serta diwariskan terus menerus dari generasi ke generasi selanjutnya.

Sekian dan terimakasih.

Jakarta, 15 November 2019  
Direktur Sejarah

Dra. Triana Wulandari, M.Si.

## PENGANTAR PENULIS

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji hanyalah milik Allah, *Rabb* Semesta Alam senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah, serta nikmat kepada penulis berupa kesempatan memasuki dunia keilmuan dan memberi kekuatan dalam menuntaskan penulisan buku yang merupakan bagian dari kewajiban sebagai bagian dari penerima bantuan fasilitasi penulisan sejarah dari Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Hadirnya karya ini tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan syarat formal bagi para penerima bantuan, tapi lebih jauh menjadi motivasi penulis untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pecinta dan penikmat nilai sejarah lokal dan menangkap makna dari peristiwa.

Buku yang saya berjudul “Kejayaan Lada dan Praktek Perburuhan di Lampung Abad XVI-XX” bertujuan merekonstruksi hubungan antara kejayaan lada dengan praktek perburuhan di Lampung baik pada masa Kesultanan Banten maupun ketika Lampung berada di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Kejayaan lada Lampung pada abad ke XVI-XVII telah menjadikan wilayah ini menjadi perebutan pengaruh hegemoni kekuasaan Kesultanan Banten dan Palembang. Pun

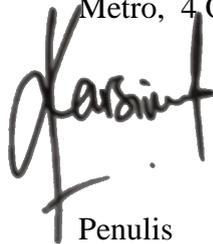
demikian bagaimana kemudian kebutuhan akan produksi lada, tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga kerja, serta bagaimana peralihan komoditas lada ke komoditas karet dan kopi di Lampung dalam hubungannya dengan ketersediaan buruh sebagai tenaga kerja pada masa Kolonial Belanda.

Beralih ke balik layar, penulisan karya ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang cerdas, hebat dan kuat yang dengan kerendahan hati turut menguatkan penulis sejak memulai hingga terselesaikannya buku ini. Maka di kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terimakasih kepada: Lisa Retno Sari yang selalu mendukung dan mengingatkan akan pentingnya niat dan ketulusan selama penulisan. Ayra Ashalina Fauziah, ditengah kesibukan dan aktivitas penulis baik sebagai pengajar dan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selalu memberikan keceriaan dan warna dalam keseharian penulis. Kepada Mamak dan Bapak yang selalu setia mendukung penulis dalam segala hal, semoga selalu Allah berkahi dan berikan samudra kenikmatan di dunia dan akhirat. Kepada kakang Husnaini, semoga Allah selalu berikan kemudahan di setiap langkah tugas negara yang kau emban, teruntuk Husnawati berikut kak tri , mb yang selalu mendukung langkah adiknya yang terkadang *nyeleneh*. Adik-adik, Restika Ananda Putri dan Devi Ectarianisa semoga Allah

mudahkan aktivitas, cita dan mimpinya dalam menjalani hidup. Para guru yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, semoga ilmu yang diberikan selalu membawa keberkahan. Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktunya membantu penulis, terimakasih untuk masukan, kritik dan diskusi hangatnya guna penyempurnaan tulisan. Serta tim Direktorat Sejarah yang telah memfasilitasi proses penulisan dari awal hingga akhir.

Akhirnya, semoga karya kecil ini memiliki nilai dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya sejarah lokal di Lampung sekaligus menjadi salah satu wasilah kebermanfaatannya penulis selama hidup. aamiin.

Metro, 4 Oktober 2019



Penulis

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karsiwan

NIP : 19890916 2019031008

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan saya yang berjudul *Kejayaan Lada dan Praktek Perburuhan di Lampung Abad Ke XVI-XX* adalah benar merupakan karya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang terdapat dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan kutipannya dalam penulisan buku ini. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata tulisan buku ini sebagian atau keseluruhan isi buku ini merupakan plagiat dari karya milik orang lain.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Metro, 04 Oktober 2019



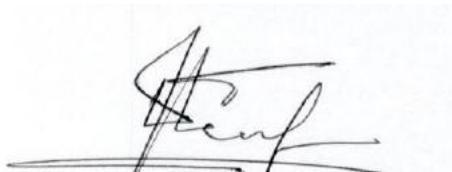
Karsiwan

NIP. 19890916 2019031008

## LEMBAR PENGESAHAN PENDAMPING

Buku berjudul “Kejayaan Lada dan Praktek Perburuhan di Lampung Abad Ke XVI-XX” yang ditulis oleh Karsiwan dosen Antropologi dan Sejarah Dunia pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro telah melalui proses bimbingan oleh akademisi Universitas Lampung (Unila) yaitu Drs. Syaiful, M. M.Si., dan telah diperbaiki sesuai saran-saran dari pembimbing.

Bandar Lampung, 11 November 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syaiful', is written over a light blue rectangular background. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

Drs. Syaiful, M. M.Si.  
NIP. 19610703 198503 1 004

## ABSTRAK

### **Kejayaan Lada dan Praktek Perburuhan di Lampung Abad XVI-XX**

Oleh  
Karsiwan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejayaan lada Lampung dan praktek perburuhan yang terjadi di dalamnya dari abad XVI-XX. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan teknik pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, kejayaan lada Lampung dan praktek perburuhan yang terjadi di dalamnya dari abad XVI-XX. Lada di Lampung dikenal dengan sebutan *Lampung Black Papper* karena kualitas dan ketenarannya, dimasa Kesultanan Banten budidaya lada berkembang pesat dengan banyaknya perintah penanaman lada oleh Sultan melalui piagam yang dikirimkan ke pemimpin adat (Punyimbang). Pada masa kolonial Belanda budidaya lada tetap digalakkan meskipun mulai digantikan dengan tanaman perkebunan kopi dan karet. Pada awalnya praktek perburuhan di Lampung dilakukan secara sukarela pada masa awal budidaya lada, dan berubah setelah kedatangan kolonialisme Belanda. Perburuhan terbagi menjadi 3 yakni, 1) Buruh Lepas, 2) Buruh Bebas, 3) Buruh Kontrak.

**Kata Kunci:** Lada, Buruh, Kolonialisme Belanda, Banten, Lampung

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH</b>	<b>iv</b>
<b>PENGANTAR PENULIS</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>	<b>ix</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENDAMPING</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>vvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR PETA</b>	<b>xiv</b>

### **I. PENDAHULUAN**

1.1 .Latar Belakang Masalah	1
1.2 .Permasalahan	16
1.3 .Ruang Lingkup Penelitian	17
1.4 .Tujuan Penelitian	17
1.5 .Manfaat Penelitian	18
1.6 .Kajian Pustaka	19
a. Konsep Lada	19
b. Konsep Pemerintah Kolonial Belanda	19
c. Konsep Buruh	20
1.7 Penelitian yang Relevan	21
a. Lampongsche Districten	22
b. <i>De Pepercultuur In De Buitenbezittingen</i>	22
c. Perdagangan Lada di Lampung dalam Tiga Masa 1653-1930	23
d. Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung pada tahun 1800-1942	24
e. Sungai Tulang Bawang dalam Perdagangan Lada di Lampung pada Periode 1648-1914	25
f. Pembangunan Irigasi Way Tebu sebagai	

Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1927	26
g. Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816- 1942	28
1.8 Kerangka Pemikiran	29
1.9 Metode Penelitian	30
1.10 Sistematika Penulisan	31
<b>II. Lampung</b>	
2.1 Gambaran Umum Lampung	35
2.2 Alam Lampung	39
2.3 Penduduk dan Masyarakat Lampung	45
2.3.1 Sejarah Masyarakat Lampung	48
a. Catatan Cina	56
b. Catatan Orang Belanda	57
c. Berasal dari Legenda Tapanuli	58
d. Teori yang berasal dari Pagarruyung	59
e. Teori Kelima dari Kitab Negara Kertagama	62
2.3.2 Masyarakat Lampung	63
2.3.3 Masyarakat Lampung Adat Saibatin	64
2.3.4 Masyarakat Lampung Adat Pepadun	65
2.3.5 Masyarakat Lampung Hari ini	69
2.4 Bahasa, Budaya, dan Hasil Kebudayaan Masyarakat Lampung	73
2.4.1 Bahasa Masyarakat Lampung	74
2.4.2 Aksara Masyarakat Lampung	77
2.4.3 Budaya Masyarakat Lampung	79
2.4.4 Hasil Budaya Masyarakat Lampung	86
2.5 Sistem Pemerintahan Masyarakat Lampung	89
2.6 Hasil Bumi Tanah Lampung	97
<b>III. Lada Lampung</b>	
3.1 Lada	102
3.2 Jenis Lada	107
3.2.1 Lada Hitam	108
3.2.2 Lada Putih	109
3.3 Lada Lampung	110

a.	Lokasi dan Metode Budidaya Lada	113
b.	Penanaman dan Pemeliharaan Lada	116
c.	Pekerjaan setelah Masa Tanam	126
d.	Proses dan Hasil Panen Lada	129
1.	Produksi Lada Hitam	132
2.	Produksi Lada Putih	134
e.	Proses setelah Panen	135
f.	Kontrak Kerja dalam Budidaya Lada	142
g.	Perdagangan	143
3.4	Fungsi Lada	149
a.	Simbol Persahabatan	149
b.	Alat Barter	150
c.	Politik Diplomasi	151
d.	Simbol Kejayaan	152
3.5	Gambaran Perburuhan pada Masa Kejayaan Lada Lampung	154
<b>IV.</b>	<b>Lampung Dibawah Kesultanan Banten</b>	
4.1	Sejarah Hubungan Lampung Banten	162
4.2	Struktur dan Pola Pemerintahan Lampung Dibawah Kesultanan Banten	167
4.3	Dampak Pemerintahan Kesultanan Banten	175
4.3.1	Budidaya Lada Masa Banten	177
4.3.2	Kondisi Perdagangan	185
4.3.3	Kondisi Ekonomi	193
4.3.4	Kondisi Sosial	195
4.3.5	Kondisi Politik	201
4.4	Gambaran Perburuhan pada Masa Kesultanan Banten	206
<b>V.</b>	<b>Lampung pada Masa Pemerintahan Kolonial</b>	<b>212</b>
5.1	Struktur dan Pola Pemerintahan Masa Kolonial	222
a.	Perangkat Desa	232
b.	Pengangkatan Pegawai	233
c.	Tugas Pegawai Adminitrasi Desa	235
d.	Gaji Pegawai Pribumi	235
5.2	Budidaya Lada dibawah Pemerintah Kolonial	240

5.3	Perkebunan dan Awal Perburuhan di Lampung	241
5.4	Masa Tanam Paksa	252
5.5	Masa Politik Pintu Terbuka	261
5.6	Masa Politik Etis	269
5.7	Kondisi Perdagangan, Sosial, Ekonomi, dan Politik pada Masa Kolonial	281
5.7.1	Kondisi Perdagangan	281
5.7.2	Kondisi Sosial	290
5.7.3	Kondisi Ekonomi	295
5.7.4	Kondisi Politik	301
5.8	Gambaran Perburuhan pada Masa Kolonial	304
5.8.1	Kehidupan Buruh	310
	a. Sistem Kerja di Perkebunan	310
	b. Kondisi Buruh Perkebunan	313
	c. Keberadaan Buruh Perempuan	315
	d. Keberadaan Buruh Rumah Tangga	317
	e. Kesehatan Buruh di Perkebunan	320
	f. Perjuangan Kaum Buruh	325
5.8.2	<i>Koeli Ordonantie</i>	328
5.8.3	Mekanisme Perekrutan Buruh	338
	a. Perekrutan berdasarkan Pesanan Pihak Perusahaan	344
	b. Perekrutan Sendiri	345
	c. Perekrutan dengan Metode <i>Laukeh</i>	347
5.8.4	Jenis Tenaga Kerja	352
	a. Tenaga Kerja Lepas	352
	b. Tenaga Kerja Bebas	353
	c. Tenaga Kerja Kontrak	354
	d. Tenaga Kerja <i>Herendiesten</i>	356

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Simpulan	371
-----	----------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	374
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISTILAH

<i>Afdeling</i>	Sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan Hindia Belanda setingkat kabupaten yang dikepalai seorang Asisten Residen.
<i>Bau</i>	Ukuran luas tanah. Satu bau = 1.700 m <sup>2</sup>
<i>Bandar</i>	Nama jabatan dari sultan Banten bagi pemimpin komunitas migran di Lampung yang terlibat dalam perdagangan lada.
<i>Bahar</i>	Satuan berat dalam perdagangan lada
<i>Besluit</i>	Keputusan atau ketetapan pemerintah kolonial Belanda
<i>Bijblad</i>	Penjelasan tambahan pada lembaran negara
<i>Binnenland Bestuur</i>	B.B atau departemen dalam negeri pada masa pemerintah Kolonial Belanda
<i>Depa</i>	Satuan panjang tradisional yang memiliki ukuran sepanjang rentangan tangan ke samping
<i>Erfpacht</i>	Tanah yang disewakan dalam jangka panjang
<i>Hak Octrooi</i>	Hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC.
<i>Janggolan</i>	Suatu kewajiban iuran masyarakat dan digunakan sebagai penghasilan bagi pamong desa.
<i>Jenjen/Jenang</i>	Perpanjangan tangan sultan Banten di Lampung yang bertugas sebagai perwakilan sultan dalam menghimpun hasil bumi untuk dikirim ke Banten.
<i>Jung</i>	Sejenis perahu kuno yang berasal dari

<b><i>Kebuayan</i></b>	Cina dan berkembang pada dinasti Han. Banyak digunakan di wilayah Sumatera sebagai alat transportasi sungai. Sistem kekerabatan yang berasal dari satu pertalian darah atau keturunan, istilah tersebut juga dikenal dengan <i>paksi</i> (kesatuan buay inti atau klan).
<b><i>Keratuan</i></b>	Persekutuan hukum adat. Yang dimaksud dengan istilah <i>ratu</i> ialah penguasa wilayah tanah dan lingkungan kekerabatan adat.
<b><i>Karesidenan</i></b>	Batas wilayah administratif pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan dikepalai seorang residen.
<b><i>Marga</i></b>	Wilayah persekutuan adat di Lampung yang luasnya tidak terbatas, biasanya dibatasi oleh hutan-hutan belukar dan lembah-lembah ngarai yang tidak mungkin dihuni. Sistem/Institusi genealogis teritorial yang menjalankan pemerintahan adat dengan menggunakan asas kekerabatan.
<b><i>Negara Rendah</i></b>	(Belanda: <i>de Lage Landen</i> ; Prancis: <i>les Pays- Bas</i> ) adalah istilah bagi wilayah pesisir di Eropa Barat yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan delta sungai Rhine, Meuse, Scheldt, dan Ems.
<b><i>Onderafdeling</i></b>	Sub-distrik dari <i>Afdeling</i> , dan dipimpin oleh seorang <i>Controleur</i>
<b><i>Onderneming</i></b>	Wilayah perkebunan dalam bahasa Belanda
<b><i>Pax Neerlandica</i></b>	Motto Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai satu kesatuan dengan Kerajaan Belanda.
<b><i>Pasirah/Pesirah</i></b>	Kepala pemerintahan marga (Belanda: <i>margahoofd</i> ) di Sumatera bagian Selatan.

<b>Paseban</b>	Berarti Balai (dalam bahasa Jawa), tempat kegiatan silaturahmi menghadap Sultan Banten dalam rangka mengakui kekuasaan Banten atas Marga di Lampung
<b>Penyimbang</b>	Anak laki-laki tertua yang mewarisi kedudukan dan tanggung jawab keluarga, kerabat, dan kebuayan.
<b>Peppung</b>	Musyawaharah adat yang dilakukan oleh para penyimbang marga.
<b>Perwatin/Proatin</b>	Dewan adat yang berisi para tokoh adat/pimpinan adat. Perwatin memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas pemerintahan adat atau urusan yang berhubungan dengan <i>hippun/peppung</i> adat.
<b>Pikul</b>	Satuan berat tradisional, setara dengan 62,5 Kg
<b>Piil Pesenggiri</b>	Nilai-nilai budaya dan merupakan harga diri masyarakat Lampung yang merupakan nilai sosial dan moral dan pedoman dalam bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
<b>Poenale Sanksi</b>	Suatu peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1910 (termasuk <i>koeliordonnantie</i> ) yang memberi hak kepada majikan untuk mengikat dan menguasai sepenuhnya kaum buruhnya yang berbangsa Indonesia
<b>Residen</b>	Pegawai Pamong praja yang mengepalai daerah (bagian Propinsi yang meliputi beberapa kabupaten)
<b>Seba</b>	Kunjungan politik pemimpin Lampung menghadap sultan Banten untuk memberikan pengakuan dan kesetiaan.
<b>Staatsblad</b>	Peraturan negara yang tercantu m

dalam lembaran negara yang merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonansi, dan reglement.

***Tiyuh***

Tempat tinggal beberapa komunitas suku

***VOC***

Perusahaan dagang milik Belanda yang didirikan tahun 1602 untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia

***Way***

Sungai (dalam bahasa Lampung)

## DAFTAR GAMBAR

1. Perkebunan Lada di Lampung	8
2. Pemukiman Masyarakat Lampung	51
3. Gadis Lampung	67
4. Aksara Lampung	79
5. Tapis Lampung	87
6. Lada	102
7. Pemasangan tegakan hidup pada tanaman lada	117
8. Tanaman lada yang mulai merambat	121
9. Petani lada di kebun lada	124
10. Proses pemangkasan tanaman tegakan	127
11. Proses merambatkan lada	129
12. Perambatan tanaman Lada	131
13. Proses panen lada	133
14. Proses pembuatan lada putih di Tulang Bawang, Lampung	137
15. Penjemuran hasil panen lada	132
16. Penjemuran Lada	141
17. Pengepakan lada oleh para buruh perkebunan	145
18. Perahu Bermuatan lada menuju Palembang	148
19. Lada sebagai Alat Barter Perdagangan	150
20. Surat Sultan Banten Kepada Punggawa di Lampung	151
21. Pengiriman lada melalui jalur air di Lampung	153
22. Hasil Panen Lada Hitam Lampung	157
23. Penjemuran Lada	159
24. Pedagang menunggu hasil lada di pelabuhan	173
25. Penanaman dan pengelolaan lada	179
26. Perahu sebagai alat transportasi lada	185
27. Aktivitas perdagangan lada di pelabuhan	197
28. Surat Sultan Banten Tentang Laporan adanya Bajak	199
29. Struktur pemerintahan kolonial di Hindia Belanda	229
30. Pengiriman lada melalui pelabuhan di Teluk Betung	244
31. Jalur pengiriman lada melalui darat	250
32. Pembukaan Perkebunan Kopi di Way Lima	263

33. Pejabat Pemerintah Belanda Foto Bersama Masyarakat di Way Lima, Lampung	268
34. Pembukaan wilayah kolonisasi	262
35. Pengecekan, Menunggu, Keberangkatan dan Pembukaan Wilayah Kolonisasi	267
36. Jaringan Irigasi Sekampung di Trimurjo	280
37. Pasar Sukadana di Kolonisasi Lampung	287
38. Sekolah di Kolonisasi Lampung	292
39. Perkebunan dan Pabrik Karet di Lampung	294
40. Pembukaan Perkebunan Karet di Way Lima, Lampung	304
41. Struktur Organisasi Kerja di Perkebunan	306
42. Gambaran Kehidupan Buruh di Perkebunan	315
43. Pemeriksaan Kolonis di Pelabuhan teluk, Lampung	323
44. Residen Rookmaker Meninjau daerah kolonisasi	327
45. Penduduk Pribumi sebagai pekerja transportasi	357
46. Pembukaan lahan dan pembuatan Jalan (Residen Rookmaker meninjau langsung kolonisasi Lampung)	361

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1918	10
2.1 Profil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	37
2.2 Asal usul masyarakat Lampung	60
2.3 Perbandingan adat Saibatin dan Pepadun dalam Masyarakat Lampung	68
2.4 Jumlah Penduduk Lampung Menurut Kabupaten/Kota	72
2.5 Komposisi Penduduk Lampung Berdasarkan Suku Bangsa Tahun 2000	73
3.1 Luas Lahan Budidaya Lampung tahun 1912	112
3.2 Pengeluaran selama Budidaya Lada	126
3.3 Perkiraan Hasil Budidaya Lada di Lampung	138
3.4 Aspek Keterbutuhan pembiayaan Lada hingga Panen	140
4.1 Wilayah dan Sebaran Lada di Lampung Tahun	181
4.2 Hasil Lada di Lampung Tahun 1760-1764	182
4.3 Wilayah dan Sebaran Hasil Lada di Lampung Tahun 1780-1786	183
4.4 Harga Lada	191
4.5 Upah Buruh pada Abad XV-XVII	209
5.1 Sebaran wilayah penghasil lada	242
5.2 Perbandingan Komoditas Hasil Perkebunan	257
5.3 Produktifitas lada dibawah pemerintah kolonial Belanda hingga 1866	260
5.4. Usulan Program 10 Tahun Kolonisasi	275
5.5 Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1916	284
5.6 Perdagangan Lada Lampung selama Kurun	

waktu 1912-1930	286
5.7 Perbandingan ekspor kopi dari residensi di Sumatera Selatan (dalam ton)	301
5.8. Sumbangsih perusahaan perkebunan di Lampung terhadap total Produksi Karet dan Kopi di Hindia Belanda	302
5.9 Pedoman pemungutan pajak	308
5.10 Kondisi Buruh yang Meninggal di Lampung sejak 1911-1913	322
5.11 Hasil Rekruten Metode <i>Laukeh</i>	352

## DAFTAR PETA

1. Peta Wilayah Sumatera Bagian Selatan	36
2. Peta Persebaran Marga Lampung	46
3. Peta Pemukiman dan Penyebaran Penduduk Lampung	55
4. Peta Persebaran Lada di Indonesia	105
5. Peta Pengaruh Kekuasaan Kesultanan Banten	163
6. Wilayah Lampung yang mendapat pengaruh Banten	170
7. Arus perdagangan di Lampung masa Banten	187
8. Peta Karesidenan Lampung	215
9. Peta Kolonisasi Bagelen dan Wonosobo	273

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepulauan Nusantara sudah dikenal sejak lama sebagai wilayah penghasil komoditas rempah-rempah unggulan seperti lada, pala, kopi, dan cengkeh. Hal ini mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan penduduk pribumi seperti bangsa Portugis, Cina, Arab, hingga Belanda. Malaka merupakan titik pertemuan semua jalur rempah-rempah yang penting sepanjang abad ke XVI hingga permulaan awal abad ke XX, dari dunia timur dan akan berlayar ke barat (Turner, 2019: 29).

Ketika bangsa Portugis hadir pertama kalinya disana, mereka menganggap bahwa Malaka adalah pelabuhan laut terkaya dan tersibuk di dunia. Bahkan Tome Pires menggambarkan dengan penuh ungkapan hiperbolanya, “bahwa siapapun yang menguasai Malaka, berarti mampu mencekik mati Venesia sebagai pelabuhan utama perdagangan rempah di Eropa. Sumatera adalah tempat pertama sekaligus terakhir di kawasan Asia Tenggara yang ditemukan dunia dalam jalur pelayaran internasional (Reid, 2014: xxi). Sebelum Magelhaens memperkenalkan jalur perdagangan di kawasan Asia Pasifik, jalur pelayaran dunia di wilayah Asia Tenggara hanya dikenal

melalui tiga jalur, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan jalur darat melalui semenanjung Malaya. Lewat ketiganya, Sumatera sudah dikenal dikalangan pedagang Dunia, baik Eropa, Cina, India hingga bangsa Arab. Sehingga beberapa jejak-jejak peninggalan tertua dari pengaruh bangsa asing ditemukan disini seperti pengaruh India, Arab, Persia dan Cina.

Rempah-rempah dibawa oleh pedagang Cina melalui Selat Malaka, kemudian diperdagangkan ke India dan Malabar. Dari India, rempah selanjutnya menyeberangi Samudera Hindia menuju Teluk Persia atau Laut Merah oleh pedagang Arab, untuk selanjutnya rempah-rempah bergerak menuju Eropa melalui jalur darat melintasi gurun pasir menuju pasar-pasar di jazirah Arab serta ke Aleksandria (Turner, 2019: 51). Baru setelah mencapai Aleksandria, jalur selanjutnya adalah melintasi perairan Mediterania untuk kemudian sampai di daratan Eropa.

Rempah dengan jenis lada, merupakan komoditas paling tinggi dan paling banyak mengandung nilai historis dan bernilai pada zamannya. Rempah ini berasal dari buah *Piper nigrum*, jenis tumbuhan merambat dari pantai Malabar, India. Tumbuhan ini tumbuh subur dari hutan yang merambahi lereng wilayah Ghat dibawah sinar matahari, teduh, dingin dan panasnya belukar hutan tropis (Turner, 2019: 17). Hingga sampai ke kepulauan Nusantara terbawa oleh angin Monsun pada rute pelayarannya.

Perdagangan lada di Pantai Sumatera mampu menghasilkan 5.000 ton lada, dan sebagian besar dikirim ke New England sehingga mampu menjadi pemasok utama kebutuhan lada di Eropa. Harga jual lada berkisar diangka 10-11 dolar perpikul (sekitar 62,5 kg) dan harga terendah meskipun sangat jarang terjadi berada di angka 8 dolar perpikul pada tahun 1803 (Reid, 2014: 284). Kenaikan harga jual lada terjadi karena tingginya permintaan akan lada, bahkan setidaknya terdapat 30 kapal Amerika di Pantai Sumatera untuk melakukan transaksi jual beli lada.

Wilayah Lampung merupakan daerah yang terletak di ujung paling selatan Pulau Sumatera dan menjadikannya pintu gerbang Pulau Sumatera, ia menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah ini sejak dahulu terkenal dengan komoditas rempah-rempah jenis Lada, keadaan ini membuat Lampung menjadi strategis sebagai tempat yang mudah untuk menjalin hubungan dengan daerah lainnya di Nusantara dan menarik para penguasa untuk datang serta menguasai wilayah ini. Dalam catatan Pires (2014: 223), menyebutkan ada beberapa wilayah di Lampung yang menjalin hubungan dengan Jawa dan Sunda yaitu negeri Sekampung dan negeri Tulangbawang. Dilihat dari letak geografis wilayah Lampung, memiliki lokasi yang strategis karena berada ditepi Selat Sunda.

Lada Lampung dikenal dengan istilah *Lampung black papper* sudah menjadi primadona komoditas rempah-rempah dan diekspor ke berbagai penjuru dunia sejak abad ke-XVI. Pada masa itu, lada merupakan bahan rempah yang sangat diminati oleh orang-orang yang berasal dari Benua Eropa, sehingga para pedagang asing berdatangan ke kawasan penghasil lada di Nusantara. Lada Lampung banyak dijual melalui Pelabuhan Banten mengingat Lampung dalam perjalanan sejarahnya pernah menjadi wilayah dibawah kekuasaan kesultanan Banten. Selain di Lampung, menurut Soedewo (2007: 20), Lada diproduksi di perkebunan di wilayah kekuasaan Banten di Pulau Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Silabar di Bengkulu. Lada di Lampung banyak dihasilkan dari daerah bagian selatan (Kalianda, Katibung), utara (Tulangbawang, Menggala) dan timur Lampung (Sukadana).

Masyarakat Lampung pada awalnya merupakan wilayah yang mandiri dengan struktur pemerintahan yang khas dalam bentuk pemerintahan *Kebuayan* yaitu kesatuan-kesatuan kemasyarakatan adat yang kecil. Sistem pemerintahan *Kebuayan* pada dasarnya sudah dikenal sejak permulaan orang-orang Lampung berdiam di wilayah ini. Mereka bermukim dalam lokasi tertentu dengan batas-batas wilayah yang jelas. Keperluan hidup sehari-hari dipenuhi secara bersama-sama, dan masyarakat Lampung dipimpin oleh orang

tua yang dianggap lebih baik dari pada yang lainnya (Tjandrasasmita, 1984: 174).

Pada abad ke XVI, Lampung merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan kesultanan Banten, dan dalam menjalankan pemerintahannya Sultan mengangkat perwakilannya di Lampung melalui penduduk setempat dengan gelar seperti pangeran, bupati, dan temenggung, sedangkan dari pihak Banten sendiri sultan menunjuk wakil bernama *jenjem* untuk sebagai perwakilan di empat wilayah di Lampung. *Jenjem* memiliki kedudukan sebagai pengawas tertinggi, dan bertugas untuk menerima produk, mengirimkannya ke agen-agen perusahaan, memberikan gelar-gelar bagus untuk dorongan dan penghargaan, dan akhirnya menjualnya untuk keuntungan mereka sendiri. Para pelaku perdagangan lada kemudian membuat pemukiman dan tinggal disekitaran pasar di Lampung, seperti pedagang dari Cina bertempat tinggal di Menggala dan Teluk (Broersma, 1916: 167).

Pemimpin masyarakat adat di Lampung melakukan seba ke Banten dalam rangka pernyataan sikap untuk tunduk dan patuh terhadap kepemimpinan Sultan. Sebaliknya Banten juga mengharapkan stabilitas pasokan lada dari Lampung. Ketika itu, Banten sebagai pusat lada hampir tidak bisa memenuhi permintaan dunia karena wilayah Banten di Pulau Jawa tidak bisa memenuhinya. Secara ekologis wilayah Banten di Pulau

Jawa tidak cocok untuk tanaman lada. Ekspansi ke Lampung dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan dunia akan lada tersebut. Situasi sosiopolitik di Lampung memungkinkan Banten tidak perlu melakukannya dengan mengerahkan kekuatan militer tetapi cukup dengan mengeluarkan peraturan. Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1662 menerbitkan Undang-undang bagi penguasa beserta rakyat Lampung agar taat kepada Banten khususnya kewajiban masyarakat Lampung dalam penanaman lada.

Kebijakan Sultan Ageng kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Sultan Abdulmuhasin Muhammad Zainal Abidin (1690–1733) dengan diterbitkan 5 piagam tembaga 3 diantaranya berisi tentang kewajiban menanam lada untuk daerah Seputih, Sukau, dan Rajabasa. Pada piagam Sukau berangka tahun 1104 H atau 1691 M, piagam ini ditulis dengan huruf Lampung dan memakai bahasa Jawa Banten. Dalam piagam ini terlihat jelas kekuasaan Banten atas wilayah Lampung dimana Sultan Banten dapat dengan mudah mengangkat, mengganti, bahkan memecat kepala daerah di Lampung apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai harapan. Dalam piagam ini juga terlihat jelas bahwa masyarakat Lampung berkewajiban untuk menanam dan mengumpulkan lada untuk Banten sebagai bukti tunduk dan patuhnya terhadap Kesultanan Banten.

Tahun 1682 merupakan tahun yang penuh gejolak dalam pemerintahan kesultanan Banten. Perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penguasa Kesultanan Banten, dengan putra mahkota Sultan Haji. Perselisihan ini lambat laun meningkat menjadi perang perebutan tahta kekuasaan Kesultanan Banten. Persaingan ini kemudian menyebabkan Sultan Haji terdesak dan meminta bantuan VOC dengan janji berupa imbalan penyerahan beberapa daerah yang dikuasai Sultan Ageng berikut negeri-negeri lada yang menjadi pasokan utama pasar Banten, termasuk wilayah Lampung. Permintaan Sultan Haji ini termuat dalam suratnya tertanggal 12 Maret 1682 yang dikirim kepada Mayor Issac de Saint Martin, Admiral kapal VOC dari Betawi yang sedang berlabuh di Banten.

Dengan adanya janji yang sangat menguntungkan ini, maka pada tanggal 17 April 1682 tentara VOC mendarat di Banten, menyerang Pasukan Tirtayasa dan berhasil mengalahkannya. Sultan Haji berkuasa di Banten, kemudian diangkat dan diakui sebagai Sultan Banten yang sah oleh VOC. Sebagai imbalan lanjutan sekaligus membayar hutang budinya kepada VOC, Sultan pada tanggal 22 Agustus 1682 menandatangani surat perjanjian di mana VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan Lada. Dan sejak itu Belanda secara yuridis mempunyai perdagangan lada di Lampung. Kondisi berlanjut hingga masuknya Daendels dan menghapuskan Kesultanan

Banten pada 21 November 1808 sebagai pemerintah yang berdaulat dan berdampak pada status Lampung sehingga wilayah ini langsung berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda (Broersma, 1916: 30).

Perdagangan lada ketika berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dan berdasarkan laporan *Departement van Landbouw Nijverheid En Handel Departement of Agriculture tahun 1930* terlihat bahwa wilayah Lampung mampu menghasilkan dan mengirimkan lada hitam baik ke wilayah Jawa, maupun ekspor luar negeri. Lampung mampu mengekspor lada hitam sebanyak 12.920.475 kg ke luar negeri, dengan jumlah sebanyak itu Lampung mampu memenuhi 76% dari total seluruh ekspor lada hitam di wilayah Indonesia.



Perkebunan Lada di Lampung

Sumber: De Papercultur, hal. 31

Wilayah Lampung dalam perjalannya sudah membudidayakan tanaman lada dan telah memproduksi sejak abad ke-16 dan terus berlangsung hingga awal abad ke-XX. Melalui perjalanan panjangnya, Lampung mampu mengekspor lada hitam ke berbagai wilayah di Hindia Belanda yakni Jawa sebanyak 2.886.430 kg dan ekspor ke daerah lainnya sebanyak 8.543 kg sehingga totalnya 2.894.973 kg. Secara keseluruhan wilayah Lampung mampu mengekspor lada hitam baik ke luar ataupun di dalam negeri sebanyak 15.815.448 kg atau sebanyak 77% dari seluruh total ekspor.

Berdasarkan laporan *Departement van Landbouw Nijverheid En Handel Departement of Agriculture* diketahui bahwa jumlah ekspor lada hitam dan putih dari wilayah Lampung mencapai 15.816.219 kg. Jumlah ini mencapai 47,5% dari total ekspor lada di Hindia Belanda. Dibandingkan dengan wilayah Aceh yang menguasai perdagangan lada pada abad ke-16 hanya mampu memproduksi lada dengan kapasitas mencapai 3,9 % dari total ekspor dan berada di tempat ke empat. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa hingga awal abad ke-XX wilayah Lampung masih mendominasi produksi lada hitam di wilayah Hindia-Belanda.

Tabel 1.1 Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1918

Tahun	Harga Lada (per 1/2 kg)	Ekspor Lada Lampung dari Hindia Belanda (ton)
1890	21	9.426
1891	19	8.634
1892	15 <sup>1/2</sup>	12.426
1893	14	9.299
1894	11	10.278
1895	11	8.717
1896	10 <sup>1/2</sup>	15.479
1897	16 <sup>1/2</sup>	14.532
1898	22 <sup>1/2</sup>	14.431
1899	28 <sup>1/2</sup>	12.873
1900	30 <sup>1/4</sup>	11.398
1901	30 <sup>3/4</sup>	10.673
1902	30	11.809
1903	31 <sup>1/4</sup>	14.078
1904	31	12.922
1905	26 <sup>5/8</sup>	13.604
1906	23 <sup>1/2</sup>	20.130
1907	17 <sup>1/2</sup>	16.945
1908	16 <sup>1/2</sup>	20.201
1909	20 <sup>7/8</sup>	19.180
1910	18 <sup>7/8</sup>	26.180
1911	27 <sup>1/4</sup>	24.695
1912	26 <sup>1/8</sup>	26.541
1913	25 <sup>1/2</sup>	19.045
1914	57 <sup>1/4</sup>	21.604
1915	50	22.249
1916	175	11.952

(Sumber: *Economisch-Statistische Berichten Woensdag 5 April 1922 No.327*. Online. (www.delpher.nl) diakses pada 1 April 2019).

Kejayaan lada Lampung selain mampu menjadikan Lampung sebagai sentra ekonomi pada masanya, di sisi yang lain juga membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi meningkat. Praktek perburuhan di Lampung sudah terjadi sejak tanaman lada memiliki nilai jual yang tinggi, serta awal kemunculannya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela antara pemilik lada dengan para pekerja dari Jawa, keadaan ini terus berlangsung hingga masa dimana wilayah Lampung berada dibawah kekuasaan kesultanan Banten. Awalnya tenaga kerja dari Jawa khususnya Banten berdatangan secara sukarela yaitu saat dimana musim tanam padi telah berlalu, sambil menunggu masa panen tiba dan untuk tetap menjaga keadaan ekonomi tetap berjalan, mereka datang ke Lampung sebagai buruh petik lada.

Kondisi berbeda saat Lampung berada dibawah kekuasaan Belanda, praktek perburuhan di wilayah ini mulai diberlakukan melalui serangkaian kebijakan dan peraturan. Keadaan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan politik mulai dari kebijakan pintu terbuka hingga kebijakan etisnya. Wilayah Lampung dengan hasil perkebunan seperti lada, kopi, kapuk, dan gambir, kemudian mulai membudidayakan tanaman kopi sejak akhir pertengahan abad ke-19. Perkembangan tanaman kopi pada saat itu diuraikan secara cermat oleh Probonegoro, yaitu:

*Ing taon 1856 sasampoenipoen tanah Lampoeng tentrem, poenika ing tanah Djawi taksih rame tijang doesoen kaparentahan nanem kopi dateng Nagari. Sampoen mesti kemawon pangageng Lampoeng inggih ladjeng parentah dateng tijang-tijang Lampoeng soepados nanem kopi. Parentah waoe inggih dipoen tindakaken, kalampahan ing taoen 1857 residen Lampoeng saged nglapoeraken jen ing bawahipoen sampoen wonten wit kopi 200.000, ing tahun 1862 mindak dados 4 joeta. Nanging sarehning tijang Lampoeng poenika boten remen nanem kopi, dados tanemanipoen ladjeng katah ingkang pedjah, woesanipoen ing taoen 1888 ing tanah Lampoeng kalapoeraken bilih sampoen boten wonten tanaman kopi, kadjawi ing pager-pager oetawi satoenggal kalih ing pakawisan preloe dipoen teda pijambak. (Probonegoro, *Lampoeng Tanah Lan Tijangipoen*, Batavia: Bale Poestaka, 1940, hlm. 12; J. W. J. Wellan, *Zuid Sumatera Economische Overzicht*, Wegeningen: H. Veenman & Zonnen, 1923, hlm. 29).*

Pada tahun 1890an seiring dengan diberlakukannya sistem ekonomi dengan pola swastanisasi dalam bentuk kebijakan politik pintu terbuka, wilayah Lampung yang dibuka untuk perkebunan swasta Barat dibuka di Way Lima (kelak kolonisasi pertama ditempatkan di Bagelen, berjarak 5 km dari perkebunan) (Dirk Janse, *Het Koloniale Album Als Verhaal: Beeldvorming in foto albums uit Sumatera, 1860-1900*. Sama halnya dengan pola perkebunan pada umumnya, Way Lima merupakan daerah perkebunan yang baru dibuka dan secara sosial, ekologis, dan historis terpisah dari pusat pemerintahan yang saat itu berada di Teluk Betung dan

terpisah dari daerah disekitar perkebunan, menurut Ann Laura Stoler pola perkebunan ini sebagai cara untuk mengontrol buruh secara total (Stoler, 2005: 4). Dengan menempatkan para buruh untuk tinggal disekitar wilayah perkebunan, maka secara otomatis pemantauan dan penyiapan tenaga kerja menjadi lebih mudah untuk dilakukan pemantauan.

Kebijakan etis berangkat dari pernyataan Ratu Wilhelmina di dalam pidatonya yang disampaikan pada tahun 1901 menyatakan bahwa, pemerintah kolonial akan melakukan perbaikan nasib penduduk pribumi Indonesia, melalui tiga kebijakan politiknya, yaitu: pengembangan pendidikan (edukasi), pembangunan sarana pertanian (irigasi), dan pemindahan penduduk (emigrasi). Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai kebijakan politik etis (politik balas budi) pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Untuk menindaklanjuti pidato itu dan mencermati isu tentang keadaan ekonomi penduduk sebagai dampak dari politik tanam paksa dan liberal, pada tahun itu juga Ratu Belanda menganjurkan supaya diadakan penelitian di bidang kependudukan, ekonomi, pajak, dan kerja wajib di wilayah Jawa dan Madura (Creutzberg dan Laanen, 1950: 14-15). Lampung dijadikan sebagai wilayah percontohan pelaksanaan politik etis, dengan melaksanakan pengirimkan kolonis di daerah kolonisasi pertama dan penempatannya di desa

Bagelen, Gedong Tataan daerah yang agak sedikit menjauh dari *ommalanden* Telukbetung. Baru kemudian disusul dengan kolonisasi di Wonosobo (1922) dan Trimurdjo-Metro.

Kebijakan ini merupakan hasil perjuangan kaum liberal dan humanis di negeri Belanda dalam melihat persoalan penduduk di negeri jajahan yang semakin miskin, terbelakang dan tertinggal. bagian dari trilogi politik etis pemerintah kolonial Belanda yakni kolonisasi, edukasi dan irigasi. Proses pemindahan penduduk dari Pulau Jawa merupakan implementasi kebijakan politik etis dipindahkan ke luar pulau, pada kenyataannya justru disinyalir menjadi sarana untuk mendatangkan pekerja untuk dijadikan buruh di daerah-daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik pemerintah kolonial Belanda.

Kondisi terlihat pada penempatan para kolonis disekitar perkebunan swasta milik Belanda, dan atau ditempatkan diantara tempat pemukiman penduduk asli Lampung (seperti Bagelen yang terletak diantara *afdeling* Teluk Betung dan kota Agung, kolonisasi Trimurdjo terletak diantara Tegineneng dan Sukadana). Penempatan para buruh ini dikemudian hari justru dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga kerja bagi para pengusaha dibidang perkebunan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan. Buruh kontrak yang didatangkan dari Pulau Jawa kemudian dipindahkan ke pusat-pusat

kegiatan ekonomi baik perkebunan maupun pertambangan seperti perkebunan karet di daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara dan di daerah pertambangan batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat, serta pembukaan Perkebunan Karet di Way Lima, Gedong Tataan Provinsi Lampung hari ini.

Demikian pula halnya dengan implementasi dibidang pengairan dan sistem irigasi yang ada. Berbagai pembangunan jaringan irigasi di Lampung seperti di Pringsewu dan jaringan irigasi Argoguruh (Pesawaran), sesungguhnya bukan untuk kepentingan masyarakat kolonis, khususnya warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, melainkan digunakan bagi kepentingan perkebunan-perkebunan milik swasta Belanda. Irigasi, bukan hanya untuk mengairi areal sawah milik penduduk, akan tetapi lebih diprioritaskan untuk mengairi areal perkebunan milik swasta, terutama perkebunan karet, kopi, tebu, dan tembakau.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana kejayaan Lada dalam hubungannya dengan praktek perburuhan di Lampung pada masa abad ke XVI-XX. Hal ini dilakukan untuk mengkaji perubahan dan perkembangan sosial dan ekonomi di Lampung dalam kaitannya antara kejayaan lada dan praktek perburuhan di Lampung. Perkembangan budidaya lada awal kemunculannya hingga masa awal dan pengaruh

Kesultanan Banten hingga masa kolonialisme Belanda dalam usaha budidaya lada dan perdagangan lada. Hingga hubungan antara kejayaan lada Lampung dengan perburuhan baik pada masa Banten hingga kolonial Belanda sehingga memunculkan suatu pola dan praktek perburuhan di Lampung sepanjang abad ke XIX hingga awal abad ke XX.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kegiatan penulisan dan penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimanakah proses budidaya dan perkembangan lada hingga masa kejayaannya di Lampung pada abad ke XVI?
2. Bagaimanakah proses budidaya dan perkembangan lada hingga masa kejayaannya dibawah Kesultanan Banten?
3. Bagaimanakah proses budidaya dan perkembangan lada hingga masa kejayaannya dibawah pemerintah Kolonial Belanda,
4. Bagaimanakah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Lampung pada abad ke 19 hingga awal abad ke XX?
5. Bagaimanakah hubungan dan keterkaitan praktek perburuhan di Lampung dengan keberadaan lada pada puncak perdagangan dan kejayaannya.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Objek Penelitian : Lada Lampung dan praktek Perburuhan
2. Subjek Penelitian : Lampung
3. Waktu : abad XVI-XX

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penulisan Sejarah ini penulis maksudkan dengan beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menuliskan masa kejayaan lada di Lampung sebagai suplemen tambahan materi pembelajaran Sejarah berbasis sejarah lokal,
- b. Menuliskan awal mula praktek perburuhan di Lampung dalam kaitannya dengan masa kejayaan perdagangan lada di Lampung,
- c. Mengembangkan dan menyebarkan bahan ajar Sejarah yang mengandung materi Sejarah lokal sebagai salah satu penguatan pendidikan karakter;
- d. Mempertahankan nilai-nilai sejarah lokal di daerah untuk dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu wisata sejarah;
- e. Membantu guru sejarah dalam rangka mendorong dan memotivasi siswa untuk menggali nilai-nilai

Sejarah lokal di daerah Lampung khususnya, dan Indonesia pada umumnya;

- f. Membantu guru sejarah dalam memperkaya materi keilmuan dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan alternatif proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan menantang minat belajar siswa;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kebanggaan siswa terhadap nilai-nilai sejarah bangsa; serta menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diantaranya:

- a. Mengetahui sejarah daerah Lampung pernah mengalami masa kejayaan ekonomi melalui budidaya tanaman Lada;
- b. Mengetahui sejarah dimulainya praktek perburuhan di tanah Lampung pada abad ke XIX hingga awal abad ke XX;
- c. Meningkatkan pemahaman dan kebanggaan terhadap nilai-nilai sejarah bangsa khususnya sejarah Lampung;
- d. Menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa.

## **1.6 Kajian Pustaka dan Penelitian yang Relevan**

### **a. Konsep Lada**

Lada atau merica adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, namun banyak para petani lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya (Ahli Pengobatan, 2014). Lada merupakan jenis tumbuhan merambat yang tumbuh dan berkembang melalui bantuan tanaman penopang. Lada tumbuh maksimal pada daerah beriklim tropis dimana bijinya sangat sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa lada sangat khas, menjadikan tanaman ini sebagai bahan pelengkap dari resep masakan andalan (Mediatani, 2015).

Lada Lampung dikenal dengan istilah *Lampung black papper* sudah terkenal mendunia. Produk lada ini telah menjadi primadona komoditas rempah-rempah dan diekspor ke berbagai penjuru dunia sejak abad ke-XVI. Lampung dengan segala potensinya, lebih dikenal sebagai penghasil lada terbesar di seluruh Nusantara.

### **b. Konsep Pemerintah Kolonial Belanda**

Konsep pemerintah kolonial Belanda menurut Karsiwan (2013: 12) adalah suatu pemerintahan yang didirikan di atas kekuasaan negara lain baik melalui perjanjian, dan penaklukan, serta tak jarang

menggunakan cara peperangan. Dengan tujuan untuk menguasai wilayah yang didudukinya beserta segala potensi yang ada. Pemerintah kolonial dalam hal ini merupakan suatu perpanjangan tangan negara induk untuk mengatur, mengontrol dan menguasai negara jajahan.

Lampung sebagai salah satu daerah penghasil rempah di Sumatera lebih dikenal sebagai penghasil lada terbesar di seluruh Nusantara. Hal ini mendorong bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan penduduk pribumi seperti bangsa Belanda. Broersma (1916: 30) menyatakan dalam bukunya *De Lampongsche Districten* bahwa awalnya Lampung di bawah kekuasaan kesultanan Banten beralih menjadi daerah di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sejak Daendles menghapuskan Kesultanan Banten pada 21 November 1808”.

### **c. Konsep Buruh**

Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa yang dimaksud Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 3). Buruh, pekerja, tenaga kerja, karyawan pada dasarnya

adalah manusia dan dalam melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau majikan atau pengusaha.

Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Dalam penelitian ini, buruh dimaknai kepada mereka yang melakukan pekerjaan kasar di Lampung pada abad ke XVI hingga awal abad ke XX.

## **1.7 Penelitian yang Relevan**

Penulisan ini merupakan upaya merekonstruksi kejayaan lada Lampung hingga awal kemunculan perburuhan di tempat yang berjudul Sang Bumi Rua Jurai. Tentunya tulisan ini mengambil referensi pada beberapa buku dan atau karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Beberapa literatur banyak digunakan penulis sebagai rujukan dengan harapan akan semakin menambah khasanah dan pengetahuan serta kedalaman penulisan tentang Kejayaan Lada dan praktek Perburuhan di Lampung. adapun beberapa judul buku dan karya ilmiah yang digunakan ialah sebagai berikut.

## 1. Lampongsche Districten

Karangan yang ditulis oleh Boersma tahun 1916 memberikan gambaran utuh tentang Lampung pada masa kolonial Belanda. Baik dalam tataran deskripsi penduduk, sistem marga dan pemerintahan, pertanian hingga kebijakan kolonisasi termasuk di dalamnya sistem kredit dalam menopang ekonomi dalam sistem perdagangan. Buku ini dilengkapi dengan berbagai data dukung pada masanya, baik dari departmen dalam negeri, inspektorat tenaga kerja dll, sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam proses penulisan buku ini.

## 2. *De Pepercultuur In De Buitenbezittingen*. Batavia: Landsdrukkerij

Buku pedoman budidaya lada di kawasan hindia Belanda merupakan suatu pedoaman bagaimana budidaya lada dikembangkan. Gambaran umum tentang budidaya lada disusun dengan urutan sebagai berikut: 1) Alasan di mana budidaya dilakukan, 2) Tanah atau kebun tempat Budidaya Lada, 3) Pekerjaan setelah masa tanam, 4) Proses panen, 5) Persiapan, 6) Kontrak kerja dalam budidaya lada, 7) Perdagangan lada, 8) Spesifikasi luas tanaman, perluasan lahan yang diharapkan serta bagaimana produksi. Dengan cara ini diharapkan mendapatkan gambaran singkat namun praktis tentang

budaya lada dan perdagangan lada di Hindia Belanda.

3. Perdagangan Lada di Lampung dalam Tiga Masa 1653- 1930.

Kajian penelitian ini merupakan hasil yang ditulis oleh Iim Imadudin, dalam paparannya terungkap dinamika perdagangan lada di Lampung dalam tiga sistem politik. Penulis memaparkan perebutan komoditas lada hitam di kawasan Lampung dengan melibatkan pihak Banten pada satu sisi, dengan VOC, dan berlanjut pada pemerintah Kolonial Hindia Belanda disisi lainnya. Konstelasi perebutan hegemoni atas wilayah Lampung ini, tidak dapat dihindari dan menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi di bidang perdagangan lada hitam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dinamika perdagangan pada komoditas lada di Lampung tidak terlepas dari masing-masing pihak yang saling berebut pengaruh. Para pedagang, Banten dan pemerintah Kolonial Belanda begitu dominan dalam perniagaan lada hitam dari Lampung.

Para elit lokal Lampung (Punyimbang) juga memberikan pengaruh dan dalam perjalannya mampu memberikan peran yang cukup menentukan dalam bandul perniagaan lada. Dinamika perdagangan lada seiring perjalanan waktu semakin memudar pesona

sebagai komoditas perdagangan ekspor utama, selain karena faktor eksternal dengan menurunnya jumlah permintaan lada di pasar internasional dan digantikan dengan komoditas lain seperti kopi dan karet, juga karena faktor internal, seperti tidak optimalnya pemeliharaan, perawatan, dan pengolahan lada pada kebun-kebun lada milik masyarakat di Lampung.

#### 4. Politik Ekonomi Belanda di Lampung tahun 1800-1942

Hasil karya yang ditulis oleh Yuli Kristian merupakan Tesis pada UIN Jakarta, hasil penelitiannya berhasil mengungkapkan strategi yang digunakan Belanda dalam menguasai wilayah Lampung terdapat dalam bidang seperti ekonomi dan politik. Kajian penelitiannya lebih menitikberatkan dalam aspek ekonomi, dan meliputi berbagai sektor seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan kesiapan tenaga kerja.

Hasil penelitian diperoleh gambaran data bahwa langkah yang digunakan pihak Belanda dalam menguasai bidang ekonomi dilakukan dalam dua fase: *pertama*, akuisisi wilayah teritori Lampung yang prosesnya sudah dimulai sejak campur tangan VOC dalam membantu sultan Haji dalam konflik suksesi kekuasaan di Banten, *kedua*, pemerintah kolonial

Belanda melakukan praktek eksploitasi dan menancapkan hegemoninya di bidang ekonomi melalui jalan strategi politik ekonomi yang diterapkan pada setiap sektor perniagaan yang memiliki dampak dan pengaruh pada dimensi sosio-kultural masyarakat Lampung hingga perkembangan wilayah ini hingga kini.

5. Sungai Tulang Bawang dalam Menunjang Perniagaan Lada di Lampung Periode 1648-1914.

Karya yang ditulis oleh Gregorius A. Wibowo ini mengkaji tentang pasang surut dan dinamika perdagangan lada melalui jalur air dengan memanfaatkan sungai Tulang Bawang yang berperan sebagai salah satu penopang perdagangan lada. Hal ini dikarenakan jalur darat belum begitu berkembang, dan sebagian besar wilayah Lampung banyak dijumpai aliran sungai-sungai. Transportasi sungai dalam perniagaan komoditas rempah jenis lada di Lampung sejak awal, masa kekuasaan Kesultanan Banten hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Peneliti berhasil menguraikan peran penting sungai pada periode puncak tata niaga lada di Lampung pada masanya hingga awal kemerosotannya. Peran sungai sebagai sarana transportasi mulai merosot karena

berbagai faktor seperti kehadiran sarana transportasi darat berupa dibangunnya jalan dan jalur kereta api pada masa pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Selatan, termasuk wilayah Lampung. Jalur kereta di Lampung sendiri dibangun memanjang dari daerah Panjang, Teluk Betung hingga Martapura-Baturaja di Sumatera Selatan.

6. Pembangunan Irigasi Way Tebu sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda di Pringsewu Tahun 1927.

Tulisan lainnya tentang perkembangan Lampung pada masa kolonial Belanda ialah pembangunan irigasi Way Tebu sebagai Bagian Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda di Pringsewu Lampung tahun 1927 yang ditulis oleh penulis sendiri pada tahun 2013. Tulisan ini merupakan skripsi selama menempuh pendidikan S1 di pendidikan sejarah Unila. Hasil penelitian disimpulkan bahwa wilayah kolonisasi Pringsewu merupakan daerah perluasan dari kolonisasi sebelumnya di Bagelen, Gedong Tataan. Masyarakat kolonis mulai mendiami wilayah ini sejak tahun 1925, dan merupakan perluasan dari kolonisasi lama di daerah Bagelen.

Pemetaan, survei, dan pengukuran lokasi calon kolonisasi baru sudah dilakukan sejak tahun 1917

dengan mempertimbangkan cadangan air (sungai) yang memadai untuk saluran irigasi, seperti aliran Sungai Way Tebu, Way Sekampung, dan Way Nenep. Perencanaan pembangunan irigasi Way Tebu telah diusulkan sejak 1922, dan mulai dibangun melalui pembangunan jaringan irigasi Way Tebu pada tahun 1926. Seksi Bendungan Way Tebu I-II tahun 1926, dilanjutkan Bendungan Way Tebu III pada tahun 1927. Jaringan irigasi ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun dan selesai tahun 1936.

Pada saat proses pembangunan jaringan irigasi, warga masyarakat diminta untuk membatu secara bergotong royong membangun saluran irigasi, jembatan, jalan dan saluran talud yang saling menghubungkan satu dengan lainnya, sedangkan pihak pemerintah hanya menyiapkan bahan bakunya saja melalui peraturan pemerintah yang diatur dalam *Statsblad* No. 438 tahun 1931.

Dampak dari pembangunan irigasi Way Tebu ini, mulai tahun 1930-an luas areal pertanian padi di Pringsewu meningkat dan membuat kolonis lama kekurangan tenaga kerja untuk memanen saat musim panen tiba. Para kolonis lama meminta kepada pemerintah untuk mendatangkan kolonis baru dari

daerah asalnya, dengan jaminan bahwa kehidupan para kolonis baru ditanggung sepenuhnya oleh para kolonis lama yang kemudian memunculkan sistem *kolonisasi bawon*. Dimana selama proses mendatangkan kolonis baru, maka kolonis lama berperan memberikan tumpangan sekaligus pekerjaan sementara yakni buruh panen padi, hasil panen dibagi dengan kolonis baru.

7. Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816 hingga 1942.

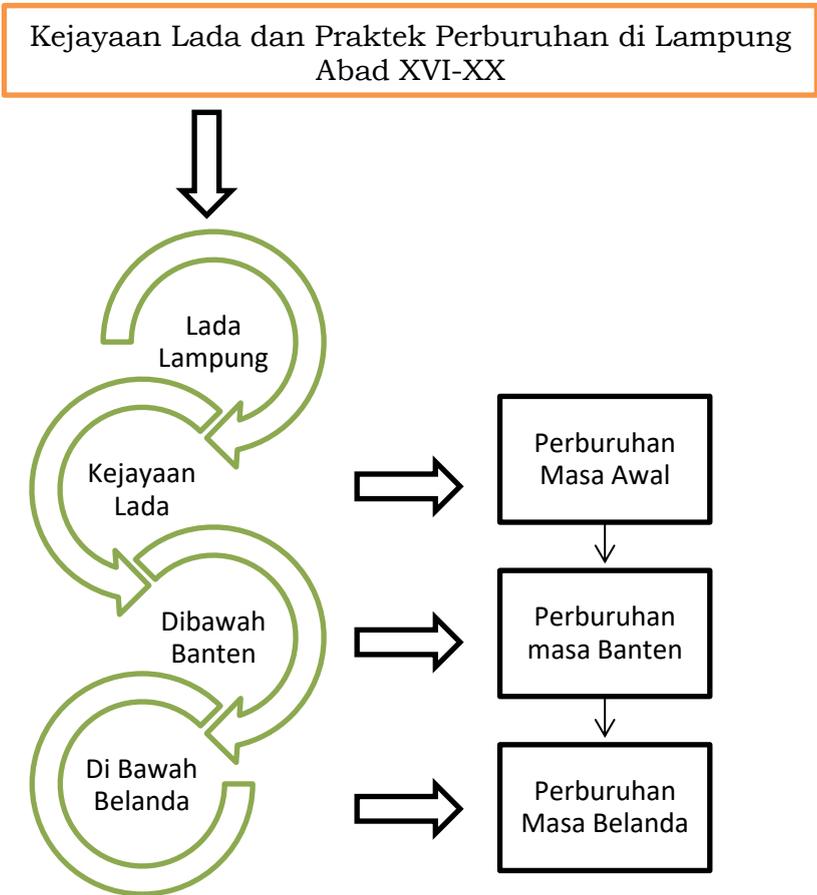
Karya ini merupakan sumbangsih Laelatul Masroh yang mengkaji sejarah Lampung sebagai salah satu daerah penghasil lada mengingat wilayah Lampung termasuk daerah penghasil komoditi lada hitam terbaik. Para petani budidaya lada diharuskan untuk menjual hasil panen ladanya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga jual yang telah ditentukan.

Tata niaga lada dijalankan melalui perpanjangan tangannya yakni para kepala marga. Lada merupakan komoditi yang wajib untuk ditanam penduduk Lampung dalam skala kecil hingga sedang. Beberapa faktor yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya pasang surut tata niaga perdagangan komoditas lada di Lampung seperti adanya beberapa penyakit tanaman,

hama, kesalahan dalam tata kelola perkebunan lada, dan terjadinya pergantian budidaya lada dengan tanaman ekspor lainnya akibat menurunnya permintaan lada di pasar dunia.

### 1.8 Kerangka Pemikiran

Guna memudahkan kontruksi penulisan dan memudahkan pembaca, maka disusunlah kerangka berfikir sebagai berikut:



## **1.9 Metode Penelitian**

Penulis dalam upaya melakukan kajian dan konstruksi kejayaan lada Lampung hingga awal munculnya perburuhan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan beberapa tahapan, yakni heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (melalui kritik intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran data) dan historiografi (penulisan). Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas yaitu mengenai kejayaan lada dan praktek perburuhan di Lampung, kemudian menelusuri beberapa sumber kepustakaan primer ataupun sekunder terkait dengan judul penulisan. Tahap selanjutnya yaitu kritik intern dan ekstern, untuk melihat keaslian dan reabilitas sumber yang didapatkan.

Tahap selanjutnya interpretasi, dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh sehingga tidak hanya imajinasi semata untuk itu peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan sumber-sumber lain baik sekunder seperti surat kabar sezaman maupun sumber-sumber tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan baik kepada fakta maupun peristiwa. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologi serta saling berkaitan.

Tahap terakhir historiografi yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis dan memperhatikan aspek kausalitas. Pembahasan mengenai kejayaan lada dan praktek perburuhan di Lampung akan disampaikan secara kronologis mulai pada kemandirian pertanian lada masyarakat Lampung, di bawah kekuasaan kesultanan Banten, hingga berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda hingga hubungan antara lada dengan praktek perburuhan di Lampung.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Setelah bab pengantar, penulisan kejayaan lada dan praktek perburuhan di Lampung ini selanjutnya memaparkan tentang kondisi alam maupun masyarakat Lampung, seperti yang akan diuraikan dalam bab II. Dalam bab II, penulis hendak menjelaskan tentang alam Lampung beserta pertumbuhan tanaman baik tanaman rakyat (lada) maupun tanaman perkebunan (kopi, karet) beserta keadaan sosial ekonomi masyarakat Lampung sampai awal abad ke-20. Selanjutnya, bab III membahas tentang tanaman lada Lampung beserta lingkungan alam yang mendukung pertumbuhan lada termasuk fungsi lada pada masa kejayaan perdagangan lada dunia.

Bab IV membahas tentang keadaan Lampung (termasuk peragangan lada, kehidupan sosial, dan politik) dibawah kekuasaan Banten. Bab V membahas tentang proses masuk

dan berkembangnya pemerintah kolonial Belanda termasuk penguasaan atas perdagangan lada, perubahan kebijakan, perkebunan hingga politik etis. Bab ini juga hendak mengulas pertumbuhan modal swasta Barat di Lampung dan proses peralihan perkebunan dari lada ke kopi kemudian perkebunan karet. Pada bab ini juga penulis mencoba menjelaskan tentang pola perekrutan buruh di Lampung serta sistem kerja buruh baik pada masa panen lada penduduk pribumi ataupun dengan sistem pola pekerjaan di perkebunan. Selanjutnya di bab terakhir, penulis mencoba menganalisis hubungan antara lada dengan perburuhan yang terjadi di Lampung.

## Daftar Pustaka

- Bastin, John. 1965. *The British in West Sumatra*. Kuala Lumpur
- Broersma, R. 1916. *De Lampongsche Districten*. Batavia: De Javasche Boekhandel & Drukkerij Rijswijk.
- Cahyono, Edi. 2005. *Gerakan Serikat Buruh: Sejak Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Hasta Mitra, Penerbit buku bermutu.
- Jan Breman. 1997. *Koelies, Planters Enkoloniale Politiek, Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust* (Menjinakan sang kuli Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20 diterjemakan oleh Koesalah Soebagyo Toer), Pustaka Utama Grafiti, hlm i-xxxviii
- Janse, Dirk. *Het Koloniale Album Als Verhaal: Beeldvorming in foto albums uit Sumatera, 1860-1900, skripsi*. Dutch: Universiteit Utrecht. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019)
- Hardiman. 2015. *Perkebunan Lada di Banten Tahun 1805-1816*. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Masroh, Laelatul. 2015. *Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816-1942*. Jurnal Sejarah dan Budaya. Universitas Negeri Malang
- Paulus, J. 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Jilid 7*. Gravenghage: Martinus Nijhoff dalam *T. Keizerina Devi*.
- Probonegoro. 1940. *Lampoeng Tanah Lan Tijangipoen*. Batavia: Bale Poestaka
- Soedewo, Ery. 2007. *Lada Si Eman Panas: Dampaknya Bagi*

*Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten*. Jurnal Universitas Sumatera Utara. Medan.

Soepomo, Iman. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta.

Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*. Yogyakarta: Karsa

T. Keizerina Devi. 2004. *Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)”*. Universitas Sumatera Utara & Universitas Indonesia, Jakarta.

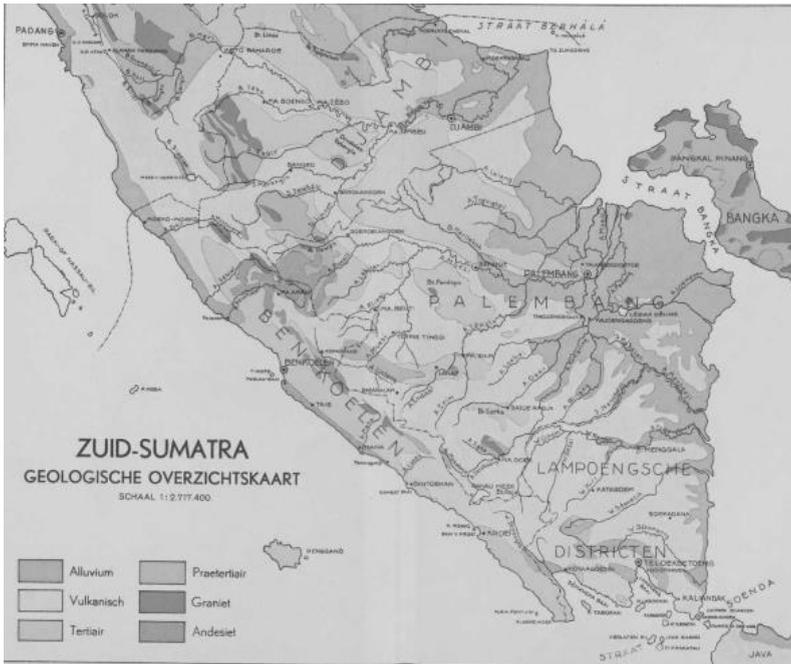
Waluyo. 2008. *Gerakan Ilmu Pengetahuan Sosial: Kelas VII untuk SMP/MTS*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

## **BAB II LAMPUNG**

### **2.1 Gambaran Umum Lampung**

Wilayah Lampung secara astronomis terletak pada kedudukan Timur-Barat antara  $103^{\circ}40'$ –  $105^{\circ}50'$  Bujur Timur, dan dari Utara hingga Selatan berada antara  $6^{\circ}45'$ –  $3^{\circ}45'$  dengan luas wilayah mencapai  $35.288,35 \text{ km}^2$  (Gambaran Umum Daerah Lampung). Daerah Lampung mencakup gugusan pulau-pulau sedang hingga kecil di bagian paling tenggara, ujung pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera.

Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi daerah yang menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Sumatera melalui selat Sunda. Selat Sunda merupakan sebuah kawasan yang harus dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari wilayah Jawa menuju Sumatera atau sebaliknya. Di daerah utara, Lampung berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur berhadapan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berhimpitan dengan Samudra Indonesia (Lampung dalam angka, 2018: xxxv).



Peta Wilayah Sumatera Bagian Selatan

Sumber: J.W.J. Wellan, 1932. *Zuid Sumatra*. hal: 38

Memiliki luas 35.288,35 km<sup>2</sup>, provinsi ini terdiri atas dataran rendah yang membentang di bagian tengah, pegunungan yang membentang di daerah pesisir, pulau-pulau kecil yang banyak dijumpai di sekitaran teluk Lampung, dan wilayah perairan laut dibagian selatannya. Luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha, sementara garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, dan Gunung Tangkit Tebak dan merupakan gunung dengan ketinggian diatas 2.000 mdpl.

Provinsi ini juga memiliki 70 pulau, terdiri atas 18 pulau berpenghuni dan 52 pulau lainnya belum berpenghuni (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007: 133). Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah sebuah wilayah Keresidenan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota pemerintahan di daerah Tanjungkarang-Telukbetung.

Dalam perkembangannya kemudian ibukota provinsi Lampung menjadi Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Profil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Kec.	Desa
1.	Kab. Lampung Selatan	Kalianda	700,32	17	260
2.	Kab. Lampung Tengah	Gunung Sugih	3. 802,68	28	314
3.	Kab.	Kotabumi	2.725,87	23	247

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km <sup>2</sup> )	Kec.	Desa
	Lampung Utara				
4.	Kab. Lampung Barat	Liwa	2.142,78	15	136
5.	Kab. Lampung Timur	Sukadana	5.325,03	24	264
6.	Kab. Tanggamus	Kota Agung	3.020,64	20	302
7.	Kab. Tulang Bawang	Menggala	3.466,32	15	151
8.	Kab. Way Kanan	Blambangan Umpu	3.921,63	14	227
9.	Kab. Pesawaran	Gedong Tataan	2.243,51	11	144
10.	Kab. Pringsewu	Pringsewu	625,00	9	131
11.	Kab. Mesuji	Mesuji	2.184,00	7	105
12.	Kab. Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	1.201,00	9	96
13.	Kab. Pesisir Barat	Krui	2.907,23	11	118
14.	Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	296	20	126
15.	Kota Metro	Metro	61,79	5	22

Sumber : Lampung Dalam Angka 2018, xliiii

Secara topografis daerah Lampung terdiri dari berbagai bentang kenampakan alam, antara lain:

1. Wilayah dengan tampilan perbukitan hingga gugusan gunung dengan sudut kemiringan >300 m dpl, wilayah ini banyak dijumpai di daerah pesisir selatan

dan pesisir barat Lampung;

2. Wilayah dengan tampilan berombak sampai bergelombang dengan sudut kemiringan 8%-15% dan ketinggian 300-500 m dpl;
3. Wilayah dengan tampilan dataran alluvial dengan sudut kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 mdpl, wilayah ini banyak dijumpai di daerah tengah Lampung;
4. Wilayah dengan tampilan dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1-1 mdpl, wilayah ini banyak dijumpai di daerah Mesuji Lampung; dan
5. Wilayah dengan tampilan river basin, dengan River Basin yaitu Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Sekampung, Way Semangka, dan Way Mesuji (Lampung Dalam Angka 2018, xxxvii).

Meskipun demikian, sebagian besar topografi daerah Lampung berada pada kemiringan tidak lebih atau kurang dari 15% sehingga membuat wilayah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang dapat diandalkan.

## **2.2 Alam Lampung**

Perbedaan wilayah Lampung dari Jawa adalah yang paling dominan ialah dalam kaitannya dengan etnografi dan zoologi. Sementara sehubungan dengan bagian utara dan selatan, itu

terutama terdiri dalam struktur geologi formasi pantai, dan dalam pengembangan sistem sungai. Pantai selatan hampir setiap tempat tinggi dan curam, sering dilengkapi dengan lekukan membengkokkannya ke luar atau ke dalam, itu ditutupi dengan batu, dan dikelilingi oleh banyak pulau-pulau kecil. Pantai timur, sebaliknya, adalah dataran rendah yang datar, garis pantai membentuk garis yang hampir benar, tanpa teluk yang kuat, tanpa batu dan pulau, yang hanya ditemukan dalam jumlah besar di titik ke arah selatan. Bagian selatan adalah tanah pegunungan dengan bentuk yang sama dengan bagian timur wilayah Banten, yang terdiri dari gunung Karang dan gunung-gunung yang bersebelahan; menuju lereng selatan hanya mengalir sungai kecil.

Bagian utara wilayah Lampung sebagian besar merupakan dataran rendah yang luas, dan bahkan jauh di pedalaman Lampung tak jarang kita jumpai perbukitan-perbukitan dengan ketinggian 100 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah negara aluvial, terutama terdiri dari pasir kuarsa dan tidak memiliki tanda asal gunung berapi. Perbedaan besar ini harus tetap diperhatikan, ketika kita memperlakukan sungai-sungai yang tersebar di wilayah Lampung atau pulau-pulau yang mengelilinginya. Seperti yang disebutkan sebelumnya jumlah yang terakhir di sepanjang pantai timur sangat kecil. Memang fakta membenarkan bahwa sebagian besar wilayah ini berbatu dan curam, tetapi tidak besar atau tinggi.

Dari arah utara menuju Selatan terdapat gugusan kepulauan sebagai berikut: Tanjung Sekupu (terletak sangat dekat dengan daratan) Pulau Utara, Pulau Batu Puti, Pulau Tiga Saudara Perempuan, Pulau Rimau, Pulau Penjaran dan Kandan (yang bersama-sama disebut Kepulauan Zutphen) dan di seberang teluk Lampung adalah Pulau Krakatau, Sebessi, Sebuku. Dari arah dekat pantai timur dari Selatan ke utara, terdapat pulau seperti Pulau Sekeppel, Condong, serta di pantai barat dari utara ke Selatan terdapat Pulau Pasaran, Kubor, Tangkil, Tegal, Mahitam, Kelagian, Pahawang, dua pulau kecil tanpa nama, Lagundi, dengan sebelas anak kecil di sekelilingnya. Di Teluk Emper atau atau Semangka, Pulau Tabuan di tengah menuju sisi timur teluk dari Selatan menuju dan dua pulau kecil di Teluk Kiluan, hingga di Teluk Kalumbayan dan dua di teluk utara-barat dari Pulau Pentiwi (Zoolinger, 1847: 627; Hadikusuma, 1977: 11).

Proporsi yang sama ditemukan dengan mengacu pada daerah lekukan teluk, di mana pantai timur sangat kekurangan, sehingga tidak mungkin nama untuk menyebutkan satu, sedangkan di Selatan jumlah mereka sangat besar. Dalam bahasa daerah Lampung wilayah ini disebut Teluk. Teluk besar Lampung biasa dikenal sebagai Teluk Betung, yang namanya hanya diterapkan di bagian belakang teluk (Zoolinger, 1847: 627). Daerah di sebelah barat teluk yang lebih kecil diberi nama seperti, Rateh, Pundu dan Pidada.

Teluk Samangka hampir sedalam tetapi lebih kecil dari teluk Teluk Betung. Di bagian Timur Lampung memiliki berbagai teluk, yakni sebagai berikut: 1) Teluk Kiluan, 2) Kalumbayan, 3) Pentiwi, 4) Puti, 5) Limau Badak.

Dengan demikian ada di pantai timur Lampung hanya Tanjung Sekupu, yang secara tegas adalah sebuah pulau, terletak di dekat daratan. Titik Selatan, sebelah Timur dari wilayah Lampung membentuk gugusan teluk bernama Tanjung Tua, di seberang Anyer wilayah Banten. Tanjung Tikus terletak di Timur antara Teluk Lampung dan Teluk Samangka. Antara teluk Samangka dan Blimbing, terdapat Tanjung Raja yang dapat diamati dari sebelah Timur, Tanjung Cina di Selatan, Timur dan Tanjung Sulaiman di Selatan, Barat, dan merupakan wilayah dibawah Karesidenan Bengkulu pada masa pemerintahan Rafless (Zoolinger, 1847: 628).

Beberapa Gunung dengan keberadaan puncak yang tinggi dan bervariasi cukup banyak dijumpai di Lampung, seperti: (1) Gunung Pesagi (2262 m) di daerah Sekala Brak, (2) Gunung Seminung (1881 m) di daerah Balik Bukit, (3) Gunung Tebak (2115 m) di daerah Sumber Jaya, (4) Gunung Rindingan (1506 m) di daerah Pulau Panggung, (5) Gunung Pasawaran (1661m) di daerah Kedongdong, (7) Gunung Ratai (1661 m) di daerah Padang Cermin, ( 8) Gunung Betung (1240 m) di

daerah Teluk Betung, (9) Gunung Rajabasa (1261 m) di daerah selatan Lampung yakni di sekitaran Kalianda (Hadikusuma, 1977: 11).

Sungai-sungai besar yang mengalir dan melintas di daerah Lampung menurut panjang dan *catchment areanya* adalah sebagai berikut : (1) Way Sekampung, panjang 256 km.- c.a. 4. 795, 52 km<sup>2</sup>, (2) Way Semangka, dengan panjang 90 km, c.a. 985 km<sup>2</sup> (3) Way Seputih, panjang 190 km, c.a . 7.149,25 km<sup>2</sup>, (4) Way Jepara, panjang 220 km, c.a. 1.540 km<sup>2</sup>, (5) Way Tulangbawang panjang 136 km c.a. 1.285 km<sup>2</sup>, (6) Way Masuji, panjang 220 km, c.a . 2.053 km<sup>2</sup> (Hadikusuma, 1977: 11).

Sungai Way Sekampung yang mengalir di daerah Lampung, memiliki anak-anak sungai yang jumlahnya begitu banyak, tetapi tidak ada yang panjangnya sampai 100 km. Hanya terdapat sebuah anak sungai dengan panjang mencapai 51 km dengan c.a. 106,97 km<sup>2</sup> ialah sungai Way Ketibung yang mengalir di Kecamatan Way Katibung (Kalianda, Lampung Selatan).

Sungai Way Seputih secara umum terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, dan mengalir serta melintas disepanjang aliran sungainya. Sungai Way Seputih memiliki anak-anak sungai dengan kriteria panjang sungai lebih dari 50 km adalah sebagai berikut:

- (1) Way Terusan, dengan panjang 175 km, c.a. 1500 km<sup>2</sup>,
  - (2) Way Pengubuaan, dengan panjang 165 km, c.a. 1.143,78 km<sup>2</sup>,
  - (3) way Pegadungan, dengan panjang 80 km, c.a. 975 km<sup>2</sup>,
  - (4) Way Raman, dengan panjang 55 km, c.a. 200 km<sup>2</sup>
- (Hadikusuma, 1977: 12).

Sungai Way Tulangbawang mengalir di daerah Kabupaten Lampung Utara, mengalir dan melintas disepanjang aliran sungainya. Sungai ini memiliki anak-anak sungainya dengan kriteria panjang sungai lebih dari 50 km panjangnya adalah sebagai berikut:

- (1) Way Kanan, dengan panjang 51 km, c.a. 1.197 km<sup>2</sup>,
  - (2) Way Rarem, dengan panjang 53,5 km, c.a. 870 km<sup>2</sup>,
  - (3) Way Umpu, dengan panjang 100 km, c.a. 1.179 km<sup>2</sup>,
  - (4) Way Tehmi, dengan panjang 60 km, c.a. 550 km<sup>2</sup>,
  - (5) Way Besai, dengan panjang 113 km, c.a. 870 km<sup>2</sup>,
  - (6) Way Giham, dengan panjang 80 km, c.a. 506,25 km<sup>2</sup>
- (Hadikusuma, 1977: 12).

Way Mesuji yang mengalir di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan disebelah utara Lampung. Sungai Way Mesuji memiliki anak sungai yang bernama sungai Buaya, dengan panjang mencapai 70 km, c.a 347,50 km<sup>2</sup>.

### **2.3 Penduduk dan Masyarakat Lampung**

Penduduk Lampung tinggal dan mendiami sebagian besar daerah Lampung, serta daerah Krui (dahulu masuk ke dalam wilayah Bengkulu) kecuali untuk marga Wai Tenong (Semendo), dan untuk daerah Palembang wilayah Muara Dua dan Komering Ulu kecuali Makakau dan marga Kisam (Pasemah) (Tuuk, 19129: 1). Hanya sebagian kecil dari daerah Lampung yang dihuni oleh non-Lampoengers, seperti tiga marga Semendo marga Kasui, Rebang-Seputih, dan Rebang Pugoeng, dihuni oleh masyarakat Pasemah, sementara ada juga beberapa permukiman orang Lampung di Banten (daerah Cikoneng), dan sebaliknya terdapat pemukiman orang Banten di Lampung yakni di daerah Teluk, dan sebagian besar orang Jawa yang tersebar diluar wilayah penduduk asli.

Penduduk asli Lampung selalu membutuhkan tanah luas untuk tempat tinggal di sana. Sebagian tanah kemudian diproses menjadi ladang, sisanya mengantarkan apa yang dapat diberikan hutan. Pada awalnya, masyarakat Lampung hidup secara tradisional, mereka hidup berkelompok dengan mata pencaharian berupa berburu dan tani. Pertanian yang diusahakan orang Lampung berbeda dengan Masyarakat Jawa, apabila pertanian padi di Jawa dilakukan dengan mengolah tanah basah dalam bentuk persawahan, maka masyarakat Lampung mengupayakan padi dengan cara menenam di huma atau tegalan dimana hutan dibabat, lalu



Pada masa ini, hidup seorang bergantung dengan pertolongan orang lain. Hutan dikerjakan bersama, sawah ditegalan juga dibuat bersama-sama. Mendirikan dan memperbaiki rumah, membuat jalan selalu dikerjakan bersama-sama. Tukang, kuli dan buruh belum ada, stratifikasi sosial pun nampaknya tidak ada, karena dalam masyarakat semua dikerjakan secara gotong royong. Setiap individu memiliki kedudukan yang setara, tidak ada perbedaan yang mencolok masyarakat hidup rukun, damai dan tentram dalam kebersamaan. Kondisi ini terus berjalan, apabila ada individu yang melanggar adat istiadat maka setiap persoalan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat.

Gambaran masyarakat yang saling menghargai inilah yang memunculkan faktor baru dalam masyarakat, yakni pemimpin (Punyimbang Bumi, Punyimbang Ratu, Punyimbang Tiyuh, Punyimbang Raja). Pemimpin bekerja untuk umum, oleh karena itu ia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri, keluarga dan urusannya. Pemimpin tidak sempat lagi memikirkan sawahnya, tidak sempat memperhatikan rumahnya maka masyarakat ikut merasa bertanggungjawab atas nasib pemimpinnya. Masyarakat merasa berhutang budi kepada pemimpinnya, dan untuk menghargai jasanya masyarakat bersedia membalasnya sebagai ungkapan terimakasih. Kenyataan dalam sejarah

telah menggambarkan bahwa petani hidup di desa memiliki kesadaran sosial yang tinggi, berjiwa komunal, gotong royong. Perubahan terjadi dalam keadaan ekonomi baru mulai dirasakan saat masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu.

### **2.3.1 Sejarah Masyarakat Lampung**

Sejarah masyarakat Lampung memiliki akar budaya yang cukup beragam. Hampir seluruh masyarakat Lampung menganggap dan menemukan asal garis keturunannya melalui tradisi lisan, dan merujuk dari akar leluhur yang sama, si Lampung. Asal usul leluhur masyarakat Lampung terikat dengan sejarah dimana sejarah ini terhubung dengan sebuah kerajaan dari salah satu kerajaan yang dominan dan historis di Lampung.

Suku Abung terhubung dengan para pangeran Sekala-Berak, sementara itu Suku Belalau terhubung dengan kerajaan di Pagaruyung. Suku Lampung di daerah Teluk Semangka sedikit berbeda dalam menarik leluhur mereka, ada yang menganggap leluhurnya berasal dari Pagaruyung dan ada dari mereka yang menganggap leluhurnya berasal dari Banten. Masyarakat suku Melinting-Peminggir melampirkan silsilah leluhur mereka kepada para pangeran Madjapahit, melalui perantara putri legendaris Darah Putih, sementara suku Meninting menunjuk para pangeran Banten sebagai leluhur

utamanya, sementara juga mempertahankan keturunan mereka dari Buai-Runjung (Royen, 1929: 5).

Kelompok tertua adalah mereka yang mula-mula mendiami daerah Sekala Brak, kemudian Malayu (Pagaruyung), lalu Madjapahit dan akhirnya Banten. Ini sepenuhnya sejalan dengan ruang ekspansi yang terkenal dari bekas kekaisaran. Pojang dari berbagai kelompok baik kelompok Pubian, Abung, dan kelompok lainnya dianggap sebagai putra Si Lampung yang disebutkan sebelumnya. Rupanya, setiap kelompok masyarakat adat telah menghubungkan asal mula leluhur bersama Si Lampung dengan otoritas kerajaan yang dimiliki, dan telah meninggalkan memori kolektif dalam ingatan dan kesan mendalam masyarakat Lampung pada sebuah tempat bernama Skala Brak.

Tempat nama itu sekarang terletak di sebelah selatan Danau Ranau di Dataran Tinggi Belalau. Dari sini semua arus telah terjadi, sebagian dari bagian utara dengan Adji (62) sebagai pusat dan Naga-Berisang sebagai pojang; sebagian dari Belalau dengan empat pojang di dataran tinggi itu sebagai leluhur. Sekarang luar biasa bahwa arus migrasi masyarakat Lampung telah keluar ke semua arah, hanya berhenti di utara dan juga oleh orang-orang gunung.

Sejarah suku bangsa Lampung diperkirakan sejak zaman Hindu animisme yang berlaku antara tahun pertama Masehi

sampai permulaan abad ke-16. Yang dimaksud dengan zaman Hindu disini ialah zaman masuknya ajaran-ajaran atau sistem kebudayaan yang berasal dari daratan India termasuk Budhisme yang unsur-unsurnya terdapat dalam adat budaya orang Lampung. Nampaknya pengaruh Hinduisme itu sangat sedikit yang dianut oleh orang-orang Lampung, tetapi yang banyak adalah kepercayaan asli yang merupakan tradisi dari zaman Malayo-Polinesia, yang serba bersifat animisme.

Nampaknya daerah ini sudah lama dikenal orang-orang luar sekurang-kurangnya pada masa permulaan tahun Masehi, ia merupakan tempat orang-orang dari laut mencari hasil-hasil hutan. Hal ini terbukti dari ditemukannya berbagai jenis bahan keramik dari zaman Han (206 SM – 220 M), begitu pula bahan keramik dari masa setelah dinasti Han (memerintah sekitar abad ke-3 sampai abad ke-7) dan seterusnya ditemukan pula bahan-bahan keramik Cina sampai masa keramik dari zaman Ming (1368 – 1643).

Berdasarkan berita dari negeri Cina dari abad ke-7, dikatakan bahwa di daerah selatan terdapat kerajaan yang antara lain disebutkan To-lang, Po'hwang. Dengan mempersatukan kedua nama itu maka dijumpai kembali Tulangbawang, yang ditempatkan di Lampung. Sebenarnya letak bekas kerajaan ini yang tepat belum dapat diketahui dengan pasti, kita hanya dapat memperkirakan terletak di sekitar Way Tulangbawang,

yaitu di kecamatan Tulangbawang (Menggala) di Kabupaten Lampung Utara bagian timur.



Pemukiman Masyarakat Lampung

Sumber: <http://noordkustbanka.blogspot.com>

Moh. Yamin memberikan pemaknaan akan kata Tolang, Po'hwang akan berarti “orang Lampung” atau “utusan dari Lampung” yang datang dari negeri Cina sampai abad ke 7.

Yamin mengatakan sebagai berikut:

“Perbandingan bahasa-bahasa Austronesia dapat memisahkan urutan kata untuk menamai kesaktian itu dengan nama asli, yaitu: tu (to, tuh), yang hidup misalnya dengan kata-kata ra-tu, Tuhan, wa-tu, tu-buh, tu-mbuan, dan lain-lainnya.

Berhubung dengan urut kata asli tu (tuh, to) yang menunjukkan kesaktian menurut perbandingan bahasa-bahasa yang masuk rumpun Austronesia, maka baiklah pula

diperhatikan bahwa urat itu terdapat dalam kata-kata seperti to (orang dalam bahasa Toraja), tu (Makasar dan Bugis).

Dengan demikian To-lang, P'hwang berarti To ialah orang, sedangkan lang P'hwang = Lampung, dan sejak itu orang menyebut daerah ini Lampung. Meningkatnya kekuasaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 disebut dalam inskripsi batu tumpul Kedudukan Bukit dari kaki bukit Seguntang di sebelah barat daya Kota Palembang, yang mengatakan bahwa pada tahun 683 Sriwijaya telah berkuasa di laut dan di darat, dan pada tahun 686 negara itu telah mengirimkan ekspedisinya untuk menaklukan daerah-daerah lain di Sumatera dan Jawa. Oleh karena itu dapatlah diperkirakan bahwa sejak masa itu Kerajaan Tulangbawang telah dikuasai oleh Sriwijaya, atau daerah ini tidak berperan lagi sebagai kota pelabuhan sungai di pantai timur Lampung. Riwayat lama yang disampaikan secara turun temurun di kalangan rakyat mengatakan bahwa cikal bakal sebagian besar orang Lampung yang ada sekarang ini berasal dari Sekala Brak, yaitu suatu daerah dataran tinggi gunung Pesagi (2262 m) di kecamatan Kenali (Belalau) sekarang.

Dengan demikian dapat diperkirakan dan disimpulkan bahwa asal usul orang Lampung itu hidup dan menetap di kawasan Bukit Barisan pada abad ke-13 atau setidaknya sezaman dengan keberadaan kerajaan Paguruyung

Minangkabau yang didirikan Adityawarman pada tahun 1339. Di dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu sebuah kitab hukum adat istiadat masyarakat Lampung yang hingga saat ini, masih dapat ditemukan dan dibaca, baik dalam aksara asli maupun yang sudah ditulis dalam aksara latin seperti bahasa Inggris, Belanda maupun Prancis. Walaupun isinya sudah banyak dipengaruhi oleh kepentingan bangsa asing, termasuk keyakinan baik Katholik, Protestan hingga agama Islam. Kabar keberadaan masyarakat Lampung dalam ajaran Islam yang masuk dari pengaruh Banten, diceritakan sebagai berikut:

“Siji turunan Batin tilu suku tuha lagi lewek djak Pagaruyung Menangkabau pina turun satu putri kajangan, dikimpoikan jama Kun Tunggal, ja ngadu Ruh Tunggal ja ngakon tunggal ja ngadakan umpu sai tungau umpu sai tungau ngadakan umpu serunting umpu sai runting pendah disekala berak jak budiri ratu pumanggihan, Ratu pumanggihan (umpu sai Runting nganak lima muari:

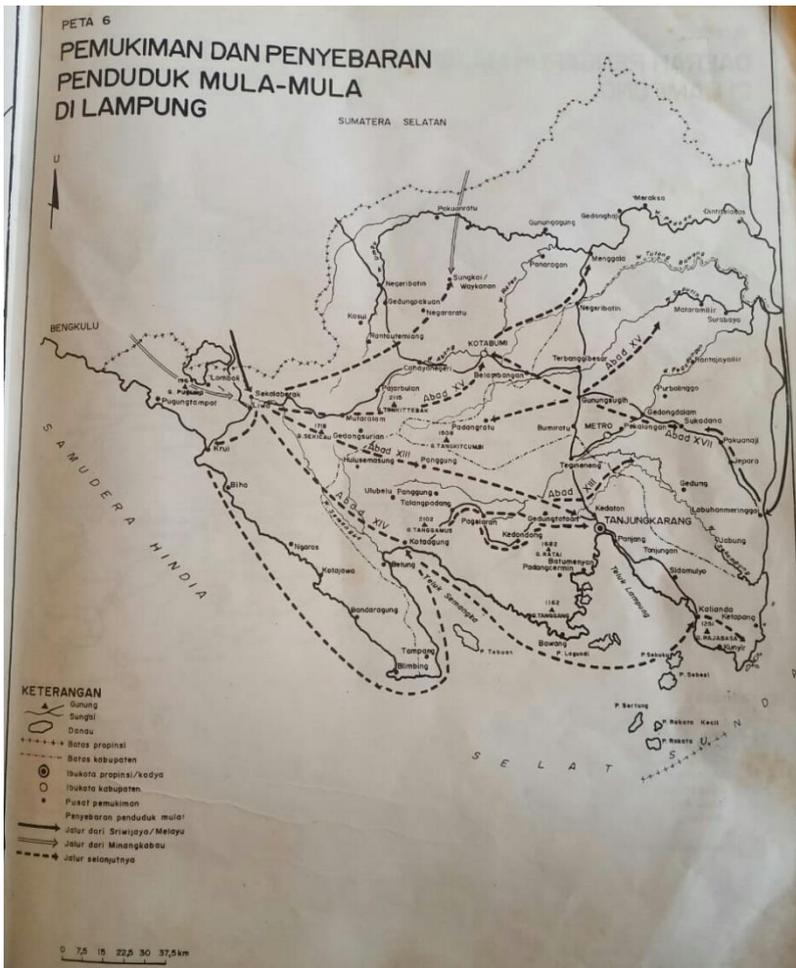
1. Sai tuha Indor Gadjah turun abung siwa miga
2. Sai Belungguh turunan peminggir
3. Sai Pa’lang nurunkan pubijan 2 suku
4. Si Padan ilang
5. Si sangkan wat di suka ham

Dengan demikian, menurut Kuntara Raja Niti, orang Lampung (suku Pubijan, Abung Peminggir, dan lain-lain) berasal dari Kerajaan Pagaruyung, keturunan putri Kayangan dan Kua Tunggal. Kemudian setelah kerabat mereka berdiam di Sekala B’rak, maka di masa cucunya, Umpu Serunting,

mereka mendirikan Keratuan Pemanggilan. Umpu Serunting ini menurunkan lima keturunan anak laki-laki mereka yakni Indra Gadjah yang menurunkan orang Abung, Belunguh yang menurunkan orang-orang Peminggir, Pa'lang yang menurunkan orang-orang Pubiyan, Pandan yang dikatakan menghilang dan Sungkan yang dikatakan Suku Ham.

Kitab hukum adat masyarakat Lampung yang disebut dengan Kuntara Raja Niti mengabarkan bahwa, dikarenakan adanya orang-orang Bajau (perompak laut) yang melakukan penyerangan di Lampung, maka keratuan Pemanggilan itu terpecah dan menyebar meninggalkan Sekala Brak, ke daerah dataran rendah Lampung Keturunan Indra Gadjah kemudian menetap di Ulok (daerah Tanjungraja Lampung Utara), di mana di bawah pimpinan Minak Rio Begeduh mereka mendirikan Keratuan Di Puncak. Diperkirakan bahwa di masa Minak Rio Begeduh ini armada Majapahit singgah di pantai timur, yaitu di daerah kekuasaan Keratuan Pugung yang berada di kecamatan Labuhan Maringgai sekarang tetapi tidak sampai masuk ke daerah pedalaman.

Di masa kekuasaan putra Minak Rio Begeduh yang bernama Minak Paduka Begeduh, daerah Abung diserang lagi oleh perompak dari laut yang mengakibatkan tewasnya Minak Paduka Begeduh. Hal ini menyebabkan keempat anak Minak Paduka Begeduh mengadakan pertahanan. Mereka adalah



Peta Pemukiman dan Penyebaran Penduduk Lampung  
 Sumber: Sayuti, 1988. Peta Sejarah Provinsi Lampung

Unyai (Minak Trio Disou), yang menetap dan membuat pertahanan di sepanjang Way Abung dan Way Rarem, Unyi (Minak Ratu Di Bumi), yang menetap dan membuat pertahanan di sepanjang Way Seputih, Uban (wanita) dengan suaminya yang menetap dan membuat pertahanan di sepanjang Way Terusan. Menurut cerita turun temurun yang

kita dengar, Subing berhasil menebus kehormatan ayah mereka Minak Paduka Begeduh yang wafat itu dengan membunuh kepala perompak yang disebut Raja Dilaut. Adapun beberapa teori tentang keberadaan asal usul masyarakat dan nama Lampung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Catatan Cina**

Berdasarkan catatan musafir Cina yang pernah berkunjung ke Nusantara pada abad ke-7, Itsing menyebutkan kata To-Lang, Po-Hwang sebenarnya merupakan suatu kata yang dapat ditranskripsikan ke dalam kata Tulang Bawang, yang berada disekitaran sungai Tulang Bawang di Lampung. Menurut Hadikusuma pada seminar Sejarah Lampung pada tahun 1976, mengemukakan pandangannya bahwa kata To-Lang-po-hwang itu dapat dieja berdasarkan kata To yang memiliki arti orang dalam bahasa masyarakat Toraja, sedangkan kata Lang-Po-Hwang memiliki arti Orang Lampung sehingga terdapat hubungan erat antara kedua kata tersebut terhadap asal muasal masyarakat Lampung (Bukri, 1977: 10).

Asal-usul ulun Lampung (orang Lampung) erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Pada abad ke VII orang di negeri Cina sudah membicarakan suatu wilayah didaerah Selatan (Namphang) dimana terdapat kerajaan yang disebut Tolang Pohwang, To berarti orang dan Lang Pohwang adalah

Lampung. Nama Tolang, Pohwang berarti “orang Lampung” atau “utusan dari Lampung” yang datang dari negeri Cina sampai abad ke 7. Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga abad ke-11.

Kronik Tai-ping-huan-yu-chi yang berasal dari abad kelima Masehi, menyebutkan nama-nama negeri di kawasan Nanhai (Laut Selatan), antara lain dua buah negeri yang disebutkan berurutan: To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebut satu kali, tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri ini mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 dan 466. Prof. Gabriel Ferrand, pada tulisannya dalam majalah ilmiah *Journal Asiatique*, Paris tahun 1918, hal. 477, berpendapat bahwa kedua nama itu mungkin hanya satu nama: To-lang-po-hwang, lalu negeri itu dilokasikan Ferrand di daerah Tulangbawang, Lampung.

#### **b. Catatan Orang Belanda**

Teori lain yang mengemukakan asal usul orang Lampung berasal dari tulisan Broersma dalam bukunya berjudul “*De Lampongsche Districten*” ia menuliskan bahwa Residen Lampung yang pertama yakni J.A. Du Bois (1829-1834) pernah melihat dan membaca buku berjudul “Sejarah

Majapahit”, milik orang Indonesia di daerah Teluk Betung yang disimpannya sebagai azimat. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Tuhan pencipta alam menurunkan orang pertama ke bumi bernama Sang Dewa Senembahan dan Widodari Sinuhun. Dari merekalah kemudian berturut-turut menurunkan Si Jawa penguasa di wilayah Majapahit, Si Pasundayang Ratu Pajajaran dan Si Lampung Ratu Balau. Kata Lampung berarti *óp het water drijven* (daratan terapung diatas air). Sampai hari ini di kalangan penduduk Lampung, sub suku Pubian masih percaya mitos ini, bahwa nenek moyang masyarakat Lampung adalah Poyang si Lampung, dan dari kata inilah nama Lampung berasal.

### c. **Teori Ketiga Berasal dari Legenda Tapanuli**

Berdasarkan cerita pada masa yang telah lama berlalu meletuslah sebuah gunung api yang menyebabkan munculnya danau Toba hari ini. Ketika terjadinya letusan gunung tersebut, terdapat empat bersaudara yang masing-masing berusaha menyelamatkan diri, dan pada akhirnya mereka akhirnya meninggalkan Tapanuli dengan cara berlayar menggunakan rakit. Salah satu dari empat bersaudara tersebut bernama Ompung Silamponga dan dalam perjalanannya terdampar di daerah Krui, kemudian naik ke dataran tinggi, daerah ini dikenal dengan sebutan Dataran Tinggi Belalau atau Sekala Berak. Dari ketinggian inilah, Ompung Silamponga melihat daerah yang terhampar luas dan membuat takjub hatinya, maka

dengan perasaan kagum berteriaklah ia dengan menyebut *Lappung*. Sebagian pendapat juga menguatkan teori ini bahwa asal kata Lampung berasal dari nama Ompung Silamponga.

Teori ini diperkuat dengan adanya persamaan huruf Lampung dengan huruf Batak. Bahkan ada yang menerangkan bahwa suku yang memuat cerita tersebut masih disimpan oleh penduduk (Penyimbang adat) dari kampung Rajabasa, Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan (Bukri, 1977: 11).

#### **d. Teori yang berasal dari Pagarruyung**

Tulisan Hilman Hadikusuma yang dimuat dalam kumpulan Bunga Rampai Adat Budaya No. 2 tahun II yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unila berjudul, Persekutuan Hukum Adat Abung. Dalam tulisan tersebut, termuat silsilah dan asal-usul penduduk Lampung, berdasarkan cerita rakyat yang diwariskan turun temurun bahwa penduduk Lampung itu berasal dari daerah Sekala Berak yang diduga kuat sebagai asal muasal perkampung pertama di Lampung, dan setidaknya sejak abad ke 14 M.

Penduduknya disebut dengan orang Tumi (*Buai Tumi*) yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekermong. Mereka menganut kepercayaan Dinamisme dengan kepercayaan menyembah pohon lemasa atau pohon melasa kepampang sebukau. Pohon ini dari cabangnya gatal dan

beracun, namun dapat dihilangkan dengan menggunakan getah dari pohon tersebut.

Keberadaan kelompok masyarakat Buay Tumi itu pada akhirnya berhasil dipengaruhi oleh empat orang pendakwah agama Islam yang datang kesana, yakni Umpu Pernong, Umpu Nyerupa, Umpu Bejalan di Way, dan Umpu Belunguh. Ke empat umpu itu adalah cikal bakal keberadaan Paksi Pak Skala Brak, dan berasal dari Pagarruyung (Sumatera Barat). Keberadaan pendakwah ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Kuntara Raja Niti.

Kitab Kuntara Raja Niti menuliskan bahwa ke empat umpu ini dengan sebutan Poyang yakni, Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Belunguh dan Inderwati. Menurut cerita yang berkembang pada masyarakat Belalau di atas juga disebut bahwa ke empat umpu itu adalah pembawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan. Dalam bukunya, Hilman Hadikusuma menyusun sebuah hipotesa berdasarkan ke dua cerita diatas, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 asal usul masyarakat Lampung

No	Nama Poyang	Gelar/Sebutan	Kedudukan	Keturunan
1.	Indar Gajah	Umpu Bejalan di Way	Puncak	Masyarakat Abung
2.	Pak Lang	Umpu Pernong	Hanibung	Masyarakat Pubian

3.	Sikin	Umpu Nyerupa	Sukau	Jelma Daya
4.	Belunguh	Umpu Belunguh	Kenali	Masyarakat Peminggir
5.	Indarwati	Puteri Bulan	Ganggiring	Masyarakat Tulang Bawang

Sumber: Bukri dkk, 1977: 12

Ke Empat umpu ini berasal dari Sumatera Barat (sebagian dari Pagarruyung, sebagian lagi dari Dharmasraya), sebelum sampai di Lampung, mereka mengunjungi daerah Rejang (Bengkulu) mengusahakan pertambangan khususnya emas bersama dengan tokoh masyarakat setempat yaitu Datuk Pe Patih Nan Sebatang yang berasal dari daerah Laras Bodi Chaniago Pagarruyung. Selain itu, terdapat cerita rakyat Cindur Mato yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan cerita rakyat di Lampung,

disebutkan bahwa pada suatu ketika Pagarruyung diserang musuh dari India, penduduk setempat mengalami kekalahan karena musuh telah menggunakan senjata modern (dari besi) sedangkan rakyat masih menggunakan alat dari nibung (ruyung). Mereka kemudian melarikan diri ada yang melalui sungai Rokan, sebagian melalui laut dan terdampar di hulu sungai Ketaun di Bengkulu dan menurunkan Suku Rejang. Yang lari ke Utara menurunkan Suku Batak, yang terdampar di Gowa menurunkan Suku Bugis, sedangkan yang terdampar di sungai Krui menyebar ke dataran tinggi Sekala Berak dan menurunkan orang Lampung (Bukri, 1977: 13)

Cerita diatas merupakan *folklore* yang berkembang di masyarakat tanpa di dukung oleh bukti fisik baik dokumen tertulis maupun prasasti, sehingga narasi ceritanya tidak begitu jelas seperti masa atau waktu terjadinya yang dapat digunakan untuk mendukung teori asal usul masyarakat Lampung. Namun, jika kita melihat mobilitas penduduk baik yang aktif maupun pasif dalam perubahan status sosial masyarakat adatnya kita akan menemukan kesamaan antara masyarakat Lampung dengan masyarakat Minang.

Kesamaan yang dimaksud yaitu, masyarakat Pesisir (Peminggir) memiliki kesamaan dengan masyarakat adat di *Koto Piliang* di Minangkabau bahwa status sosial masyarakat adatnya tidak dapat berubah, sedangkan untuk masyarakat Pepadun memiliki kesamaan dengan masyarakat adat di *Bodi Chaniago* di Minangkabau, bahwa seiring perkembangannya setiap jenjang kewargaan adat dapat berubah baik dari yang jenjang rendah menjadi jenjang yang lebih tinggi atau sebaliknya. Perubahan ini juga melalui prosesi upacara adat, dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan masyarakat adat tentunya seperti pemotongan kerbau dll.

e. **Teori Kelima dari Kitab Negarakertagama Majapahit**

Dokumen tertua dalam tradisi tulisan nusantara menyebutkan "Lampung" terdapat Majapahit. Kitab Negarakertagama

memuat tulisan Lampung pada syair bait ketiga belas tertulis dengan bunyi :

*“Ilwas lawan Samudra mwan i Lamuri Batan  
Lampung mwan Barus Yekadhinyang watek bhumi  
Malayu satanah kapwamateh anut Le tekang nusa  
Tanjungnagara ri Kapuas lawan ri Katingan Sampit  
mwan Kuta Lingga mwan i Kuta Wawaringin  
Sambas mwan i Lawas.”*

Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Lampung pernah disebutkan menjadi salah satu wilayah yang disebut sebagai "nusantara" dengan diberikan kewajiban untuk membayar upeti (Pajak) kepada para penguasa Majapahit di Jawa. Hal ini diperkuat dengan adanya pemukiman di daerah Pagar Dewa yang diyakini sebagai tempat mahapatih Majapahit Gajah Mada dimakamkan.

### **2.3.2 Masyarakat Lampung**

Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi “*Sang Bumi Ruwa Jurai*”. *Sang Bumi* diartikan sebagai suatu daerah yang agung dan berbilik, sedangkan *Ruwa Jurai* dimaknai sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung (Lampung Dalam Angka 2009: v). Pada awalnya motto ini dimaknai sebagai dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat asli Lampung baik masyarakat beradat *Pepadun* dan masyarakat beradat *Peminggir*. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, filosofi ini dimaknai

sebagai masyarakat asli (baik Pepadun maupun Saibatin) dan masyarakat pendatang yang tinggal dan menetap di Lampung.

### **2.3.3 Masyarakat adat Lampung Saibatin**

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah pesisir Lampung baik di Selatan, Barat, dan Timur Lampung. Persebaran masyarakat adat Saibatin mencakup daerah seperti di Teluk Betung, Kalianda, Raja Basa, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Pugung, Jabung, Cukuh Balak, Padang Cermin, Pesisir Krui, Ranau, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, dan Liwa. Bahkan beberapa penduduk Lampung ada yang mendiami wilayah di luar Lampung seperti di daerah Cikoneng di Pantai Banten, daerah Kayu Agung, Muara Dua, Martapura (Sumatera Selatan) dan daerah Merpas di Selatan Bengkulu.

Masyarakat beradat Saibatin seringkali disebut juga masyarakat Lampung Pesisir. Penyebutan ini dikarenakan sebagian besar masyarakat adatnya menetap di sepanjang garis pantai baik di wilayah pantai timur, selatan dan barat Lampung, dengan persebaran sebagai berikut:

1. Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
2. Bandar Enom Semaka (Tanggamus)

3. Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)
4. Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)
5. Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
6. Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)
7. Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)
8. Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
9. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Masyarakat Lampung beradat Saibatin, memiliki struktur pemerintahan yang sedikit berbeda dengan masyarakat beradat Pepadun. Mereka memiliki struktur pemerintahan yang khas, dan membedakan dengan masyarakat adat Pepadun. Pemerintahan di desa-desa pada masyarakat adat Saibatin terdiri atas:

1. kepala marga yang umumnya disebut pesirah marga dengan gelar Pangeran atau Depati,
2. kepala dusun disebut Krio atau Mangku atau juga Proatin.
3. staf yang disebut dengan punggawa, atau kepala suku (Tuwo Suku) (Hadikusuma, 2014: 113).

#### **2.3.4 Masyarakat adat Lampung Pepadun**

Masyarakat Lampung beradat Pepadun tersebar diberbagai wilayah Lampung, khususnya di daerah Pedalaman Lampung dan terdiri dari:

1. Abung Siwo Megou terdiri dari Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa. Masyarakat Abung mendiami wilayah adat dan tersebar di tujuh tempat seperti di daerah Sukadana, Jabung, Labuhan Maringgai, Terbanggi, Seputih Timur, Gunung Sugih, dan Kotabumi.
2. Megou Pak Tulangbawang terdiri dari Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan. Masyarakat adat Tulangbawang mendiami wilayah adat dan tersebar di empat wilayah seperti di daerah Wiralaga, Panaragan, Menggala, dan Mesuji.
3. Pubian Telu Suku terdiri dari tiga masyarakat adat yakni Minak Patih Tuha atau dikenal juga dengan sebutan Suku Manyarakat, Minak Handak Hulu atau dikenal juga dengan sebutan Suku Bukujadi Minak Demang Lanca atau dikenal juga dengan sebutan Suku Tambapupus. Masyarakat adat Pubian mendiami wilayah adat dan tersebar di delapan wilayah seperti di daerah Tanjungkarang, Balau, Padang Ratu, Gedungtataan, Pugung, Bukujadi, Seputih Barat, dan Tegineneng.
4. Way Kanan Buway Lima terdiri dari Buway Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tiyang Jungur). Masyarakat adat Way Kanan mendiami wilayah adat

dan tersebar di berbagai wilayah seperti di daerah Blambangan Umpu, Kasui, Negeri Besar, Pakuan Ratu, Bahuga, dan Baradatu.

5. Sungkay Bunga Mayang terdiri dari Buway Liwa, Semenguk, Selembasi, Perja, Indor Gajah, Harrayap, Debintang. Masyarakat adat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat dan tersebar di berbagai wilayah seperti di daerah Bunga Mayang, Negara Ratu, Sungkay, dan Ketapang.



Gadis Lampung (Sumatranjess, hal. 12)

Adat istiadat masyarakat Lampung baik yang menggunakan adat Saibatin, maupun Pepadun itu masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang menonjol sehingga secara umum dapat kita bedakan. Perbedaan ini terdapat pada beberapa hal yang masing-masing perbedaan ini menjadi ciri khas masing-masing masyarakat adat. Berikut adalah ciri-ciri

kedua kelompok masyarakat adat tersebut yang dikemukakan oleh Hadikusuma (1989, 118 -119).

Tabel 2.3 Perbandingan adat Saibatin dan Pepadun dalam Masyarakat Lampung

No.	Kategori	Masyarakat Beradat	
		Adat Saibatin	Adat Pepadun
1.	Status Adat	Kedudukan dalam masyarakat adat bersifat tetap tidak ada upacara peralihan adat	Kedudukan dalam masyarakat adat dapat dialihkan dengan upacara singkat adat Pepadun
2.	Nilai Kepemimpinan	Stratifikasi kedudukan masyarakat adat Sebatin tanpa nilai, tanpa tahta Pepadun	Stratifikasi kedudukan punyimbang bernilai menurut kedudukan masyarakat adat Pepadun
3.	Sistem Perkawinan	Sistem dan bentuk upacara perkawinan dengan jujur dan semanda	Bentuk upacara perkawinan dengan jujur setelah perkawinan istri ikut suami
4.	Status Pakaian Adat	Pakaian adat hanya dimiliki dan dikuasai sebatin, siger (mahkota) sebelah	Hanya kelompok yang telah bermartabat dapat mengenakan dan memiliki pakaian adat, siger tarub
5.	Nilai Keturunan	Kebanggaan keturunan	Memiliki perasaan bangga

No.	Kategori	Masyarakat Beradat	
		Adat Saibatin	Adat Pepadun
		terbatas hanya pada kerabat Sebatin	atas keturunan yang baik
6.	Hubungan Kekeabatan	Hubungan kekeabatan kurang akrab	Hubungan kekeabatan sangat akrab
7.	Kitab Pegangan Hidup	Belum diketahui kitab pegangan hukum adatnya	Kitab-kitab hukum adatnya cukup banyak, antara lain Kuntara Raja Niti, Kuntara Sempurna Jaya, Kuntara Raja Asa, dan Kuntara Tulangbawang.
8.	Pengaruh Islam	Pengaruh agama Islam lebih kuat	Pengaruh agama Islam tidak sekuat pengaruh adat
9.	Sistem hukum dan peradilan	Peradilan adat mulai lemah	Peradilan adat masih kuat.

Sumber: Diadaptasi dari Titik Pudjiastuti, Aksara dan Naskah Kuno Lampung. hal. 20

### 2.3.5 Masyarakat Lampung hari Ini

Pelaksanaan kolonisasi di Provinsi Lampung dimulai ketika pada tahun 1905 dilakukan penempatan keluarga kolonis Jawa yang berasal dari Desa Bagelen di Jawa Tengah. Setiap kolonis kemudian ditempatkan di Desa Bagelen Gedong Tataan, 25 km sebelah barat ibukota Karesidenan Lampung di Tanjungkarang. Penempatan kolonis di daerah Bagelen

merupakan suatu strategi untuk menyiapkan tenaga kerja murah di sekitar daerah perkebunan.

Sejak tahun 1905 hingga tahun 1943 di Provinsi Lampung telah berhasil ditempatkan transmigran dengan jumlah sebanyak 51.010 KK atau 211.720 jiwa di kawasan kolonisasi Gedong Tataan, Gadingrejo, Wonosobo, Pringsewu di daerah Lampung Selatan, dan kawasan Sekampung, Trimurjo, Metro, dan Batanghari di daerah Sukadana Lampung Tengah pada masanya. Penempatan ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya kemajemukan etnis di daerah Lampung seperti suku Lampung, Jawa, Banten, Minang, Palembang, Ogan, Bugis, dan China.

Jumlah penduduk provinsi ini 6.983.699 jiwa pada 2005, terdiri atas penduduk laki-laki dengan jumlah 3.596.432, dan penduduk perempuan dengan jumlah 3.387.267. Selama 35 tahun terakhir, jumlah penduduknya meningkat hampir 3 kali lipat, dari 2,78 juta pada 1971 menjadi 6,9 juta pada 2005. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan penduduk menurun hampir lima kali lipat, dari 5,77% (1971-1980) menjadi 1,16% (2000-2005).

Fenomena ini menunjukkan adanya upaya dan kerja keras pemerintah setempat mengendalikan jumlah penduduk yang telah berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007: 134).  
 Perkembangan penduduk di wilayah Lampung berdasarkan data BPS provinsi Lampung tahun 2007 dapat kita lihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Lampung Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Lampung Barat	382.706	388.113	378.005	380.208	381.439
Kab. Tanggamus	801.260	801.609	821.119	824.922	826.610
Kab. Lampung Selatan	1.177.505	1.192.296	1.281.104	1.312.527	1.341.258
Kab. Lampung Timur	885.080	890.298	919.274	929.159	936.734
Kab. Lampung Tengah	1.073.412	1.082.494	1.129.352	1.146.158	1.160.221
Kab. Lampung Utara	549.060	555.099	554.617	559.172	562.314
Kab. Way Kanan	359.284	359.844	359.945	361.810	362.749
Kab. Tulang Bawang	723.096	733.520	750.672	763.360	774.265
Kota Bandar Lampung	779.179	788.937	793.746	803.922	812.133

Kota Metro	122.417	123.740	128.343	130.348	132.044
Provinsi Lampung	6.852.999	6.915.950	7.116.177	7.211.586	7.289.767

Sumber : Lampung Dalam Angka 2007

Provinsi Lampung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang beragam dan cukup bervariasi, Kota Bandar Lampung menempati wilayah dengan kepadatan tertinggi yakni berkisar anatar 1.982–4.038 orang per km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Kota Metro yang mencapai 371-1.981 orang per km<sup>2</sup>. Pada lima kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus, kepadatan penduduknya mencapai 94-370 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan kabupaten lain seperti Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, Mesuji, Tubabar, dan Tulang Bawang mencapai 77-93 orang per km<sup>2</sup> (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 2007: 134).

Provinsi Lampung dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu penduduk asli dan pendatang yang populasinya tersebar di berbagai daerah di Lampung. Berdasarkan data hasil sensus penduduk yang dilakukan tahun 2000, disimpulkan bahwa persebaran komposisi penduduk berdasarkan suku bangsa yang menghuni wilayah Lampung yaitu: (1) Jawa 4.113.731

(61,88%), (2) Lampung 792.312 (11,92%), (3) Sunda (termasuk Banten) 749.556 (11,27%), (4) Semendo dan Palembang 36.292 (3,55%), (5) Suku bangsa lain (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, Cina) 754.989 (11,35%) (BPS Lampung, 2000).

Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Lampung Berdasarkan Suku Bangsa Tahun 2000

No.	Suku Bangsa	Jumlah (jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa	4.113.731	61,88%
2	Lampung	792.321	11,92%
3	Sunda (termasuk Banten)	749.556	11,27%
4	Semendo dan	36.292	3,55%
5	Palembang Suku bangsa lain (Batak,Bengkulu, Bugis, Minang, dll)	754.989	11,35%
JUMLAH		6.646.890	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, 2000

## 2.4 Bahasa, Budaya, dan Hasil Kebudayaan Masyarakat Lampung

Sebagai sebuah etnik yang berada di wilayah Sumatera, Lampung juga memiliki berbagai hasil budaya, bahasa, dan yang beragam. Hasil budaya ini tentunya menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat adat di Lampung, seperti dalam pemaparan berikut ini.

### **2.4.1 Bahasa Masyarakat Lampung**

Masyarakat Lampung dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, meskipun demikian bahasa Lampung tetap digunakan dalam kegiatan-kegiatan adat dan percakapan sehari-hari sesama orang Lampung. Bahasa Lampung adalah sebuah bahasa yang dipertuturkan oleh masyarakat Lampung asli, juga dapat dijumpai pada wilayah selatan Provinsi Sumatera Selatan sekitaran OKI, dan pantai barat Provinsi Banten.

Bahasa Lampung merupakan satu puluhan bahkan ratusan bahasa daerah yang ada dan berkembang di Indonesia, dari pulau Weh Aceh hingga pelosok timur Papua. Penutur sejati bahasa Lampung tidak hanya ada di Lampung namun juga di provinsi Sumatra Selatan dan Banten (Katubi, 2007). Penggunaan bahasa Lampung sebagai bahasa sehari-hari berbeda dengan bahasa Jawa yang mengenal tingkatan. Namun, sebagaimana kebanyakan bahasa lain, bahasa Lampung memiliki corak dan ragam, seperti ragam resmi dan ragam tidak resmi.

Bahasa Lampung terdiri dari dua dialek besar yang berbeda secara tajam dalam pelafalannya, yaitu (1) dialek Abung dan (2) dialek Pesisir. Perbedaan yang menyolok dalam bidang fonologi antara kedua dialek itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Kata-kata yang berakhir dengan fonem (o) pada

dialek Abung, pada umumnya dalam dialek Pesisir berakhir dengan fonem (a). Oleh karena itu, bahasa Lampung lazim pula dibagi atas bahasa Lampung berlogat o (dialek Abung) dan bahasa Lampung berlogat a (dialek Pesisir).

Monognfi Daerah Lampung (1976: 61) menyebutkan bahasa Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni berlogat O/Nyow itu sebagai *logat nyow* 'logat apa' dan bahasa Lampung berlogat a sebagai *logat api* logat apa. Penamaan *logat nyow* dan *logat api* itu didasarkan atas pendapat J.W. Van Royen. Misalnya, *dijo di Bini* (dialek Abung) dalam dialek Pesisir adalah *dija*. Dr Van Royen mengklasifikasikan Bahasa Lampung dalam Dua Sub Dialek, yaitu Dialek Abung atau Nyow dan Dialek Belalau atau Dialek Api.

Bahasa Lampung dialek Abung terbagi kedalam enam subdialek, yaitu:

- a. subdialek Abung;
- b. subdialek Sungkai;
- c. subdialek Tulang Bawang;
- d. subdialek Kota Bumi;
- e. subdialek Jabung;
- f. subdialek Menggala.

Bahasa Lampung dialek Pesisir terbagi menjadi tujuh subdialek, yaitu:

- a. subdialek Krui;
- b. subdialek Way Uma;
- c. subdialek Kota Agung;
- d. subdialek Talang Padang;
- e. subdialek Kalianda; .
- f. subdialek Pubian;
- g. subdialek Melinting (Arifin, 1985: 47).

Berdasarkan peta bahasa, Bahasa Lampung memiliki dua subdialek. Pertama, dialek A (api) yang dipakai oleh ulun Sekala Brak, Melinting Maringgai, Darah Putih Rajabasa, Balau Telukbetung, Semaka Kota Agung, Pesisir Krui, Ranau, Komering dan Daya (yang beradat Lampung Saibatin), serta Way Kanan, Sungkai, dan Pubian (yang beradat Lampung Pepadun). Kedua, subdialek O (nyo) yang dipakai oleh ulun Abung dan Tulangbawang (yang beradat Lampung Pepadun).

Bagi masyarakat Lampung, Bahasa Lampung masih dapat digunakan sebagai lambang daerah dan identitas daerah atau pun identitas diri masyarakat Lampung. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Lampung oleh masyarakat khususnya suku Lampung di daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Lampung. Dengan kata lain fungsi bahasa Lampung sesuai pula dengan hasil Seminar Politik Bahasa nasional pada tahun 1975 dengan ditentukannya fungsi bahasa daerah sebagai:

- a) lambang kebanggaan daerah,
- b) lambang identitas daerah,
- c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Namun demikian, terjadi pula pergeseran-pergeseran sikap penutur bahasa Lampung terhadap bahasa Lampung itu sendiri pada sebagian masyarakat Lampung terutama generasi muda yang tinggal di perkotaan.

Bahasa Lampung hingga saat ini, masih digunakan dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari saat bercakap-cakap dalam kesehariannya pada keluarga penduduk asli Lampung, meskipun demikian, bahasa ini sudah mulai dikurangi penggunaannya. Bahasa Lampung secara umum mulai ditinggalkan dan tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari dan mengantinya dengan bahasa nasional bahasa Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa Ibu memiliki kekayaan kultural yang tak tergantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

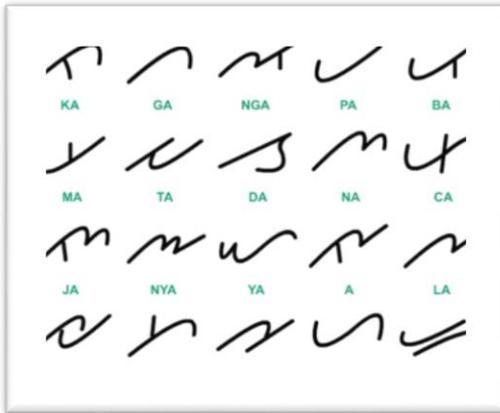
#### **2.4.2 Aksara Lampung**

Sejarah aksara Lampung mengalami berbagai Dinamika dan perkembangannya. Umumnya orang Lampung berpendapat bahwa bentuk aksara Lampung ada dua macam, yaitu aksara Lampung kuno dan aksara Lampung hari ini (Pudjiastuti, 1997: 47). Terdapat beberapa perbedaan pada kedua aksara ini yaitu, yang pertama adalah jumlah aksara Lampung lama

berjumlah 19 huruf sedangkan aksara Lampung sekarang berjumlah 20 huruf, perbedaan yang kedua mengenai tanda bunyi dan ketiga adalah tanda bacanya.

Aksara lampung yang disebut dengan Had Lampung ialah bentuk tulisan yang memiliki hubungan kedekatan dengan aksara Pallawa dari India bagian Selatan. Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam Huruf Arab dengan menggunakan tanda tanda fathah di baris atas dan tanda tanda kasrah di baris bawah tapi tidak menggunakan tanda dammah di baris depan melainkan menggunakan tanda di belakang, masing-masing tanda mempunyai nama dan arti tersendiri.

Aksara Lampung banyak dipengaruhi oleh dua unsur aksara dari luar yaitu Aksara Pallawa dan Huruf Arab. Aksara Lampung diidentifikasi memiliki hubungan kekerabatan dengan aksara dari Rejang Bengkulu, Rencong, dan Aksara Bugis. Aksara Lampung terdiri dari tiga macam unsur utama, yakni: 1) huruf induk (*kelabai surat*); 2) anak huruf atau tanda bunyi (*benah surat*); 3) tanda-tanda baca (Pudjiastuti, 1997: 46). Aksara Lampung dikenal dengan istilah KaGaNga, dan dibaca-tulis dari kiri ke kanan dengan Huruf Induk berjumlah 20 buah.



Gambar 2.1 Aksara Lampung  
 Sumber: [www.wikipedia](http://www.wikipedia)

Aksara lampung telah mengalami berbagai bentuk perubahan dan perkembangannya. Sejarah mencatat bahwa sebelumnya aksara Lampung kuno memiliki bentuk, simbol, dan pemulisan yang jauh lebih rumit. Dalam perkembangannya aksara lampung dilakukan penyempurnaan dan penyederhanaan hingga yang kita jumpai sekarang. Aksara Lampung yang diajarkan di sekolah-sekolah dalam mata pelajaran MULOK merupakan hasil dari proses penyempurnaan yang telah dilakukan.

### 2.4.3 Budaya Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat yang unik yang membedakannya dengan masyarakat dari kebudayaan yang lain. Masyarakat yang mendiami wilayah paling ujung selatan pulau Sumatera ini merupakan masyarakat yang mencoba bertahan dengan tradisi nenek

moyang mereka dari gempuran budaya luar yang kini mulai menggerogoti kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (*Ulun Peminggir*) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir yang terdiri dari wilayah Melinting, Teluk, Semangka, Belalau (Krui), Ranau, Komerling/Kayuagung, Cikoneng (Banten).

Masyarakat Lampung Pesisir ini menggunakan dialek tersendiri yang dikenal dengan dialek Api. Sedangkan Lampung Pepadun (*Ulun Pepadun*) adalah mereka suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu didaerah Abung, daerah Tulangbawang, daerah Waykanan/Sungkai, Pubiyan. Masyarakat Lampung Pepadun ini memiliki dialek yang berbeda dengan suku Lampung Pesisir, mereka yang berasal dari wilayah Lampung Pepadun menggunakan dialek yang dikenal dengan dialek O atau Nyow (Hadikusuma, 2014: 123)

Adanya dua suku adat besar yang mendiami wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya di setiap wilayah adat yang berbeda. Keanekaragaman ini membuat wilayah Lampung menjadi wilayah yang penuh warna dengan adat istiadat masyarakatnya. Namun walau kedua suku adat ini

memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi mereka diikat oleh apa yang masyarakat Lampung sebagai *Piil Pesenggiri* yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung dalam menjalani hidup mereka.

Falsafah hidup masyarakat Lampung mengandung hal yang berhubungan dengan kehormatan diri, keluarga, dan kesatuan kelompok masyarakat Adat Lampung. Falsafah ini disebut *Piil Pesenggiri*. Piil Pesenggiri berisi lima unsur pokok yang terdiri dari:

1. *Piil Pesenggiri*, yaitu keharusan hidup dengan standar moral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, dan kewajibannya.
2. *Sakai Sambayan*, yaitu keharusan hidup berjiwa sosial, tolong menolong tanpa pamrih, dan bergotong royong.
3. *Nemui Nyimbah*, yaitu /keharusan berlaku sopan santun terhadap sesama anggota masyarakat dan terbuka tangan baik moral maupun material kepada siapa saja.
4. *Nengah Nyeppur*, yaitu keharusan ikut bergaul dalam masyarakat, ikut memberikan sumbangan pikiran, serta pendapat dan inisiatif bagi kebaikan hidup bersama.
5. *Bejuluk Beadek*, yaitu terpatri makna keharusan berjuang meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata tertib, dan bertata krama yang baik.

Penerapan kelima unsur pokok yang terkandung dalam falsafah hidup masyarakat Lampung terlihat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung. Unsur *Piil Pesenggiri* yang mengharuskan setiap masyarakat Lampung berjiwa besar, mengetahui kedudukan diri sendiri, dan bersatu

terpancar dalam pepatah *sai tuh malah cawou, sai sunak malah kiwak* yang tua mengalah bicara, yang muda mengalah tenaga.

Kelima unsur pokok di atas mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Lampung, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya, seperti yang terkandung dalam konsep *bejuluk beadek*. Unsur ini lebih menonjolkan adanya pengakuan hak individu. Masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong dalam kehidupan sosial. Hal ini tampak pada tanggung jawab saudara, yang diberikan kepada saudaranya yang lain. Misalnya, tanggung jawab yang diberikan saudara tertua kepada saudaranya yang lain yang mengalami hambatan di dalam menyelesaikan pelajarannya (sekolah).

Di samping sikap positif itu, mereka memiliki sikap negatif yang sering muncul di kalangan masyarakat Lampung, yaitu sikap kurang sabar, mudah tersinggung, dan mudah berkecil hati. Namun, masyarakat Lampung mempunyai sikap keterbukaan terhadap masyarakat pendatang. Dalam masalah otoritas dan kepemimpinan, mereka sangat menonjolkan asas mufakat yaitu dalam pepatah *Sai malah cawou, sai sanak malah kiwak*. Pemegang otoritas tertinggi dalam masyarakat Lampung adalah musyawarah para *penyimbang* atau *perwatin*

*adat* yang berarti perwujudan demokrasi adat (Arifin, 1985: 24). Sehingga seluruh persoalan kehidupan masyarakat Lampung selalu diselesaikan dengan musyawarah para tokoh adat.

Sifat-sifat masyarakat Lampung di atas tercermin dalam lima kembang penghias siger pada lambang Provinsi Lampung. Sifat-sifat dan karakteristik masyarakat Lampung juga dapat kita temukan dalam ungkapan adi-adi (pantun) masyarakat Lampung, yaitu:

Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri  
Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi  
Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi  
Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian  
gawi.

Pada umumnya masyarakat Lampung memiliki prinsip dan nilai harga diri yang tinggi, terutama kelompok masyarakat beradat Pepadun. Setiap orang Lampung memiliki harga diri yang tinggi, dan menjadi sebuah kehinaan apabila mereka tidak mampu menjaga harga dirinya, terlebih apabila yang bersangkutan merupakan seorang *punyimbang* yang menjadi contoh dan panutan masyarakat adatnya. Karena keinginan untuk dihormati, maka seorang Lampung sekalipun masih kanak-kanak ingin memakai nama besar yang disebut *juluk*. Ia memakai nama gelar yang disebut *adok* untuk laki-laki dan *inai* bagi perempuan, setelah berumah tangga. Begitu pula karena suka mendapat pujian maka ia gemar menerima tamu

(*nemui*) dan gemar memberi atau mengirim bingkisan hadiah kepada orang-orang tertentu, terutama yang terikat hubungan kekerabatan (*nyimah*) dengannya.

Selain itu, kata *nemui* dan *nyimah* juga diartikan sebagai kebiasaan masyarakat Lampung dalam memaafkan kesalahan orang, mereka mudah sekali memaafkan maka dalam hubungan sosial kemasyarakatannya. Kebiasaan suka memaafkan ini, didukung dengan kebiasaan masyarakat adat Lampung yang seringkali dijumpai biasa saling berkunjung (*nengah*), suka mengenal satu dengan yang lain (*nyappur*), serta pandai bertutur kata dan bermusyawarah. Namun dalam persoalan adat dan menjaga nama baik kaum kerabat keturunannya, orang Lampung paling keras prinsip hidupnya, maka mereka suka saling tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan berat seperti membangun rumah, atau dalam upacara adat yang besar (Hadikusuma, Arifin, dan Barusman, 1996: 23).

Watak dan karakteristik masyarakat Lampung dengan jelas tercermin dari falsafah hidup yang mereka pegang dan mereka percaya sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupannya. Orang Lampung sangat dikenal sebagai sekelompok masyarakat yang menyukai puji pujian, dan gemar memiliki gelar adat yang tinggi, karena semakin tinggi gelar adat maka masyarakat akan semakin

menhormatinya. Seorang Lampung tidak segan mengeluarkan biaya besar dalam upacara adat besar baik berupa uang maupun pemotongan sejumlah kerbau hanya untuk mendapatkan gelar kehormatan dalam strata kebangsawanan orang Lampung.

Bahkan karena *piil* yang demikian tinggi, banyak masyarakat Lampung sangat enggan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai oleh mereka sebagai pekerjaan rendahan seperti kuli, buruh kasar dll. Bahkan hal ini telah diatur didalam hukum adat mereka yang tertuang didalam Kitab Kuntara Raja Niti (Fachrudin, 2006)

“Maka wat jelma anjak jadi jarahan atawa taban ya mulang tiyuh mesol kibaw sai, nurun riyal putelu pak likur pakaini pigang tangan jama batin telu suku, ya nyawakan ‘mati anjak mak bangikku’ cawani” (KRN.ps.140/141)

Maksudnya, jika seseorang menjadi budak atau menjadi taban (kuli beban), maka ketika ia kembali ke kampung ia diharuskan membayar sejumlah 3x24 rial dengan satu kerbau untuk disembelih. Kemudian orang tersebut bersalaman dengan para tua-tua adat batin telu suku dengan mengatakan ‘alangkah tidak enak nya nasib saya’ katanya (Hadikusuma, 1990). Nilai budaya ini dalam masyarakat Lampung telah mendarah daging dan menegaskan bahwa menjadi suatu kehinaan apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi.

#### **2.4.4 Hasil Budaya Masyarakat Lampung**

Masyarakat Lampung terbentuk melalui sejarah yang panjang, dan berliku, tapak demi tapak hingga perkembangannya saat ini. Pada keadaan tertentu terdapat banyak sekali peninggalan yang eksis atau terekam hingga kini dan menjadi warisan budaya masyarakat Lampung. Warisan budaya, menurut Davidson (1991:2) diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa’. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu.

Nilai warisan budaya dari masa lalu (*intangible heritage*) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada pada setiap komunitas adat di Lampung dan menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa di Nusantara. Budaya-budaya yang dimaksud meliputi: tradisi lisan dan tulisan, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001: 12).

Bidang seni rupa misalnya dalam bidang arsitektur mulai berkembang bentuk rumah adat Lampung yang nantinya berkembang menjadi rumah khas pada masyarakat Adat Lampung. Bangunan rumah kediaman dan sejenisnya, selalu

merupakan rumah panggung bertiang (*pilo dwellings*), yang diperkirakan telah mulai sejak periode zaman kuno ini.



Tapis Lampung

Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

Bidang seni tari dan seni suara/musik sampai saat ini masih terlihat tanda-tanda adanya pengaruh Hindu. Dalam bidang seni suara/musik terdapat nada dan irama yang bercorak Melayu dengan variasi nada India dari tangga nada minor. Kemungkinan berkembangnya seni suara telah berkembang pada periode ini walaupun kenyataan tidak langsung menerima dari India. Yang jelas bahwa sampai saat ini jenis alat musik yang dikenal dengan nama Kulintang sebagai salah satu alat musik yang tradisional yang telah berkembang sejak lama. Masuknya pengaruh Hindu ke Lampung mungkin melalui Jawa atau wilayah Sumatra lainnya membawa

gamelan dan alat perlengkapannya. Tetapi setelah alat-alat musik tersebut berada di Lampung hanya beberapa alat dari gamelan itu yang dipergunakan.

Seni musik dalam perkembangannya terdapat alat musik Lampung yang tradisional itu terlihat seperangkat alat musik yang terdiri dari *kelenong* (12 buah), gendang (1 buah) dan gong ukuran kecil (2 buah). Bidang seni sastra berkembang pula yang disebut cerita rakyat, peribahasa, pantun-pantun, teka-teki, dan sebagainya. Yang berbentuk prosa telah dikenal *serambai* (cerita panjang), *cerita curika* (cerita pendek) dan *cecawan* (keluhan jiwa). Berkembangnya kesenian yang telah disebutkan di atas pada umumnya dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa agama pada saat itu (Bukri, 1981: 34).

Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan sebagai sebuah warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, rumah adat, patung pahlawan (Galla, 2001: 8). Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni seperti kain tapis, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film (Galla, 2001: 10).

## 2.5 Sistem Pemerintahan Masyarakat Lampung

Sistem pemerintahan masyarakat adat Lampung mengenal sistem *kepunyimbangan adat*. Keluarga kepala suku selalu menduduki tempat terhormat dengan gelar punyimbang. Wilayah suku memiliki pola yang tak terbatas (kebuayan atau buwai) adalah marga dan setiap kabuainnya menunjuk leluhurnya, salah satu dari sembilan anak Minak Pamoeka Bagindo, yang merupakan keturunan leluhur Silampung (Broersma, 1916: 41). Marga adalah wilayah kesatuan suku dan terdiri dari berbagai tiyuh (kampung), dan setiap tiyuh terdapat kelompok suku, dan kelompok keluarga. Sama seperti marga memiliki kepala yang dikenal, punyimbang marga, demikian pula tiuh memiliki punyimbang tiuh dan suku memiliki punyimbang suku. Karena itu punyimbang itu selalu merupakan keturunan Bagindo. Penyatuan tiuh terkait adalah marga, sama halnya satu atau lebih marga membentuk kabuaian.

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, terdapat susunan *kepunyimbangan* (kepemimpinan) kerabat selalu berurutan di bawah kepemimpinan para punyimbang yaitu anak laki-laki tertua dari garis keturunan tertua menurut garis keturunan laki-laki. Dengan demikian terdapat konsekuensi langsung dalam pemerintahan adat ini yakni dengan munculnya beberapa punyimbang seperti *punyimbang buay balak* (keturunan besar) dan *punyimbang buay lunik* (keturunan

kecil) yang memimpin jurai atau subbuay. *Punyimbang* ini memegang peranan penting dalam suatu keluarga Lampung mulai dari keluarga batih sampai kepada buay. Tanpa adanya *punyimbang* suatu kerabat akan buyar karena tidak ada pemimpin yang mengatur atau dengan kata lain tidak adanya panutan dalam diri seseorang yang dituakan dalam musyawarah ketika terjadinya suatu peristiwa yang harus diselesaikan secara adat. Sehingga keberadaan *punyimbang* mampu merekatkan dan menyatukan masyarakat adat Lampung.

Masyarakat Lampung memiliki struktur pemerintahan adat dimana kepengurusannya dipegang oleh keluarga dari garis keturunan berdasarkan garis keturunan anak laki-laki tertua. Dahulu kewargaan kelompok masyarakat adat Lampung dapat dibedakan menjadi dua yakni, kesatuan adat pepadun dan kesatuan adat pesisir (peminggir). Susunan pemerintahan pada masyarakat adat pepadun terdiri dari:

1. *Kepunyimbangan* Marga (bumi);
2. *Kepunyimbangan* Tiyuh (ratu);
3. *Kepunyimbangan suku* (raja);
4. Warga adat biasa;
5. Keturunan budak (*beduwow*) (Hadikusuma, 2014: 122).

Keberadaan susunan masyarakat adat ini berimplikasi dengan nilai-nilai harga diri (*Piil Pesenggiri*) masyarakat adatnya, seperti *Kepunyimbangan* Marga (bumi) bernilai harga diri 24;

*Kepunyimbangan Tiyuh* (ratu) memiliki nilai harga diri separuh dari *Kepunyimbangan Marga* yakni bernilai 12; *Kepunyimbangan suku* (raja) memiliki nilai harga diri seperempat dari *Kepunyimbangan Marga dan* bernilai separuh dari *Kepunyimbangan Tiyuh* yakni bernilai 6; Warga adat biasa dan Keturunan budak (*beduwow*) tidak memiliki harga diri. Sedangkan dilingkungan masyarakat Lampung beradat pesisir atau peminggir, kewargaan pemerintahannya dibedakan menurut susunan *kesebatinan*, yaitu:

1. *kesebatinan marga (bandar)*;
2. *kesebatinan pekon*;
3. *kesebatinan suku* (Hadikusuma, 2014: 122)..

Berbeda dengan masyarakat adat pepadun yang dapat berubah statusnya, pada masyarakat adat Pesisir tidak dapat berubah, dan masyarakatnya tentunya berdampak pada status sosial yang tidak berubah. Kondisi masyarakat adat ini dapat kita temukan juga pada masyarakat adat di *Koto Piliang* di Minangkabau.

Punyimbang dipilih tidak hanya berdasarkan keturunan semata, namun setiap punyimbang haruslah memiliki sifat dan karakteristik seorang pemimpin pilihan dan keutamaan. Karakter kepemimpinan ini sebagaimana tercantum didalam kitab Kuntara Raja Niti pasal 39 tentang modal seorang punyimbang dengan ketentuan: 1) Jujur serta sabar; 2) Manis muka dan manis kata; 3) Sanggup rugi makanan dan rugi

belanja; 4) Rugi bahasa dan baik budi (Hadikusuma, 1986: 16 KRN, Pasal 39). Setiap pemimpin harus sabar dalam menghadapi anggota masyarakatnya, tutur kata dan bahasanya begitu santun namun tegas dalam bersikap. Selain itu tentunya karakter lain yang harus dimiliki pemimpin ialah sikap rela berkorban untuk kebaikan masyarakat adatnya.

Karakteristik dan kepemimpinan ini tercermin dengan hubungan antara pemimpin dan anak buahnya. Maka ditangan seorang pemimpin yang adil dan amanah, maka setiap anak buah akan memiliki perasaan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kuntara Raja Niti pasal 40 tentang peti seorang punyimbang dengan ketentuan: 1) Manusia sayang padanya; 2) Selalu berusaha memikirkan hari depan; 3) Tidak mudah putus asa (Hadikusuma, 1986: 16).

Dalam ketentuan diatas, dapat kita cermati bahwa setiap pemimpin itu seharusnya membuat setiap masyarakat menjadi sayang dan rela melakukan apapun kepada para punyimbang. Keadaan ini terjadi dikarenakan setiap warga masyarakat adat memiliki perasaan bahwa para punyimbang telah memberikan yang terbaik bagi masyarakat adatnya, tidak hanya hari ini, tetapi hingga jauh kedepan.

Kehidupan para punyimbang merupakan pengejawantahan nilai-nilai adat budaya masyarakat Lampung, sehingga segala tindak tanduk punyimbang selalu menjadi landasan dan acuan

warga masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Bahkan untuk mengekspresikan perasaan marah sekalipun, setiap punyimbang harus selalu memperhatikan nilai-nilai kehidupan sebagaimana tercantum dalam kitab Kuntara Raja Niti pasal 40 tentang cara seorang punyimbang marah, dengan ketentuan:

1. Cara punyimbang marah terhadap warga adatnya atau warga kerabatnya dapat dilakukan dengan ucapan kata atau dengan tangan, atau tindakan tertentu lainnya;
2. Jika marah dengan tangan tidak dihukum bangun atau tepung, tetapi jika marah dengan kata-kata lalu SI Punyimbang menurunkan sirih pinang (ngerogoh ngasan) dengan memotong ayam atau kambing atau kerbau dengan mengumpulkan para punyimbang untuk meminta agar musyawarah perwatin menerima dan menyetujui bahwa ia akan mengeluarkan warga adatnya dari kesatuan adatnya, maka sidang perlu mempertimbangkannya;
3. Untuk itu perwatin harus memeriksa warga adat bersangkutan dengan teliti dan berlaku adil, apakah ada perbuatan mereka yang melanggar hukum adat, jika ada apakah tidak cukup dihukum denda saja;
4. Jika yang bersangkutan ternyata tidak salah tetapi dikarenakan si punyimbang merasa jengkel atas warga adatnya, maka sidang mempertimbangkan jalan keluarnya dengan menyetujui sebagai tindakan peringatan atau dimaafkan (Hadikusuma, 1986: 46).

Para punyimbang disisi lain memiliki Hak dan Kewajiban yang mengikat dan melekat dalam masyarakat adat Lampung. Punyimbang Buai atau Punyimbang Bumi memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan adatnya, sebagaimana tercantum dalam

kitab Kuntara Raja Niti pasal 163 tentang hak dan kewajiban punyimbang, dengan ketentuan antara lain: 1) Anak buahnya jika akan pindah masuk kepunyimbangan lain tidak diperbolehkan tanpa persetujuannya; 2) Orang lain yang akan masuk menjadi anggota pepadunnya atau kebumiannya tidak diperbolehkan kecuali dengan seizinnya; 3) Memutus perkara atau menentukan hukuman adalah hak punyimbang buai atau punyimbang bumi, tidak boleh setiap orang berbuat sembarangan; 4) Jika ada orang lain mengambil hak tersebut diatas, maka ia dihukum denda 4 x 12 rial dengan pembagian untuk perwatin adat 36 rial, dan untuk punyimbangnya sendiri 12 rial (Hadikusuma, 1986: 54).

Kebijakaan dan kearifan seorang punyimbang diuji ketika terjadi sebuah pelanggaran adat, baik dengan kategori berat, maupun ketika ada kerabat punyimbang yang melakukan pelanggaran adat. Untuk memutuskan tingkat kesalahan warga adatnya hingga berujung pada konsekuensi terusirnya pihak pelanggar dari komunitasnya.

Setiap punyimbang memiliki peraturan yang mesti diperhatikan dalam memutuskan sebuah perkara dalam masyarakatnya. Peraturan ini merujuk pada ketentuan adat dalam kitab Kuntara Raja Niti, sebagaimana tercantum

dalam kitab Kuntara Raja Niti pasal 58 tentang mengusir warga adat, dengan ketentuan antara lain:

1. Jika ada punyimbang yang mengusir anak buah warga adatnya, maka punyimbang itu harus menyediakan hidangan,
2. Jika ketika mengusir, hidangan disajikan berupa ketan dan menyembelih ayam, maka jika anak buah itu diterima kembali maka hidangan harus dengan menyembelih kambing,
3. Jika mengusir anak buah, dengan menyembelih kambing, maka jika anak buah itu diterima kembali maka punyimbang menyembelih kerbau, Jika ketika mengusir dengan menyembelih kerbau, maka ketika menerima anak buahnya kembali, ia harus menyembelih dua ekor kerbau.
4. Penerimaan kembali anak buah dengan menyembelih dua ekor kerbau, harus ditambah dengan membeli hulu dua, masing-masing bernilai 30 rial, yaitu total 60 rial,
5. Pembagian hulu itu ialah satu untuk perwatin dan satu hulu untuk punyimbang bersangkutan, dan semua biaya hajatan dan biaya adat lainnya menjadi tanggungan punyimbang bersangkutan (Hadikusuma, 1986: 58).

Kearifan seorang punyimbang juga diukur dari sejauh mana punyimbang menimbang seseorang yang ada diluar komunitas adatnya, dan mengajukan diri untuk dapat diterima sebagai warga masyarakat adat punyimbang yang bersangkutan. Maka setiap punyimbang wajib memutuskan dengan mempertimbangkan aturan adat sebagaimana tercantum dalam kitab Kuntara Raja Niti pasal 175 tentang masuk seseorang menjadi warga adat, dengan ketentuan antara lain:

1. Jika ada orang entah darimana asal usulnya akan masuk menjadi warga adat guna bercampur gaul menurut taat tertib adat pepadun, maka yang pertama harus dilakukannya adalah memperkenalkan diri kepada para punyimbang;
2. Syarat memperkenalkan diri ialah membawa biaya sebesar 80 rial. Kemudian untuk berjabat tangan dengan para punyimbang 100 rial, untuk setiap kamar rumah punyimbang yaitu masing-masing tiga kamar, 3 x 24 rial;
3. Biaya untuk perwatin adalah 3 x 50 rial ditambah 3 kerbau atau senilai 60 rial. Kemudian boleh saja ditambah dengan tanda kasih sayang pendatang baru kepada para hadirin;
4. Kemudian mengenai kedudukan rumah tangga diserahkan penilaiannya kepada punyimbang sendiri (Hadikusuma, 1986: 60).

Seiring perkembangan zaman, masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan *Kepunyimbangan* mengalami perubahan dan penyesuaian. Pada saat ini, fungsi dan peranan para punyimbang hanya terbatas pada hubungan kekerabatan. Pun demikian pada struktur pemerintahan dalam setiap jenjang kewargaan adat dapat berubah baik dari yang jenjang rendah menjadi jenjang yang lebih tinggi atau sebaliknya. Perubahan ini juga tentunya melalui prosesi upacara adat, dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan masyarakat adat seperti pemotongan kerbau dll. Gambaran masyarakat adat pepadun ini dapat kita temukan juga pada masyarakat adat di *Bodi Chaniago* di Minangkabau.

## **2.6 Hasil Bumi Tanah Lampung**

Wilayah Lampung banyak menghasilkan hasil bumi yang sebagian besar diperoleh dari memanfaatkan hutan sebagai lingkungan hidup masyarakat Lampung pada masanya. Hasil bumi itu antara lain: Beras, Rotan, Kapas, Damar dan Lada.

### **2.6.1 Beras**

Cara menanam padi nasional yang tepat adalah sebagai berikut; orang-orang keluar dari hutan, membiarkan kayu itu mengering, setelah itu membakarnya, dan akhirnya menabur dan menuai padi di tanah kering, di tempat yang sebelumnya ditutupi dengan pohon. Masyarakat Jawa menyebut budidaya padi dengan sebutan sawah tetapi di Lampung dikenal dengan istilah “ladang”. Budidaya padi semacam ini menghadirkan banyak kesulitan bagi masyarakat, karena masyarakat tidak ada dalam budaya oleh sawas.

Di seluruh wilayah Lampung proses pengolahan pada menjadi beras sebagai makanan pokok dilakukan dengan cara beras melepaskannya dari kulitnya. Hal ini dilakukan oleh para wanita, dan dilakukan oleh dua orang dan di antaranya menempatkan diri mereka berseberangan di batang kayu, yang memiliki lubang di tengah panjangnya. Berdasarkan hasil penelitian Zoolinger dikatakan bahwa hanya ada satu tempat penggilingan padi milik Bupati di Teluk Betung, yang didatangkan dari Bugis (Zoolinger, 1847: 634).

### **2.6.2 Lada Lampung**

Dimasa kejayaannya, lada merupakan bahan rempah yang dicari dan sangat diminati oleh masyarakat kulit putih di Benua Eropa, dan pedagang Cina hingga Arab, sehingga mereka rela jauh-jauh melakukan pelayaran ke kawasan penghasil lada di Nusantara. Lada yang dikeluarkan dari Pelabuhan Banten selain dihasilkan dari perkebunan di Banten sendiri, juga diproduksi di perkebunan lada di wilayah kekuasaan Banten di Pulau Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Bengkulu (Soedewo, 2007: 20). Lada di wilayah ini menghasilkan dua jenis lada, yakni lada hitam dan lada putih yang dihasilkan di daerah Tulang Bawang.

Lada yang telah membuat Lampung menjalin hubungan dengan daerah lainnya di Nusantara dan menarik para penguasa untuk datang serta menguasai wilayah ini. Lada Lampung yang dikenal dengan lada hitam ini sudah diekspor ke berbagai negara sejak abad ke-16. Untuk itu peneliti perlu mengkaji bagaimana kondisi Lampung pada abad ke-16. Hal ini dilakukan untuk mengkaji perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam perkebunan dan perdagangan lada dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi Lampung pada abad ke-16 juga akan menjawab mengapa banyak wilayah berupaya untuk menguasai produksi lada di Lampung.

Hingga kini, lada masih menjadi simbol daerah Lampung dalam bentuk logo pemerintah daerah Lampung, yakni daun dan buah lada. Daun Lada berjumlah 17, dan buah lada berjumlah delapan sedangkan biji lada berjumlah 64 menggambarkan terbentuknya provinsi Lampung pada tahun 1964.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A.C. 2012. Pemertahanan Bahasa Ibu: Kasus Bahasa Sunda. Dalam Pokoknya Rekayasa Literasi. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI bekerjasama dengan Kiblat.
- Arifin, Zainul Dkk. 1985. *Ragam dan Dialek Bahasa Lampung*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Arsandi, D. 2013. *Menggalakkan Bahasa lampung di Lingkungan Kampus*. (www.academia.edu.)
- Davison, G. dan C Mc Conville. 1991. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Galla, A. 2001. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*. Brisbane: Hall and Jones Advertising.
- Kamus Bahasa Lampung Online. (<http://kamus.lampung.cc>.)
- Katubi, O. 2006. *Sikap Penutur Jati Bahasa Lampung*. Pusat Penelitian dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. (sastra.um.ac.id)
- Katubi, O. 2007. *Lampungic Languages: Looking for New Evidence of Language Shift in Lampung and the Question of Its Reversal*. *Studies in Philippine Languages and Cultures* Vol. 16, 1-10.
- Kaplan, R.B. and Baldauf-Jr, R. 1997. *Language Planning: From Practice to Theory*. Sydney: Multilingual Matters Ltd.
- Mok, A., Chow, A., Wong, W. 2006. Strengthening Language Arts in English Language Teaching in Hongkong. In Penny McKay (Ed). 2006. *Planning and*

*Teaching Creatively within a Required Curriculum for School-Age Learners.* Virginia: TESOL, Inc.

Mbete, A.M. 2010. *Strategi Pemertahanan Bahasa-Bahasa Nusantara.* Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara.

*Monografi Daerah lampung.* 1976. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Pudjiastuti, Susi. 1997. *Aksara dan Naskah Lampung Kuno dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kini.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

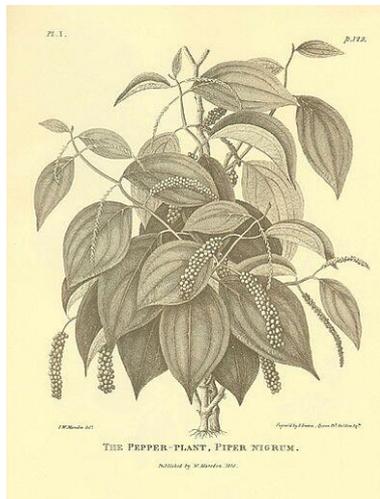
Putra, K.A. 2013. *Revitalisasi Bahasa Lampung.* *Lampung Post*, 13 Februari 2013.

Zoolinger, H. 1847. *The Lampongsch. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* 5 (1851).

## BAB III LADA LAMPUNG

### 3.1 Lada

Lada rempah atau merica yang dimanfaatkan untuk kegunaan sehari-hari berasal dari tumbuhan bernama latin *Piper nigrum* L. Budidaya lada yang biasa dilakukan adalah dengan stek, satu atau dua kaki panjangnya, dari tunas horizontal yang membentang di sepanjang tanah dari kaki dari tanaman merambat tua (disebut lado sulur). Lada hitam (*paper nigrum*) yang di hasilkan di Sumatera bagian selatan khususnya Lampung, daerah Jawa Barat dan kemudian juga Kalimantan Selatan, sesungguhnya bukan tanaman asli Nusantara. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari daerah Ghat Barat, India. Kemudian tersebar ke berbagai tempat di Afrika, Asia, dan Amerika.



Sumber: Marsden, *Histori is Sumatra*

Pulau Sumatera merupakan tanah yang subur dan menyenangkan yang dilmpahi oleh banyak jenis buah-buahan langka dan enak. Tanaman pokok yang mereka miliki hanya padi, dengan pengolahan lahan pertanian menggunakan kerbau yang banyak dijumpai disana untuk membajak tanah (Reid, 2014: 31). Popularitas lada sebagai bumbu masakan dan tanaman obat yang berkhasiat menyebabkan harganya melambung.

Rempah yang dijuluki *King of Spices* ini pun menjadi salah satu komoditas yang diburu oleh penjelajah Eropa. Bahkan Turner (2019: 51) mengungkapkan bahwa Pesta ramalan di Woodstock di kerajaan Skotlandia menggunakan banyak sekali rempah-rempah (lada, kayu manis, cengkih, pala dan jahe) dalam hidangan dan jamuan pesta yang diselenggarakan tahun 1256. Bahkan setiap jamuan pesta yang dilakukan tanpa melibatkan rempah akan membuat tuan rumah merasa gagal dan terhina. Seperti yang kita ketahui, perburuan rempah-rempah oleh bangsa Eropa tersebut lantas berujung pada kolonialisme, perburuhan dan monopoli perdagangan rempah.

Dari tempat asalnya itu tanaman komersial ini menjalar ke seluruh pantai Timur India, dan diperkirakan mulai abad ke-12 Lada Hitam telah mulai ditanam di Sumatera hingga sampai di Lampung. Sejak komoditas lada telah menjadi bagian komoditi ekspor yang penting, terutama sejak

tampilnya Kerajaan Pasai dan kemudian Malaka hingga Banten. Lada diperkirakan telah diekspor dari Pasai adalah sekitar 1400-1800 ton, yaitu separuh yang dihasilkan dari Malabar (Leirissa, 1995: 34). Sejak tahun 1400 penanaman lada melintas pesat di Nusantara (demikian pun di Malabar). Penanaman ini pun terus meluas hingga mencakup daerah Aceh, Minangkabau, Jambi, Lampung dan daerah lain di semenanjung Sumatera.

Pada mulanya lada memang ekspor dari Malabar melebihi dari Nusantara, tetapi sejak orang-orang Eropa menemukan jalan laut melalui Afrika Selatan, maka sejak pertengahan abad ke-17 produksi lada dari Nusantara meningkat melebihi produksi dari India, terutama karena diperebutkan oleh Inggris, Belanda, dan Cina (Reid 1993: 7-10). Peningkatan produksi ini tak lain karena adanya usaha budidaya lada baik yang diupayakan oleh Kerajaan Aceh, Palembang, Banten hingga Inggris dan Belanda.

Kedatangan bangsa Eropa, Arab, India dan Cina ke Nusantara pada awalnya memiliki tujuan untuk mencari daerah asal penghasil komoditas rempah berada. Para saudagar kemudian membeli banyak rempah seperti lada, cengkih, pala dan kapas, untuk diperdagangkan di pasaran dunia. Bumi Nusantara dengan berbagai keelokan dan sumber daya alam yang begitu kaya memberikan sebuah

fantasi dan janji keuntungan berlipat ganda dalam perdagangannya. Dengan potensi yang demikian besarnya menyebabkan hasrat pedagang Asing tidak hanya untuk berniaga, namun lebih jauh berkeinginan untuk menguasai Nusantara. Berdagang tidak lagi menjadi fokus utama, tetapi mereka lebih fokus untuk memutuskan perhatian untuk melakukan berbagai upaya penguasaan dan monopoli atas setiap daerah yang mereka kunjungi selama proses perdagangan.



**Daerah Perkebunan Lada di Indonesia**  
 Sumber: wacana.co.id

Pada masa kejayaannya, lada merupakan komoditas panas di benua Biru, dan merupakan bahan rempah yang sangat diminati, sehingga para pedagang asing berdatangan ke kawasan penghasil lada di Nusantara. Lada banyak

diperjualbelikan di Pelabuhan Banten selain diproduksi dari budidaya lada pada perkebunan di Banten, juga banyak dihasilkan di perkebunan lada di mana kekuasaan Banten telah mencapainya di Pulau Sumatera seperti daerah Lampung, Silebar di Bengkulu, dan Palembang (Soedewo, 2007: 20). Banten dalam mengendalikan kekuasaannya tidak langsung memerintah, terlebih wilayah ini tidak berbatasan darat langsung sehingga kontrol terhadapnya relatif terbatas.

Tata niaga perdagangan lada di Lampung semakin berkembang ketika banyak pedagang dari Cina tidak lagi menunggu kedatangan petani lada di pasar dan pelabuhan, tetapi langsung menuju ke kebun lada yang terdapat di pedalaman Sumatera, bahkan beberapa perahu dari Cina langsung melakukan transaksi perdagangan di Menggala, Lampung. Dalam catatan perjalanannya Pires menyebutkan ada beberapa wilayah di Lampung yang sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Jawa dan Sunda yaitu negeri Sekampung dan negeri Tulangbawang (Pires, 2014: 223).

Lada yang telah menyebabkan penduduk Lampung menjalin hubungan dengan daerah lainnya di Nusantara dan menarik para penguasa untuk datang serta menguasai wilayah ini. Lada Lampung yang dikenal dengan lada hitam ini sudah diekspor ke berbagai negara sejak abad ke-16. Untuk itu peneliti perlu mengkaji bagaimana kondisi Lampung pada abad ke-16. Hal ini

dilakukan untuk mengkaji perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam perkebunan dan perdagangan lada dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi Lampung pada abad ke-16 juga akan menjawab mengapa banyak wilayah berupaya untuk menguasai produksi lada di Lampung.

Kegunaan lada pada zaman keemasan perdagangan lada tidak hanya untuk perasa dan penambah rasa pada makanan tetapi juga berfungsi sebagai simbol status seseorang. Di Eropa pada abad pertengahan digunakan sebagai pelengkap jamuan makan bangsawan eropa dengan cara menaburkan lada pada makanan akan menunjukkan status seseorang. Lada di benua Afrika khususnya Mesir Kuno, lada hitam digunakan sebagai salah satu bahan pelengkap dalam proses pembalseman atau pengawetan mayat (Arman, 2017: 22)

### **3.2 Jenis Lada**

Lada Lampung merupakan salah satu jenis atau varian lada di Sumatera pada abad XVI sampai XX. Secara umumnya masyarakat Sumatera, membagi lada menjadi tiga jenis dengan nama yang berbeda-beda pada tiap wilayah. Di Laya, Kerajaan Rejang mereka menyebutnya dengan nama *Lado Kawur*, *Lado Manna*, dan *Lado Jambi* dimana nama-nama lada tersebut diambil dari tempat dimana lada pertama kali dibawa (Marsden, 1811: 212).

Lada (merica) ditanah Lampung terbagi menjadi 2 jenis lada, yaitu merica Cenging dan merica Jambi (Broersma, 1915: 173). Kedua jenis lada ini memiliki biji yang lebih besar dan, deposan diperoleh dengan menempatkan cabang muda sedemikian rupa sehingga bagian atas berada di luar setelah beberapa minggu, cabang itu berakar dan potongannya dipotong dari batangnya.

Lada Lampung dikenal dengan istilah lada kawur, jenis lada Lampung merupakan yang terkuat daripada jenis lada manna dan lada Jambi dengan ukuran buah dan daun yang paling besar. Lada Lampung meskipun fase perkembangan dan pertumbuhan lada lebih lambat daripada kedua jenis lada yang lain. Secara umum, wilayah Lampung memiliki beberapa jenis lada, yaitu lada hitam di sebagian besar wilayah Lampung dan jenis lada putih yang dihasilkan di daerah Tulang Bawang pada masanya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

### **3.2.1 Lada Hitam**

Lada hitam paling terkenal dan banyak digunakan di Amerika Serikat. Rempah berwarna hitam ini dibuat dari buah lada matang tapi tidak terlalu matang, yakni buah lada berwarna hijau yang sudah mulai berubah menjadi kuning. Setelah dipetik, buah ini direbus sebentar, kemudian dilakukan proses fermentasi untuk selanjutnya dikeringkan melalui proses

alamiah dengan dijemur langsung di bawah sinar matahari (atau dengan pemanasan dengan udara panas) sampai buah lada menjdai keriput dan menghitam.

Lada hitam memiliki rasa yang panas, pedas, dan aromatik. Pada masa kejayaan kerajaan Mesir, lada ini biasa digunakan untuk membantu proses pengawetan mumi, sedangkan di daratan Eropa lada digunakan sebagai penyedap rasa.

### **3.2.2 Lada Putih**

Selama berabad-abad, lada putih di Eropa dianggap berasal dari tanaman lain dengan kualitas paling tinggi dibandingkan dengan lada hitam pada umumnya. Hal ini terlihat dari kenampakan dan perbedaan warna, dan tentunya anggapan bahwa warna putih selalu lebih unggul dari lada hitam. Lada ini dijual memiliki nilai jual dan harga yang mengungguli daripada jenis lada yang lain (Marsden, 1811: 203).

Lada putih adalah jenis lada yang sudah matang dan bagian kulit luarnya sudah hilang terkelupas. Cara umum yang biasa dilakukan untuk menghilangkan seluruh kulit luar lada ini adalah dengan merendamnya dengan air selama beberapa hari di dalam keranjang, baik pada air yang mengalir maupun dalam air yang tidak mengalir. Terkadang lada ini hanya dikubur dalam tanah selama beberapa hari, kemudian setelah direndam selama 7-10 hari kulitnya akan pecah dengan sendirinya, lada digosok kulit luarnya hingga benar-benar

terkelupas. Kemudian lada dikeringkan dengan cara digosok-gosok menggunakan tangan, dan selanjutnya dijemur dibawah terik matahari, dan terakhir di tampi untuk memisahkan lada dengan kulit luarnya yang tersisa. Wilayah Lampung yang banyak menghasilkan jenis lada putih yakni daerah Tulang Bawang.

Produksi kedua jenis lada ini, sampai tahun 1913-1936 mencapai 60-90% dari produksi lada di Indonesia, dan dengan produksi sebanyak itu, Indonesia menempati negara pengekspor lada dengan kontribusi sebesar 58,33% produksi lada dunia (Fadillah, 1989: 261). Jenis lada ini, pada abad ke XVII dihargai dengan harga seperempat dolar (15 peni) tiap galon bambu yang beratnya sekitar 6 pon. Ketika sudah sampai di daratan Eropa, harganya dalam kisaran 10 hingga 11 dolar (Marsden, 1811: 2052).

Lada putih memiliki aroma sederhana dan rasa pedas yang tidak tajam. Bumbu masakan satu itu umumnya digunakan untuk membuat saus, sup, kentang, dan minuman. Lada putih populer digunakan dalam masakan Eropa mengalahkan lada hitam.

### **3.3 Lada Lampung (*Lampung Black Papper*)**

Sistem penanaman lada di Lampung sebagian besar masih dilakukan secara kultur ekstensif pada masanya. Lahan yang

akan dijadikan budidaya lada atau lahan garapan merupakan hasil pemilihan atas hutan sekunder dan atau bekas hutan primer yang telah dibuka dan diolah menjadi perladangan dan layak untuk penanaman. Tanaman lada umumnya dapat tumbuh secara optimal pada tanah yang tidak terlalu kering dengan musim hujan yang lebih panjang daripada musim kemarau, meskipun demikian lada amat peka terhadap genangan air dalam tanah.

Budidaya lada di wilayah Lampung tersebar diberbagai lokasi mulai dari kawasan timur, utara, dan barat hingga selatan daerah Lampung, seperti daerah Sekampung dan Sukadana di Lampung Timur, Katimbang di Kalianda Lampung Selatan, Tulang Bawang di Utara, daerah Semangka, Tanggamus dan Teluk Betung. Luas lahan budidaya lada di Lampung dapat dipaparkan dengan merujuk pada artikel yang telah dibukukan sebagai panduan pelaksanaan budidaya lada dengan judul *De Pepercultuur in de Buitenbezittingen*.

Banyak keterangan yang sangat membantu terkait dengan budidaya lada di Hindia Belanda. Buku ini juga memaparkan tentang wilayah persebaran dan luas lahan budidaya lada yang digunakan di daerah Lampung hingga tahun 1912 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 3.1 Luas Lahan Budidaya Lampung tahun 1912

No	Nama Daerah	Luas Garapan	
		Dalam bau	Konversi dalam hektar
1	Sekampung	± 2400	1680
2	Seputih	± 2300	1610
3	Semangka	± 940	658
4	Teluk Betung	± 900	630
5	Tulang Bawang	± 800	560
6	Katimbang	± 50	35
Total		± 7390	5173

Dari luasnya ini, 1.470 bau telah ditanam dengan cabang muda yang belum berbuah, sehingga sekitar 5.920 dapat dianggap produktif. Tingkat ekspansi perkebunan dalam dua tahun ke depan tidak dapat diturunkan ke angka yang tepat. Untuk tujuan ini, terlalu banyak faktor variabel (harga produk, penyakit di antara populasi, dll). Harus diperhitungkan. Ketika menanam pada cabang muda 1470 yang disebutkan di atas, kebun-kebun tua atau kebun-kebun yang menghasilkan tanaman yang tidak mencukupi dan karenanya ditinggalkan, kita juga harus menghapus.

Kesultanan Banten memiliki andil besar dalam budidaya lada pada masyarakat Lampung. Angka produksi hasil budidaya lada di Lampung juga sangat fluktuatif, namun pada

dasawarsa pertama abad XX, panen lada Lampung tahun 1911 diperkirakan mencapai 180.000 pikol, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang tidak terlalu baik bahkan cenderung buruk maka produksi lada diperkirakan hanya 130.000 pikol.

Mengingat semua ini, tidak mungkin untuk memperkirakan produksi untuk dua tahun ke depan, terutama mengingat harga mahal lada saat itu. Keadaan terakhir menyebabkan pekebun lebih memperhatikan kebun yang berproduksi rendah dan lebih memperhatikan pemeliharaan, sehingga ini juga tidak akan tetap tanpa pengaruh pada angka produksi.

Agar lebih memudahkan memahami budidaya Lampung, berikut disajikan data proses penanaman dan budidaya lada dengan data yang bersumber dari buku *De Pepercultuur in de Buitenbezittingen* sebagai berikut.

#### **a. Lokasi dan Metode Budidaya lada**

Ketika memilih lokasi untuk budidaya dan pembangunan kebun lada, di wilayah Lampung cukup hanya dengan memperhatikan jenis tanah. Di daerah Katimbang Lampung Selatan, bahkan setiap bagian dari tanah yang tidak berbatu dan dapat diolah dianggap cocok untuk budaya ini. Kondisi dan kualitas tanah yang dianjurkan dan baik bagi tanaman lada ialah tanah liat berwarna merah dan cenderung berwarna gelap yang terbentuk dari proses panjang batuan vulkanik muda,

tanah jenis ini amat mendukung produktifitas tanaman lada dan sangat mudah ditemukan di Lampung.

Ketika wilayah Lampung masih banyak lahan berupa hutan belantara dengan sistem perladangan berpindah-pindah, menyebabkan kesuburan tanah senantiasa terjaga. Untuk jenis tanah liat yang lain seperti tanah dengan tekstur terang dan agak kekuningan dapat juga digunakan untuk budidaya, namun umumnya berpengaruh pada masa hidup dan produktifitas dari tanaman lada yang hanya dapat bertahan hidup dengan perkiraan maksimal di usia 15 tahun sejak penanaman.

Ketinggian ideal untuk tanaman lada ialah berada diantara dataran tinggi dan rendah sekitar 600 mdpl. Pada topografi yang landai, tanaman lada dapat tumbuh secara maksimal, jika lokasi yang dipilih lebih tinggi dari ketinggian idealnya maka tanaman lada tidak akan tumbuh dengan maksimal atau subur. Kondisi ini tampaknya didukung oleh kondisi topografis wilayah Lampung yang berbukit-bukit baik keberadaan Bukit Barisan yang membentang di selatan dan barat, serta dataran rendah yang berawa-rawa di sebelah timur wilayah Lampung. Dari perbukitan ini, mengalir sungai-sungai besar seperti Way seputih, Way Sekampung, Way Mesuji, dan Way Tulang Bawang beserta anak-anak sungainya ke arah timur (Hadikusuma, 1977: 13-14).

Seperti yang sudah dikatakan diatas, tanah yang akan dijadikan kebun lada melalui proses waktu yang panjang, kegiatan ini diawali dengan membuka hutan belantara di Lampung, setelah hutannya dibuka tahap selanjutnya adalah menanam padi terlebih dahulu, setelah padi ditanam, tahap selanjutnya adalah menanam kayu yang akan dijadikan penopang lada. Hal ini dilakukan karena lada adalah tanaman rambat seperti halnya tanaman sirih. Adapun tanaman yang umumnya digunakan sebagai penopang tanaman lada diantaranya adalah pohon dadap, kelor atau randu (Broersma, 1916: 172). Ketiga jenis tanaman tersebut dipilih karena umumnya tanaman yang tegak dan lurus pertumbuhan batangnya, kayu penopang tersebut harus rutin dipangkas rantingnya.

Kebun-kebun petani banyak ditanami tanaman lada dengan luas masing-masing satu mil persegi yang ditanam dari sebuah akar atau hasil stek lada. Tanaman lada tersebut diikat kesebuah pancang sampai tanaman lada tumbuh besar menjadi pohon berdaun lebat. Proses penanaman lada dilakukan secara teratur dan berbaris dengan jarak antar baris antara 2 hingga 3 meter.

Adapun jarak batang penopang ada satu depa (1,7 m). Pemberian jarak ini dimaksudkan untuk memudahkan perawatan hingga proses panen, selain tentunya agar tanaman

lada dapat tumbuh secara optimal dengan hasil yang maksimal. Dalam satu kebun paling banyak ditemukan terdapat 9 baris, dengan setiap baris berisi 37 batang. Jadi apabila kita hitung tanaman lada untuk setiap bau, maka dalam sebau terdapat 1000 batang lada (Broersma, 1916: 172).

### **b. Penanaman Lada dan Pemeliharaan lahan**

Penggunaan lahan dalam budidaya tanaman lada umumnya dapat dengan mudah dijumpai pada dasawarsan ketiga abad ke XVII, hal ini karena setiap penduduk kampung dapat mengolah sebidang tanah karena tanah dimaknai sebagai milik bersama dalam kelompok kebuayan. Jika seorang penduduk kampung lain benar-benar ingin membudidayakan tanah untuk jenis lada yang bukan milik kampungnya, sudah lazim untuk mengajukan izin terlebih dahulu dari kepala kampung di mana yurisdiksinya terletak pada tanah yang diinginkan. Permintaan seperti itu kadang-kadang disertai dengan persembahan berupa hadiah kecil yang terdiri dari beberapa jenis persembahan seperti ayam dan beras, atau sepotong kapas (Broersma, 1916: 58; De Pepercultuur, 83).

Jika tanah telah diolah oleh seseorang, dan pengolahan sebidang tanah menjadi hak miliknya dan jika dia meninggalkannya untuk sementara waktu, maka orang lain tidak dapat menggunakan tanah itu tanpa seizinnya. Tanda paten sederhana bahwa tanah ini sudah ada yang memiliki seperti potongan/sayatan kecil di pohon adalah bukti bahwa

tanah tersebut telah digunakan. Durasi hak eksploitasi yang dimaksud sangat berbeda dan tergantung pada kebiasaan setempat, bahkan hak ini turun temurun. Namun, pengguna lahan biasanya kehilangan haknya setelah 25 hingga 30 tahun setelah percobaan pembukaan lahan.



Pemasangan tegakan hidup sebagai penopang tanaman lada (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 104)

Setelah petani Lampung menemukan lokasi yang cocok untuk taman, ia akan mulai menebang pohon, membuka dan membuatnya cocok untuk ladang padi. Penduduk Lampung dengan senang hati menyerahkan hasil panen kepada para pekerja sewaan, yang pembayarannya dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa orang membayar dengan bagian dari panen, seperlima hingga setengahnya. Biaya yang harus

dikeluarkan untuk proses persiapan penanaman (memotong dan membakar) sebanyak  $f$  35 dan pengerjaannya dilakukan oleh para buruh.

Tahap selanjutnya dalam proses budidaya lada adalah stek lada ditanam di tanah yang disebut masih perawan. Ini hanya terjadi setelah beberapa kali panen padi. Setelah panen padi pertama, kadang-kadang bahkan ketika padi belum ditebang, penanam mulai memperluas stek untuk pohon pendukung. Adapun batang penopang kira-kira setinggi orang dewasa baru kemudian bibit lada ditanam, umumnya yang digunakan untuk bibit kebanyakan adalah hasil cangkokan/stek.

Proses membuat cangkokan lada ialah sebagai berikut, ranting yang cukup tuanya dirundukkan kebawah, ruas-ruasnya ditanam dalam tanah, tetapi pucuknya ditinggal (Marsden, 2016: 177). Kurang lebih dua atau tiga minggu ruas yang terpendam tadi mengeluarkan akarnya. Jika akarnya sudah terlihat panjang kemudian dipotong rantingnya. Ada juga yang penanamannya menggunakan bibit Turus Carang, yaitu ranting yang dipotong dari batang tanpa dipendam terlebih dahulu, jika ranting yang akan digunakan untuk bibit penanamannya bersamaan dengan kayu penopangnya.

Menurut pengalaman dan diceritakan turun-temurun, tanaman yang menggunakan bibit cangkokan itu selama 3 tahun sudah berbuah, jika bibitnya berasal dari tunas muda, maka

permulaan berbuahnya diperkirakan jika tanaman sudah berumur 6 tahun. Memang tanaman menjadi lebih lebat, tapi kabarnya lebih awet daripada tanaman yang cangkokan.

Lada (merica) ditanah Lampung terbagi menjadi 2 jenis lada, yaitu merica Cenging dan merica Jambi (Broersma, 1915: 173). Kedua jenis lada ini memiliki biji yang lebih besar dan, deposan diperoleh dengan menempatkan cabang muda sedemikian rupa sehingga bagian atas berada di luar setelah beberapa minggu, cabang itu berakar dan potongannya dipotong dari batangnya. Stek dengan cara seperti ini dijual dipasaran harganya mencapai 2 atau 3 gulden per seratus batangnya. Dari stek inilah kemudian diperoleh hasil buah lada dan dipanen setelah buah sepenuhnya telah matang.

Penanaman lada membutuhkan penopang tanaman agar tumbuh kembang tanaman ini tegak keatas, lebih kokoh dan mudah mendapatkan akses cahaya matahari agar tumbuh maksimal. Petani lada umumnya menggunakan dua jenis tegakan, yaitu tegakan mati dan tegakan hidup.

Tegakan mati banyak digunakan diwilayah budidaya lada seperti di Bangka, dan Kalimantan dengan menggunakan batang dari tanaman jenis tertentu seperti kayu besi (*Acacia oraria Von Muel*), melangir (*Shoren balangeran Burcle*), mendaru (*Urandra cormculata Foxn*), gelam (*Melaleuca leucodendron Linn*), seru (*Shima baucana Miq*), dan pelawan

(*Tristania maingayi Duthie*) (Yudianto, 2015: 77). Budidaya lada di daerah Lampung sendiri banyak menggunakan tegakan hidup seperti di wilayah Palembang dan memilih jenis pohon yang sama seperti pohon dadap duri (*Erythrina Sumbumdra*), kadang dadap minyak tanpa duri (*Erythrina Indica*), pohon randu atau kapok (*Ceiba Petandra*) dan Gamal (*Gleseria sepium*).

Pelaksanaan pemasangan tegakan hidup dilakukan oleh para buruh dengan upah sebesar  $f$  13,50 untuk setiap hektare tanaman lada. Biaya ini belum termasuk pembelian batang dadap yang akan ditanam sebagai tegakan hidup tanaman lada yang dapat mencapai  $f$  13,50 untuk setiap hektare tanaman lada. Tegakan hidup berfungsi untuk menghambat tumbuhnya percabangan lada sehingga tidak terlalu membutuhkan rutinitas pemangkasan sulur lada, selain itu tegakan hidup juga berfungsi sebagai naungan pada masa awal budidaya lada.

Umumnya penduduk Lampung lebih menyukai tegakan hidup dari jenis dadap duri (*Erythrina Sumbumdra*), karena jenis tanaman ini lebih kuat dari tanaman yang lain. Jika penanam berniat untuk memperluas potongan lada pada saat yang sama dengan pohon pendukung, yang jarang terjadi, maka ia menggunakan potongan dadap dengan panjang kira-kira 1,70 M. Namun, biasanya menjadi lebih muda dan lebih pendek potong stek lada dan biarkan tumbuh selama 11 tahun sebelum

mematikan stek lada; selama waktu itu tanah digunakan untuk penanaman padi.

Stek lada ditanam dalam barisan dengan jarak dan ruang bersama antara 2,50 dan 3,50 M. Sebuah kebiasaan yang umum dilakukan menyiratkan bahwa sebuah perkebunan lada terdiri dari sembilan baris 37 atau 333 pohon, kebun yang lebih besar berisi kelipatan jumlah pohon pendukung ini. Jadi, rata-rata penanaman tanaman penopang ini memiliki 1000 dukungan tegakan pohon dadap.



Jonge peperplanten geleid tegen de definitieve steunpalen.

Tanaman Lada yang mulai merambat pada tanaman penopang (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 105)

Stek lada umumnya diperoleh di pasaran (cangkokan), jenis pemotongan lainnya adalah lanak atau tander sementara jenis ketiga disebut sulur. Stek diperoleh dengan cara berikut. Dari

tanaman lada berumur satu atau dua tahun, salah satu sulurnya ditekuk ke bawah dan diletakkan sedemikian rupa di parit yang menjorok ke luar tanah. Bagian yang berada di bawah tanah telah diremukkan dengan cara sedikit dibengkokkan. Setelah 20 hingga 30 hari, cabang ini telah berakar dan hasil pemotongan (markot) terputus dari batang sebenarnya. Harga per 100 item stek lada bervariasi antara  $f 2$  hingga  $f 3$ , ini belum termasuk biaya pengemasan stek lada yang mencapai  $f 1$  per bibit lada.

Tander atau lanak adalah cabang muda yang telah melekat pada pohon dengan akarnya sendiri. Tunas dipotong sepanjang 2 atau 3 bagian dan akarnya terlepas dari pohon pendukung. Jika stek semacam itu ditanam di musim timur, bagian yang akan dimasukkan ke dalam tanah diletakkan di dalam air selama lima atau enam hari sebelumnya. Tindakan pencegahan ini akan berlebihan jika penanaman dilakukan di musim barat.

Sulur diperoleh dengan memotong cabang-cabang induk muda dari bagian-bagian tanaman merica dan menempelkan diri pada pohon pendukung dengan akar, dengan satu atau dua akar dari induknya. Stek ini juga harus direndam selama lima hari dengan bagian akar di dalam air sebelum ditanam. Sulur umumnya dianggap lebih rendah; pendapat dibagi pada nilai dua jenis stek pertama. Para peneliti mengklaim bahwa markot lebih disukai karena mengeluarkan yang terbaik,

menurut pendapat mereka, tanaman merambat yang lebih kuat, yang mempertahankan kapasitas produktif mereka lebih lama (15-18 tahun). Yang terakhir memang mengakui bahwa markot sudah berbuah setelah 4 tahun, sedangkan lanak hanya dimulai pada usia 6, tetapi di sisi lain diasumsikan bahwa markot berhenti memproduksi setelah 12 tahun.

Penggunaan jaringan pengairan ataupun pipa air tidak ditemukan atau lebih tepatnya tidak diketahui dan dikenal dalam budidaya lada di wilayah Lampung. Keadaan ini dipilih sedemikian rupa sehingga drainase alami terjadi, karena umumnya lada ditanam di daerah pegunungan dengan kemiringan antara 15-30. Stek lada ditempatkan pada jarak beberapa meter dari sisi tajur tegak tanaman dadap sebagai penopang dan merentang sedalam beberapa jari.

Tanaman yang dipelihara orang tersebut tidak banyak yang bebas dari penyakit. Demikian juga dengan merica. Adapun penyakit merica yang berbahaya adalah penyakit layu daun. Wujudnya seperti padi yang terkena penyakit wereng. Batangnya mengerut, daunnya layu kemudian mati. Penyakit tadi disebabkan oleh cacing tanah didalam tanah. Yang dirusak akar dan pangkal tanaman sampai yang busuk. Disebabkan dari penyakit pembusukan. Banyak kebun merica di Kalianda yang mati. Selain penyakit kebun merica itu juga termasuk kutu loncat datangnya bergerombolan pada malam

hari. Mencabut penopang dengan cara menginjak-injak tanaman dengan kaki. Seandainya kemasukan kutu loncat begitu kebun merica akan mengalami kerusakan



Petani lada diantara rerimbunan pohon tanaman lada (Sumatraantjes, Reisbrieven van H.C Zentgraaff en W.A Van Goudoever, hal. 17)

Para pemilik kebun menanam lada mulai dalam skala kecil hingga besar tergantung pada kemampuan petani lada. Skala kecil umumnya dilakukan oleh petani yang hanya mengandalkan tenaga kerja dari keluarganya biasanya menanam 333 hingga 1000 sulur, dan kemudian dibantu oleh keluarganya dalam pengolahan, perawatan hingga proses panen. Dengan pengecualian tertentu, pengolahan lada setelah lahan siap ditanam menggunakan tenaga kerja yang di sewa, dengan kata lain menggunakan buruh kontrak.

Buruh yang bekerja pada perkebunan lada akan berbeda dengan buruh yang bekerja pada sektor lain seperti pertambangan. Buruh lada digunakan ketika proses pembangunan kebun lada, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, pemasangan tanaman penopang. Dalam hal ini buruh selalu didatangkan dari wilayah Banten. Selalu ada banyak pertimbangan mengapa para pekerja asal Banten yang digunakan, selain tentunya ketersediaan tenaga kerja yang memadai, aspek kedekatan geografis pun nampaknya cukup mampu untuk dikedepankan dalam mendukung gagasan ini.

Proses budidaya lada di Lampung sejak mulai penanaman, pemeliharaan dan panen hingga proses pengolahan hasil lada dalam budidaya skala kecil dilakukan oleh setiap kepala keluarga beserta keluarganya. Sangat jarang dijumpai masyarakat Lampung dalam proses penanaman dengan

jumlah tanam yang lebih besar segera ditanam tanpa dilakukan persiapan dengan penyediaan buruh lada yang cukup, sehingga diperlukan modal tambahan untuk pengerjaan budidaya lada ini untuk mendatangkan para pekerja atau buruh. Besaran biaya yang harus disiapkan oleh petani lada untuk budidaya lada beserta upah tenaga kerja di Lampung ialah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pengeluaran selama Budidaya Lada

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya
1.	Upah menanam tanaman penopang	<i>f</i> 13,50
2.	Upah pengemasan stek lada	<i>f</i> 13,50
3.	Upah pemeliharaan selama empat tahun pertama (160 hari dengan upah <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 120
4.	Upah pemeliharaan selama empat tahun kedua (120 hari dengan upah <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 90
5.	Upah pemeliharaan lainnya (100 hari dengan upah <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 75.-
6.	Upah pemangkasan dadap, 6 kali	<i>f</i> 81.

Sumber: De Pepercultuur in de Buitenbezzittingen, hal. 37

### c. Pekerjaan setelah masa tanam

Kebun lada umumnya dibersihkan tiga kali dan maksimal 6 kali dalam setahun. Kegiatan pembersihan ini untuk membersihkan gulma yang mulai tumbuh disekitaran tanaman

lada. Dilain waktu, pohon-pohon pendukung mulai dipangkas setiap tahun atau setiap dua tahun. Gulma ditempatkan di antara tanaman lada, berfungsi untuk mendorong pembentukan humus, dan juga rumput berfungsi untuk mencegah erosi lapisan humus pada tanah yang digunakan. Tanaman lada yang mati kemudian ditanami kembali, dan tidak perlu dengan cara dicangkul. Untuk menghindari kerusakan akibat serangan hewan (seperti gajah dan babi), banyak kebun masyarakat Lampung dipagari dengan kawat berduri.



Onderhoud van den tuin.

Proses pemangkasan tanaman penopang pada tanaman lada (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 106)

Selain itu, penanam harus memastikan bahwa perkebunan lada perlu diikat, sementara itu adalah kebiasaan untuk melepaskan tanaman tahunan dari pohon pendukung,

membengkokkannya dan menempatkannya kembali ke tanah dengan ujung dukungan, dimana dukungan disalurkan dengan cara menggali pada kedalaman sekitar 1 dm. Ujung-ujung ini kemudian bertunas lagi dan yang satu penuh, pada awalnya cabang yang tumbuh dekat dengan tanah. Penduduk Lampung mengungkapkan ini dengan mengatakan bahwa kebun lada menjadi "lebih lebat" dan mengklaim bahwa, sebagai hasil dari perawatan ini, hasil lada menjadi lebih besar. Pembengkokan cabang-cabang lada umumnya terjadi pada musim hujan.

Beberapa pemilik kebun membayar para buruh dari Banten dengan cara memberikan beberapa bagian dari hasil panen, mulai dari seperlima hingga setengahnya. Pekerjaan buruh di kebun lada dilakukn dengan perhitungan pembayaran per hari. Setiap buruh lada menerima rata-rata 60 sen dan beras untuk dimakan, mereka juga menerima 5 sen per kaleng bensin dan beras (Broersma, 1916: 175). Pemangkasan tanaman tegakan hidup berupa pohon dadap juga dilakukan untuk mengontrol suhu dan iklim di dalam kebun budidaya lada. Pemangkasan dilakukan oleh para buruh setiap 2 bulan sekali dengan upah pemangkasan  $f$  81 selama setahun.

Agar menghasilkan produktifitas buah lada yang maksimal, maka banyak kebun lada pada masyarakat Lampung dikelilingi oleh pagar tanaman hidup, ataupun pagar besi.

Pemagaran bertujuan untuk melindungi tanaman lada dari serangan hewan-hewan berbahaya, seperti babi, dan gajah yang dapat merusak tanaman lada. Hal ini terjadi pada masa lalu wilayah Lampung merupakan salah satu habitat asli gajah Sumatera, dan budidaya lada banyak dilakukan di hutan yang telah dirubah menjadi perkebunan dan perladangan. Sehingga dengan demikian seringkali dijumpai kebun dan ladang petani ini merupakan jalur migrasi gajah dari satu hutan ke hutan lainnya.



Proses merambatkan lada pada tanaman penopang (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 105)

#### **d. Proses dan Hasil Panen Lada**

Proses panen hasil budidaya lada di Lampung terjadi 2 kali dalam setahun. Perbedaan diantara dua panen per tahun

seperti panen awal 1) panen lada penyelang diluar musim biasanya terjadi di bulan Maret dan April, 2) panen besar yaitu panen lada pada musimnya biasanya terjadi pada bulan September dan Oktober (Broersma, 1916: 173; Reid, 2014: 290). Musim panen penyelang dimulai sejak Januari, yakni saat penduduk mulai memetik biji-biji lada kecil di bagian bawah tanaman yang merambat. Maret, April dan Mei adalah puncak panen lada pada musim penyelang.

Biji lada terbaik tumbuh dipucuk tanaman, dan merupakan biji terakhir yang dipetik. Biji lada yang di panen dimusim puncak panennya umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih padat daripada yang dipetik pada musim panen penyelang. Bahkan sebelum panen dilakukan, tanaman mekar lagi untuk panen besar.

Di daerah sekitar pantai Lampung panen jatuh kira-kira pada bulan April dan Mei, sedangkan diwilayah utara Lampung waktu yang cocok untuk pemetikan lada dilakukan beberapa bulan kemudian. Dengan kondisi alam wilayah Lampung yang berbeda-beda tentunya sulit untuk mengambil kesimpulan pasti kapan waktu yang tepat dalam panen budidaya tanaman lada.

Segera setelah beberapa biji buah lada mulai memerah dibagian tepi tandan lada, ini menjadi suatu pertanda waktunya telah tiba untuk proses panen lada. Hasil lada dalam

bentuk Biji tergantung di tandan-tandan kecil yang panjangnya kurang lebih 7,6 cm dengan lebar 2,5 cm. Tandan yang dipetik dikeringkan dan ditempatkan pada halaman petani di depan rumah di atas tikar atau di bawah alas lain. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendapatkan panas sinar matahari secara langsung sehingga lada akan kering secara optimal.



Perambatan tanaman Lada (Sumatranjess, hal. 21)

Proses penjemuran ini menyebabkan kulit biji lada terkelupas, kemudian tangkai diangkat dan biji-biji lada dibersihkan dari kulit dan kotoran baru kemudian dimasukkan ke dalam karung-karung goni. Tiap tandan umumnya mampu menampung 40-50 biji lada, sehingga penduduk Sumatera mampu menghasilkan banyak lada yang mampu mengisi kapal-kapal asing dengan jumlah hamper 20 kapal bahkan lebih setiap tahunnya (Reid, 2014: 31).

Di kebun kecil, panen dilakukan oleh pemiliknya sendiri dengan bantuan anggota keluarganya, di kebun yang lebih besar, pekerjaan ini dilakukan oleh kuli-kuli dari Banten yang disewa, yang sebelum dan selama proses perawatan lada dan pembibitan stek lada. Stek lada yang telah siap kemudian ditempatkan pada jarak beberapa meter dari sisi stek batang dan tanaman penopang merentang sedalam beberapa jari.

Setelah semua tandan lada, yang dapat dicapai dengan berdiri sendiri, diambil, gulungan yang lebih tinggi dikumpulkan, menggunakan tangga. Untuk mencegah kerusakan pada tanaman, tangga tidak pernah diletakkan pada pohon pendukung. Karena itu mereka telah diberi bentuk tripod sehingga, saat panen berlangsung, tangga dapat dipindahkan di sekitar cabang.

### **1. Produksi Lada Hitam**

Lada hitam memiliki buah dan bertangkai, jika masih muda warnanya hijau, jika sudah masak warnanya merah. Adapun proses panen dilakukan dengan cara, saat lada/merica tersebut setangkai baru terdapat satu atau dua yang merah maka dipanen. Jika masih hijau, keringnya hancur menjadi debu.

Musim panen dimulai pada bulan Juli atau Agustus, lamanya sampai 3 bulan. Akan tetapi pada bulan April mulai kemarau dan harus disiram. Ditanah Bangka

panen lada tidak mengenal musim, hal tersebut dikarenakan pengaruh pupuk dalam proses budidaya lada. Cara memanen lada tersebut menggunakan tangga dari bambu berbentuk segitiga (tripod), tandan lada dipetik dalam tangkai-tangkainya, kemudian hasil panen dalam satu hari dibawa pulang ke kampung. Setiap hari dijemur didepan rumah menggunakan alas atau nyiru. Jika sudah kering kulitnya akan mengelupas kemudian tangkainya dipotong dan dibuang, setelah itu kemudian dimasukkan kedalam karung (Broersma, 1916: 173).



Proses panen lada (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 108)

Di Lampung proses pembersihan dan pengepakan lada dilakukan dan disimpan pada sebuah kandang, yaitu

sebidang tanah di pekarangan rumah yang dilapisi tikar sebagai lantai. Apabila kualitas lada dirasakan telah layak dijual maka selanjutnya akan disimpan pada sebuah *babalang* atau *kecundang* yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan dan bisa diangkat atau dijinjing (Hadikusuma, 1977: 122).

Untuk membedakan kualitas setiap lada, terdapat sebuah cara tradisional yang digunakan yakni dengan cara menggenggam lada, apabila lada setelah dikeringkan masih melekat dalam genggamannya, maka lada masih memerlukan penjemuran untuk menurunkan kadar air didalamnya. Sebaliknya apabila lada lepas dari genggamannya ini menandakan bahwa sudah memiliki kualitas yang baik. Demikian itu proses pengolahan lada hitam.

## **2. Produksi Lada Putih**

Selain lada/merica hitam di Lampung juga ada lada/merica putih. Sama dengan merica hitam hanya pengolahannya yang berbeda. Pertama, merica yang akan dibuat putih itu harus merah semua sesudah dipanen terus dimasukkan kedalam karung, kemudian ditimbun didalam tanah selama kira-kira dua minggu kemudian diambil serta dimasukkan kedalam air yang mengalir, ini dilakukan dengan tujuan supaya bijinya

terlepas dari tangkai, sesudah itu kemudian digilas didalam ayakan besar sampai kulitnya pun terlepas dari biji, kemudian dijemur dibawah sinar matahari selama 3-4 hari (Broersma, 1915: 173). Kalau sudah kering, biji lada selanjutnya dimasukkan kedalam karung. Sudah dijelaskan diatas penghasilan lada putih ditanah Lampung ini hanya sedikit sekali, yang banyak adalah di Tulang Bawang.

#### **e. Proses Setelah Panen**

Lada Lampung hampir secara eksklusif ditanam dan diproses adalah jenis lada hitam. Di wilayah Seputih-Tulangbawang, buah lada yang baru dipetik diizinkan untuk menjalani semacam proses fermentasi, dengan menumpuknya di bawah tanah didalam rumah selama sekitar sepuluh hari. Tandan lada kemudian tersebar di tanah dan dilepaskan dari tandan dengan cara memukulnya dengan bilah bambu atau menginjaknya secara manual menggunakan kaki. Biji lada kemudian dengan bantuan sinar matahari dikeringkan selama empat hari, jika sudah kering dimasukkan kedalam karung dan kemudian siap untuk dijual.

Di daerah Lampung dari wilayah ini, lada yang telah dipetik segera disebar di tanah atau di atas tikar dan dijemur dibawah panas matahari selama empat hingga lima hari. Tahap selanjutnya yaitu lada setelah kering dilepaskan dari tandannya dengan cara menginjaknya dengan kaki dan

akhirnya lada terpisah dari tandannya. Tahap akhir dari proses ini selanjutnya biji lada dikeringkan lebih lanjut untuk memastikan kandungan airnya benar-benar hilang.

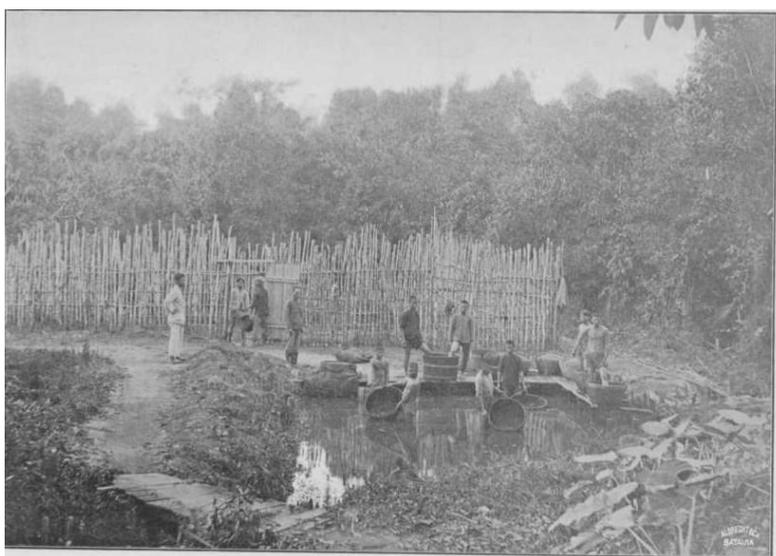
Setelah produk telah cukup kering dan dibersihkan dari kotoran, lada dikemas dalam jumlah kira-kira satu pikol dalam kantong-kantong karung. Lada putih hanya diproduksi dan disiapkan di bagian Sepoetih Toelangbawang itupun hanya dengan jumlah dan kapasitas produksi lada dalam jumlah kecil. Tandan buah lada utuh dimasukkan ke dalam karung dan dikubur di tanah. Setelah 10 hingga 12 hari kantong ditempatkan di air yang mengalir, buah kemudian dilepaskan dari tandannya.

Buah lada yang longgar kemudian ditempatkan di saringan, di mana mereka dikupas dengan tangan. Ketika biji-bijian lada telah dirasakan bersih, langkah selanjutnya proses pengeringan di bawah sinar matahari langsung selama kurang lebih empat hari (bergantung dengan panas matahari) dan dikemas dalam kantong-kantong karung untuk jumlah satu pikol.

Sejumlah besar lada dibawa dari desa yang berjarak sekitar setengah mil (hampir 1 km) dari pelabuhan terdekat tempat para pedagang menunggu (Reid, 2014: 286). Penduduk Lampung mengangkut lada-lada menggunakan karung-karung yang dipanggul di punggung melintasi banyak

sungai-sungai kecil dengan kedalaman kurang lebih setengah meter. Terkadang penduduk mengangkat hasil lada menggunakan perahu jung di waktu malam hari agar dapat sampai di pelabuhan tepat transaksi jual beli lada di pagi hari.

Umumnya lada ditimbang berdasarkan ukuran amerika. Lada tersebut dijual perpikul dengan perhitungan satu pikul adalah sebesar 100 *Catti* (setara dengan 133,33 pon ukuran Amerika= 60,5 kg). Apa yang ditimbang pada siang hari akan dibayar pada malam hari karena hal yang umum berlaku demikian disini (Reid, 2014: 290).



Bereiding van witte peper.

Proses pembuatan lada putih di Tulang Bawang, Lampung (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 109)

Asisten Residen di daerah Sepoetih-Toelangbawang memberikan perhitungan tentang biaya yang harus dikeluarkan dalam budidaya tanaman lada. Perhitungan ini mencakup biaya persiapan, pembibitan, perawatan tanaman lada termasuk pemangkasan tanaman penopang, dan tenaga kerja. Upah tenaga kerja pun terbagi kedalam beberapa kategori seperti upah perawatan kebun, proses panen hingga pengeringan dan pengepakan untuk memproduksi lada dalam luas wilayah tertentu.

Sebuah kebun lada di tanah normal, satu depa dengan ukuran 75 X 40 dengan luas 9.700 m<sup>2</sup>, di mana terdapat 1.350 sulur lada telah ditanam. Dengan luas tanah dan jumlah budidaya lada, maka diasumsikan dengan perkiraan usia produktif tanaman lada hingga 14 tahun diperoleh gambaran data sebagai berikut.

Tabel 3.3 Perkiraan Hasil Budidaya Lada di Lampung

Tahun Ke-	Hasil Lada
Dua tahun pertama	tanpa hasil
tahun ke-3	0,5 picol
tahun ke-4	3 Pikol
tahun ke- 5	8 Pikol
tahun ke- 6	13 Pikol
tahun ke- 7	18 Pikol
tahun ke- 8	25 Pikol

tahun ke- 9	25 Pikol
tahun ke- 10	18 Pikol
tahun ke- 11	10 Pikol
tahun ke- 12	5 Pikol
tahun ke- 13	2 Pikol
tahun ke- 14	1/3 Pikol
Jumlah	128 Pikol

Sumber: Broersma, 1916: 175

Hasil budidaya lada di wilayah Lampung berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa puncak hasil panen lada terjadi pada tahun ke delapan dan kesembilan dari masa awal tanam lada. Hasil lada pada tahun tersebut mencapai 25 pikol/bau tanaman lada masyarakat Lampung. Siklus tanaman lada kemudian berangsur turun ke kondisi semula pada tahun ke empat belas dan seterusnya.

Biaya proses budidaya tanaman lada yang harus dikeluarkan oleh petani mencakup beberapa aspek pengeluaran seperti biaya persiapan, pembibitan, perawatan, dan tenaga kerja untuk memproduksi lada. Biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam produksi lada belum termasuk perhitungan gagal panen, atau produksi tidak maksimal. Hasil panen lada terkadang menjadi tidak maksimal seperti adanya serangan penyakit yang menyerang tanaman lada dan atau faktor merugikan lainnya seperti penyerangan gajah, sehingga biaya

produksi diatur dalam angka bulat dan diperkirakan terjadi di angka 100 pikol.

Tabel 3.4. Aspek Keterbutuhan pembiayaan Lada hingga Panen

No.	Aspek Kebutuhan	Biaya
1.	Beli tanah	<i>f</i> 0
2.	Mempersiapkan lahan (memotong pohon dan membakar)	<i>f</i> 35.
3.	Beli 1350 stek penopang	<i>f</i> 40,50
4.	Beli 1350 bibit lada	<i>f</i> 33,75
5.	Upah menanam potongan	<i>f</i> 13,50
6.	Upah pengemasan stek lada	<i>f</i> 13,50
7.	Biaya tanam selama empat tahun pertama (160 hari pada <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 120
8.	Upah pemeliharaan selama empat tahun kedua (120 hari pada <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 90
9.	Upah pemeliharaan lainnya (100 hari pada <i>f</i> 0,75 per hari)	<i>f</i> 75.-
10.	Upah pemangkasan dadap, 6 kali	<i>f</i> 81.
11.	Pengemasan dan biaya persiapan termasuk perbanyakan sulur lada <i>f</i> 0,40 per kantong (membentuk penjualan 5 kantong 1 pikol), untuk 100 pikol (lihat di atas)	<i>f</i> 200,
	Total	<i>f</i> 702.25
	Rata-Rta	<i>f</i> 7/pikul

Sumber: Broersma, 1916: 175

Karenanya, biaya produksi per pikol untuk kebun yang diasumsikan adalah  $702.25 : 100 = \pm f 7$ . Namun, karena tidak semua kebun berada dalam kondisi yang menguntungkan seperti yang disebutkan di atas, biaya produksi lada dalam satu hektar dihitung rata-rata. Ketika tidak ada pekerjaan yang dilakukan dengan karyawan yang direkrut, biaya ini tentu saja jauh lebih rendah. Perhitungan ini memiliki aturan tetap dan dalam kondisi tertentu tentunya tidak dapat ditentukan berapa biaya yang dikeluarkan dengan kepastiannya.



Het drogen van witte peper.

Penjemuran hasil panen lada (*De pappercultuur in de Buitenbezittingen*, hal. 111)

Tidak semua penanam lada membayar tanaman dadap sebagai penopang perkebunan lada mereka, besar kemungkinan petani lada sudah menyiapkan tanaman dadap dengan kata lain

mereka tidak membeli tanaman penopang lada. Sedangkan untuk stek lada dan untuk penanaman sebagian besar menggunakan para buruh Banten yang datang secara sukarela. Perhitungan ini belum termasuk resiko kerugian karena penyakit, kebakaran, dan kegagalan panen yang seringkali jauh lebih tinggi menghampiri para petani lada.

#### **f. Kontrak Kerja dalam Budidaya Lada**

Perjanjian kerja tertentu tidak dapat kita bahas dan bicarakan mengingat sumber data yang amat terbatas terkait perjanjian kerja antara pemilik kebun dengan para buruh, terlebih fakta masyarakat kita bahwa umumnya perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Namun, di bawah ini adalah gambaran umum tentang kebiasaan yang diikuti seseorang saat merekrut pekerja yang berasal Banten.

Upah harian pekerja umumnya terbagi atas dua, yang pertama berjumlah antara  $f$  0,60 hingga  $f$  0,75 tanpa makan dan minum ataupun tunjangan lainnya, sedangkan yang kedua antara  $f$  0,33 hingga  $f$  0,50 dengan biayanya tambahan seperti makanan, minuman dan kadang-kadang juga rokok pekerja, dan ini juga belum termasuk akomodasi bekerja di kebun petani Lampung di tempat terpencil. Tambahan lain apabila pekerja ikut membuat gudang hasil panen, dan memilih untuk ikut berjaga dan tinggal didalamnya.

Jika hanya pekerja yang dipekerjakan untuk memetik, maka pembayaran juga dilakukan dengan sebagian dari hasil panen. Kuli menerima  $f$  0,30 per kantong plukloon yang jatuh. Para kuli juga bertanggung jawab untuk memelihara kebun dan memproses panen untuk jumlah tertentu dengan jumlah  $+ f$  60.- per 250-300 tanaman lada (Broersma, 1916: 78). Jaminan sandang, pangan dan papan, termasuk nutrisi para buruh pemetik lada ditanggung oleh petani pemilik kebun. Proses pembayaran gaji dilakukan segera setelah petani lada sebagai pemilik kebun berhasil menjual hasil panen lada dan menghitung serta menyadari keuntungan hasil panen lada di kebunnya.

### **g. Perdagangan**

Perdagangan komoditas lada di Lampung biasanya melibatkan para perantara termasuk para tengkulak lada, hanya satu penanam lada dari daerah Sekampung membawa produknya sendiri ke Batavia atau Palembang. Di antara mereka yang berprofesi sebagai tengkulak adalah Orang Cina, Palembang, orang Lampung dan orang Banten. Para tengkulak umumnya menerima uang muka (panjer) dari pedagang lada di Palembang atau Telukbetung dan bepergian bersama mereka ke pedalaman (Broersma, 1916: 78).

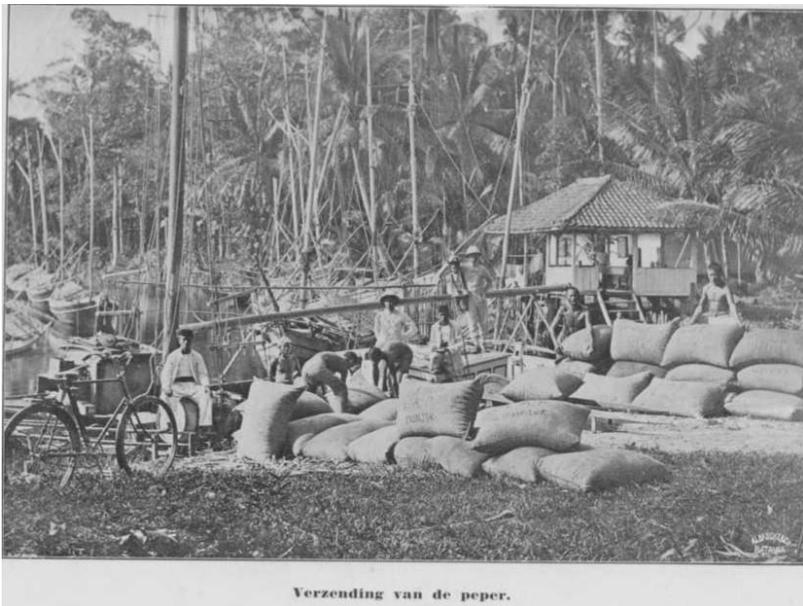
Seiring perjalanan waktu, pembeli telah mendapatkan kepercayaan langsung dari para tuan kebun, sehingga mereka

seringkali secara langsung memiliki koneksi untuk langsung membeli lada pada tempat budidaya lada dilakukan. Harga lada di pedalaman akan sangat berpengaruh dan menentukan harga pasar di Telukbetung atau Menggala. Tengkulak akan terus mendapat informasi tentang harga-harga itu, sementara pembeli menerima harga pasar berdasarkan harga jual lada yang terjadi di Batavia dan Palembang setiap hari.

Marsden mengungkapkan bahwa proses distribusi lada melalui jalur sungai yang sempit, lada umumnya dibawa dengan menggunakan rakit atau perahu jung yang terbuat dari kayu gelondongan jenis trembesi. Namun, banyak juga dijumpai rakit yang terbuat dari bambu-bambu yang disatukan. Untuk menjaga agar muatan kering maka penduduk Lampung membuat dudukan khusus dari potongan bambu di dalam perahu tradisionalnya.

Rakit dikayuh dengan dayung dari bagian depan dan belakang, samping kanan dan kirinya juga jika diperlukan di sungai-sungai yang berarus deras. Para pendayung harus menggunakan seluruh tenaga dan kekuatan ketika kondisi aliran sungai sangat deras. Banyak pula tantangan dalam mengangkut lada dengan rakit ke hilir, seperti banyaknya pepohonan yang melintang di sungai. Banyak juga disepanjang aliran sungai terdapat bebatuan besar yang dapat menghancurkan rakit (Marsden, 2016: 167).

Selain keuntungan yang timbul dari perbedaan harga ini, pedagang perantara juga mendapatkan dari perbedaan berat. Di wilayah pedalaman Lampung misalnya satu pikol beratnya terkadang 130 dan lebih banyak kati. Namun, harga yang harus dibayar sama dengan harga pikol 100 kati. Pembeli asal Jepang ini juga melakukan pembayaran di muka atas lada yang sudah dipanen, yang belum cukup kering, uang muka ini kemudian diselesaikan saat pengiriman lada telah dilaksanakan.



Pengepakan lada oleh para buruh perkebunan (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 112)

Pedagang juga sering memberikan uang muka, terutama di saat panen padi kurang baik. Dalam kasus seperti itu, penanam

hanya menerima  $f$  10. - untuk setiap pikol lada yang akan dikirim nanti. Keadaan ini tidak pernah mendapat kemajuan lebih besar dari  $f$  400. Setelah produk tiba di tangan para pedagang di lokasi utama, baru kemudian pengiriman lada dilakukan. Dari wilayah selatan Lampung, di daerah sekitar Teluk Semangka dikirimkan lada menuju pasar-pasar di Batavia, dan hanya sebagian kecil hasil lada yang dikirimkan langsung ke Eropa.

Tanjungkarang adalah pasar lada utama sebelum digantikan oleh Telukbetung (Broersma, 1916: 176-177), bahwa lada dibawa ke sana dari Wai Lima dan dari wilayah utara melalui Gunungsugih untuk diperdagangkan di sana dan kemudian dibawa ke Telukbetung untuk selanjutnya diproses pengiriman lada. Lada dari daerah Katimbang, Lampung Selatan sebagian besar hasil panennya dikirim ke Batavia.

Lada dari wilayah Telukbetung dan wilayah *Ommaladen* (luar kota) dikirim dalam jumlah besar langsung oleh satu perusahaan ke Eropa, pengeksport lainnya mengirim lada ke Batavia. Dari bagian Seputih-Tulangbawang beberapa kali sebuah kapal Tiongkok membawa lada dari Rantau Jaya Ilir ke Palembang, sedangkan tempat penjualan lainnya bernama daerah Cabang dan Jaboeng (kini masuk ke wilayah Lampung Timur) hasil ladanya disebut lada Meringgai dengan ukuran lebih kecil dan dikirim melalui Labuhan Maringai, wilayah

pesisir Timur Lampung. Namun, sebagian besar lada yang diproduksi di daerah ini dikirim dari Menggala, baik oleh kapal uap dari *Paketaartmaatschappij*, atau dengan teko kukus dari perusahaan Cina atau oleh perahu penduduk setempat. Produk ini terutama ke Palembang, hanya sebagian kecil yang datang ke Batavia, dan lebih banyak di ekspor ke Eropa melalui Aceh di pasaran dunia.

Perdagangan lada di wilayah Utara Lampung, terjadi melalui jalur perairan di daerah Menggala. Keadaan ini didorong oleh keberadaan orang-orang kaya dari daerah Palembang, mereka membawa pergi produk-produk lada dengan jenis yang lebih baik. Berdasarkan laporan Richter Railway menyatakan bahwa rata-rata 18.000 picol lada telah diproduksi setiap tahunnya di Menggala selama kurun waktu 1910-1913 (Broersma, 1916: 176). Dengan jumlah yang cukup besar, pasar lada di Palembang melalui jalur air pada akhirnya lebih menghemat biaya pengiriman daripada harus mengirimkan lada ke Kesultanan Banten.

Banyak pedagang utama di Telokbetong melakukan perjanjian perdagangan dengan memberikan uang muka untuk musim panen yang akan datang. Mereka mengandalkan informasi mengenai kelayakan kredit dari pekebun yang disediakan oleh pembeli di pedalaman. Hampir tanpa kecuali tindakan pribadi dibuat dari tindakan ini. Namun, ini tidak

menyatakan bahwa uang muka telah diberikan, tetapi menetapkan bahwa pemilik telah menjual kebunnya kepada pemberi pinjaman dengan hak untuk menebus dalam jangka waktu tertentu, harga pembelian sesuai dengan uang muka yang diterima, itu juga diatur dalam akta bahwa pembelian kembali harus dilakukan dengan memasok sejumlah lada hingga nilai harga pembelian (uang muka), dihitung pada harga pasar pada hari pengiriman. Pajak atau bea ekspor untuk hasil panen lada tidak dikenakan biaya.



Perahu Bermuatan Lada menuju Palembang (*Zuid Sumatra*, hal 165)

Sehubungan dengan harga lada, bahwa sesuatu yang tidak mungkin, bahkan dalam kondisi perkiraan, untuk memberikan pernyataan dalam situasi saat perdagangan ini dilakukan. Spekulasi dalam produk ini telah sedemikian besarnya sehingga pada 14 Oktober 1911 telah dibayar *f* 37.- lada hitam

per orang. Sementara beberapa pedagang telah memesan lada dari Eropa untuk memenuhi kewajiban yang ada. Jadi, pada saat pengumuman ini ditulis, 5000 pikol sudah dalam perjalanan ke India.

Hingga kini, lada masih menjadi simbol daerah Lampung dalam bentuk logo pemerintah daerah Lampung, yakni daun dan buah lada. Daun Lada didapati berjumlah 17, dan buah lada berjumlah delapan sedangkan biji lada berjumlah 64 menggambarkan terbentuknya provinsi Lampung pada tahun 1964.

### **3.4 Fungsi Lada**

Pada masa kejayaannya, lada memiliki banyak fungsi dalam proses hubungan diplomasi antar kerajaan dan pemerintahan, seperti sebagai tanda persahabatan, alat barter, dan Diplomasi.

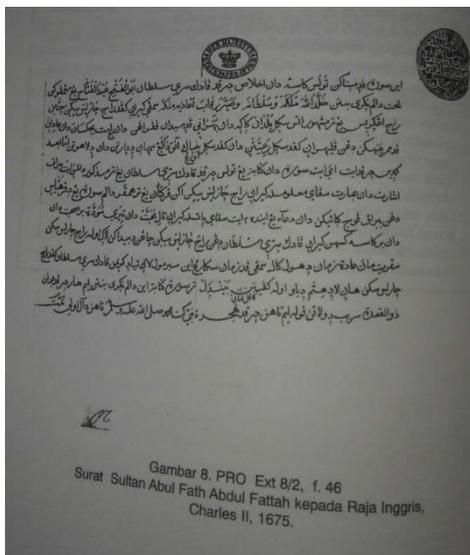
#### **a. Lada sebagai Simbol Persahabatan**

Lada sebagai simbol persahabatan digunakan pada masa kejaayaan perdagangan lada, bahkan lada Lampung digunakan sebagai simbol persahabatan antara Banten dengan Inggris, Denmark dan Inggris. Ini tergambarkan dalam surat yang ditulis pada tanggal 5 Zulkaidah 1085 H atau 31 Januari 1675 ini adalah surat Banten, dari Sultan Abul Fath Abdul Fattah kepada Raja Inggris, Charles II. Isi surat tersebut mengingatkan agar persahabatan antara Banten dan Inggris jangan terputus. Sebagai tanda

persahabatan, Sultan Banten memberi hadiah berupa lada hitam kepada Inggris melalui kapten kapal Banidal. Surat ini disimpan di Publik Record Office, dengan nomor arsip PRO Ext 8/2,f.46. Naskah ditulis dengan aksara Pegon dalam bahasa Melayu dan menggunakan tinta berwarna hitam muda.

### b. Lada sebagai Alat Barter

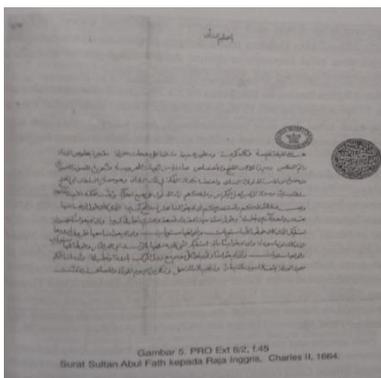
Lada memiliki fungsi sebagai alat barter pada masa kejaayaan perdagangan lada, bahkan lada Lampung digunakan sebagai alat barter untuk mendapatkan senjata seperti senapan dan meriam. Peristiwa ini tergambarkan dalam surat dari Sultan Banten, Sultan Abul Fath Abdul Fattah untuk Raja Inggris, Charles II tanpa tarikh diperkirakan ditulis pada tahun 1664.



Surat ini berisi permohonan agar Inggris bersedia menjual meriam, senapan dan *istinggar* kepada Kesultanan Banten. Untuk itu, sebagai hadiah Sultan Banten mengirimkan lada hitam dan jahe kepada raja Inggris. Surat ini disimpan di Publik Record Office, dengan nomor arsip PRO Ext 8/2,f.45. Naskah ditulis dengan tulisan Arab dan bahasa Arab.

### c. Lada sebagai Politik Diplomasi

Lada memiliki fungsi diplomasi pada masa kejayaan perdagangan lada, bahkan lada Lampung digunakan sebagai ucapan selamat atas dilantiknya H.W Daendels sebagai gubernur di Hindia Belanda, ini tergambar dalam Surat dari Sultan Abul Nasr Muhammad Ishaq Zainalmutaqin kepada Daendels dan Raad van Indie, berisi laporan mengenai penanaman lada di Lampung dan masalah pembagian keuntungan dari perkebunan serta harga jualnya.



Surat Sultan Banten kepada Punggawa di Lampung

Sultan juga mengucapkan terimakasih atas hadiah yang diterimanya. Sebagai balasan, Sultan mengirimkan 200 bahar lada, kain sutra, dan sebagainya kepada Daendels. yang ditulis pada hari selasa tanggal 9 jumadil awal tahun 1223 H atau 3 Juli 1808. Surat ini disimpan di Bagian Naskah Timur, Universitas-Bibliotheek, Leiden Belanda dalam bundel UB Cod. Or.2241 III b. 15 (Klt 16/No. 541). Naskah ditulis dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu menggunakan tinta berwarna hitam.

Surat dari Sultan Abul Nasr Muhammad Ishaq Zainalmutaqin, berisi ucapan selamat atas diangkatnya Herman Williem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menggantikan Albertus Henrieus Wiese. Sebagai ungkapan tanda persaudaraan, Sultan mengirimkan hadiah berupa lada hitam sebanyak 200 bahar.

Surat yang ditulis pada hari selasa tanggal 9 tahun 1223 H atau 10 April 1808. Surat ini disimpan di Bagian Naskah Timur, Universitas-Bibliotheek, Leiden Belanda dalam bundel UB Cod. Or.2241 III b. 15 (Klt 17/No. 540). Naskah ditulis dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu dan Arab, menggunakan tinta berwarna hitam.

#### **d. Lada sebagai Simbol Kejayaan**

Lada juga memiliki fungsi sebagai simbol kejayaan dan berdampak pada persaingan dagang. Kejayaan yang dimaksud ialah barangsiapa yang mampu menguasai perdagangan lada maka secara langsung mampu memonopoli perdagangan dunia dan pada akhirnya memunculkan persaingan antar pedagang. Persaingan ini tidak hanya dari internal para pedagang di Lampung tetapi juga dari pihak luar yang melibatkan banyak kerajaan seperti Banten, Palembang, Pasai, VOC, EIC Inggris. Persaingan internal melibatkan banyak kebuayan dan pada akhirnya menjadi perpanjangan tangan kesultanan Banten.



Pengiriman Lada melalui jalur air di Lampung (*Zuid Sumatra*, 1932: 125)

Sistem pemerintahan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Banten diwakili oleh Pemuka-pemuka Lampung yang mendapat mandat untuk menjadi penguasa di Lampung atas restu Sultan Banten dalam mengendalikan kekuasaannya di Lampung, Banten hanya menempatkan "*Djenjem*"-nya di Menggala daerah Lampung bagian utara (Gonggong dkk, 1983: 24). Penempatan ini tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah Menggala berbatasan langsung dengan Kesultanan Palembang. Menggala sebagai salah satu daerah penghasil lada terkadang melakukan perdagangan dengan kesultanan Palembang, dan dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Banten di Lampung.

*Jenjen* ini tidak memiliki hak untuk memerintah di Lampung, ia hanya sebuah bentuk perwakilan resmi dari Banten dalam menghimpun hasil bumi untuk diangkut ke Banten. Dampak langsung dari meningkatnya permintaan lada oleh pasar luar negeri adalah timbulnya persaingan antara para pedagang asing, sehingga masing-masing berusaha untuk memperkuat posisinya dengan berbagai macam cara. Misalnya VOC, berusaha mempengaruhi Sultan Banten agar mendapatkan hak monopoli perdagangan lada (Hardiman, 2015: 4).

### **3.5      Gambaran Perburuhan pada Masa Kejayaan Lada Lampung**

Pada awalnya, masyarakat Lampung tidak mengenal kasta dalam masyarakatnya, apalagi praktek perburuhan. Mereka hidup secara komunal, bersifat tradisional, mereka hidup berkelompok dengan mata pencaharian berupa berburu dan tani. Pertanian yang diusahakan penduduk Lampung tentunya berbeda dengan Masyarakat Jawa.

Pertanian padi di Jawa dilakukan dengan mengolah tanah basah dalam bentuk persawahan, maka masyarakat Lampung mengupayakan padi dengan cara menanam di huma atau tegalan. Budidaya padi dilakukan dengan cara memabat hutan, lalu dibersihkan baru kemudian ditanami padi. Sistem pertanian padi di huma ini mengharuskan masyarakat lampung berpindah-pindah, karena huma hanya bisa ditanami padi sekali, lalu ditinggalkan, kemudian dibabat kembali untuk dijadikan perladangan lagi.

Pada masa ini, hidup seorang bergantung dengan pertolongan orang lain. Hutan dikerjakan bersama, sawah ditegalan juga dibuat bersama-sama. Mendirikan dan memperbaiki rumah, membuat jalan selalu dikerjakan bersama-sama. Tukang, kuli dan buruh belum ada, stratifikasi sosial pun nampaknya tidak ada, karena dalam masyarakat semua dikerjakan secara gotong royong. Setiap

individu memiliki kedudukan yang setara, tidak ada perbedaan yang mencolok masyarakat hidup rukun, damai dan tentram dalam kebersamaan. Kondisi ini terus berjalan, apabila ada individu yang melanggar adat istiadat maka diselesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat.

Gambaran masyarakat yang saling menghargai inilah yang memunculkan faktor baru dalam masyarakat, yakni pemimpin (kepala desa, ketua adat, datuk, ratu). Pemimpin bekerja untuk umum, oleh karena itu ia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri, keluarga dan urusannya. Pemimpin tidak sempat lagi memikirkan sawahnya, tidak sempat memperhatikan rumahnya maka masyarakat ikut merasa bertanggungjawab atas nasib pemimpinnya. Masyarakat merasa berhutang budi kepada pemimpinnya, dan untuk menghargai jasanya masyarakat bersedia membalasnya sebagai ungkapan terimakasih.

Kenyataan dalam sejarah telah menggambarkan bahwa petani hidup di desa memiliki kesadaran sosial yang tinggi, berjiwa komunal, gotong royong. Perubahan terjadi dalam keadaan ekonomi baru mulai dirasakan saat masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu. Penduduk lokal umumnya tidak bersedia bekerja di perkebunan karena identik dengan pekerjaan buruh kasar, meskipun dengan tawaran upah yang

sangat tinggi sebagai buruh. Scott (1606: 170-171) menggambarkan bahwa penduduk asli Sumatera termasuk bangsa Melayu tidak akan mau bekerja dalam jenis pekerjaan kasar karena diidentikkan dengan perbudakan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan buruh para pengusaha merekrut buruh kasar dari Cina.

Buruh Jawa kemudian menjadi salah satu alternatif penyedia tenaga kerja manakala ketersediaan buruh Cina semakin sulit didapatkan. Sistem perburuhan dengan sistem buruh kontrak dirasakan sangat menguntungkan pihak pengusaha, hal ini terjadi karena pemilik perkebunan memperoleh hak untuk menghukum para buruh dimana dalam melakukan pekerjaannya buruh dipandang lalai, malas-malasan, dan berusaha kabur dari perkebunan dalam sistem *poenale sactie*.



Hasil Panen Lada (De pappercultuur in de Buitenbezittingen, hal. 111)

Baru pada tahun 1932 *poenale sanctie* terpaksa di hapuskan karena adanya anggapan bahwa Amerika Serikat melarang perdagangan impor untuk setiap jenis barang-barang yang diperoleh dengan menggunakan tenaga kerja kontrak dengan sistem paksaan. Penghasilan buruh pada masa kerja ini mendapatkan upah seperlima harga lada dipasaran. Di Inggris pada tahun 1400 lada dihargai dengan 7 *penny* per pon lada yang sama dengan upah buruh selama 1 pekan bekerja (Turner, 2019: 154).

Pemerintah dalam keadaan tertentu dengan dalih untuk kepentingan bersama dapat mengerahkan tenaga rakyat untuk pekerjaan-pekerjaan umum. Proses selanjutnya, maka para bupati, demang, sesuai dengan tugas dan instruksi yang telah diberikan, harus mampu untuk mengupayakan agar setiap tenaga kerja mampu disediakan desa secara merata (fassuer 1992: 30).

Beberapa penduduk dengan jumlah dan kriteria tertentu dikerahkan untuk masing-masing desa, dan pada tataran pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan masyarakat desa, hanya mereka yang memiliki kedudukan dan terhormat berhak atas penggarapan tanah (*sikep*) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak

memiliki (numpang), sehingga muncul sikep-sikep baru yang wajib melaksanakan "*heerendiensten*" pula (fassuer 1992: 30).



Penjemuran Lada (Sumatranjess, hal. 21)

Tetapi penduduk tetap terikat secara tradisional untuk melakukan berbagai kewajiban lain yang menyangkut pembangunan sarana prasarana untuk melancarkan pengangkutan hasil perkebunan seperti karet, kopi dan lada. Jalan-jalan dan jembatan mulai muncul sejak ini. Dengan dipimpin oleh para pemimpin tradisional di desa (para kepala adat) penduduk sewaktu-waktu mendapat panggilan secara bergiliran untuk bekerja tanpa upah pada berbagai proyek pekerjaan umum itu. Pekerjaan ini sering membawa kesengsaraan dikarenakan lokasi proyek yang jauh dari tempat kediaman pekerja atau pada tempat-tempat yang

menyulitkan. Pekerjaan ini juga memberatkan karena pada saat-saat penduduk harus memanen kebun makanannya, sering datang panggilan untuk mengerjakan prasarana itu (fassuer 1992: 30).

### **Daftar Pustaka**

Marsden, William. *Sejarah Sumatera*. Yogyakarta: Indoliterasi. Hal. 212

Dedi Arman. 2017. *Dari Hulu Ke Hilir Batanghari: Aktivitas Perdagangan Lada di Jambi Abad XVI-XVII*. BPNB Kepulauan Riau. Direktorat Jendral Kebudayaan Jakarta. hal. 22

Broersma, R. 1916. *De Lampongsche Districten*. Batavia: De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij. Hal. 172

*De Pepercultuur in de Buitenbezittingen* 1913. Batavia: Landsdrukkerij.

Nurhakim, Lukman & Moh. Ali Fadillah. 1989. *Lada: Politik Ekonomi Banten di Lampung* dalam Prosedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi III: Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi. Depdikbud: Jakarta. hal. 261

Cornelis Fasseur. 1992. *The Politics of Colonial Exploitation, Java, The Dutch, and Cultivation System*. Cornel University Press dalam Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. hal. 30

Hadikusuma, Hilman. 1977. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Depdikbud: Jakarta hal. 13-14

Hardiman. 2015. *Perkebunan Lada di Banten Tahun 1805-1816*. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

- Leirissa, 1995. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. hal. 34
- Anthony Reid 1993. *Sumatera Tempo Doeloe: dari Marcopolo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 31
- Edmund Scott. 1606. *An Exact Discourse of the Subtilties, Fashions, Policies, Religion, And Ceremonies of the East Indians, as well Chyneses as Javans, there abyding and dwelling*, dalam *The Voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas*, ed. Sir William Foster. London, Hakluyt Society. 1943: hal 81-176.
- Ery Soedewo. 2007. *Lada Si Eman Panas: Dampaknya Bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten*. Jurnal Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal. 20
- Sumatraantjes*, Reisbrieven van H.C Zentgraaff en W.A Van Goudoever, hal. 17
- Jack Turner. 2019. *Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imperialisme*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 51
- Yudianto, 2015. *Tanaman Lada dalam Perspektif Autekologi*. Bandar Lampung: Aura Publishing. hal. 77
- J.W.J. Zellan. *Zuid Sumatra*, hal 165)

## **BAB IV**

### **LAMPUNG DIBAWAH KESULTANAN BANTEN**

#### **4.1 Sejarah Hubungan Banten-Lampung**

Hubungan diantara dua penguasa wilayah berbeda pulau ini sudah terjalin sejak masa Keratuan Pugung di Melinting dipimpin oleh Minak Jalan Ratu. Hubungan antara Lampung dan Banten semakin mesra ketika Fatahilah pernah datang sendiri ke Lampung, dan kemudian kawin dengan puteri dari Minak Raja Jalan, penguasa dari Keratuan Pugung yang bernama puteri Sinar Alam. Penguasa Banten pada waktu itu yakni Sunan Gunung Jati, kemudian menikahi putri keratuan Pugung bernama Putri Sinar Alam pernikahan ini terjadi pada tahun 1528.

Sunan Gunung Jati selain sebagai penguasa wilayah Cirebon juga diakui oleh Kesultanan Demak sebagai penguasa Banten. Sunan Gunung Jati di Banten kemudian digantikan oleh putranya Hasanudin (1552-1570), yang bergelar Penembahan Surosowan. Di Lampung sendiri, Keratuan Pugung kemudian diperintah oleh salah seorang Putra Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam, yang bernama Ratu Darah Putih..

Hubungan antara dua wilayah yang berbeda pulau ini, diperkuat dengan ditemukannya sebuah piagam Kuripan (sesuai nama tempat diketemukan piagam tersebut) yang mengikat antar kedua penguasa ini. Piagam ini ditulis diatas tembaga yang ditemukan di Kampung Kuripan 1552. Menurut J.E.H. Kohler dalam tulisannya yang dimuat dalam *Tjidchrift Voor Nederlandsch Indie* tahun 1874 dikatakan bahwa Pangeran Hasanudin dari Banten dibantu oleh seorang Pangeran bernama Pangeran Balu dari daerah Tulangbawang. Di dalam *Tjidchrift Voor Indische, Taal Land en Volken Kunde* di bawah redaksi Dr. PH. S van Ronkel deel XLVIII, Pangeran Baluk diperkirakan Raja Balau.



Peta Pengaruh Kekuasaan Kesultanan Banten  
Sumber: [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Sistem tata niaga perdagangan lada di Lampung kemudian

diwakili 4 orang wakil di Lampung yang disebut *Jenjen* yang diangkat oleh Sultan Banten. Dalam upaya melanggengkan monopoli lada di Lampung, Sultan Banten juga memberikan gelar dan pangkat kepada kepala-kepala marga di Lampung dalam bidang pemerintahan dan secara sah mewakili kedudukan Sultan Banten di wilayah kebuayannya.

Eksansi dan perluasan wilayah Kesultanan Banten hampir selalu melibatkan Lampung, seperti ketika Sultan Maulana Yusuf menduduki tahta kesultanan Banten dan berkuasa sejak tahun 1570-1588. Sultan tercatat meminta bantaun Lampung dalam proses penyerangan kerajaan Hindu Padjajaran. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad (1588-1596), Hubungan ini terus berlanjut, dan dibuktikan dengan partisipasi pemimpin Lampung dalam penyerangan Banten terhadap kesultanan Palembang. Meskipun dalam peperangan ini Sultan Maulana Muhammad gugur, ini tak lantas memutuskan hubungan Banten-Lampung pada masa selanjutnya, meskipun sebenarnya penyerangan ini dalam rangka perebutan hegemoni penguasa perdagangan lada di Tulangbawang khususnya komoditi lada putih.

Hubungan Kesultanan Banten dengan wilayah Lampung dibentuk oleh perjalanan panjang antara saudara kandung yang saling membutuhkan, mendukung dan melengkapi. Di wilayah Lampung, terdapat beberapa makam kuno dan

dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, dan dikenal dengan makam Kyai Banten salah satu tokoh penyebaran islam di Lampung. Bahkan di Kedaton, sebuah bukit memiliki julukan sebagai Gunung Banten, karena di bagian lereng bukit tersebut terdapat sebuah kuburan yang diyakini sebagai makam seorang kyai asal Banten.

Lokasi lain yang menguatkan jalinan kemesraan Lampung Banten ialah keberadaan Desa Pager Dewa, sebuah desa di wilayah pedalaman Lampung bagian utara dan persis berada di tepi hulu way Tulang Bawang. Di desa Pagar Dewa diyakini terdapat makam kuno yang dikeramatkan dan dikenal sebagai makam kyai Banten tokoh pendakwah asal Banten. Desa Pagar Dewa disinyalir pernah menjadi pusat Kerajaan Tulangbawang dan diperkirakan telah menganut kepercayaan agama Islam. Tulang Bawang dalam catatan sejarah selalu memiliki keterkaitan dengan kerajaan kuno Tulangbawang di Lampung dan diperkirakan ada sejak abad kelima hingga ketujuh sebelum kemunculan kerajaan Sriwijaya.

Meskipun demikian, hingga kini sisa-sisa peninggalan pusat kerajaan Tulangbawang hingga kini masih belum ditemukan. Data empiris lainnya dapat kita temukan di kota Bandar Lampung, yakni tempat ditemukan pemukiman penduduk Banten yang tersebar di beberapa lokasi seperti Tanjung Gading, Kampung Kaliawi, Gedung Pakuan, Durian Payung,

hingga daerah Kuripan. Hal tersebut mungkin cukup beralasan, mengingat jarak antara Banten dan Lampung sangat dekat dan dapat dicapai menggunakan perahu jung menyeberangi Selat Sunda. Bahkan di masa lalu, penduduk Banten memiliki ladang-ladang (huma) di Lampung, meskipun mereka tetap tinggal di Banten. Sebagai data historis juga ditemukan lempengan prasasti tembaga di Kuripan Kalianda Lampung Selatan. Pada saat ini masih tersimpan pada keluarga Raden Intan II. Pahlawan Nasional dari Lampung. Antara Banten dan Lampung terdapat perjanjian yang terdapat dalam piagam tersebut.

Persahabatan antara Lampung dan Banten, diperkuat dan dibuktikan dengan adanya piagam Kuripan dan dinamai sesuai dengan desa ditemukannya yakni desa Kuripan, di rumah kediaman kerabat Raden Inten. Piagam ini menunjukkan awal masuk dan berkembangnya pengaruh kesultanan Banten di wilayah Lampung. Lamun ana musuh Banten. Banten pengerowa. Lampung tut wuri lamun ana musuh Lampung. Lampung pengerowa. Banten tut wuri (kalau ada musuh Banten. Banten di depan. Lampung di belakang. kalau ada musuh Lampung. Lampung di depan. Banten di belakang (Sayuti, 1993: 25). Menilik isinya, lebih kurang merupakan perjanjian persahabatan, saling melindungi dan setia. Masa dibuatnya piagam ini yakni pada masa kepemimpinan Sultan Hasanudin dari Banten dan Ratu Darah

Putih dari Keratuan Darah Putih (Lampung bagian selatan), terlebih fakta bahwa keduanya merupakan putra-putri Fatahilah dengan ibu yang berbeda.

Hubungan kesultanan Banten dan Lampung, pernah diuji dalam sebuah masa dimana kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa terjadi sebuah konflik internal. Konflik internal ini kemudian menjadi meluas dan melibatkan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji dalam konflik suksesi pemerintahan di Kesultanan Banten. Perang suksesi ini pada akhirnya melibatkan VOC yang mendukung Sultan Haji melawan kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa.

Rakyat Lampung berada di pihak Sultan Ageng Tirtayasa sebagai penguasa yang sah dari kesultanan Banten. Meskipun pada akhirnya kemenangan berada di pihak Sultan Haji, dan Sultan Ageng dipihak yang kalah dan harus menyerahkan wilayah Lampung sebagai penghasil lada untuk kesultanan Banten. Hal ini karena sejak awal konflik suksesi, Sultan Haji sudah menjanjikan daerah penghasil lada kepada VOC apabila bersedia membantunya.

#### **4.2 Struktur dan Pola Pemerintahan di Lampung Dibawah Kesultanan Banten**

Masyarakat Lampung pada awalnya merupakan wilayah yang mandiri dengan struktur pemerintahan *Kebuayan* yaitu kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang kecil. Sistem

pemerintahan *Kebuayan* pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang khas dan sudah lama dikenal sejak awal keberadaan masyarakat Lampung mendiami wilayah ini. Mereka bermukim dalam lokasi tertentu dengan batas-batas wilayah yang jelas. Keperluan hidup sehari-hari dipenuhi secara bersama-sama. Masyarakat ini juga dipimpin oleh orang tua yang dianggap lebih baik dari pada yang lainnya (Tjandrasasmita, 1984: 174).

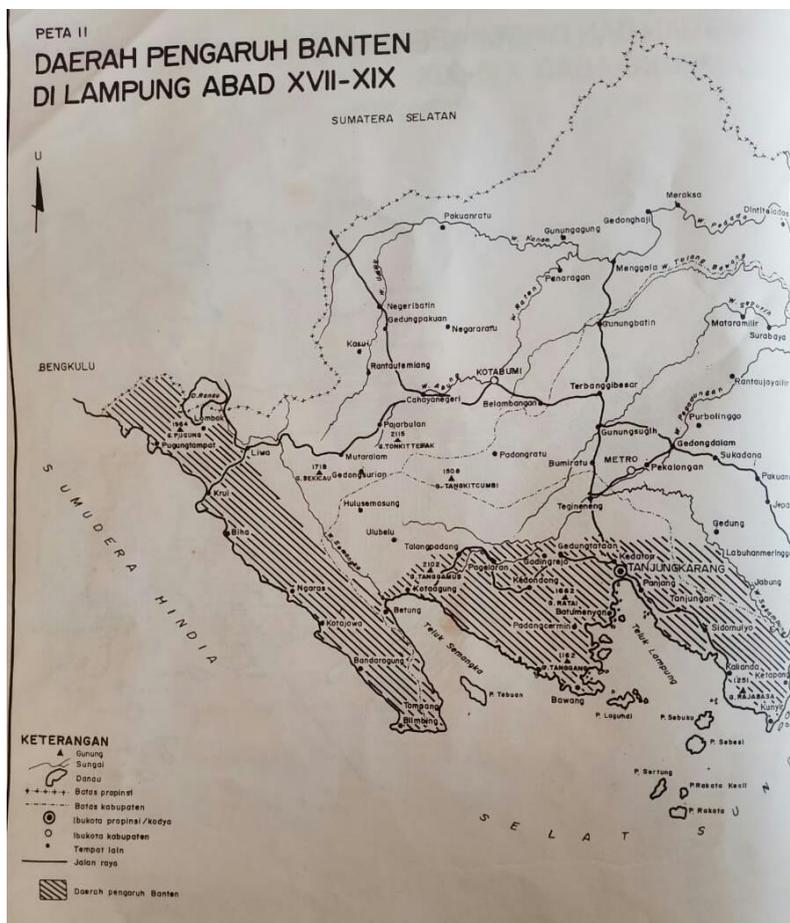
Di Lampung, pola pemerintahan berdasarkan garis keturunan laki-laki dan terlihat pada sistem pemerintahan adat baik di pemerintahan marga, tiyuh, maupun kampung. Pemerintahan adat marga mengenal pola kepemimpinan kepunyimbangan (pemimpin adat) secara kolektif dengan didampingi para perwatin (dewan marga) yang terdiri dari para anggota keluarga tertua dari masing-masing punyimbang.

Masyarakat Lampung dalam berserikat dan berkumpul dalam satu kelompok akan menuakan, menghormati, dan menempatkan kedudukan tertinggi kepada punyimbang asal keturunan yang disebut punyimbang marga atau punyimbang paksi (Hadikusuma, 1989: 7–8). Kondisi masyarakat adat ini terus berlangsung sejak zaman sebelum masuknya Islam. Saat Banten memasuki wilayah Lampung dan menguasainya, selain organisasi masyarakat, kesatuan adat marga juga dikenal dalam struktur masyarakat berbentuk keratuan.

Sejak awal abad ke XVI-XVIII, lada adalah salah satu komoditas utama perdagangan dunia, bahkan mendapatkan gelar *King of Spice*. Sumber-sumber sejarah ini banyak mengabarkan bahwa komoditas lada merupakan barang yang amat dicari dan menjadi buruan para pedagang di Eropa. Pada abad ke XVI, Lampung merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Banten. Para pemimpin adat di Lampung membutuhkan legitimasi kekuasaan di wilayah adatnya, dan legitimasi ini diperoleh dari kekuatan dari luar yang mereka akui dan ditaati, salah satunya ialah kekuasaan Kesultanan Banten. Sedangkan Banten pada pihak yang lain juga membutuhkan dan mengharapkan sesuatu dari Lampung dalam bentuk kesetiaan yang dibuktikan dengan pengiriman upeti, pajak, dan lada ke Banten.

Pada puncak kejayaan lada di Malaka, Banten sebagai pusat perdagangan lada yang memasok sebagian besar kebutuhan lada dunia, hampir tidak bisa memenuhi permintaan dunia karena wilayah Banten tidak cocok untuk budidaya lada secara luas. Secara ekologis wilayah Banten di Pulau Jawa tidak cocok untuk tanaman lada. Ekspansi ke Lampung dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan dunia akan lada tersebut (Nurhakim, 1990: 268). Keberadaan sistem pemerintahan adat di Lampung secara tidak langsung membantu Banten dalam mengatur pemerintahan di wilayah

ini, dan tidak perlu menggunakan kekuatan militer tetapi cukup dengan mengeluarkan peraturan-perturan dalam menjalankan pemerintahanya.



Wilayah Lampung yang mendapat pengaruh Banten  
Sumber: Sayuti, 1988. Peta Sejarah Provinsi Lampung

Selain itu, terdapat kebiasaan para pemimpin adat di Lampung untuk melakukan *seba* ke Banten setiap tahunnya. Melalui *seba* inilah para punyimbang adat Lampung mendapatkan

pengakuan dari kesultanan Banten, dan pada akhirnya mampu memainkan perannya dalam menjaga pasokan lada Lampung ke wilayah Banten. Banten sangat berkepentingan terhadap lada, sehingga untuk urusan hukum adat dan kemasyarakatan, Lampung diberi hak otonomi sedangkan untuk lada sepenuhnya urusan Banten (Nurhakim, 1990: 258 – 274). Keadaan ini disadari para pemimpin Banten karena kawasan Lampung dinilai sangat cocok bagi budidaya tanaman lada daripada wilayah Banten.

Sultan Abdulmuhasin Muhammad Zainal Abidin (1690–1733) pada masa pemerintahannya telah menerbitkan 5 piagam yang ditulis pada tembaga, tiga piagam diantaranya berisi tentang keharusan masyarakat Lampung untuk menanam lada. Daerah Lampung yang diwajibkan untuk menanam lada antara lain daerah Seputih, Rajabasa, dan Sukau.

Pada piagam Sukau berangka tahun 1104 H atau 1691 M, yang ditulis dengan aksara Lampung dan memakai bahasa Jawa Banten. Dalam piagam ini terlihat jelas kekuasaan Banten atas wilayah Lampung dimana Sultan Banten dapat dengan mudah mengangkat, mengganti, bahkan memecat kepala daerah di Lampung apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai harapan. Dalam piagam ini juga terlihat jelas bahwa masyarakat Lampung berkewajiban untuk menanam dan

mengumpulkan lada untuk Banten. Berikut teks terjemahan piagam sukau:

Dan lagi barang siapa bepergian ke Lampung baik memakai kapal atau jukung atau yang lain daripada itu hendaklah membeli merica, sedang ia tidak membawa cap yang ujudnya seperti ini, maka handaklah betul-betul dicegah dan jangan sekali-sekali diijinkan membeli merica. Jika tidak tercapai dicegah hendaklah dirampas segala hartanya dan perahunya sekalian.

Dan jika ada pedagang merica di Lampung dengan membawa cap yang ujudnya seperti yang disebutkan tadi, hendaklah dipercaya, berilah izin membeli meriam dan jagalah baik-baik orang itu. Dan lagi semua orang yang berdagang merica, hendaklah membuat bea satu talen (25 sen) tiap seratus juta kepada punggawa karena sudah membantu (Bukri dkk, 1981: 50-51).

Pada masa Sultan Syifa Zainul Arifin (1733–1750) telah dikeluarkan dua prasasti yang kedsuanya dikeluarkan pada tahun 1746. Prasasti pertama berisikan pengangkatan Pangeran Jayasinga sebagai wakil Sultan bagi daerah Tulangbawang di Tagi, prasasti kedua berisi tentang kewajiban menanam seribu pohon lada kepada setiap orang dan ketentuan hukum pidana berkaitan dengan lada.

Pada masa Sultan Zaenul Asyikin juga dikeluarkan prasasti. Dua prasasti yang dikeluarkan, pertama berangka tahun 1761 berisi pengangkatan Tumenggung Tanuyuda untuk penggawa Penet. Prasasti kedua berangka tahun 1771 berisi kewajiban menanam pohon lada bagi setiap orang Lampung. Pada kasus

hubungan awal antara Lampung–Banten terdapat hubungan simbiosis mutualisme, yakni hubungan saling membutuhkan. Para pemimpin masyarakat di Lampung setelah melakukan *seba* dengan memberikan pengakuan kekuasaan tertinggi atas Banten, mereka mendapatkan pengakuan pula sebagai penguasa di Lampung ditandai dengan pemberian simbol-simbol kebesaran kesultanan Banten.



Gambaran Pedagang menunggu hasil lada di Pelabuhan (*Zuid Sumatra*, 1932: 118)

Perkembangan selanjutnya, ketika Banten dihadapkan pada persoalan lada, pihak Lampung dapat memenuhinya dengan imbalan pihak Banten mengangkat penggawa di Lampung. Pengangkatan penggawa ini sebenarnya merupakan kepentingan Banten dalam rangka mengamankan pasokan lada, namun bagi masyarakat Lampung memberikan dampak

terhadap semakin kokohnya kedudukan sang pemimpin di mata masyarakat adatnya.

Terciptanya suatu hubungan yang saling membutuhkan antara Lampung–Banten telah memberi ruang sekaligus peluang terjadinya arus keluar masuknya perdagangan lada secara teratur, antara masyarakat Lampung dengan para *punggawa* wakil sultan di Lampung. Penduduk Lampung memberikan pajak atas hasil perdagangan lada kepada para *punggawa*, sebagai bentuk ketundukan rakyat kepada pemimpinnya. Ketaatan ini kemudian memberikan konsekuensi lanjutan kepada *punggawa* untuk memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi dari kesultanan Banten.

Perdagangan lada ke luar Lampung sebagian besar dilakukan menggunakan jalur air bukan melalui jalur darat. Perdagangan banyak melalui pelabuhan sungai (*tangga raja*) milik para kepala marga setelah mendapatkan rekomendasi Sultan Banten dengan mempertimbangkan masukan dari para *punggawa*. Model perdagangan bebas yang mula-mula biasa dilakukan, selanjutnya berubah setelah masuknya pengaruh VOC sehingga sistem perdagangan berkembang ke arah monopoli perdagangan. Tingginya permintaan lada di pasar dunia dan situasi politik antara Banten dan VOC, memaksa Banten menerapkan peraturan semacam *culture stelsel*.

Masyarakat Lampung dipaksa menanam lada. Seiring dengan ini berkembanglah sistem monopoli perdagangan.

Pelabuhan Banten merupakan pusat pendistribusian lada baik hitam, maupun lada putih, untuk selanjutnya ke Malak hingga sampai di Cina, kemudian melalui jalur Mediterania masuk ke Eropa. Banten sebagai pusat lada telah berlangsung sejak masa Kerajaan Sunda di mana kerajaan Islam belum terbentuk (Leur, 1967: 102–103). Perdagangan lada mencapai puncaknya pada masa Sultan Abdul Qadir Kenari, pada tahun 1603 dengan total ekspor lada sebanyak 259.200 pound lada serta 8.440 karung lada ke berbagai pasar di Eropa. Lima belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1618, datang 10 kapal berbobot 1000–1500 ton dari Cina di pelabuhan Banten untuk melakukan transaksi perdagangan lada hitam.

### **4.3 Dampak Pemerintahan Kesultanan Banten di Lampung**

Keadaan geografis Lampung di satu sisi berdekatan dengan pulau Jawa (Kesultanan Banten), pada sisi lainnya berbatasan dengan Sumatera Selatan (Kesultanan Palembang) menyebabkan wilayah Lampung menjadi daerah perebutan pengaruh diantara dua kekuasaan besar tersebut pada masanya. Data menunjukkan bahwa salah satu pusat penghasil lada di Lampung ialah daerah Tulang Bawang yang berdekatan dengan Kesultanan Palembang. Palembang

sendiri merupakan salah satu tempat dipasarkannya lada dari berbagai daerah, seperti lada dari Jambi, Bengkulu dan Lampung. Keadaan ini menimbulkan konflik antara Kesultanan Palembang-Banten dengan komoditas lada sebagai pemicu konflik diantara keduanya.

Pada kurun waktu 1596-1608, tercatat bahwa Banten pernah menyerang Palembang, bahkan sempat melakukan pengepungan pada tahun 1596. Pengepungan sendiri dipimpin oleh Sultan Banten, meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan bahkan memakan korban Sultan Banten sendiri. Konflik ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dalam buku Sejarah Daerah Lampung tertulis bahwa tahun 1737 ketika armada Palembang dan armada Banten sudah saling berhadap-hadapan di Tulang Bawang, perang dapat dihindarkan melalui campur tangan VOC. VOC ketika itu mengirimkan Reiner De Clerk dan berhasil meredakan ketegangan ini (Bukri, 1981: 51).

Selain itu, kunjungan para pemimpin adat (Punyimbang) ke Banten dengan sendirinya menyebabkan wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Banten. Melalui *seba* inilah para punyimbang adat Lampung mendapatkan pengakuan dari kesultanan Banten, dan pada akhirnya mampu memainkan perannya dalam menjaga pasokan lada Lampung ke wilayah Banten. Banten sangat berkepentingan terhadap lada,

sehingga untuk urusan hukum adat dan kemasyarakatan, Lampung diberi hak otonomi sedangkan untuk lada sepenuhnya mutlak menjadi hak Kesultanan Banten.

#### **4.3.1 Budidaya Lada Masa Banten**

Guna mendukung kesinambungan produksi lada di Lampung, Sultan Abdul Muhasin pada tahun 1694, mewajibkan setiap penduduk Lampung menanam lada dalam jumlah banyak. Keadaan ini tergambar dalam undang-undang yang diterbitkan Sultan dalam prasasti untuk daerah Putih (kuat dugaan yang dimaksud daerah ini adalah daerah Putih Doh), yang berbunyi:

“merica (lada) dapat dijadikan sebagai alat tukar, dan dalam perkara hutang piutang, mereka dikenai keharusan menanam lada sebanyak 500 pohon untuk setiap orang dan hasilnya dibawa ke Surosowan disertai surat pemberitahuan dan cap jual beli” (Nurhakim, 1985: 267).

Prasasti ini menandakan bahwa Sultan Banten memperbolehkan hutang piutang menggunakan lada, serta barang siapa yang berhutang diwajibkan untuk menanam lada sebanyak 500 pohon dan penghasilannya dapat dipergunakan untuk membayar hutang, sekaligus membayar pajak ke Banten. Bahkan apabila si penghutang ini tidak memiliki penghasilan lain, ia tidak hanya diharuskan menanam, namun juga menjadi buruh pemetik lada kepada si pemberi hutang.

Selain itu, Sultan Abdul Muhasin juga menerbitkan prasasti untuk Punyimbang di Rajabasa dengan isi yang hampir sama dengan prasasti untuk daerah Putih Doh, yakni kewajiban menanam lada sebanyak 600 pohon untuk setiap orang yang berarti Lampung semakin dominan dalam produksi lada untuk Banten. Selain itu, sultan memberikan peraturan tambahan dalam transaksi jual beli lada yang dilakukan baik di darat maupun dilaut, bahwa setiap transaksi yang tidak dilengkapi dokumen maka itu adalah transaksi ilegal, dan perdagangan ladanya bisa dirampas.

“jika ada perahu dagang memuat lada di pelabuhan Lampung, dan menjual kepada negara lain, maka perintah Sultan untuk merampas ladanya, dan kapalnya ditenggelamkan, Rampasan itu dibagi dua, sebagian rampasan itu dipersembahkan kepada sultan Banten, dan sebagian diberikan kepada orang yang menggalkan perdagangan ilegal itu (Nurhakim, 1985: 267).

Frekuensi perdagangan lada yang semakin meningkat mengakibatkan keuntungan perdagangan lada semakin tinggi bagi Kesultanan Banten, tak terkecuali masyarakat Lampung. Perluasan lahan dan pembudidayaan lada semakin massif di wilayah ini, sehingga penanaman dan pembudidayaan lada mampu merubah tatanan sosio-kultur baik di wilayah Banten dan Lampung.



## Penanaman dan Pengolahan Lada

Sumber: Sumatranjjes, hal. 22

Burger (1962: 49) menggambarkan betapa elite birokrat dan saudagar menjadi kaya raya, memiliki rumah mewah, tanah, kapal, dan bahkan kehidupan para buruh sekalipun. Stratifikasi sosial semakin menunjukkan jurang perbedaan dan tingkatannya bagaimana elit birokrat dan

saudagar perdagangan menjadi kaya raya pada satu sisi, dan kehidupan para buruh pada kondisi lainnya. Kehidupan para buruh lambat laun menjadi semakin dikendalikan para pemilik perkebunan.

Wilayah Lampung mampu menghasilkan lebih banyak lada daripada hasil budidaya lada di wilayah Banten sendiri. De Rovere van Breugell seorang pengusaha Belanda dengan pengalamannya dalam melakukan bisnis dengan Kesultanan Banten, melaporkan bahwa, Kesultanan Banten telah memasok seluruh Perusahaan dagang VOC dengan jumlah rata-rata 9.000 bahar selama satu abad. Bahkan pasokan lada ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah mencapai 19.000, 13.000, 11.000 bahar (Broersma, 1915: 168).

Dari angka-angka diatas jelas terlihat betapa hasil panen lada Lampung pada abad 17 dan 18 sangat besar. Pada kenyataannya, produksi lada tidak pernah terjadi seperti sekarang ini. Dengan asumsi dua kali lipat angka yang dikutip oleh Breugell sebagai rata-rata, Broersma memprediksi jumlah produksi lada mencapai lebih dari 50.000 pikul per tahun, meskipun ini hanya merupakan data perkiraan. Hal ini tentunya didukung dengan keberadaan bank-bank yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dalam mendukung budidaya Lada di

Lampung dengan cara menyalurkan kredit ke petani lada Lampung.

Budidaya Lada tersebar diberbagai wilayah di Lampung. Persebaran daerah lada dan hasil lada sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1 Wilayah dan Sebaran Lada di Lampung

Daerah	Jumlah lada yang dihasilkan
Seputih	1.889 Bahar
Telok	653 Bahar
Kalianda	1.432 Bahar
Sekampung	1.734 Bahar
Semangka	1.332 Bahar
Tulang Bawang	454 Bahar
Nibung	432 Bahar
Total	7.926 Bahar

Sumber: Jurnal, untuk Hindia Belanda Tahun 1862 bagian II halaman 141 e.v. dalam Broersma, Lampongsche Districten hal. 141

Disebutkan juga dalam laporan Braugell daerah yang banyak menghasilkan lada ialah daerah Sileb, wilayah yang terletak di sudut Teluk Semangka, dan merupakan wilayah di bawah penguasaan Inggris dalam Karesidenan Bengkulu. Daerah Silebar mampu menghasilkan lada dengan jumlah 207 bahar lada, dan sebagian besar

dikirimkan ke Banten dengan total 627 bahar. Berdasarkan sebaran wilayah penghasil lada di Lampung, sejak tahun 1760 hingga 1764 diperoleh data hasil budidaya lada dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Hasil Lada di Lampung Tahun 1760-1764

Tahun	Hasil Lada
1760	11.609 bahar
1761	7.992 bahar
1762	6.349 bahar
1763	9.684 bahar
1764	6.602 bahar

Sumber: Jurnal, untuk Hindia Belanda Tahun 1862 bagian II halaman 141 e.v. dalam Broersma, Lampongsche Districten hal. 141

Berdasarkan data diatas, bahwa tahun 1760 merupakan hasil maksimal budidaya lada sebanyak 11.609 bahar dan selanjutnya terus menurun ditahun-tahun setelahnya. Data diatas juga menunjukkan hasil rata-rata budidaya lada di Lampung berjumlah 25.341 picol per tahun. Penurunan besar terjadi pada paruh kedua abad kedelapan belas dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya penurunan ini.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan lada ialah faktor keamanan. Keresahan dan

ketiadaan rasa aman meningkat akibat semakin maraknya perampokan di darat dan perompakan di laut ketika akan menjual hasil panen lada. Kondisi ini ditambah dengan banyaknya kepala desa yang melakukan kegiatan perdagangan dengan berusaha menjual sebagian hasil lada kepada selain Banten, seperti kepada Inggris, Cina, dan Kesultanan Palembang.

Tabel. 4.3 Wilayah dan Sebaran Hasil Lada di Lampung Tahun 1780-1786

Wilayah	Tahun			
	1780	1781	1782	1786
Seputih	1.130	498	581	293
Telok	1.165	783	603	344
Kalianda	2.900	2.551	1.473	1.518
Sekampung	639	789	307	210
Semangka	800	1.239	1.088	175
Pamet	705	893	415	637
Tulang Bawang	100	37	20	25
Nibung	295	235	182	236
Total	7.734	7.024	4.669	3.438

Sumber: Jurnal, untuk Hindia Belanda Tahun 1862 bagian II halaman 141 e.v. dalam Broersma, Lampongsche Districten hal. 169

Jadi rata-rata 17.142 picol per tahun, yang sekali lagi luar biasa, lebih rendah dari dua puluh tahun sebelumnya. Saat perdagangan menurun, penanaman lada juga mengalami penurunan. Pada 1798-1802 rata-rata hasil lada hanya mencapai 6.514 picol per tahun dan pada 1810 rempah-rempah jenis lada hampir benar-benar menghilang dari situasi dipasaran. Keadaan ini semakin tidak jauh lebih baik, karan praktis tanpa adanya kedamaian dan kepastian harga maka dapat dipastikan petani lada di Lampung tidak membudidayakan kebun lada.

Ada saat ketika itu dianggap untuk memperkenalkan pengiriman paksa ke Pemerintah untuk lada dari penduduk Lampung. Itu tidak terjadi karena harganya telah naik terlalu banyak. Penyelidikan menyeluruh pada tahun 1841 menunjukkan bahwa Pemerintah harus membayar *f* 12.- dalam tembaga atau *f* 10.- dalam perak per pikul lada, sehingga setelah peningkatan dengan biaya yang diperlukan itu tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Petani Lampung mendapat pembayaran yang lebih tinggi dan harga pasar naik menjadi *f* 17 hingga *f* 18.



Perahu sebagai Alat Transportasi Lada (*Zuid Sumatra*, hal 155)

Petani lada menjual lada ke Bugis, Palembang, Madura, atau pedagang lainnya dan bepergian melalui jalur sungai menggunakan perahu. Perahu tradisional Lampung digunakan untuk mengangkut hasil lada, barang, tenaga, dan mempertimbangkan berapa keuntungan yang didapatkan dari harga pembelian. Bagian dari keuntungan mereka adalah bahwa mereka sering mengambil jumlah kecil hasil keuntungan dengan imbalan biji rami, kapas, dan beras, yang kemudian mereka perhitungkan dan diperdagangkan kembali dengan harga lebih tinggi.

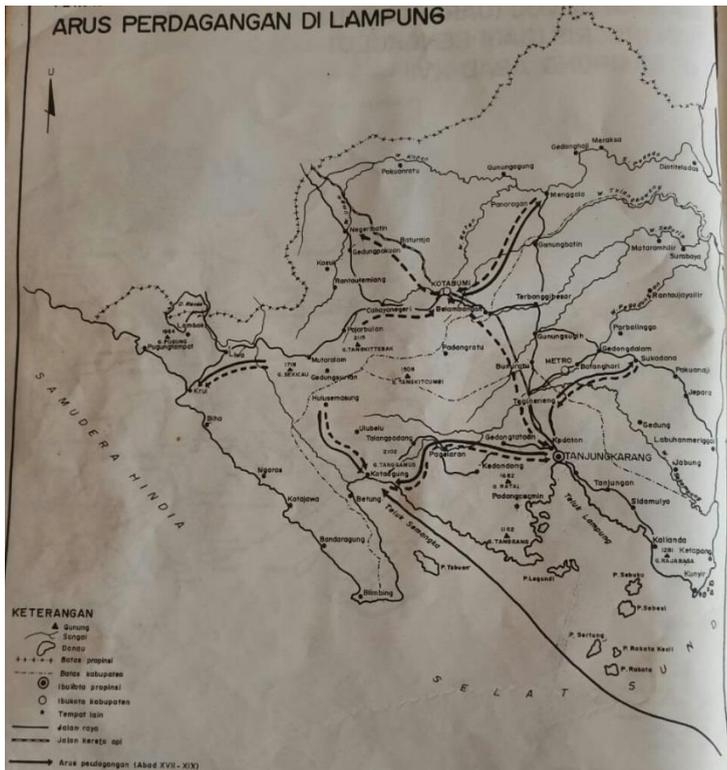
#### **4.3.2 Kondisi Perdagangan**

Jalinan perdagangan antara Lampung dengan Banten sudah terjadi sejak lama. Perdagangan antara dua daerah

berbeda pulau ini disebabkan karena adanya perasaan saling membutuhkan antara Banten dengan Lampung. Lalu lintas perdagangan, kemudian tidak hanya sebatas melibatkan antar individu tetapi berkembang menjadi jalinan perdagangan antarkelompok. Perkembangan teknologi, khususnya transportasi, dan pengetahuan navigasi menjadikan pertukaran sebagai suatu aktivitas yang sangat kompleks. Selain dari sudut pandang geografis, pola perdagangan Lampung-Banten juga dapat dilihat dari aspek sosiopolitik yang mewarnai dinamika masing-masing kelompok. Karena bagaimanapun juga keadaan sosial dan politik akan memberikan pengaruh terhadap jalannya aktivitas perdagangan antar keduanya.

Wilayah Lampung terletak di ujung selatan pulau Sumatera, dan langsung berhadapan dengan Selat Sunda penghubung ke wilayah Jawa. Begitu pentingnya Selat Malaka, maka kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka berusaha menunjukkan hegemoninya, terutama kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7-13. Menguasai Selat Malaka berarti menguasai perdagangan yang melalui jalur laut yang terpenting. Monopoli perdagangan berarti kemampuan memperoleh penghasilan yang lebih besar berupa pajak perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar dan berjaya. Salah satu cabang jalur sutra laut adalah Selat Sunda. Daerah Lampung

termasuk kedalam jalur cabang ini. Di Lampung pernah ditemukan benda-benda keramik peninggalan dinasti Han (Krom. 1956: 10) sebagai bukti pernah terjadi pelayaran taut dari dan ke Tiongkok pada awal tarikh masehi telah ada ke Lampung. Melalui jalur sutra laut dengan cabang ke arah Selat Sunda dan Laut Jawa terutama Jawa Barat.



Arus Perdagangan di Lampung masa Banten  
 Sumber: Sayuti, 1988. Peta Sejarah Provinsi Lampung

Menurut keputusan sultan Banten tertanggal 22 Februari 1663, ditetapkan bahwa, setiap penduduk Lampung diharuskan menanam dan memelihara Lada sebanyak 500

batang. Hasil-hasilnya dapat mereka jual kepada siapa saja, orang-orang Jawa, Cina, Belanda atau Inggris, tetapi lebih dahulu harus membawa hasil itu ke Banten. Bila ketentuan itu dilanggar, maka akan dilaksanakan hukuman yaitu dengan cara pelakunya akan diibuang beserta anak dan isterinya ke daerah Banten.

Hasil-hasil lada yang dibawa orang-orang Lampung dan diperdagangkan di Banten itu bebas pajak, tetapi untuk permasalahan harga jualnya ditentukan oleh pihak sultan. Mengenai hasil lain di Lampung terutama hasil hutan yang banyak dikirim ke Banten, seperti:

- a. Damar Sela yang harganya 1 real (f 2,50) tiap *bhaar*. Atau kira-kira tiga pikul. Dari harga ini, setiap harga jualnya dikenakan pajak 5% dan harus disetor kepada penguasa setempat.
- b. Rotan, yang di hitung dalam satuan bos terdiri atas 50 batang seharga 1 *real*. Pajak untuk produk rotan ini besarnya 10%.
- c. Lak;
- d. Gading gajah, yang harganya 22 *real* (+ f 55) setiap pikul;
- e. Ternak yang paling banyak di Lampung adalah kerbau yang harganya 4 - - 5 real (+ f 10, - - f 12.50), setiap ekor, sedangkan sapi dan kambing hanya sedikit terdapat Susu dari kedua hewan ini (Gonggong, 1993: 43).

Selain produk diatas, terdapat hasil bumi yang lain seperti beras dan kelapa, sehingga banyak dikirim ke Banten. Hasil tersebut terutama pada abad ke- 17 menjadi

komoditi yang banyak dikirim ke Banten. Memasuki abad ke-18 daerah Lampung telah stabil. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kemerosotan terhadap wibawa penguasa Banten. Banyak diantara para pegawai Kesultanan Banten (*Jenjen*) sering terjadi percekocokan dan perselisihan, terutama mengenai transaksi penjualan dan pembelian lada hitam asal Lampung.

Daerah Lampung pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab *Negarakertagama* (1365) yang memasukkan nama Lampung dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dengan demikian pelayaran di sekitar selat Sunda sudah memiliki keterhubungan juga dengan bangsa Cina, Arab dan Persia.

Sejak dulu ternyata komoditi lada merupakan komoditi ekspor pada saat itu. Tetapi yang sudah pasti komoditi lada sebagai bahan ekspor adalah pada masa Kesultanan Banten. Di sebelah utara Banten terdapat kerajaan Palembang yang mulai berperan dalam sejarah sejak awal abad ke 16. Antara Banten dan Palembang sering terjadi perebutan kekuasaan terutama untuk menguasai perdagangan lada di Lampung Utara.

Pernah terjadi pada tahun 1605 Banten menyerang Palembang di bawah pimpinan Sultan Muhammad yang

menyebabkan beliau tewas dalam penyerangan itu (Sayuti, 1993: 53). Daerah Tulangbawang menjadi daerah perebutan antara Sultan Banten dan Sultan Palembang. Wilayah Lampung bagian selatan dan tengah merupakan wilayah dibawah kekuasaan Banten sepenuhnya terutama dalam mengatur perdagangan lada. Dalam urusan pemerintahan setempat bagi Banten sudah cukup apabila setiap tahun penguasa di Lampung melakukan "seba" ke Banten, dan melaporkan berbagai perkembangan baik komoditas lada, keamanan, dan lainnya.

Akhir abad ke XVI hingga awal abad ke XVII, perdagangan lada didominasi oleh para pedagang local dengan perahu-perahu tradisional yang membeli lada langsung di pedalaman Lampung. Dengan jumlah hasil lada yang demikian besarnya, maka tak heran tentunya wilayah Lampung menjadi diperebutkan oleh dominasi kekuatan bangsa luar Lampung. Perebutan kekuasaan yang berasal dari luar Lampung dengan melibatkan Banten, Palembang, VOC hingga bangsa Inggris melalui EICnya yang berkedudukan di Bengkulu.

Bangsa asing dalam melakukan transaksi perdagangan lada tak jarang melakukan sistem barter, dengan cara menukar lada dengan pakaian. Pakaian dapat diajdikan sebagai alat tukar karena merupakan salah satu komoditi yang sangat populer pada masa itu di Sumatera, dan

sebagian besar kebutuhannya didatangkan dari luar Sumatera. Impor kain tidak mendapatkan pajak berupa cukai, sementara cukai untuk lada sebesar 10 persen dari harga jual lada (Roelofsz, 2016: 226).

Adapun harga jual lada ditetapkan dengan satuan real dengan ukuran lada dalam kemasan karung dengan bobot 50 pon (Arman, 2017: 42). Adapun harga jual lada dalam kurun waktu 1599 hingga tahun 1620 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Harga Lada

Tahun	Satuan	Harga
1599	Karung	3 real
1600	Karung	4-6 real
1608	Per 10 Karung	21 real
1612	Per 10 Karung	121 real
1614	Per 10 Karung	15 real
1616	Per 10 Karung	17 real
1617	Per 10 Karung	31 real
1618	Per 2 Karung	10 real
1619	Per Karung	2 real
1620	Per 10 Karung	5 sampai 7,5 real

Sumber: M.A.P Meilink Roelofsz. 2016. *Perdagangan Asia dan pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar 1630*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 402

Sejak saat itu yaitu abad ke 16 sampai 17, baik Palembang maupun Banten tidak lagi untuk saling menyerang terutama untuk memperebutkan Lampung Utara, tetapi setelah Kesultanan Palembang sudah sangat lemah karena himpitan VOC, Banten dapat menguasai juga Lampung

Utara. Dalam prasasti tembaga yang ditemukan di Bojong berangka tahun 1670. menyebutkan bahwa semua hasil lada sebelum dijual ke luar daerah, terlebih dahulu harus diselesaikan pembayaran pajak penjualan kepada jenang sebagai wakil Sultan Banten di Lampung.

Perdagangan lada pada masa pemerintahan Sultan Haji (1683-1687) hingga Sultan Zainal Arifin (1750-1752) semakin diperketat dengan adanya aturan bahwa barang siapa menjual lada tidak kepada Banten, apalagi berdagang lada dengan orang Palembang, maka yang bersangkutan harus ditangkap dan jika melawan boleh diikat dan sanak keluarganya harus dibawa ke Banten.

Demikian pula barang siapa yang merampok, atau menculik orang (perempuan) dilaut maupun di darat, tanpa mendapat perintah dari Kanjeng Sultan orang itu di hukum mati dan anak istrinya dibawa ke Surosoan dijadikan budak istana. Serta segala kekayaannya diserahkan kepada Kanjeng Sultan. Dan lagi . . . . dan jika ada orang Lampung hendak bepergian dengan perahu, baik membawa muatan ataupun tidak, hendaklah meminta cap (surat ijin) perahu punggawa dengan membayar satu talen. Mereka itu diperintah menanam merica lima ratus pohon tiap orangnya (Bukri dkk, 1981: 50-51).

Para Punggawa yang mengetahui dan membiarkan perdagangan illegal akan dipecat, serta dirinya berikut keluarganya akan dibawa ke Banten untuk dihukum dan keluarganya akan dijadikan budak istana. Apabila

transaksi perdagangan lada terjadi diwilayah lautan, maka seluruh muatan lada beserta perahunya, dapat dirampas untuk kemudian diserahkan kepada penguasa Banten.

Aturan tata niaga perdagangan lada beserta sanksinya ini juga berlaku untuk komoditas rempah jenis pala dan cengkeh (Nurhakim, 1989: 269). Selain itu terdapat aturan yang mengharuskan masyarakat Lampung untuk menanam lada sebanyak 500 batang per kepala untuk menjaga suplai lada ke Banten.

#### **4.3.3 Keadaan Ekonomi**

Sejak awal abad XVI, telah terjadi surplus lada di Banten, kemudian mulai dikembangkan sistem pendapatan baru dalam perdagangan lada dalam bentuk pajak lada guna mendukung pendapatan Banten. Gambaran terjadinya surplus lada ini semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qadir Kenari yang berkuasa pada tahun 1603, dimana Banten berhasil mengekspor sejumlah besar dengan jumlah 259.200 pound, ditambah dengan jumlah 8. 440 karung ke pasaran Eropa.

Pada tahun selanjutnya, yakni tahun 1618, 10 kapal dari negeri China berbobot 1000-1500 Ton datang ke pelabuhan Banten dan mengangkut lada ke negerinya (Chijs 1881: 61; Blusse, 1983: 155 dalam Reid Asia Tenggara dalam Kurun Niaga hal. 234).

Kebijakan lada pada masa Sultan Abdul Muhasin (1690-1733) mengeluarkan kebijakan terkait penanaman lada yang tertuang dalam prasasti Bojong (bertarikh 1690) bahwa sultan menetapkan bahwa para punggawa Lampung yang membawa lada ke Banten harus membawa cap yang sah serta surat-surat berisi keterangan tentang banyaknya lada yang dibawa sebagai laporan kepada sultan. Tujuan pemberian cap sebagai identitas lada yang sah diperjualbelikan ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan cukai lada dari Lampung, dan membawa konsekuensi bahwa setiap perdagangan tanpa disertai cap resmi kerajaan dianggap perdagangan ilegal dan diperbolehkan di sita serta kapalnya ditenggelamkan.

Guna semakin memperkuat dominasi perdagangan lada, sekaligus memonopoli perdagangan di wilayah Lampung khususnya daerah Tulang Bawang yang jauh dari jangkauan Banten. Apalagi mengingat daerah ini lebih dekat dengan kesultanan Palembang maka, dimasa Sultan Syifai Zainul Arifin yang berkuasa sejak tahun 1733 hingga 1750, dikeluarkanlah dua buah prasasti di tahun 1746 untuk Lampung.

Prasasti pertama berisi tentang pengumuman pengangkatan punyimbang Tulangbawang yakni Jayasinga sebagai wakil Sultan di daerah Tulang Bawang

dengan gelar Pangeran, dengan pusat kekuasaan di daerah Tagi (Tuuk, 1884: 191-209), dengan kekuasaan meliputi segala perkara perdata dan pidana harus berdasarkan kesaksian Jayasinga. Sedangkan prasasti yang kedua menetapkan kepada punggawa di Tulang Bawang tentang tindak pidana dan sanksinya, yakni:

“Jika ada tindakan merusak tanaman lada maka hukumannya 30 real setiap pohon. Kepada mereka juga diperintahkan menanam lada sebanyak seribu pohon setiap orang, dan memiliharnya turusnya. Selain itu, diumumkan pula bahwa barangsiapa yang menjual lada kepada orang Palembang harus ditangkap, dan jika melawan dan berteriak boleh diikat dan sekeluarganya dibawa ke Banten untuk dijadikan pelayan dan Budak. Untuk para punggawa yang merestui atau mengetahui perdagangan ilegal dipecat dan sekeluarganya dibawa ke Banten. Hukum lain juga berlaku bagi mereka yang menjual lada di lautan, seluruh muatan berikut perahunya dirampas untuk diserahkan kepada sultan, selain itu prasasti ini juga mengabarkan bahwa syarat sahnya jual beli lada dengan cap raja, serta larangan memperdagangkan komoditas cengkeh, dan pala” (Tuuk, 1884: 209).

Prasasti ini memiliki bunyi hukum yang begitu keras dan mengikat bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap jual beli komoditas lada. Selain itu keberadaan prasasti ini juga dalam rangka meredam gejolak sosial yang terjadi di wilayah Lampung khususnya Tulang Bawang. Gejolak yang dimaksud ialah dorongan otonomi daerah Tulang Bawang, dikarenakan adanya faktor

keberadaan Kesultanan Palembang yang berbatasan darat secara langsung dengan wilayah ini.

#### **4.3.4 Keadaan Sosial**

Masyarakat Lampung yang sangat menjunjung tinggi falsafah hidup *pil pesenggiri* sebagai harga diri dalam praktek pemerintahan dan nilai *prestise* dan kedudukan serta status sosial di tengah masyarakat adat Lampung telah menyebabkan para kepala marga di Lampung untuk *seba* ke Banten. *Seba* selain untuk menyampaikan pengakuan serta tunduk dan patuhnya para punyimbang terhadap kekuasaan Sultan, dan sebagai konsekuensi serta imbalannya Sultan mengakui kedudukan para Punyimbang sebagai pemimpin kelompoknya dengan persyaratan tertentu seperti mampu menjamin pasokan lada ke Banten yang ditulis dalam prasasti/piagam yang terukir di tembaga dan beragam hadiah, simbolik dan gelar kebangsawanan dengan demikian mampu menaikkan *privilege* marga pemiliknya (Canne, 1862: 515).

Wilayah *Kebuayan* satu dengan yang lain merupakan wilayah *Kebuayan* yang terpisah-pisah, dan kondisi inilah yang memudahkan Banten menanamkan pengaruhnya di Lampung. Terlebih dalam perkembangannya, para penyimbang adat (pemimpin) di Lampung kemudian satu

persatu melakukan *seba* ke Banten, hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk pengakuan pemimpin adat di Lampung terhadap kekuasaan Banten.



Aktivitas Perdagangan Lada

Sumber: <http://noordkustbanka.blogspot.com>

Kegiatan *seba* para *punyimbang* ini pada sisi yang lain semakin meneguhkan kedudukan para *punyimbang* sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat adat tetap mendapat pengakuan dari Sultan Banten. Sebagai tanda pengakuan Sultan Banten terhadap para *punyimbang* adat ini, dibuatlah piagam (prasasti) yang ditulis diatas lempengan tembaga ditulis dengan huruf arab dan Lampung menggunakan bahasa Jawa Banten. Disamping itu, Sultan Banten juga memberikan berbagai macam

gelar kepada setiap penyimbang adat seperti punggawa, Pangeran, Ngabehi, Raden, dan sebagainya. Gelar ini hingga kini masih dapat kita jumpai pada masyarakat Lampung.

Berdasarkan surat *controleur* di Telukbetung tahun 1883 disebutkan bahwa para penyimbang berhak menggunakan atribut/gelar yang diberikan sultan Banten.

Adapun atribut/gelar tersebut antara lain:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Siger,                | 15. Dader           |
| 2. Slenggam Dalem,       | 16. Tmbak Bercbang  |
| 3. Pangga,               | 17. Kandang Rarang, |
| 4. Burung Garuda,        | 18. Jimat Agung,    |
| 5. Jempana,              | 19. Pencarengan,    |
| 6. Rato,                 | 20. Lawang Kuri,    |
| 7. Penduk wo Belas       | 21. Peninjauan,     |
| 8. Sabuk Jaran,          | 22. Kupiah,         |
| 9. Payung Hendak,        | 23. Ngarih Kukikat, |
| 10. Payung Gubir,        | 24. Jajalan Putri,  |
| 11. Payung Agung,        | 25. Pepadon,        |
| 12. Payung Hitam,        | 26. Pelita Empat,   |
| 13. Tumbak Gegakan Merak | 27. Pancah Aji.     |
| 14. Mendaringin,         |                     |
- (Bukri dkk, 1981: 50-51).

Pada masa kekuasaannya di Lampung, Kesultanan Banten menganggap bahwa kepentingan petani harus berada di bawah kepentingan negara, sehingga memiliki konsekuensi segala bentuk ketidakpatuhan daerah taklukan berarti bernilai pemberontakan. Ini pernah terjadi saat 2 orang kaya di Lampung menolak untuk

mengirimkan hasil ladanya ke Banten, dan lebih memilih melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa China, sehingga Sultan Banten mengirimkan 20 perahu perang Banten untuk menumpas dan mengakhiri pembangkangan yang terjadi di Lampung (Collenbrader 1900: Montana, 1988: 20).



Surat Sultan Banten Tentang Laporan adanya Bajak Laut (Pudjiastuti, 1995: 35)

Untuk mengatasi segala penolakan dan gejolak yang mungkin muncul setelah pengerahan kekuatan militer, maka Sultan Banten dengan inisiatifnya, membuat Undang-Undang bagi penguasa di Lampung beserta rakyat Lampung yang berisi antara lain bahwa segala peraturan sultan harus ditaati dan menerbitkan kebijakan cukai lada hanya untuk Banten mulai tahun 1662 M. Terlebih dalam perkembangan perdagangan lada, Banten

mengalami kekurangan produksi hasil lada, dan semakin tergantung dengan Lampung dengan kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung peningkatan produksi lada.

Keadaan ini diperkuat dengan ancaman kepada para kepala marga di Lampung, bahwa yang berhak mengangkat dan memecat kepala marga hanyalah sultan, sehingga mereka diharuskan untuk mengumpulkan lada, transaksi jual belilada harus dengan cap. Para penyimbang adat sekaligus kepala pemerintahan di Lampung juga diharuskan memberikan jaminan keamanan dan perizinan bagi para pedagang berikut pajak yang harus dibayar kepada Sultan akibat dari perdagangan lada di wilayah Lampung.

Selain gambaran sosial para elite, dan para buruh, terdapat juga sekelompok bandit kriminal bajak laut yang sering melakukan pembajakan terhadap pengiriman lada ke Banten. Kondisi ini terjadi mengingat daya tarik Lampung dalam bidang ekonomi dan perdagangan pada masanya memaksa banyak pihak tertarik untuk terlibat ambil bagian di dalamnya. Atsushi memberikan kesimpulan bahwa produk yang paling bernilai dan berharga seperti lada, damar, emas, rotan, dan lainnya menjadi alasan yang mendorong dan memotivasi

berbagai kelompok pedagang dari luar untuk datang sekaligus berdagang di Lampung sepanjang abad ke-18 (Atsushi, 45).

Para bajak laut merupakan orang-orang bugis yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari satu pulau ke pulau lainnya, kemudian menetap di daerah Lampung bagian selatan sekitar daerah Semangka. Keberadaan mereka merupakan imbas dari takluknya Hasanuddin melalui perjanjian Bongaya, dan khusus di Lampung untuk mengambil lada yang akan dikirimkan ke Batavia. Hal ini terlihat dari Laporan Sultan Abulmufakhir Muhammad Aliuddin kepada Willem Arnold Alting mengenai pembajakan yang terjadi di beberapa Kampung di Lampung sehingga lada tidak sampai ke Banten. Surat ini ditulis pada tahun 1206 H atau 1792. Surat ini disimpan di Bagian Naskah Timur, Universitas-Bibliotheek, Leiden Belanda dalam bundel UB Cod. Or.2241 III b. 1 (Klt 1/No. 68).

#### **4.3.5 Kondisi Politik**

Pengaruh Banten di Lampung dalam hubungannya dapat dikemukakan, bahwa pada waktu itu Lampung bukan merupakan suatu daerah *unitaris* yang dikuasai dalam bentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Kondisi ini menyebabkan sejarah kerajaan-kerajaan tidak

ditemukan sebagaimana ada di tempat-tempat lain. Masyarakat Lampung yang ada hanyalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang disebut *kebuayaan*. *Kebuayaan* merupakan suatu kesatuan geneologis pada daerah-daerah tertentu yang didiami secara turun temurun.

Masa kekuasaan Banten ditandai dengan fakta bahwa setiap kesatuan masyarakat adat memiliki jenjang/ strata yang berbeda-beda. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: 1) Menyanak (kerabat kecil serumah), 2) Suku; 3) Tiyuh atau Pekon, 4) Marga atau Bandar, dan dipimpin oleh anak sulung lelaki dari keturunan tertua (pendiri kampung) yang memiliki kedudukan sebagai punyimbang penerus keturunan atau sebatin. Kepemimpinan dalam masyarakat adat dilaksanakan dengan masyarakat prowatin adat (ketua-ketua adat) yang mewakili setiap kelompok *kebuayaan*. Dalam menjalankan pemerintahan adat para punyimbang dibantu oleh beberapa anggota, seperti:

1. Menyanak wari (sanak kerabat) dengan kedudukan sebagai pembarap (wakil);
2. Pepang penyambut (dahan pengganti);
3. Tungkok (tongkat);
4. Penglaku (petugas);
5. Kepala meranai (kepala bujang) (Hadikusuma, 2014: 122).

Sistem pemerintahan kebuayaan ini pada dasarnya sudah lama dikenal sejak awal masyarakat Lampung menetap dan mendiami daerah dataran tinggi Sekala Berak di Belalau. Sistem pemerintahan ini terus tumbuh berkembang dan setelah masuknya agama Islam dan pengaruh Banten sistem ini tetap diakui. Hal ini dapat kita ketahui dari silsilah-silsilah dari para penyumbang adat Lampung yang banyak ditulis dalam buku-buku, pelepah kulit kayu, di mana tidak jarang ada kerabat kebuayaan ini sudah mencapai dua puluh empat generasi.

Keadaan ini tentunya memiliki kesesuaian dengan masa permulaan berkembangnya agama Islam dan masuknya pengaruh Banten di Lampung. Jadi secara ringkas dapat dikatakan, bahwa masa masuknya Islam ke Lampung sekaligus merupakan masuknya pengaruh *Banten*. Dan pengaruh ini ternyata sedemikian mendalamnya, sehingga banyak memberikan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya pada masyarakat Lampung.

Lampung dalam sejarah pemerintahan kunonya pernah mengenal sistem pemerintahan keratuan dengan jumlah lima sampai enam keratuan, tetapi semua pemerintahan keratuan ini membrikan pengakuan terhadap kekuasaan kekuatan kesultanan Banten. Hal ini dapat kita lihat dari *Bukdalung* (tamtra-prasasti) yang ditulis oleh

penguasa Banten dalam mengatur wilayah Lampung. Dalam hal penguasaan tanah, di Lampung para punyimbang yang memimpin kebuayan bermusyawarah dan mufakat untuk hanya mengakui lima pemerintahan keratuan yang berhak atas tanah dan kepemimpinan marga di seluruh Lampung.

Setiap keratuan dipimpin dan diatur oleh para Ratu atau Umpu yang dipilih berdasarkan asas kepemimpinan dalam sistem *primus inter pares*. Kepemimpinan ini kemudian diwariskan kepada anak sulung laki-laki dalam keratuan ini. Adapun keratuan-keratuan yang ada di Lampung yakni sebagai berikut:

1. Keratuan Ratu di Puncak
2. Keratuan Ratu di Balau
3. Keratuan Ratu di Pemanggilan
4. Keratuan Ratu di Pugung
5. Keratuan Ratu Darah Putih (Bukri dkk, 1981: 54).

Dari Lima Keratuan ini yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam kebuayaannya adalah Abung Sewo Mego (Abung Sembilan Marga). Tata Adat Abung yang kerriudian menjadi Abung Sewo Mego menurut sumber yang ada didirikan oleh empat bersaudara, anak dari Ratu di Puncak, yaitu:

1. Unyai (Minak Prio Disow)
2. Unyi (Minak di Bumi/Minak Sangalang Bumi)

3. Nuban (Wanita) diwakili putra beliau Ratu Sang Balai Kuang)
4. Subing (Minak Permata Jagat) (Bukri dkk, 1981: 54).

Pada abad XVI di Bojong Penagan timbul Buay Kunang setelah di antara mereka itu melakukan *seba* ke Banten. Dalam perkembangannya, banyak Buay-buay yang lain mengikti langkah Buay Kunang untuk mendapatkan pengakuan, dan untuk selanjutnya *seba* (berkunjung) ke Banten tersebut diikuti oleh kebuayan-kebuayan lainnya yang berada di sekitar Keratuan Rau di Puncak. Kebuayan yang kemudian hari melakukan *seba* di antaranya berasal dari kebuayan lain seperti:

1. Adat pepadon Buay Lima di daerah Umpu, Way Kanan yang didirikan oleh keluarga-keluarga dari ,keratuan Pemanggilan (Belalau). Dapat digolongkan disini masyarakat adat Sungkay dan sekitarnya.
2. Adat Pepadon Paksi Pak di Tulang Bawang didirikan oleh keluarga dari Catur tunggal kebuayan inti yaitu: Buay Bulan. Temagoan, Buay Umpu, dan Buay Aji.
3. Adat Pepadon Pubian di daerah Pubian yang berasal dari Keratuan Balau dan Keratuan Pugung yang kemudian dikenal dengan adat Pubian Telu suku (Bukri dkk, 1981: 55).

Di samping masyarakat Lampung yang tersebut di atas terdapat pula masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah Lampung Peminggir. Peminggir ialah sebutan untuk kelompok masyarakat yang menempati daerah

Lampung Barat (Krui), Rajabasa (Kalianda), Ranau, dan Telukbetung. Sebagai akibat dari aktivitas *seba* para penyimbang ke Banten di mana pengurus kebangsawanan dalam kedudukan masyarakat diperlukan, maka kebuayaan dalam Keratuan Ratu di Puncak meningkatkan sistem tata ketatanegaraan dalam bentuk pemerintahan adat pepadun.

Sistem pemerintahan yang dimaksud yaitu suatu sistem kehidupan masyarakat, di mana semua persoalan hidup warga masyarakat, dan pemerintahan. Adat Istiadat sosial, ekonomi, berdasarkan musyawarah mufakat kepenyimbangan (proatin). Adat pepadun itu mempunyai tiga tingkatan: 1) Adat penyimbang marga, 2) Adat penyimbang tiyuh, 3) Adat penyimbang suku.

Oleh karena sifat hubungan antara pemerintahan Kesultanan Banten dengan Lampung hanya menjadi daerah protektorat (pelindung), sehingga Banten tidak mencampuri pemerintahan adat setempat. Maka masing-masing pemerintahan adat di Lampung dalam sistem pemerintahan kebuayannya menjalankan pemerintahan sendiri-sendiri. Pemerintahan Banten hanya menempatkan satu perwakilannya (*Jenjem*) ditempat yang strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan pasokan lada dari Lampung ke Banten.

#### **4.4 Gambaran Perburuhan pada Masa Kesultanan Banten**

Bagi pedagang awal Eropa, dalam membantu urusan tata niaga di pelabuhan mereka berusaha untuk menyewa para buruh di pelabuhan dengan upah yang dirasa begitu besar. Di wilayah Kesultanan Banten, termasuk daerah Lampung seorang buruh dibayar untuk bekerja dengan upah 3 gantang per hari. Dengan gambaran bahwa tidak ada tenaga buruh bayaran yang bebas dan bekerja secara bebas untuk sementara.

Buruh Bumiputera hanya dapat disewa dan dipekerjakan oleh pedagang dari pemiliknya setelah dilakukan peminjaman jasa buruh dari majikannya. Para majikan biasanya selalu meminta bayaran tinggi untuk jasa para buruh miliknya. Karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan setiap majikan untuk menyewakan budak-budak mereka. Para pedagang dari Eropa membayar budak-budak itu dengan sejumlah uang yang akan diberikan kepada tuannya, kemudian mereka dapat menggunakan tenaga budak itu untuk pekerjaan apapun yang diinginkan (Ibrahim, 1688: 177).

Pada masa ini, buruh adalah hak milik majikan suatu ikatan yang umumnya didasarkan atas utang piutang, yang ketaatannya bersifat kuat, akrab dan mengikat, namun juga sekaligus dapat berpindah atau diperjualbelikan. Kepemilikan

diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kehidupan para buruh baik persoalan ekonomi, gaji hingga hidup dan matinya seorang buruh. Keadaan ini tak ubahnya perbudakan manusia, dengan segala dalih dan pijakannya, setiap buruh seperti budak-budak milik tuannya.

Aturan hukum di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia berisi sejumlah ketentuan yang dapat membuat seseorang menjadi budak. Perburuhan sendiri di Indonesia hingga daerah Lampung sendiri sudah merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan oleh orangtuanya dengan berbagai alasan dan keadaan. Perburuhan dengan awal sebagai seorang budak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewarisi status buruh orangtuanya;
2. Dijual menjadi buruh oleh orangtua, suami, atau diri sendiri;
3. Tertawan dalam perang;
4. Hukuman pengadilan (atau ketidakmampuan untuk membayar denda);
5. Gagal membayar hutang (Reid, 2014: 150).

Adapun upah untuk setiap buruh kerja untuk wilayah Indonesia dalam kurun niaga abad ke XV hingga awal abad ke XVII begitu beragam. Keberagaman upah yang diterima oleh setiap buruh berupa uang maupun penggantian uang dengan makanan pokok, seperti nampak pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Upah Buruh pada Abad XV-XVII

Lokasi	Sumber	Upah Harian	Upah Rata-Rata Beras (dalam Gantang)	Upah sebagai kelipatan kebutuhan beras setiap hari
Banten 1596	Lodewycksz 1598: 129	1.000 cash (budak)	3,0	15,0
Jambi	EIC Merchant 1615: 201	12 peni+ makanan (Orang Cina)	3,4	17,0
Aceh	Willemsz 1542: 508-520	0,75 mas (budak)	2,2	11,0
Melaka	Manguin	Dibayar dengan beras	4,0	20,0

Sumber: Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*: 2014 hal. 150

Utang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya praktek perburuhan, apakah diperoleh melalui kegiatan perdagangan, kalah judi, ketidakmampuan dalam membayar mas kawin, gagal panen atau terjadinya bencana yang menyebabkan kerugian. Adanya keterkaitan erat antara pihak berhutang dan kewajiban memburuh, serta adanya kecenderungan di pihak majikan untuk menggunakan uang muka dan bukan upah yang memadai untuk mempertahankan jumlah tenaga kerjanya. Sebelum berkembangnya sistem kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia, kewajiban yang

melekat pada setiap individu yang memiliki hutang dipatuhi secara hukum, dan dilaksanakan secara ketat. Dengan kata lain, menurut Galvao (1544: 126) mereka tidak pernah mengingkari hutangnya, siapapun yang tidak mengakui hutangnya, dan jika tertangkap maka sangsi berupa hukuman mati telah menanti.

Dengan tidak adanya mekanisme kerja dengan sistem buruh upah yang bebas, keterikatan buruh dengan penyedia pekerjaan menjadi sumber utama terjadinya mobilitas buruh. Umumnya, kelompok masyarakat yang kuat dan kaya menjadi aktor utama yang mampu mempekerjakan kaum buruh.

## Daftar Pustaka

- Anhar Gonggong. 1993. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. hal. 43
- Anthony Reid. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*: 2014 hal. 150
- Antonio Galvao. 1544. *A Treatise on the Moluccas, Probably the Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost Histona das Molucas*, salinan, Hubert Jacobs S.J. Rome, Jesuit Historical Institute. 1971. Hal. 126
- Ota Atsushi. 2009. *Perubahan Rejim dan Dinamika Sosial di Banten: Masyarakat, Negara, dan Dunia Luar Banten 1750-1830*. Serang: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Press
- Broersma. 1916. *Lampongsche Districten. De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij*. hal. 141
- Bukri, et.al. 1981. *Sejarah Daerah Lampung*. Depdikbud: Jakarta. hal. 50-51
- Burger dan Prayudi. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Pradnya Paramita: Djakarta. Hal. 49
- Chijs 1881: 61; Blusse, 1983: 155 dalam Anthony Reid. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jiid 1: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor hal. 234
- Collenbrader, HT. 1900. *Dagh Register Gebonden in Costed Batavia Anno 1641-1642*. S'Gravenhage.
- Dedi Arman. 2017. *Dari Hulu Ke Hilir Batanghari: Aktivitas Perdagangan Lada di Jambi Abad XVI-XVII*. BPBD

Kepulauan Riau. Direktorat Jendral Kebudayaan  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. hal.  
42

H.N van der. Tuuk. 1884. *Lampongsche Pijagens  
Medegedeeld*. BKI, XXIX. Hal. 209

Hilman Hadikusuma, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat di  
Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. hal 122.

Hilman Hadikusuma. 1989. *Adat Istiadat Daerah Lampung*.  
Depdikbud: Jakarta: hal. 7–8

Husin Sayuti. 1993. *Daerah Lampung Pada Sisi Jalan Sutra  
Dari Awal Tarikh Masehi Sampai Abad Ke-16* dalam  
R.Z Leirissa (ed). Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur  
Sutera. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
Jakarta. hal. 25

M.A.P Meilink Roelofsz. 2016. *Perdagangan Asia dan  
pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar  
1630*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 226

Muhammad Ibn Ibrahim. 1688. *The Ship of Sulaiman*,  
terjemahan dari The Persian by J.O Kane. London.  
Routladge and Kegan Paul. 1972.. hal. 177

Nurhakim, Lukman & Moh. Ali Fadillah. 1990. *Lada: Politik  
Ekonomi Banten di Lampung* dalam Prosedings Analisis  
Hasil Penelitian Arkeologi III: Kajian Agrikultur  
Berdasarkan Data Arkeologi. Depdikbud: Jakarta. hal.  
268

*Zuid Sumatra*, hal 155

## **BAB V**

### **LAMPUNG PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA**

Saat Banten telah kehilangan kekuasaannya di Lampung dan dapat dieksploitasi oleh unsur-unsur asing guna mencari keuntungan, sedangkan konflik internal di Banten sering menimbulkan peperangan berdarah. Sebagian penduduk telah bergabung dengan perampok-perampok dan menyerbu pedalaman, dan melakukan pembunuhan disertai penculikan. Tahun 1738 diberikan lagi hak kepada Belanda untuk masuk lebih dalam ke pedalaman, dan di dekat Bumi Agung VOC mendirikan benteng *Valken Oog* (Mata Gamela) untuk menjamin keamanan penyerahan Lada (Gonggong, 1993: 43). Adapun hak-hak bagi wilayah pedalaman itu didapat setelah Belanda bertindak sebagai hakim atas permintaan Palembang dan Banten mengenai perkara sebagian tanah yang menjadi sengketa di Lampung.

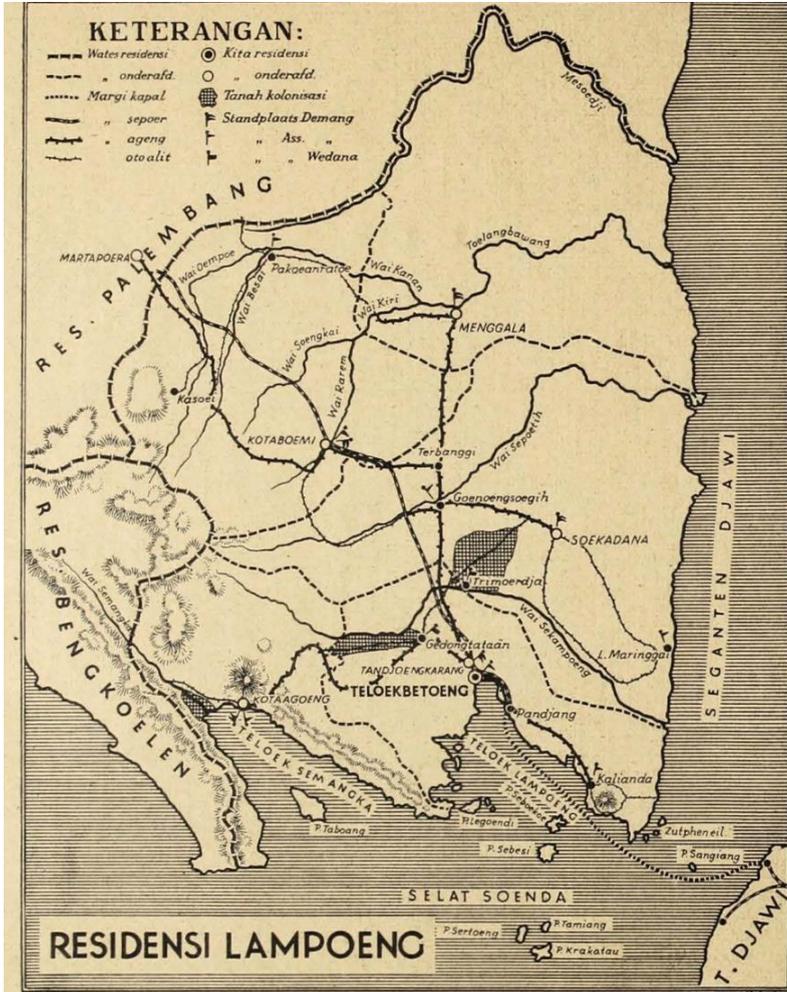
Pada waktu itu orang Lampung sudah biasa membawa lada ke Banten dan di situlah Belanda membelinya dari Sultan Banten, ketika VOC berdiri pada permulaan abad XVII. Bahkan jauh sebelum pembentukan VOC, orang Belanda sudah mengenal Selat Sunda. Pada tanggal 23 Agustus 1924 VOC sudah memutuskan untuk menduduki Pulau Besi dan Sebesi, serta mendirikan rumah di sana. Tetapi karena adanya

kekacauan dan serangan penyakit malaria, maka pemukiman ini ditinggalkan pada tahun 1625. Suatu hal pula yang perlu diingat bahwa pada abad XVII itu timbul pertentangan antara Belanda dan Inggris, terutama di wilayah Sumatera khususnya di wilayah bagian Selatan mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu.

Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Coen pada tahun 1620 merampas kapal-kapal dagang Inggris di Tiku. Tetapi kemudian pertentangan ini mereda setelah datangnya instruksi dari kerajaan Belanda, meskipun hal ini terulang lagi pada tahun 1624, di mana sejak itu Belanda memperoleh keunggulan nyata di Indonesia. Orang Inggris berusaha menyaingi Batavia yang menjadi pusat perdagangan VOC, yaitu dengan membangun pangkalan di Pulau Legundi pulau di Selatan Lampung. Pembangunan ini sendiri pada akhirnya menemui kegagalan akibat iklimnya yang tidak tertahankan oleh mereka.

Survei pertama VOC di Lampung dengan keinginan untuk berkuasa di Lampung adalah ketika mereka pada tanggal 22 Juni - 10 Juli 1661 mengirimkan dua buah kapalnya ke Teluk Semangka. Pengiriman armada ini bertujuan untuk mencari tempat berlabuh yang lebih baik dan menyempurnakan peta yang pernah dibuat oleh Kaartemaker van de Cone. Tetapi permulaan ikut campurnya VOC mengenai soal Lampung

barulah tahun 1682 setelah terjadinya pergolakan politik di Kesultanan Banten.



Peta Karesidenan Lampung  
 Sumber: Probonegoro, 1942: 17

Pada tanggal 6 Agustus 1682 pagi hari, mereka menerima instruksi dari Gubemur Jenderal, di mana antara lain disebutkan:

1. Bahwa setelah Sultan Haji berkuasa, maka VOC berkewajiban untuk melindungi Banten di Sumatra, yaitu wilayah Selebar dan Lampung yang terletak antara Kerajaan Palembang dan daerah Mayuta hingga Indrapura.
2. Menguasai perdagangan lada atau menjajagi kemungkinan untuk menguasai perdagangan lada.
3. Apabila sambutan orang Lampung itu baik, maka van der Schuur harus mencari tempat yang baik untuk mengawasi perdagangan merica di Selebar dan Ketahun.
4. Mengusir orang Inggris di Lampung dengan secara ramah-tamah tapi kalau perlu dengan kekerasan. Ekspedisi van der Schuur berangkat sore hari itu juga dari Batavia, tanggal 8 Agustus 1682 mereka singgah di Banten untuk melapor kepada Mayor Issac de Saint Martin dan Rad van Banten (Bukri, 1981: 60).

Di daerah ini pun penduduk tidak menyambut dengan hangat kedatangan VOC bahkan banyak penduduk menghindar dan mengungsi. Rupanya keadaan politik di Banten mempunyai pengaruh yang besar di Lampung. Ternyata sebagian besar penduduk di sini masih memihak Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini bukanlah tidak ada sebabnya. Ketika timbul perang antara Sultan Ageng Tirtayasa melawan Sultan Haji yang dibantu VOC itu, pada bulan Juli 1682 Sultan Ageng Tirtayasa pernah mengirimkan delapan pencalang ke Lampung dengan tugas mengadakan mobilisasi umum di sini untuk meneruskan perang dan mendirikan gudang lada di Lampung. Kiranya maksud ini jelas bahwa terniat pada Sultan Ageng Tirtayasa untuk menjadikan Lampung sebagai basis perjuangannya

yang baru di Lampung, meskipun terdapat kelompok yang memihak Sultan Haji dan VOC. Di antaranya Jenang Raja Ngembar yang baru saja menduduki tahta/jabatan di Semangka menggantikan pamannya Pangeran Purbanegara. Karena itu Sultan Ageng Tirtayasa memberikan intruksi kepada Kepala Menaran Aria Suryajaya untuk menangkap atau membunuh Raja Ngembar.

Arya Suryajaya, melaksanakan intruksi ini dan bekerjasama dengan empat puluh pencalang dengan kekuatan bersenjata yang terdiri dari para pejuang dari Rajabasa, Merak, Jo, Pangkal, Telukbetung, Keteguhan, Pedada, dan Menanga Ratai, desa-desa di daerah Lampung Pesisir Telukbetung. Arya Surajaya berhasil menangkap Raja Ngembar, Dipati-Dipati beserta anak buahnya sejumlah dua ribu orang dan bermaksud membawanya ke Banten. Tetapi sementara itu ia mendengar kabar tentang berlabuhnya kapal-kapal VOC di Karang Kandang, karena itu ia membatalkan pelayarannya yang semula telah dilakukannya.

Raja Ngembar ditinggalkan di Pulau Legundi dan Arya Surajaya berlayar ke Teluk Betung dan terus ke pedalaman. V.d. Schuur tidak mengejar Arya Surajaya, tetapi berlayar ke kampung Ratai di Teluk Sabu, setelah mendapat kabar bahwa di sana ada perahu Selebar penuh dengan muatan lada. Waktu itu rakyat Silebar banyak menyembunyikan kapal-kapal yang

bermuatan lada di tepi-tepi pantai atau anak-anak sungai di hutan dan semak-semak, dengan demikian ia bermaksud menghindari VOC. Muara sungai tempat bersembunyi itu lalu diberi berpagar sebagai penghalang dan juga dengan kapal perang kecil, berkekuatan empat puluh buah dengan seribu dua ratus pasukan yang antara lain bersenjatakan pula dua ratus bedil di bawah komando Nakhoda Kalipa, dan Panjang.

Menghadapi kenyataan ini lalu VOC menggunakan taktik diplomasi. Mereka mengirimkan seorang ulama bernama Tuan Mansyur dengan tugas membujuk orang-orang Lampung dan Selebar. Tuan Mashyur berhasil, sehingga orang Lampung dan Silebar itu mau menjual hasil ladanya kepada VOC. Harganya waktu itu sebelas ringgit tiap bahar. Secara ringkas dapatlah dikatakan bahwa ekspedisi Van de Schuur gagal menjalankan tugasnya. Di Lampung mereka tidak mendapat sambutan yang baik dan tidak dapat menguasai perdagangan lada, apalagi mendirikan benteng. Ketika pada tanggal 21 Nopember 1682 mereka pulang ke Jawa, kapal-kapal mereka hanya memuat 744.188 ton dengan harga f. 62.292,312.

Memasuki abad XVIII keadaan di Lampung belum stabil secara politik dan keamanan. Kepemimpinan Sultan mulai mengalami degradasi kepercayaan, dan kehilangan wibawa. Banyak diantara para abdi dan pegawai (*Jenjen*) Kesultanan

Banten di Lampung sering terlibat konflik dan perselisihan, terutama mengenai transaksi jual-beli lada. Pada tahun 1734, masyarakat Lampung tidak merasa terikat dengan keharusan menjual lada ke Banten, banyak daerah di Lampung seperti terjadi di daerah Tulangbawang yang lebih menyukai melakukan transaksi perdagangan lada dengan kesultanan Palembang. Hal ini terjadi karena selain lebih dekat ke Palembang, harga jual lada juga relatif lebih tinggi daripada menjual hasil lada ke Banten, ditambah bahwa pengiriman lada ke Palembang lebih ekonomis dari sisi biaya pengiriman lada.

Guna memulihkan kewibawaan kesultanan Banten di wilayah Tulangbawang, maka Sultan Zainul Arifin meminta bantuan pasukan kepada VOC, dengan imbalan kebebasan melakukan perdagangan lada di Lampung. Pasukan VOC dikirimkan ke Tulangbawang dan mampu memadamkan gejolak perlawanan yang terjadi serta mengembalikan ketaatan daerah ini di bawah kekuasaan Sultan Banten. Dalam usaha mengawasi tata niaga perdagangan Lada Lampung sebagai akibat dari jasa VOC selama peperangan memadamkan pembelotan masyarakat Tulangbawang, maka didirikanlah sebuah benteng pertahanan bernama Benteng Albertus di Menggala, pada tahun 1738.

Keberadaan benteng ini mengusik rakyat Lampung di daerah

lain untuk ikut terlibat dan memberontak, terlebih cara VOC dalam berniaga cenderung kasar dan mau menang sendiri. Benteng Albertus sendiri pada akhirnya dapat direbut untuk sementara waktu, dan menyebabkan VOC meminta bala bantuan langsung dari Batavia. Sehingga benteng Albertus digempur dan pada akhirnya berhasil direbut. Keributan di Lampung ini berhasil dipadamkan. Tetapi orang Lampung akhirnya diperbolehkan untuk menjual sendiri lada mereka ke Banten, Palembang atau Batavia. Namun begitu, keadaan di Lampung tetap juga tidak aman, kontrol VOC lemah, sedangkan Banten sendiri tidak pula terlalu memperhatikan Lampung.

Pejabat-pejabat di Lampung sendiri seringkali didatangi perampok-perampok dari Johar, Bugis, dan Mandar. Penduduk dengan kondisi demikian menjadi tidak aman sehingga perekonomian merosot akibat kebun lada ditinggalkan terbengkalai dan hasil-hasil hu tan lainnya tidak pula ada yang mengambilnya.

Pada akhir abad XVIII, di perairan sekitar Kepulauan Riau, Lingga, Bangka Belitung, bahkan Lampung kadang-kadang di perairan Laut Jawa, terasa adanya kegiatan pelaut-pelaut ini. Hal ini ada hubungannya dengan permusuhan terhadap kolonialisme Belanda. Banyak pelaut-pelaut Makasar, Bugis mencari perlindungan di daerah-daerah lain di Indonesia

bagian barat setelah ternpat mereka dipengaruhi dan diduduki kolonial Belanda. Mereka menaruh simpati terhadap Kesultanan Banten, dan berusaha untuk menjalin persahabatan dengan penguasa-penguasa setempat dan melakukan kegiatan untuk menghalangi kapal-kapal dagang VOC yang banyak diisi hasil rempah-rempah dari daerah penghasil lada.

Mereka menjadi perampok. Kapal-kapal Belanda dan Inggris, seringkali mengejar perampok-perampok ini tetapi kurang berhasil. Bahkan sebaliknya mereka ini mampu menyerang benteng-benteng Belanda, membajak kapal-kapal dagang dan bekerjasama dengan raja-raja Riau, Johor, Lingga, Bintan, dan sebagainya. Demikianlah keadaan politik di daerah Lampung. Berbeda dengan di Maluku, dimana rempah-rempah dapat dikendalikan oleh VOC di beberapa pulau saja, lada tidak sepenuhnya dikuasai VOC.

Ekspor lada terbesar dari Nusantara berasal dari Aceh. Kerajaan yang menggantikan Pasai ini berhasil meluaskan kekuasaannya meliputi pesisir Sumatra Barat dan Sumatra Timur di mana lada banyak dihasilkan. Produksi lada dikendalikan oleh Aceh melalui para panglimanya yang ditempatkan di titik-titik strategis sepanjang garis-garis pantai tersebut.

Upaya VOC untuk menaklukkan Aceh selalu gagal, meskipun

VOC sendiri berhasil menguasai jalur Malaka dari penguasaan Portugis tahun 1641. Upaya VOC untuk mendapat akses ke produksi lada yang dikuasai Aceh itu berawal di Sumatra Barat. Melalui perundingan-perundingan dengan para penguasa lokal, VOC berhasil menyingkirkan Panglima Aceh yang berkedudukan di pesisir Sumatera Barat. Suatu perjanjian yang dibuat pada tahun 1662 memberi hak bagi VOC untuk membeli seluruh lada di wilayah itu (Perjanjian Painan).

Selain itu VOC juga berhasil menguasai produksi lada yang dikendalikan Banten. Kerajaan itu juga berhasil menguasai produksi lada di Sumatra Selatan yang tidak dikendalikan Aceh. Jangkauan kekuasaan itulah yang antara lain menyebabkan kota dagang Banten menjadi ramai dan menggantikan peran Malaka. Upaya VOC pada awal abad ke 17 untuk menguasai kerajaan ini juga gagal, sehingga VOC terpaksa harus menyingkir keperbatasan timurnya dimana akhirnya mereka berhasil membangun sebuah benteng (Batavia) sebagai pusat kegiatan perdagangan di Asia. Sementara itu konflik mengenai suksesi antara keluarga raja di istana Banten mendatangkan campur-tangan VOC. Salah seorang putra raja memperkuat dirinya dalam konflik mengenai suksesi itu dengan cara bersekutu dengan VOC. Dalam perang saudara yang meletus tahun 1680 VOC mengadakan intervensi atas salah satu pihak dan berhasil

merebut istana.

Sultan Banten yang baru menandatangani perjanjian kerjasama dengan VOC pada tahun 1683. Perjanjian ini merupakan konsekuensi permintaan bala bantuan Sultan Haji kepada VOC dalam konflik suksesi pemerintahan di Banten. Antara lain ditentukan bahwa seluruh produksi lada disalurkan kepada VOC saja: dan herkaitan dengan itu semua saudagar asing yang berdiam di Banten, baik orang Asia maupun orang Eropa. dilarang hermukim di kota dagang itu. Sejak itu lah Banten kehilangan dimensi kosmopolitannya dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan VOC bersama Maluku. Makasar (yang direbut VOC tahun 1669) dan Padang.

### **5.1 Struktur dan Pola Pemerintahan di Lampung pada Masa Kolonial**

Konvensi London memberikan dampak kepada wilayah Daerah Lampung, sebagai salah satu wilayah dibawah pemerintahan Banten. Wilayah Banten ditunjuk seorang Residen yang membawahi wilayah Lampung, dan untuk wilayah Lampung diangkat seorang ambtenar yang berkedudukan di ibukota di Teluk Betung dengan pangkat asisten residen Lampung. bertindak sebagai Asisten Residen ialah Kruesman (Gonggong, 1993: 84). Pada masa pemerintahan kolonial, pemerintah menerapkan desentralisasi

yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu *hierarki* Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membeagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (propinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatgemeente* (kota madya) (Syaukani dkk, 2002).

Sistem administrasi pemerintahan kolonial di daerah-daerah luar Jawa pada dasarnya sama dengan di Jawa, yang berbeda hanyalah bentuknya. Pertimbangan-pertimbangan geografis dan lain-lainnya menyebabkan sulitnya untuk dapat membentuk gubernemen-gubernemen dan provinsi seperti halnya di Jawa hanya di tempat-tempat tertentu secara historis terdapat unit-unit daerah dalam ukuran yang lebih kecil dari kabupaten seperti halnya di luar Jawa, namun untuk sebagian besar tempat-tempat di luar Jawa unit-unit kehidupan sosialnya adalah suku dan bukannya desa seperti di Jawa. Sejak 1938 terdapat 3 wilayah gubernemen: Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Timur Besar (*Grote Oost*), yang terbagi kedalam 17 keresidenan atau residensi. Sumatera terdiri dari 10 keresidenan, yakni Aceh, Pantai Timur (*oost kust*), Tapanuli, Pantai Barat (*westhust*), Riau, Jambi, Bengkulen (Bengkulu), Palembang, Lampung, dan Bangka.

Di luar Jawa terdapat berbagai kelompok lokal, yang kadang-kadang memiliki peranan penting yang lebih besar dan mencakup wilayah yang luas dari pada desa-desa di Jawa. Ordonansi Pedesaan yang baru untuk daerah-daerah di luar Jawa yang berlaku sejak 1 Januari 1939 di satu pihak membedakan antara desa yang tradisional dengan desa-desa yang telah maju (modern) dan di lain pihak menyediakan prasarana-prasarana transformasi dari satu tingkat ke tingkat lain. Ordonansi baru (tahun 1939) tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan Ordonansi Pedesaan yang lama yang telah dicoba untuk diterapkan bagi seluruh desa-desa di Jawa, sehingga dapat berlaku efektif di luar Jawa.

Pada awalnya, struktur pemerintahan di Lampung mengenal istilah *Primus Inter pares*. Pemimpin bekerja untuk umum, oleh karena itu ia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri, keluarga dan urusannya. Pemimpin tidak sempat lagi memikirkan sawahnya, tidak sempat memperhatikan rumahnya maka masyarakat ikut merasa bertanggungjawab atas nasib pemimpinnya. Masyarakat merasa berhutang budi kepada pemimpinnya, dan untuk menghargai jasanya masyarakat bersedia membalasnya sebagai ungkapan terimakasih. Kenyataan dalam sejarah telah menggambarkan bahwa petani hidup di desa memiliki kesadaran sosial yang tinggi, berjiwa komunal, gotong royong.

Kedudukan kepala Adat (Penyimbang, Kepala Desa) ketika masa pemerintahan kolonial Belanda mulai mengalami perubahan. Apabila pada awalnya penyimbang memiliki kedudukan terhormat ditengah-tengah komunitas adatnya perlahan mulai bergeser menjadi pejabat pemerintah, dan memiliki tanggung jawab atas semua pengelolaan pemerintahan kepada pemerintah Kolonial. “Tanggungjawab itu antara lain dalam hal semua pajak, dan jasa dan atas pembagian tanah-tanah desa” (Boomgaard, 2004: 61).

Sistem pemerintahan di Lampung ketika pemerintah kolonial mulai menginjakkan kakinya di Lampung mengalami beberapa kebijakan seperti mulai dikenalnya sistem Karesidenan hingga struktur dibawahnya. Pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil menyusun pemerintahan secara tertib dan teratur, karena banyak terjadi penolakan dan pemberontakan seperti perlawanan Raden Imba, Raden Inten, hingga Batin Mangunang di Teluk Semangka.

Keadaan ini tentu saja menyebabkan perdagangan lada tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi juga menyebabkan hubungan dengan rakyat melalui kepala marga dan kepala kampung menjadi semakin kacau. Pada tahun 1818 Asisten Residen Dobuis dipindahkan di daerah Teluk Semangka namun tak lama digantikan oleh Kruesman dan Dobuis

dikirim ke Tulang Bawang karena keadaan di sana cukup membahayakan. Dobuis mendirikan benteng di Menggala, tetapi karena sering terjadi insiden dengan sultan Palembang, maka benteng itu dipindah ke Bumi Agung.

Keadaan rupanya telah menghalangi Belanda untuk dapat segera melaksanakan pemindahan pusat pemerintahan, sehingga baru dilaksanakan pada tahun 1832. Berdasarkan nota Asisten Residen Dobuis, maka diputuskan bahwa ekspedisi ke Lampung akan ditangani oleh gubernur jenderal, dan pemindahan pusat pemerintahan akan segera dilaksanakan. Susunan pemerintahan di wilayah Lampung terdiri atas:

- a. seorang asisten residen
- b. seorang sekretaris
- c. seorang kepala di daerah Menggala wilayah Tulang Bawang
- d. seorang kepala di daerah Telukbetung wilayah Telukbetung
- e. seorang kepala di daerah Siringkibu wilayah Seputih
- f. seorang kepala di daerah Bumi Agung wilayah Tulang Bawang
- g. seorang kepala di daerah Semangka, serta
- h. pegawai (Gonggong, 1993: 84).

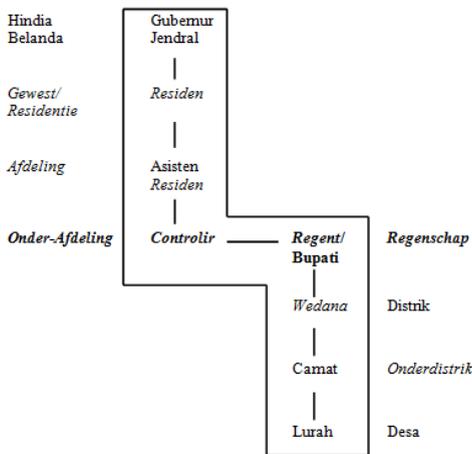
Hal ini nampak pula pada penunjukkan Residen yang langsung berada dibawah kendali Gubernur Jendral di Batavia. Sejak tahun 1832 pemerintah kolonial Belanda mengakui tatanan pemerintahan adat *kebuayan* di Lampung, dengan masing-masing *Punyimbang* atau *Sebatinna*.

Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi tertinggi dan memiliki kekuasaan atas segala urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal ini berfungsi untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan. Sistem tersebut yang telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Ketika Lampung berada di bawah kesultanan Banten, kepala daerah diangkat dari kelompok punyimbang yang mempunyai kekuasaan otonom dalam menjalankan pemerintahan, tanpa ada pengawasan dari sultan.

Pengawasan dari Sultan hanya ditunjukkan pada momen-momen politik tertentu saja, seperti tradisi menghadap raja (*paseban*) setiap tahun disertai dengan mengirim upeti kepada raja. Kondisi tersebut berubah pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Wewenang bupati dalam memerintah daerahnya tidak lagi otonom, melainkan telah dibatasi undang-undang dengan mendapat kontrol dari pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. *Binnenlandsch Bestuur* (BB) adalah istilah untuk organisasi pemerintahan dalam negeri di

Hindia Belanda dan diisi oleh pejabat kulit putih asal Belanda. BB terdiri dari dua sistem utama pemerintahan kolonial Belanda yaitu Korps Pemerintahan Belanda (NBB) dan Korps Pemerintahan Pribumi (IBB). NBB merupakan pemerintahan pusat di Batavia, dan semuanya merupakan orang Belanda yang disebut *Nederlands Binnenlands Bestuur* terdiri dari jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontrolir, dan Asisten Kontrolir.

IBB merupakan pemerintahan di daerah dan terdiri dari para bupati, patih, wedana, dan asisten wedana, semuanya adalah orang pribumi (Suriadiningrat, 1981: 52-53). Berikut dibawah ini adalah struktur dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan paling bawah beserta jabatannya:



Gambar 4.2. Struktur Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda  
(Sumber: Suryaningrat, 1981: 52)

Dapat kita lihat sebagai berikut; 1. Pejabat pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang gubernur jendral, 2. *Gewest* atau *Residentie* yang dijabat oleh seorang *Residen*. 3. *Afdeeling* dijabat oleh seorang asisten residen. 4. *Onderafdeeling* serta *Gegenshap* dijabat oleh seorang *controleur* dan bupati. 5. Distrik dijabat oleh seorang *wedana* (punggawa). 6. *Onderdistrik* dijabat oleh seorang asisten *wedana* (asisten demang, camat). 7. Desa dijabat seorang Lurah.

Karesidenan Lampung pada tahun 1864 dalam struktur pemerintahan Belanda, terdiri dari beberapa *Afdeling* yang dikepalai oleh seorang *Asisten Residen* seperti daerah Telukbetung (Telukbetung), daerah Sekampung (Sukadana), daerah Seputih (Terbanggi), daerah Bumi Agung (Pakuan Ratu), daerah Semangka (Tanjungan), daerah Empat Marga (Katimbang) (*Regerings Almanak voor Nederlandsche Indie*, 1870: 167).

Setiap *Afdeling* terbagi atas wilayah bagian yang disebut *Onderafdeling*, dikepalai oleh seorang pamong praja Belanda bergelar *Controleur*. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang pamong praja bumi putera bergelar *Bestuurs Assisten*. Daerah *Onderafdeling* didalamnya terdapat beberapa distrik dengan beberapa adat dan setiap distrik dikepalai oleh seorang kepala distrik dengan sebutan

punyimbang suku. Dan selanjutnya distrik-distrik ini pun membawahi pula beberapa onder distrik dan kampung-kampung, yang dikepalai oleh seorang kepala kampung dengan gelar *demang*.

Para kepala distrik dengan jabatan barunya diberi gelar "demang" sejak 1879 (Broersma, 1916: 47). Mereka diberikan kekuasaan dengan maksud untuk menjalankan otoritas pemerintahan pusat meskipun pada akhirnya jabatan ini tidak lebih dari sekedar pembantu pejabat Eropa. Ketiadaan hubungan antara pemerintah Eropa dan kampung-kampung di pedalaman Lampung, menyebabkan tidak mungkin bagi para inspektur untuk melakukan koordinasi dengan delapan puluh bahkan sembilan puluh kepala kampung. Bahkan apabila pertemuan dapat dilakukan untuk sekedar berkoordinasi terkait dengan hasil budidaya lada pun, maka akan lebih banyak kepala suku ketimbang pemerintah yang hadir. Kondisi ini setidaknya sedikit banyak telah menimbulkan kesenjangan.

Kepala kampung yang umumnya disandang secara otomatis oleh punyimbang tiyuh ataupun punyimbang suku harus rela kehilangan posisinya. Ini dikarenakan bagi pemerintah kolonial Belanda, para punyimbang belum mampu memenuhi ekspektasi, harapan, kehilangan kerja sama dari kepala suku bawahan mereka serta disinyalir telah kehilangan pengaruh

pada komunitas adatnya. Hingga pada akhirnya para kepala kampung tidak lagi harus selalu menjadi punyimbang, tetapi harus dipilih secara langsung oleh penduduk.

Para punyimbang yang pertama kali dihantam oleh demokrasi yang baru, berusaha menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, dengan menggunakan sisa-sisa pengaruh yang dimiliki pada komunitas adatnya. Keadaan ini menyebabkan kantor kepala kampung tidak pernah terpenuhi. Para punyimbang tadi menghilang dan mereka yang sejak itu disebut punyimbang tidak lebih dari sekadar tokoh kepala adat, pada masing-masing dalam marga mereka. Para punyimbang dihormati karena asal usulnya dan tetap memiliki kedudukan terhormat sebagai penjaga adat, tetapi tanpa rasa hormat resmi dari pemerintah, menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat adat terhadap kebijakan pemerintah. Ini ditunjukkan oleh banyaknya penduduk yang cukup acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Mereka harus memastikan perdamaian dan keamanan dan harus berkonsultasi dengan kepala suku dalam semua hal yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan penduduk ketika melatih polisi dan menyelidiki kejahatan. Apa yang bisa menjadi bantuan kepala Suku jika mereka dikendalikan oleh rasa iri dan ketidakpuasan? Mereka menganggap relokasi sebagai cara yang terkenal untuk menghilangkan hambatan di

kampung, namun pembentukan bengkok dan dampak oembul untuk menyingkirkan kepala kampung, setidaknya keterlibatan langsungnya. Sebuah ketentuan dimasukkan dalam peraturan 1879 tentang keadilan, yang seharusnya mengekang penghindaran komunitas kampung: tidak ada yang diizinkan untuk menetap di luar batas desa tanpa izin dari pemerintah (Broersma, 1916: 47).

Berikut ini beberapa struktur bagian yang termasuk dalam pemerintahan lokal di Lampung, yaitu:

**a. Perangkat Desa**

Desa merupakan unit dasar dari administrasi di Pemerintahan Belanda biasanya menghindarkan diri dari campur tangan terhadap masalah-masalah desa sejauh kepentingan pemerintah pusat tidak menuntutnya. Tiap desa dikepalai oleh kepala desa (Lurah, Bekel atau Petinggi) yang dipilih langsung oleh penduduk desa atas persetujuan residen. Adapun persyaratan bagi kepemimpinan seorang kepala kampung pada masa itu, adalah seseorang yang terkemuka dan berpengaruh ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilihan seorang kepala kampung tersebut, tidak melalui pemilihan langsung tetapi ditunjuk oleh para tokoh-tokoh masyarakat/tokoh-tokoh adat berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.

Hubungan antara kepala kampung dengan pemerintah tingkat atas desa pada masa itu ditempuh melalui jalur keswaprajaan. Dalam hubungan tersebut para kepala kampung mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada raja, melalui raja kecil (*onder besteur*). Hubungan ini memiliki skala terbatas dan dapat dikatakan hanya terbatas kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik seperti: ketertiban, ketentraman, penagihan pajak, dan keamanan kampung. Sedangkan yang menyangkut urusan suatu penyelenggara upacara adat, sepenuhnya merupakan wewenang para tokoh adat. Dengan gambaran keadaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada zaman kolonial legitimasi kepemimpinan seorang kepala kampung dalam hal ini harus dilihat sebagai agen politik bagi pemerintahan tingkat atas desa, yang pelaksanaannya mengabdikan kepada kepentingan kolonial. Kepala kampung dalam kedudukannya dipandang sebagai pemimpin tertinggi secara formal, tetapi terendah secara *hierarki*.

#### **b. Pengangkatan Pegawai**

Pada proses awal sistem administrasi ini, pencarian pegawai diperoleh berdasarkan kemampuan seseorang dengan standarisasi seperti dapat membaca dan menulis latin. Kriteria ini di wilayah Karesidenan Lampung bukanlah hal yang mudah didapatkan, sehingga sebagian besar tenaga kerja kelas “atas” harus didatangkan dari luar. *Hierarki* kepegawaian

teras atas seperti punggawa masih di jabat oleh para punyimbang dari masa-masa sebelumnya, sedangkan pada teras bawah kebanyakan diambil dari orang-orang yang dekat dengan Punyimbang, yaitu kelompok dengan gelar Pangeran, Ngabehi, Temenggung, hingga Pesirah.

Proses pengangkatan pegawai pemerintahan pada masa kolonial ini sangat ditentukan oleh penguasa kolonial itu sendiri. Keadaan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan kolonial dalam melangsungkan kekuasaan atas wilayah jajahan dan struktur birokrasi kolonial kita bisa melihat tiga posisi pertama itulah yang merupakan birokrasi atau administrasi kolonial dan tentu saja karena itu dijabat oleh orang-orang Belanda atau merupakan peranakan Indo-Belanda sementara dari tingkat bupati sampai kepada lurah merupakan organisasi administrasi asli yang merupakan warisan birokrasi ke Punyimbangan.

Politik kolonial dengan sistem *indirect rule* itu menyebabkan korps pegawai pribumi bersifat dualisme dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini tentunya amat berpengaruh pada proses penentuan jabatan maupun jenjang kepangkatan seseorang (Agung, 2009: 234). Pada *hierarki* tingkat atas, Pangeran, Ngabehi, Temenggung, hingga Pesirah. Masih berada pada otoritas kekuasaan tradisional. Oleh sebab itu, dalam proses seleksi pegawai, kriteria yang

sangat menonjol terlihat pada aspek senioritas dan pengalaman kerja jika dibandingkan dengan kriteria jenjang pendidikan. Selain itu, orientasi kelompok masyarakat adat Lampung masih berorientasi pada status sosial masih tertanam dengan sangat kuat sehingga jabatan-jabatan penting dalam sistem kepegawaian pemerintah kolonial, seperti jabatan mandor dan pengawas irigasi masih didasarkan pada keturunan.

### **c. Tugas Pegawai Administrasi Desa**

Tugas administratif kepala desa ialah terutama melaksanakan sistem tugas kepolisian di desa, memajukan pertanian, dan peternakan, mengelola kekayaan desa, dan menarik pajak tanah dan pajak-pajak lainnya di desa. Kepala desa berada langsung di bawah asisten *wedana* dan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh sejumlah pejabat-pejabat desa. Kepala desa bersama-sama pejabat desa merupakan pamong desa (Daliman, 2012: 98).

### **d. Sistem Administrasi dan Pemerintahan Pribumi**

Sistem administrasi dan kepegawaian sudah diatur berdasarkan surat keputusan berdasarkan surat keputusan (*besluit*) dan sistem gaji ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Struktur pemerintahan yang berkembang, status sosial seseorang amat menentukan tingkat kepercayaan dan jabatannya di masyarakat. Jabatan *regent* dan anggota

*adatgemeenschap* semuanya diduduki oleh golongan *Punyimbang*, yaitu masyarakat adat Lampung yang memiliki kedudukan terhormat pada komunitas adatnya. Struktur pemerintahan kolonial di Hindia Belanda pada dasarnya mengacu kepada suatu UU Kerajaan dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun struktur pemerintahan yang digunakan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda (Stroomberg, 2018: 97).

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda sedikitnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan lembaga-lembaga adat pada masyarakat Lampung menjadi suatu birokrasi pemerintahan. Setiap aparat yang ada dan menduduki suatu jabatan dalam dewan adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Peranan Belanda dalam pemerintahan lebih nyata dalam pemerintahan dengan menjadikan wilayah-wilayah kestuan adat sebagai *Onderafdeeling* ditahun 1928. Meskipun demikian *Punyimbang* tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Lampong*. Ia diakui sebagai kepala adat disamping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling* (Mattulada, 1974: 26).

Sejak tahun 1928 pemerintah kolonial Belanda melakukan perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan di daerah, dari yang awalnya menganut sistem pemerintahan marga-marga geneologis-territorial menjadi wilayah territorial-geneologis berdasarkan batas wilayah masing-masing marga. Pemerintahan marga dipimpin oleh seorang kepala marga dengan cara menunjuk atau memilih kepala Marga (*Pesirah*) berdasarkan musyawarah mufakat berdasarkan peraturan Marga *Regment* yang dikeluarkan tahun 1939, dalam rangka pelaksanaan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) S. 1938 No. 490, yang ditetapkan oleh Residen Lampung tanggal 21 Juli 1939 No. 536 (Hadikusuma, 2014: 122).

Diseluruh karesidenan Lampung hingga Bengkulu, terdapat berbagai kesatuan teritorial marga, baik yang beradat Pepadun maupun Saibatin, termasuk didalamnya beragam adat seperti Peminggir Melinting, Peminggir Teluk, dan Peminggir Belalau, Semangka, Pemanggilan, Darah Putih, Pepadun baik yang berafiliasi Pepadun Abung, Pepadun Megou Pak, Hingga Pepadun Way Kanan. Dan lebih jelasnya lihat lampiran 4.1. Sebaran Teritorial Marga pasca 1928.

Melalui Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 20 September 1929 Nomor 14, berdasarkan *Staatsblad* tahun 1929 No. 362, wilayah marga diatur dan ditentukan oleh

pemerintah kolonial Belanda, dan ditambah dengan kolonis dari Jawa dimasukkan ke dalam sistem administrasi pemerintahan di Hindia Belanda menjadi lima wilayah *onderafdeling*, yaitu:

1. Wilayah Teluk Betung dan sekitarnya di bawah seorang *Controleur* Tanjung Karang, terdiri dari:
  - a. Daerah ibukota karesidenan Lampung di Telukbetung,
  - b. Daerah Kolonisasi masyarakat Jawa di daerah Bagelen, Gedong Tataan,
  - c. Daerah marga yang terdiri dari: Teluk, Way Semah, Dantaran, Pesisir Rajabasa (Ketimbang), Sabu Menanga, Ratai, Tegineneng, Putih, Limau, Ratu, Legun, Balaw, Badak, Ketibung, Merak Batin, dan Punduh Pedada.
2. Wilayah Kota Agung dan sekitarnya di bawah seorang *Controleur* Kota Agung, terdiri dari:
  - a. Daerah ibukota Kota Agung
  - b. Daerah Kolonisasi Jawa di Kota Agung
  - c. Daerah marga: Kelumbayan, Pertiwi, Benawang, Putih, Putih Doh, Limau, Buay Belungu, Pugung, Way Ngarip Talang Padang Pasisir (Gunung Alip), , Pematang Sawah, dan Rebang Pugung.
3. Wilayah Kotabumi dan sekitarnya di bawah

seorang *Controleur* Kotabumi, meliputi marga: Buay Barasakti, Buay Pemuka Pengiran, Way Tuba, Buay Selagai, Buay Rebang Seputih, Buay Baradatu, Buay Nunyai, Buay Bunga Mayang, Buay Semenguk, Kasui, Buay Pemuka Pengiran Udik, Buay Pemuka Bangsa Raja Buay Pemuka Pengiran Hilir, dan Buay Bahuga.

4. Wilayah Sukadana dan sekitarnya di bawah seorang *Controleur* Sukadana, terdiri atas marga-marga Sukadana, Jabung, Melinting, Sekampung, Labuan Subing, Gedong Wani, Pubian Nuat, Batanghari (Nuban), Unyi, Buay Nyerupa, Way Seputih, Buay Beliuk, Subing, Anak Tuha, dan Buay Unyi.
5. Wilayah Menggala dan sekitarnya di bawah seorang *Gezaghebber* Menggala, terdiri atas marga: Tegamoan, Buay Bulan Udik, Mesuji, Buay Bulan Ilir, Way Umpu, dan Aji (*Nieuwe Administratieve Indeeing van Genoemd Gewest, Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No. 362*)

Menurut aturan tersebut setiap Kepala Marga melaksanakan pemerintahan marganya didampingi Dewan Marga, yang keanggotaannya terdiri atas para Punyimbang. Masing-masing Marga merupakan kesatuan Kampung (*Tiyuh, Pekon*) dan bagian Kampung (*suku*) termasuk jenis pemukiman

*umbulan* yang terletak di daerah perladangan dalam lingkungan kepemilikan hak ulayat tanah marga yang bersangkutan. Sistem pemerintahan marga ini berlaku hingga Indonesia merdeka tepatnya hingga tahun 1952, kemudian terhapuskan sejak tahun 1970 melalui UU no. 5 tahun 1979. Dalam pelaksanaannya, setiap kampung berada langsung dibawah pemerintahan para Wedana (setara camat hari ini), adapun pemerintahan adat menjadi masalah para Penyimbang Adat menurut kesatuan adatnya masing-masing baik yang Pepadun maupun Sebatin.

## **5.2 Budidaya Lada dibawah Pemerintah Kolonial Belanda**

Perdagangan lada sangat menguntungkan di wilayah Menggala dan Sukadana tentunya didorong oleh adanya persaingan dagang yang melibatkan banyak pihak seperti Banten, Palembang, Belanda, Inggris, dan Cina. Perdagangan lada di Tanjungkarang terjadi dalam kondisi yang kurang menguntungkan sebagaimana yang selalu terjadi di Menggala dan Sukadana. Sehingga upaya peningkatan budidaya lada sulit diharapkan dan dilakukan dalam jangka panjang di wilayah ibukota Karesidenan Lampung dan daerah sekitarnya.

Keuntungan perdagangan lada Lampung tidak hanya diperoleh dari surplus perdagangan lada, namun juga diperoleh akibat dari ulah para broker yang bermain dalam

tata niaga perdagangan lada. Sehingga kadangkala naiknya harga lada tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani lada, baik dalam skala besar dan kecil. Para broker biasanya membeli lada bahkan sebelum musim panen dilakukan dalam bentuk uang panjer kepada petani lada. Akhirnya, beberapa angka ekspor lada dalam beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 5.1 Sebaran wilayah penghasil lada

Tahun	Wilayah					Total
	Teluk betung	Labuhan Maringgai	Menggala	Kota Agung	Kalianda	
1906	85.000	Tidak ada data				
1907	56.500	10.000	28.000	21.300	12.000	127.800
1908	80.000	12.000	42.000	21.500	14.000	169.500
1909	52.000	8.000	33.000	25.000	10.000	128.000
1910	90.000	13.800	65.000	31.000	10.000	209.800
1911	45.000	16.000	38.500	18.800	3.000	121.300
1912	107.500	22.000	62.000	40.000	11.000	242.500
1913	63.000	15.000	35.000	31.000	3.000	147.000
1914	82.000	Tidak ada data				

Sumber: Broersma, 1916: 180

### 5.3 Perkebunan dan Awal Perburuhan di Lampung

Pertengahan abad ke XIX merupakan era kejayaan tanaman perkebunan pada masa pemerintahan kolonial Belanda,

dimana kegiatan eksploitasi perkebunan kolonial mulai muncul dan merajalela hingga di akhir abad ke XIX. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan dilakukan baik di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya Sumatra. Kebijakan ini dalam rangka mendongkrak hasil perkebunan yang dihasilkan di wilayah Hindia Belanda.

Kegiatan perkebunan maupun pertambangan diterapkan dengan menggunakan sistem *culture stelsel* atau kita kenal dengan istilah tanam paksa yang mengakibatkan rakyat menderita dan sengsara. Hall dalam bukunya yang berjudul *A History of South East Asia* (1964: 516), menyatakan bahwa dalam beberapa hal, aturan ini merupakan aturan lama tentang penyerahan paksa dan pengangkutan dalam bentuk yang baru. Melalui aturan baru itu diharapkan rakyat akan lebih giat menanam dan menghasilkan kopi, coklat, dan minyak kelapa (Kartodirdjo, 1992: 290-291).

Perkebunan pada masa kejayaannya memiliki fungsi sebagai sumber utama produksi yang mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan gulden bagi pemerintah kolonial Belanda. Kedatangan bangsa Eropa di kepulauan Nusantara telah menimbulkan dampak pada proses budidaya rempah seperti lada, kopi dan cengkeh. Permintaan rempah-rempah semakin meningkat, menyebabkan produksi harus dilakukan secara tepat dan cepat, selain tentunya berdampak pada

kenaikan harga jual, hingga membuat persaingan semakin tajam dalam konflik politik dan ekonomi dalam eskalasi liberalisme-kapitalisme Eropa.



Pengiriman Lada melalui Pelabuhan di Teluk Betung  
Sumber: J.W.J. Wellan, 1932. *Zuid Sumatra*. hal: 145

Gejala ini menunjukkan dinamika naik-turunnya harga pada komoditas perkebunan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, karena hampir 2/3 penduduk Indonesia terlibat dalam pekerjaan di berbagai sektor perkebunan dan kegiatan lainnya yang terkait (Soejono & Leirissa, 2008: 181). Keadaan ini tentunya menggambarkan perkembangan perekonomian dengan sistem perkebunan menjadi sumber penghidupan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat. Perekonomian daerah-daerah di luar Jawa menjadi bagian tak terpisahkan dari jaringan perekonomian global. Apabila

dahulu mereka bebas membuka lahan, namun dengan diperkenalkan sistem pertanian perkebunan, sistem perladangan mulai tergantikan terutama sejak adanya larangan membuka hutan sembarangan terutama di tanah-tanah di dekat daerah konsesi milik perkebunan swasta.

Hal ini mengakibatkan budidaya tanaman pangan tradisional mulai dikesampingkan jika tidak kita sebut mulai ditinggalkan, akibat lahan pertanian yang semakin hari semakin mengalami penurunan baik luas maupun kualitasnya (Hayati, 2000: 28). Sektor perkebunan mengalami pertumbuhan pesat dan menimbulkan dampak yang begitu besar, baik bagi rakyat pribumi, pemilik pemodal maupun negara kolonial. Sektor pertambangan dan perkebunan bersama-sama telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dan telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Soejono & Leirissa, 2010: 181).

Menjelang abad ke 19 perubahan besar mulai terlihat dan nampak menyapa usaha perkebunan di Hindia Belanda. Berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang bersifat terbatas, pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC berusaha memaksimalkan potensi lahan subur, lahan-lahan yang belum diolah, dan tenaga kerja lokal untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi kopi. Bahan-bahan

mineral menjadi penting dalam abad ke-19 bertalian dengan proses industrialisasi yang sedang berjalan di Negara-negara Eropa Barat, termasuk negeri Belanda, dan penggunaan bahan-bahan mineral ini sebagai bahan baku produksi berbagai barang jadi (Soedjono & Leirissa, 2010: 388).

Hasil tanaman perkebunan kemudian disetorkan ke gudang-gudang pemerintah melalui perantara para bupati dan kepala desa/pesirah. Setiap penduduk yang tidak mampu menyediakan tanahnya untuk sistem *Culturstelsel*, diharuskan melakukan wajib kerja di perkebunan atau pabrik-pabrik selama seperlima tahun atau 66 hari dalam setahun dengan cuma-cuma alias tidak dibayar. Di samping itu para birokrat kolonial, elite lokal pun juga ikut menikmati keuntungan ganda berupa manipulasi terhadap produsen dan imbalan yang diterima dari penguasa kolonial.

Pengusaha perkebunan muncul pada masa pemerintahan Hindia Belanda ditujukan untuk komoditi ekspor dalam pemenuhan kebutuhan pasar internasional, khususnya Eropa. Politik pintu terbuka di wilayah Hindia Belanda dan perkembangannya perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih banyak mencari pasaran di negeri-negeri asing daripada negeri Belanda sendiri (Boek, 1942: 106). Tanaman yang dihasilkan pada usaha budidaya perkebunan di Lampung cukup beragam seperti kopi, karet,

tembakau, gula, kelapa sawit, mengingat jenis tanaman ini komoditasnya sangat laku di pasaran Eropa sehingga massif dibudidayakan di Lampung.

Tahun 1850an, pasaran dunia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan usaha perkebunan mencapai salah satu puncaknya ketika VOC yang hampir bangkrut menerapkan kebijakan penanaman dan penyerahan wajib/paksa kopi di Priangan, yang dikenal sebagai Preanger stelsel. Ketika kas Pemerintahan Belanda mengalami kekosongan yang dikarenakan oleh banyaknya hutang oleh VOC, dan kebutuhan perlengkapan pendanaan perang, seperti Perang Paderi salah satunya menghabiskan dana yang cukup banyak, sehingga kas mengalami defisit.

Daerah Sumatra memiliki banyak sumber daya alam selain jenis tanah yang sesuai untuk perkebunan (Soejono & Leirissa, 2010: 242). Penduduk yang tinggal di daerah Sumatra pada awalnya belum mampu memaksimalkan luas lahan yang ada, sehingga lahan yang sangat luas mampu menopang dan dimanfaatkan dalam kegiatan perkebunan. Daerah Sumatra khususnya Lampung, mayoritas lebih memilih untuk menanam tanaman keras yang berumur panjang yang tidak memerlukan perawatan secara tetap maupun teratur. Perkembangan selanjutnya di daerah Sumatra berkembang menjadi penghasil tanaman keras yang sangat besar.

Menurut buku yang berjudul Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901 yang disusun oleh Wiharyanto, pada tahun 1870 keluarlah Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang disusun oleh menteri de Waal. Dalam UU ini diterangkan antara lain:

1. Pemerintah berhak menyewakan tanah yang tidak dipergunakan penduduk asli selama 75 tahun, kepada bangsa asing. Peraturan ini disebut *erfpacht* (tanah yang dapat diwariskan).
2. Penduduk asli tidak boleh menjual tanahnya kepada orang asing, tetapi boleh menyewakannya (misalnya untuk tanaman tebu, kopi).
3. Tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, menjadi hak milik pemerintah.

Peraturan ini juga menjelaskan bahwa semua tanah yang tidak dimiliki oleh pribumi maka menjadi milik negara. Tanah dengan kriteria seperti ini dikenal juga dengan istilah tanah bebas, meskipun tanah yang di kuasai penduduk pribumi disebut juga tanah bebas (Hayati, 2000: 25).

Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) ditetapkan pertama kali pada tanggal 9 April 1870. Keluarnya undang-undang ini merupakan momentum penting dalam munculnya perkebunan swasta yang berkembang baik di Jawa maupun di luar Jawa. Undang-undang inilah yang memberi kesempatan kepada para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa untuk berusaha di bidang perkebunan. Sistem perekonomian liberal

dengan dibuka seluas-luasnya perekonomian bagi investasi swasta di Hindia Belanda, sejak saat itulah para pemodal asing dapat menikmati keuntungan besar yang diperoleh dari ekspor hasil perkebunan. Namun sebaliknya, rakyat di negeri jajahan ini kondisinya sangat mengenaskan dan dirugikan.

Periode “liberal” ini (sekitar 1870-1900) sebagai zaman semakin hebatnya eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian Jawa maupun luar Jawa (Ricklefs, 1991: 190). Dalam perkembangan selanjutnya *culture stelsel* dihapuskan, dan tanaman wajib pemerintah diganti dengan perkebunan-perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Kebebasan bekerja serta kebebasan berkebun semuanya sebagai pengganti *culture stelsel* (Kartodirdjo, 1990: 21).

Pada masa transisi dari usaha pemerintah menuju usaha swasta menimbulkan perkebunan milik pemerintah mengalami penyusutan, sedangkan perkebunan milik swasta meluas. Dalam buku yang berjudul Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901 yang dikarang oleh Wiharyanto disebutkan bahwa, di dalam sistem baru ini pengusaha-pengusaha swasta mengambil alih perusahaan-perusahaan perkebunan yang dahulunya diurus oleh pemerintah kolonial, dan cara mengurusnya tetap berjalan seperti sedia kala, bedanya kalau dulu hanya ada pemegang saham tunggal,

sekarang jumlah pemegang sahamnya banyak. Perusahaan swasta menunjukkan tanda-tanda lebih menonjol dibandingkan dengan pemerintah.



Jalur Distribusi Darat di Lampung (*Zuid Sumatra*, hal: 143)

Undang-undang Agraria telah membuka jalan bagi perusahaan swasta, dan melindungi modal Eropa yang ditanam di berbagai perkebunan yang membuat tenaga kerja murah, serta hak-hak pengusaha terjamin (Kartodirdjo, 1990: 25-26). Sistem pajak tanah muncul terkait dengan munculnya sewa tanah. Di luar Jawa pemungutan pajak dipercayakan kepada pejabat-pejabat setempat, di Lampung pajak dikumpulkan oleh para kepala adat (Punyimbang) dan dibantu oleh para pesirah. Tanaman perkebunan memiliki fungsi untuk memperoleh pendapatan tunai sedangkan sawah atau lahan pertanian berguna dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Sebagian besar wilayah Sumatera terdapat pemisahan tegas antara perkebunan sebagai pusat produksi komoditi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dengan lahan penduduk untuk menanam kebutuhan pangannya. Dalam beberapa dekade awal abad ke 20 masih belum terjadi persaingan antara kebutuhan lahan perkebunan dengan kebutuhan penduduk menanam padi. Mayoritas perkebunan di daerah ini diletakan pada daerah yang belum menjadi bagian dari sistem produksi masyarakat, namun setelah pertumbuhan penduduk bertambah besar barulah persoalan ini mulai muncul.

Kebun-kebun kopi, karet, kelapa sawit sebagian besar ditanam di hutan tropis yang belum pernah di huni oleh penduduk. Biasanya tanah itu merupakan tanah adat yang statusnya diubah oleh pemerintah kolonial melalui berbagai peraturan menjadi tanah milik penguasa lokal atau tanah tidak terpakai sebelum dilimpahkan kepada perusahaan perkebunan yang mendapat hak konsesi.

Wiharyanto menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901, perlu diketahui bahwa pada masa pembukaan daerah luar Jawa untuk perkebunan-perkebunan swasta timbul masalah tenaga kerja. Tenaga kerja dibutuhkan dalam pekerjaan pembukaan dan pengolahan perkebunan penguasa swasta di Sumatra. Akhirnya pemerintah membuat peraturan masalah

ketenaga kerjaan. Para elite ini tidak memiliki kekuasaan untuk mengerahkan tenaga kerja penduduk yang ada di bawah kekuasaannya. Tenaga kerja mayoritas didatangkan dari luar, seperti Jawa walaupun ada juga yang dari Cina, sedangkan penduduk setempat jarang sekali bekerja sebagai buruh. Penduduk Sumatra tidak menjadi buruh karena mereka tidak suka diperintah orang lain, dan mempunyai sumber kehidupan dari tanah-tanah yang mereka miliki tersebut (Hayati, 2000: 28).

Para buruh tersebut pada perkembangannya diiklankan di koran-koran yang dicampurkan dengan iklan hewan. Hal ini berarti kuli tersebut disama artikan dengan hewan. Buruh-buruh tersebut diangkut dengan kapal yang dilarakan menuju Deli (Sumarera). Perkebunan mengharuskan calon-calon pekerja mendatangi kontrak kerja dahulu yang dapat memberikan jaminan bahwa para pekerja akan tetap bekerja di sana sedikitnya untuk suatu masa tertentu (Soejono & Leirissa, 2010: 394).

Para tenaga kerja ini dikontrak dan disebut sebagai kuli kontrak. Buruh ini melakukan kontrak dengan cara menekan jempol yang telah dicelup dengan tinta ke atas kertas yang disediakan oleh pemilik perusahaan perkebunan swasta. Orang kontrak ini adalah orang yang terampas kemerdekaannya, karena mendapatkan perlakuan yang kasar

dan kejam, dan mereka tidak dapat berlutik di hadapan para mandor dan Tuan Asisten perkebunan.

#### **5.4 Masa Tanam Paksa**

Sistem tanam paksa telah menimbulkan tekanan terhadap kondisi dan kehidupan para buruh yang bekerja diberbagai sektor, baik pertanian, pertambangan maupun perkebunan. Kondisi ini semakin diperparah dengan keberadaan undang-undang pekerja yang ada. Sedangkan pada aspek kelayakan hidup dan upah jelas tidak mencukupi para buruh pada waktu itu ditambah fakta bahwa perhatian pemerintah terhadap kaum buruh terasa amat kurang perhatiannya terhadap kesejahteraan kaum buruh. Van den Bosch melalui *cultuurstelsel* bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditas perkebunan yang tinggi permintaannya di pasaran Eropa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, van den Bosh menganjurkan pelaksanaan budidaya berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti lada, kopi, teh, indigo (nila), kayumanis, gula, dan tembakau. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara "*volunter*" (Fasseur 1992:239). Lada termasuk komoditi yang dianjurkan untuk tetap dibudidayakan pada masa ini, termasuk semakin masifnya pertanian masyarakat dalam budidaya tanaman lada di Lampung.

Menurut laporan yang sengaja ditutupi pemerintah Belanda, para kuli diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dalam brosur yang berjudul *De Millioenen uit Deli*, jurnalis bernama van den Brand tersebut mengkritik *peonale sanctie* atau hukuman berat dalam Ordonansi Kuli, yang dianggap menyiksa kuli dan membuat kuli menderita karena diperlakukan secara tidak manusiawi. Istilah kuli pun datang dari pihak kolonial untuk merendahkan martabat dan posisi kaum buruh (Bremen, 1997).

Dampak diperkenalkannya sistem tanam paksa, berdasarkan rangkuman Boomgaard dalam bukunya berjudul *Anak Jajahan Belanda* dijelaskan antara lain:

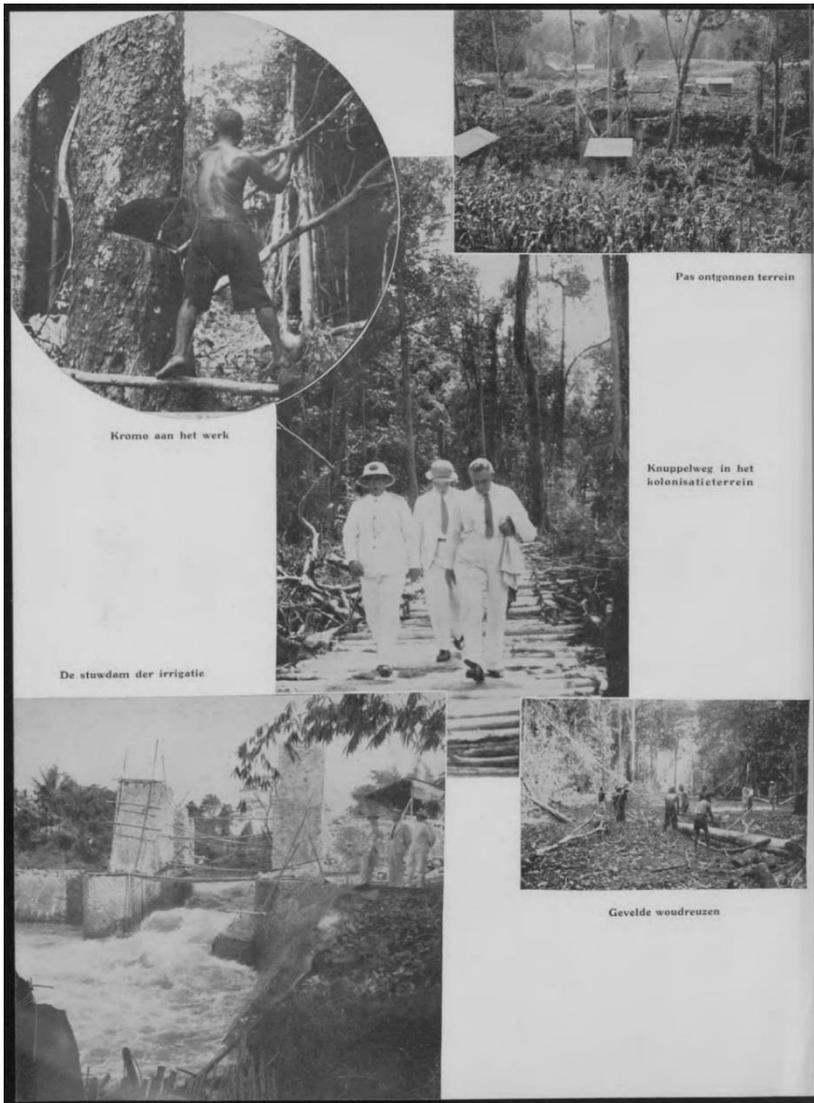
1. Produksi tanaman perdagangan untuk pasar Eropa meningkat luar biasa. Produksi padi dan tanaman perdagangan untuk pasar lokal mandek atau memburuk;
2. Meningkatnya tekanan atas tanah, tetapi tekanan atas tenaga kerjalah yang merupakan ciri paling penting dari sistem ini;
3. Permintaan yang meningkat akan tenaga kerja ini tidak hanya merupakan akibat dari sistem baru berupa kerja paksa, tetapi juga akibat meningkatnya ketergantungan pada kerja kuli untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, benteng, gedung, dan pabrik, serta permintaan akan transportasi dan tenaga kerja;
4. Kedudukan para Bupati dinaikkan bersamaan dengan penerimaan mereka terhadap budi daya dan peran baru mereka sebagai pengawas tanaman yang diwajibkan sistem tanam paksa;
5. Kepala desa kini diawasi lebih ketat, terutama oleh

pengumpul pajak dari pihak Belanda. Keadaan ekonomi pengumpul pajak ini mengalami perbaikan karena ia juga mendapat bagian dari barang rampasan itu (persentase budi daya) (Boomgaard, 2004: 63-64).

Tugas petani bukan hanya sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Pengangkutannya ke gudang-gudang juga menjadi salah satu tugas petani pula. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani.

Penyelenggaraan sistem *cultuurstelsel* pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam satuan *pikol* ( $\pm 62$  kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ke tempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir).

Para *controleur* dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan motivasi tambahan dalam meningkatkan produksi, hal ini karena mereka memperoleh "*cultuurprocent*" atau prosentasi tertentu dari hasil panen. Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pegawai berkebangsaan Belanda (Leirissa, 1996: 64).



Pembukaan wilayah kolonisasi  
 Sumber: Sumatranjjes, hal. 10

Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan *cultuur procenten* (Fasseur 1993: 46-50), yaitu bagian persentasi atau komisi yang diperoleh para pejabat pemerintah

sesuai dengan jumlah produksi yang diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Kebijakan ini merupakan eksperimen lanjutan dengan cara meniru kebijakan yang sudah digunakan dengan sistem *Preangerstelsel*.

Adanya kebijakan *Cultuur procenten* ternyata memberikan dampak yang kurang baik di dalam pemerintahan kolonial Belanda karena menimbulkan tidak samanya penghasilan para pegawai, dan cenderung membedakan kepada yang terlibat dengan *culturstelsel* dan yang tidak. Perbedaan penghasilan ini semakin mencolok antara mereka yang bekerja di daerah "gemuk" dan yang bekerja di daerah "kurus". Ketidakpuasan ini berakibat banyaknya permintaan untuk dipindah tugaskan ke daerah lain kepada pejabat Belanda.

Tabel 5.2 Perbandingan Komoditas Hasil Perkebunan

No	Tahun	Komoditas			
		Kopi	Gula	Nila	Lada
1	1840-1844	40.277.637	8.217.907	7.835.77	132.744
2	1845-1849	24.549.042	4.136.060	7.726.362	56.548

Sumber: Fasseur dalam Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. hal. 60

Dengan demikian pemerintah Belanda keuntungan paling besar berasal dari budidaya kopi. Antara tahun 1840-1849 saja mereka memperoleh sekitar 65 juta gulden dari penjualan komoditi yang paling banyak diproduksi di Priangan itu. Sedangkan dalam jangka waktu yang sama indigo (nila) hanya membawa keuntungan sebesar 15 juta gulden.

Sistem *Culture Stelsel* sejak tahun 1831 sampai 1866 keuntungan yang berhasil disetorkan ke kas negara mencapai angka f 500.000.000,- dan banyak dimanfaatkan pemerintah untuk melunasi utang dan perbaikan infrastruktur di wilayah Kerajaan Belanda (Breman, 2014: 341). Sedangkan untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 mencapai f. 50.000.000,- pada satu komoditi yaitu tanaman kopi (Breman, 2014: 304).

Menurut Fasseur keuntungan yang demikian besar dari kopi di sebabkan harga juanya memang tinggi tetapi harga belinya sangat rendah (Fassuer 19921: 36). kemudian gula juga menjadi komoditi ekspor yang besar setelah kopi. Tetapi gula baru menjadi primadona setelah kemunculan Undang-Undang Gula (1870) modal swasta diperkenankan memasuki perkebunan tebu. Indigo atau Nila yang dalam masa *cultuurstelsel* tidak terlalu jauh berbeda dari gula itu, kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak berarti, demikian juga tanaman lada mulai ditinggalkan para petani

lada. Demikian pun komoditi-komoditi lainnya terdesak samasekali setelah tahun 1870.

Periode pertumbuhan perdagangan yang singkat berganti dengan fase kemerosotan, karena harga-harga diturunkan dan/ atau jumlah yang harus diterima dikurangi. Korban pertama kebijakan ini, adalah gula dan kopi di pulau Jawa yang merupakan tanaman perkebunan jangka pendek dan tanaman usaha tani jangka panjang (*perennial*). Korban tanaman yang lebih kecil adalah kapas, nila dan merica: dua tanaman yang pertama adalah tanaman usaha tani jangka pendek, yang terakhir tanaman jangka panjang (Boomgaard, 2004: 54).

Lada merupakan tanaman yang diperhitungkan tetap dipertahankan pemerintah kolonial Belanda, hal ini menyebabkan penanaman lada tetap dilanjutkan di Sumatera bagian Selatan khususnya Lampung. Sejak tahun 1790 dan tahun tahun setelahnya, produksi kapas (benang), nila, dan merica juga digalakkan, dan mungkin dengan alasan yang sama dengan penggalakkan penanaman kopi dan gula di Jawa,. Kebijakan ini supaya lebih banyak muatan yang dapat dibawa balik pemerintah kolonial Belanda (Boomgaard, 2004: 55).

Ketika pemerintahan beralih ke tangan Daendels, pengiriman paksa komoditi kapas dan nila dihentikan, sedangkan untuk komoditas lada yang tumbuh di Jawa (merica=lada hitam,

merica panjang India, dan lada berekor) tetap dipertahankan sebagai pengiriman paksa (Boomgaard, 2004: 56). Hal ini tentunya berdampak pula pada produktifitas hasil lada di daerah ini hingga berlakunya sistem tanam paksa. Produktifitas hasil budidaya tanaman lada Lampung selama berada di bawah pengaruh kekuasaan kolonial Belanda dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

### 5.3 Produktifitas lada dibawah pemerintah kolonial Belanda hingga 1866

Abad ke-19	
Tahun	Jumlah (kg)
1857	401.100
1858	864.120
1859	188.460
1860	242.700
1861	283.569
1862	536.820
1863	604.020
1864	865.380
1865	477.960
1866	320.280

Selama kurun waktu pertengahan abad ke 19, produksi lada Lampung mengalami pasang surut jumlah lada yang dihasilkan. Puncak produksi lada terjadi pada tahun 1858

dengan jumlah 864. 120 dan tahun 1864 dengan total produksi sebanyak 865. 380. Tabel diatas menggambarkan fakta bahwa siklus panen lada mencapai puncaknya pada usia tanaman 7-8 tahun, dan akan kembali pada produksi 0 setelah 6-7 tahun dari produksi maksimal.

Untuk mengantisipasi hasil produksi yang semakin menurun, setiap dusun diperintahkan untuk mempersiapkan pembaruan lahan baru untuk tetap menjaga kesinambungan hasil panen lada. Kebijakan ini dengan harapan bahwa tanaman baru akan mulai berproduksi maksimal tepat ketika tanaman lama sudah kehalngan produktifitasnya. Akan tetapi kebijakan ini jarang dilaksanakan penduduk Lampung sampai tanaman lada berhenti berproduksi.

Hal ini terjadi dikarenakan proses peremajaan lada pada tanaman yang masih berproduksi akan mengganggu dan menghambat hasil panen tanaman lama, terlebih bahwa tanaman baru rentan mengalami kerusakan saat proses peremajaan tanaman lama. Sehingga kuantitas tanaman yang siap berbuah menjadi tidak menentu terhadap hasil yang ditargetkan, alhasil berdampak pada produksi tahunan yang menjadi tidak menentu. Keadaan ini menggambarkan bahwa agar produktifitas tanaman lada tetap stabil dan tidak terganggu dengan siklus tanaman lada.

### 5.5 Masa Politik Pintu Terbuka (1870-1900)

Penerapan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) sejak 19 April 1870 telah membuat dimulainya liberalisasi ekonomi di wilayah Sumatera. Sistem perekonomian liberal dengan dibuka seluas-luasnya perekonomian bagi investasi swasta di Hindia Belanda, sejak saat itulah para pemodal asing dapat menikmati keuntungan besar yang diperoleh dari ekspor hasil perkebunan.

Keluarnya undang-undang ini merupakan momentum penting dalam munculnya perkebunan swasta yang berkembang baik di Jawa maupun di luar Jawa. Undang-undang inilah yang memberi kesempatan kepada para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa untuk berusaha di bidang perkebunan. Namun sebaliknya, rakyat di negeri jajahan ini kondisinya sangat mengenaskan dan dirugikan.

Periode liberalisasi bidang ekonomi ini (1870-1900) menyebabkan semakin intensifnya eksploitasi terhadap sumber-sumber kehidupan masyarakat pada bidang pertanian Jawa maupun luar Jawa (Ricklefs, 1991: 190). Setelah dihapuskannya kebijakan *culture stelsel*, dan sistem penanaman tanaman wajib pemerintah digantikan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan oleh pengusaha-pengusaha swasta. Maka semakin terbukalah peluang masuknya investasi swasta ke Indonesia, tak terkecuali

wilayah Lampung. Kebebasan bekerja serta kebebasan berkebun semuanya sebagai pengganti *culture stelsel* (Kartodirdjo, 1990: 21).



Pembukaan Perkebunan Karet di Way Lima, Lampung

Masa transisi usaha dibidang perkebunan ini telah menyebabkan jumlah perkebunan milik pemerintah mengalami penyusutan, sedangkan jumlah usaha perkebunan milik swasta meluas. Wiharyanto dalam bukunya menyebutkan bahwa, di dalam sistem baru ini perkebunan-perkebunan milik pemerintah diambil alih oleh swasta, dan sistem pengelolaannya tetap menggunakan mekanisme pemerintah. Perbedaan hanyalah pada persoalan kepemilikan saham di perkebunan apabila sistem lama jumlah pemegang saham adalah negara, maka sistem yang baru memiliki jumlah

pemegang saham yang banyak tergantung pada kekuatan modal. Pola mempekerjakan buruh juga sedikit mengalami pergeseran, dengan dominannya peran perusahaan swasta dengan sistem yang lebih keras, dan memaksa dibandingkan dengan sistem perkebunan pemerintah.

Undang-undang Agraria membuka jalan bagi perusahaan swasta, dan melindungi modal Eropa yang ditanam di berbagai perkebunan yang membuat tenaga kerja murah, dan hak-hak terjamin (Kartodirdjo, 1990: 25-26). Penerapan sistem pajak penerimaan dari kepemilikan tanah merupakan reaksi atas berlakunya sistem sewa tanah. Di luar Jawa pemungutan pajak banyak dilakukan oleh para pejabat setempat seperti para Punyimbang adat.

Penerapan sewa tanah diatur melalui peraturan pemerintah yang tertuang dalam Staatsblad No. 45 tertanggal 17 Februari 1885. Secara garis besar, aturan ini terbagi menjadi 12 pasal, dan penulis mencoba menyajikannya berdasarkan aturan yang mendukung pelaksanaan sewa tanah di Lampung, yakni:

1. Seluruh tanah di Karesidenan Lampung yang dimiliki oleh penduduk asli dapat disewakan kepada penduduk pendatang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah;
2. Setiap orang atau lembaga yang akan menyewa hanya diakui apabila orang atau lembaga tersebut didirikan

di Belanda atau Hindia Belanda secara sah;

3. Tanah pada Pasal 1 dibatasi sewa paling lama dua puluh tahun berturut-turut;.
4. Pada proses perjanjian sewa tidak dikenal uang panjer (uang muka) dalam pembayaran dalam bentuk apapun yang dapat ditetapkan atau perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu penyewaan dalam satu tahun;
5. Penetapan tambahan waktu izin sewa, setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dalam Pasal 3, adalah dilarang.
6. Perjanjian sewa harus dibuat secara tertulis pada kertas resmi rangkap dua, baik dalam bahasa Belanda maupun bahasa Lampung dan atau Melayu, atau dalam kedua bahasa asli ini, pemeriksaan keabsahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanda tangan pemilik tanah harus disaksikan dan disahkan oleh kepala kampung dan salah satu kepala sukunya;
7. Kontrak sewa tanah harus terdaftar secara hukum. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor di Teluk Betung oleh hakim, dan apabila dilakukan selain di Telukbetung dapat dilakukan oleh inspektur yang sesuai bidang keahliannya, dan akan mencatat pada

setiap salinan akta perjanjian sewa;

8. Pendaftaran dapat dilakukan setelah penawaran dan paling lambat dua bulan setelah penawaran awal. Kontrak sewa harus ditolak apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan hukum yang ada, jika tidak dibuat dalam bentuk sesuai yang ditentukan oleh Pasal 6, atau jika tidak ada kepastian yang cukup mengenai hak-hak pemberi sewa atas tanah yang akan disewakan. Jika pendaftaran ditolak, keputusan ini dapat diajukan ke Residen dan keputusannya kepada Pemerintah Daerah;
9. Penyewa harus menanggung semua kondisi baik yang diperkirakan maupun yang tidak, kecuali ditentukan melalui kesepakatan lain secara eksplisit;
10. Peraturan ini tidak berlaku untuk tanah yang dimiliki oleh penduduk asli, karena hanya tanah yang memiliki sertifikat yang sesuai dengan ketentuan *Staatsblad* 1834 no 27.

Meskipun aturan dalam *Staatsblad* ini telah menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem sewa tanah terhadap tanah-tanah adat masyarakat Lampung, namun fakta bahwa pengusaha swasta Eropa lebih banyak menggunakan tanah milik negara, kondisi ini terjadi karena adanya anggapan bahwa tanah-tanah

tak bertuan meskipun dianggap tanah adat tetap merupakan tanah milik negara. Kondisi ini tentunya mendukung para pelaku dunia usaha bidang perkebunan lebih memilih menyewa tanah milik negara, karena umumnya tanah milik penduduk relatif kecil dan terbatas, sedangkan kebutuhan dunia usaha memerlukan tanah yang amat luas.

Pengelolaan perkebunan selanjutnya dikelola oleh swasta, meskipun awalnya dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda, hal ini berlaku sejak munculnya UU Agraria, karena dalam UU Agraria swasta diberikan hak seluas-luasnya dalam mengelola perkebunan di Hindia Belanda kepada perusahaan swasta Eropa. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini, pada dasarnya menyebabkan munculnya dualisme ekonomi di kalangan masyarakat daerah *Onderafdeeling Kotabumi en Telokbetung*, tanah marga untuk kesejahteraan masyarakatnya banyak yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang mempunyai modal kapital yang sangat besar.

Banyak pemilik perkebunan swasta adalah tuan tanah yang bukan penduduk setempat. Meningkatnya jumlah perkebunan swasta tentunya berbanding lurus dengan semakin meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Buruh-buruh perkebunan pun didatangkan dari Cina, Siam (Thailand), dan Jawa. Kantor-kantor pengerah tenaga kerja juga segera didirikan baik ditempat asal para buruh, maupun di tempat

tujuan kerja. Arus imigrasi dari India-Inggris ke *Staits Settlements*, dimana sebagian kecil imigran pergi ke Sumatera Timur dan menjadi buruh perkebunan yang disebut kolonial sebagai kuli pun meningkat.



Pejabat Pemerintah Belanda Foto Bersama Masyarakat di Way Lima, Lampung

Mobilisasi yang terus berlangsung dalam ketidakbebasan ini, menurut Breman, merupakan salah satu ciri dari kapitalisme di Asia. Selain itu, meningkatnya jumlah investasi dan perkebunan di Deli pun kemudian membuat pelabuhan Belawan, dibuka menjadi pelabuhan internasional . Di saat bersamaan perusahaan kereta api pun didirikan. *Deli Spoorweg-Maatschappij* (Perusahaan Kereta Api Deli) didirikan pada waktu itu untuk mempermudah kedatangan

para pembesar kolonial ke Deli. Hal itu kemudian berkembang cepat menjadi jaringan kereta api regional, dan juga telepon serta telegraf. Selain itu, berdiri pula *Chartered Bank*, dan sebagainya.

Namun kemunduran kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah ini, menimbulkan kesejahteraan di kalangan atas daerah uluan ini, para penguasa formal tradisional seperti Pesirah, Kerio, Pembarap dan lain-lain dapat memanfaatkan situasi ini dengan memperkaya diri. Perusahaan-perusahaan besar asing dalam memiliki tanah dengan cara berkolusi pada para penguasa formal tradisional, setelah mendapat tanah perusahaan besar ini juga memberi prioritas kepada mereka dalam memiliki tanah-tanah luas untuk ditanami karet secara luas.

Petani tidak hanya berkewajiban untuk sekedar menanam, namun juga diharuskan untuk memproses hasil panennya, dan mengangkutnya ke gudang-gudang pemerintah. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing (Fasseur, 1993).

Kondisi ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh pemerintah, bahwa hanya terdapat beberapa perusahaan perkebunan skala besar yang melakukan kegiatan usaha di Lampung. Perusahaan dalam memperoleh lahan dengan cara

menyewa langsung kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, perusahaan-persuahaan yang berkembang antara lain, *Cultuur Maatschappij "De Lampongs"*, *Lampung Caoutchouc Maatschappij*, *The South Sumatra Rubber Estates Limited*, *Rubber Cultuur Maatschappij*, *Langkapura (Sumatra) Rubber Estate Limited*, *Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij*, dan lainnya (Swart, 1915: 130).

### **5.6 Masa Politik Etis**

Setelah liberalisasi politik berkembang di Eropa pada pertengahan abad XIX, nasib penduduk Pribumi di Hindia Belanda menjadi sorotan dari kaum Humanis, karena menganggap pemerintah kolonial abai terhadap kesejahteraan dan kesehatan kaum pribumi. Lebih-lebih setelah muncul issue tentang apa yang disebut *Batig Slot* (Sistem keuntungan Bersih). Isu ini telah ada sejak tahun 1860-an, dan setelah diundangkan UU *Comptabiliteitswet* (1864) (Van Hoevell, 1863: 315; lihat juga Van Gennep, 1878: 10-11).

Undang-undang ini menetapkan bahwa anggaran belanja Hindia Belanda ditentukan berdasar pada Undang-undang Negeri Belanda. Sejak itu hubungan finansial antara Hindia Belanda dan negeri Belanda serta peristiwa *Batig Slot* selalu menjadi sasaran kritik. Politisi-politisi Belanda menjadi sangat sensitif terhadap hal itu. Di samping itu masalah ini menjadi kompleks, karena timbul suatu sentimen yang sama

sekali menentang politik kolonial lama, yang menuduh pemerintah kolonial Belanda telah merampok jutaan gulden kekayaan dari negara jajahan di Hindia Belanda, dan itu harus ada restitusi dari surplus yang telah diambilnya sejak berlakunya *Comptabiliteitswet* (Deventer, 1899).

Kondisi ekonomi penduduk Jawa pada tahun-tahun menjelang dilaksanakan kolonisasi tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak *Cultuur Stelsel* (Booth, 1988: 389; Manggistan, 1986: 99-141). Proses pemiskinan di Pulau Jawa terus berlangsung. Selama tahun-tahun terakhir sesudah tahun 1883 timbul gejala bahwa di mana-mana di Pulau Jawa harga-harga hasil pertanian (padi) turun, gagal panen; pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan swasta terus berlanjut sebagai akibat krisis ekonomi perkebunan; di mana-mana uang yang sampai pada penduduk berkurang; permintaan akan tenaga kerja berkurang; serta upah-upah buruh menurun (Manggistan, 1986: 123; baca juga Elst, 1986: 143-157).

Sebetulnya antara tahun 1888 sampai dengan 1915 telah terjadi penambahan luas lahan pertanian. Dari tahun 1888-1900 lahan sawah padi bertambah 8%, sedang tegalan bertambah 24%; kemudian antara tahun 1900-1915 lahan sawah padi bertambah 16%, sedang tegalan 150%.

Menurut Geertz, hasil panen padi penduduk masih tetap konstan antara 1:1. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan panen di suatu tempat diimbangi dengan kemerosotan di daerah lain, seperti yang terjadi di Kedu, Cirebon, Madiun, Kediri, Semarang, Rembang (Geertz, 1963:98-100; baca juga Hiroyoshi Kano, 1984: 51-52). Dengan bertambahnya lahan tegalan yang cukup besar tersebut di atas, petani Jawa masih belum beranjak dari kemiskinannya. Oleh karena pada tahun 1900-1905 setiap petani masih hanya memiliki tanah pertanian rata-rata 0,35 Ha - 0,17 Ha. Kasus di Karesidenan Kedu, per keluarga hanya memiliki tanah pertanian (sawah) 0,17 Ha (0,25 Bau). Mereka masih sebagai petani subsisten, tidak berusaha untuk berperilaku efisiensi dan intensifikasi. Oleh karena itu penghasilan mereka setiap tahunnya hanya sekitar 1. 80,- (Advies Raad van Indie, 25 Maret 1904, no. 30; Eindresumé, Jilid I, Lampiran A; dan Booth, 1988).

Usul (kritik) semakin radikal dengan diajukan oleh van Dedem. Ia menuntut supaya dihapuskannya pengambilan keuntungan dari tanah jajahan oleh negeri induk, (Kartodirjo, 1990: 27). Sebelum mempertimbangkan kritikan-kritikan itu, pada tahun 1867 pemerintah sesungguhnya telah membentuk suatu Tim Peneliti, yang ditugasi untuk meneliti tentang kemakmuran (penduduk Pribumi) yang rendah di wilayah Jawa dan Madura. Tujuan rencana penelitian ini adalah bahwa pemerintah ingin mengetahui, apakah betul di Jawa sedang



sebagian dipindahkan ke luar Jawa (*Kolonisatie Bulletin*, 1937: 4).

Usul untuk memindahkan (mengemigrasikan) penduduk dari Jawa ke luar Jawa itu mendapat perhatian Direktur Pemerintahan Dalam Negeri. Oleh karena itu ia melaporkan hal itu kepada pemerintah supaya gagasan emigrasi itu ditindaklanjuti (Besluit Pemerintah, 1902, no. 17; dan Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri kepada Pemerintah (Gubernur Jenderal), 3 Desember 1903). Laporan itu diterima oleh pemerintah, sehingga mulai saat itu mulai diadakan persiapan-persiapan untuk menyusun program dan pelaksanaan emigrasi, yang pada waktu itu dikenal sebagai kolonisasi.

Di dalam mempersiapkan dan penentuan lokasi Kolonisasi, pemerintah (Gubernur Jenderal) tidak mau memikirkannya sendiri. Ia memanggil Asisten Residen Sukabumi yaitu Heyting, agar menghadap kepadanya untuk melakukan penelitian guna menyusun proposal kolonisasi dari daerah-daerah Jawa yang padat penduduknya ke daerah luar yang dianggap masih jarang penduduknya. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri memberi saran kepada Heyting, supaya melakukan penelitian ke daerah di Jawa dibatasi lima daerah dan ke daerah di luar Jawa dibatasi tujuh daerah (Schalkwijk, 1918: 117).

Selain melakukan penelitian terkait kebijakan kolonisasi, Heyting juga diminta untuk mempelajari masalah tenaga kerja (kuli kontrak) yang dibutuhkan oleh perkebunan swasta di luar Jawa. Perlu diketahui bahwa semenjak tahun 1863 masalah pengadaan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan Tembakau di Deli dan langkat menjadi persoalan para pengusaha perkebunan di daerah itu di dalam mencari tenaga kerja yang setia dan terampil (Stoler, 1985).

Untuk menjalankan tugas itu, ia mendapat tunjangan oleh pemerintah sebesar 600 gulden per bulan. Di dalam rancangannya, ia telah membuat Program 10 Tahunan. Ini tampaknya menghasilkan wilayah rekomendasi untuk tujuan kolonisasi diarahkan ke daerah-daerah perkebunan, yaitu daerah yang membutuhkan tenaga kerja dan dekat dengan para calon peserta kolonisasi. Hal ini dianggap penting karena pemerintah kolonial tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeayai program yang akan disusun itu (Pelzer, 1945). Usulan program ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5.4. Usulan Program 10 Tahun Kolonisasi oleh Heyting (Heyting, 1938; dan dan Hardjono, 1977: 16)

Tahun ke	Daerah Tujuan Kolonisasi	Jumlah (KK)	Beaya (Gulden)
I.	Banyuwangi	530	f. 150.271,-
II.	Banyuwangi, Krawang	530	f. 337.675,-

Tahun ke	Daerah Tujuan Kolonisasi	Jumlah (KK)	Beaya (Gulden)
III.	Banyuwani, Krawang, Distrik Lampung	350	f. 544.100,-
IV.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung	--*	f. 314.725,-
V.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember	--*	f. 767.150,-
VI.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember	--*	f. 341.500,-
VII.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu	--*	f. 396.750,-
VIII.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu	--*	f. 437.325,-
IX.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu, Palembang	--*	f. 262.175,-
X.	Banyuwangi, Krawang, Distrik Lampung, Jember, Bengkulu, Palembang, Sumatra Barat	--*	f. 499.150
Total			f. 5.028.900,-

\*) data tidak ada.

Setiap kolonis (peserta program kolonisasi) mendapat beaya untuk premi f. 10,- per KK (kepala keluarga), termasuk Kepala Desa dan Pamong Prajanya, biaya transport dari karanganyar ke halte kali Setail, membeli alat-alat dapur, alat-alat pertanian, rumah-rumah untuk seorang dokter Jawa dan dua orang kepala Desa, pemeliharaan bangunan, beaya makan selama 8 bulan, membeli material untuk menanam, untuk gaji

dan tunjangan dua orang Kontrolir, dua orang Asisten Wedana, tiga orang Juru Tulis.

Seorang Mantri irigasi tak lupa dipersiapkan dalam program kolonisasi, termasuk upah untuk 20 orang kuli ukur, gaji untuk dokter Jawa selama 8 bulan, untuk membeli obat-obatan, gaji untuk dua orang kepala Desa dan 28 orang pamong praja, biaya dua orang Kontrolir untuk perjalanan, dua orang Asisten Wedana, tiga Juru Talis, enam orang Opas, seorang manteri irigasi dan seorang dokter Jawa bersama keluarganya ke tempat yang sudah ditentukan jumlah Beaya seluruhnya f. 150.271,- (Benoit, et al, 1989: Heyting, 1938: 106-117).

Usulan proyek itu tidak disetujui oleh pemerintah tetapi Heyting masih diberi waktu lagi untuk membuat usulan yang baru. Walaupun dalam usulannya yang kedua ini sudah dikonkritkan jumlah warga yang akan diemigrasikan namun juga belum dapat diterima oleh pemerintah terutama oleh Raad Van Indie. Alasannya adalah harus dicari daerah di Jawa yang padat penduduknya dan daerah luar sebagai daerah tujuan kolonisasi; selain itu disarankan juga sebaiknya emigrasi (kolonisasi) itu dilakukan di daerah Jawa terlebih dulu (ke Banyuwangi), kemudian baru ke luar Jawa yaitu ke Lampung untuk menghemat biaya (Surat Direktur Pemerintah Dalam Negeri kepada Gubernur Jenderal, 3 Desember 1903,

no. 469 dan 16 Januari 1904, no. 254; dan Schalkwijk, 1918: 117).

Setelah mempertimbangkan usulan-usulan tersebut di atas dan saran-saran dari pejabat-pejabat pemerintah kolonial, serta agar jangan sampai proyek emigrasi (kolonisasi) itu tidak terbengkalai, maka pemerintah memutuskan yaitu untuk mengadakan percobaan kolonisasi terlebih dahulu yang diberi nama *Kolonisatie-proef* (Percobaan Kolonisasi).

*Kolonisatie-proef* ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 1905. Sebagai tahap permulaan Karesidenan Kedu dipilih sebagai daerah yang sebgaiannya penduduknya akan dipindahkan ke daerah tujuan proyek kolonisasi. Adapun daerah tujuan kolonisasi adalah daerah Distrik-distrik Lampung tepatnya di Gedong Tataan (Besluit Pemerintah, 19 Oktober 1904; dan *Kolonisatie Bulletin*, 1937: 4; Sayogyo, 1986: 32; Sri Edi Swasono, 1986: 70).

Adapun alasan Gedong Tataan dipilih menjadi daerah percobaan kolonisasi adalah bahwa setelah Heyting mengadakan penelitian di berbagai daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Palembang, dan Lampung. Pada akhirnya pemerintah memilih daerah Lampung, tepatnya di Gedong Tataan sebagai daerah kolonisasi, karena letaknya lebih dekat dengan Jawa, dekat dengan jalan raya besar dan sudah ada jalur kereta api

(Umbilin). Sehingga biaya untuk mengantarkan para calon kolonis ringan dan lancar; luas daerah datar mencapai 17.000 Ha., ketersediaan akan sumber air banyak sehingga cocok untuk membangun persawahan. (Heyting, 1938; Zwaal: 1936, dan baca juga Schalkwijk: 117).

Kolonisasi dari penduduk di daerah Pulau Jawa Ke Lampung, khususnya di Gedong Tataan pada awal abad XX adalah suatu proyek pemerintah kolonial Hindia Belanda. Proyek ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu pendapat bahwa penduduk di Jawa telah dianggap, oleh pemerintah kolonial, sudah sangat padat dan dalam kondisi kurang makmur (*mindere welvaart*). Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu untuk segera melakukan tindakan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jawa, yaitu: dengan melakukan emigrasi penduduk di desa Jawa karena dianggap terlalu padat ke daerah lain atau daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya.

Proyek itu pertama kali dimulai pada tahun 1905 dan dikenal sebagai *Kolonisatie*. Karena proyek itu baru merupakan percobaan pemindahan penduduk, dan pertama kali yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, maka peristiwa ini terkenal sebagai *Kolonisatieproef* (Percobaan Kolonisasi). Kolonisasi ini diartikan sebagai suatu usaha pemindahan penduduk yang

telah direncanakan untuk mengatasi dan berdasarkan kepada jumlah penduduk yang semakin meningkat di Jawa dan kebutuhan tenaga kerja atau buruh kasar di perkebunan-perkebunan (*ondernemingen*) di luar Jawa (Breman: 1963 dan Prior: 1979). Ditambahkan lagi bahwa pada pertengahan kedua abad ke 19 di Pulau Jawa, di daerah-daerah karesidenan tertentu di Jawa, seperti di Kedu, Cirebon, Rembang, Kebumen, Grobogan kebetulan sedang terjadi bahaya kelaparan. (Pelzer: 1945).



Jaringan Irigasi Sekampung di Trimurjo

Sumber: Probonegoro, *Lampung Tanah lan Tinyangipun*, 1942: 28

Pemerintah Kolonial Belanda menjadi semakin yakin bahwa perlu ada tindakan cepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kependudukan di Jawa. Lebih-lebih setelah pemerintah kolonial semakin mendapat kritikan-kritian dari

kalangan kaum humanis dan demokrasi liberal radikal baik di lingkungan masyarakat, parlemen, dan pemerintahan di Belanda dan di Indonesia, bahwa kondisi-kondisi itu tidak terlepas dari kebijakannya yang telah dijalankannya di Jawa (P. Brooshooft, 1901: 134-135, dan Locher-Scholten, 1976: 306-340). Oleh karena itu, Ratu Belanda (1901) berpidato di hadapan Parlemen Belanda dengan mengatakan bahwa pemerintah Belanda akan memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia.

Pidato itu kemudian menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan terkenal sebagai kebijakan politik etis (balas budi) (Hüsken, 1994: 213-217). Kebijakan politik pemerintah kolonial untuk meningkatkan kemakmuran penduduk pribumi Indonesia, yang telah memberikan sumbangan finansial sejak keuntungan finansial ke negeri Belanda sejak zaman tanam paksa atau kultur stelsel, melalui program pembangunan masyarakat di bidang pendidikan, perbaikan pertanian, perbankan, dan kependudukan (Schalkwijk, 1918: 418; dan Kartodirjo, 1990: 32).

Bidang yang disebut terakhir ini kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan kolonisasi yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa kebijakan kolonisasi itu sebenarnya tidak untuk mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Jawa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi lebih untuk

mempersiapkan tenaga kerja, pembukaan perkebunan baru, serta pemindahan kemiskinaan di Luar Jawa, khususnya di daerah Gedong Tataan, Lampung.

## **5.7 Kondisi Perdagangan, Sosial, Ekonomi dan Politik di Lampung pada Masa Kolonial**

### **5.7.1 Kondisi Perdagangan**

Dalam bidang perdagangan, ekspedisi dalam rangka monopoli perdagangan lada berangkat dari Banten ke Lampung, tanggal 24 Agustus 1682, menggunakan kapal-kapal VOC yang bernama De Alexander, Odijk, dan De Schmit. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan dua kompi tentara dan orang banyak lainnya. Ikut dalam rombongan yakni Pangeran Natanegara dan Arya Wangsayudha utusan Sultan Haji.

Rombongan ini disertai dengan empat buah kapal kesultanan yang membawa pula dua puluh tiga surat instruksi. Surat ini berisi antara lain Pangeran Dipaningrat (Pangeran Puja Banten) kepada pembesar dan Mahkota Selebar, satu surat dari Pangeran Dipaningrat kepada Pangeran Purba Negara, kepala marga di Semangka dan dua puluh surat lainnya juga dari Pangeran Dipaningrat kepada pembesar lainnya.

Surat dari Sultan Haji itu intinya berisi pemberitahuan bahwa VOC sudah diberikan hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Rombongan kapal VOC ini sampai di Lampung pada tanggal 29 Agustus 1682 dan berlabuh di desa Tajung

Tiran. Maksud kedatangan kapten Van de Schuur ialah untuk berunding dengan penduduk desa ini terkait dengan perdagangan lada/merica, tetapi tidak berhasil. Keesokan harinya rombongan kapal VOC dan Banten ini meneruskan pelayaran ke Teluk Semangka dan membuang sauh di Karang Kandang sebuah pos bea cukai Banten.

Wilayah-wilayah sentra produksi lada yang umumnya berada di pedalaman dan dikirimkan ke Teluk Betung melalui pelabuhan Panjang, menyebabkan pengiriman lada yang umumnya dikirimkan ke Aceh, dan Palembang menjadi surut, kecuali pengiriman ke Banten (Wellan, hal 251). Hal ini didukung dengan terjadinya lonjakan ekspor komoditas lada hitam asal Lampung dengan rata-rata sebanyak satu juta kilogram. Melonjaknya lada Banten kiriman dari Lampung karena didukung dengan semakin merosotnya ekspor lada dari wilayah Palembang dengan perkiraan jumlah yang setara.

Perdagangan lada di wilayah Lampung pada dasawarsa ketiga mampu memproduksi lada mulai dari abad ke-16 dan terus berlangsung hingga abad ke-XX. Tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan bahwa hingga awal abad ke-XX wilayah Lampung masih mendominasi produksi lada hitam di Hindia-Belanda.

Tabel 5.5 Perdagangan Lada Lampung selama Tahun 1890 sampai 1916

Tahun	Harga Lada (per 1/2 kg)	Total Ekspor Lada Lampung dari Hindia Belanda (dalam ton)
1890	21	9.426
1891	19	8.634
1892	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12.426
1893	14	9.299
1894	11	10.278
1895	11	8.717
1896	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15.479
1897	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14.532
1898	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14.431
1899	28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12.873
1900	30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11.398
1901	30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	10.673
1902	30	11.809
1903	31 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14.078
1904	31	12.922
1905	26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	13.604
1906	23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	20.130
1907	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16.945
1908	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	20.201
1909	20 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	19.180
1910	18 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	26.180
1911	27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24.695
1912	26 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	26.541
1913	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	19.045
1914	57 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21.604
1915	50	22.249

Tahun	Harga Lada (per 1/2 kg)	Total Ekspor Lada Lampung dari Hindia Belanda (dalam ton)
1916	175	11.952

(Sumber: *Economisch-Statistische Berichten Woensdag 5 April 1922 No.327*. Online. (www.delpher.nl) diakses pada 1 April 2019).

Pada dasawarsa kedua abad ke-XX, ekspor lada langsung dari Lampung mengalami peningkatan. Lokasi perdagangan Europeeschen di Telokbetong berasal dari melewati abad ini. Dua pedagang mulai membeli masing-masing dan menggunakan kilogram sebagai berat. Awalnya mereka berdiri di belakang Cina dan haji, yang menggunakan datjing (Broersma, 1916: 179). Tetapi segera setelah mereka menetapkan bobot per kilogram, dengan asumsi 65 kg per pikul (1 pikul adalah 61,76 kg) dan kemudian tanpa persen untuk penurunan bobot berat lada.

Mereka yang menginginkannya berbeda bisa mendapatkan pikul dihitung pada 61,76 kg, tetapi dengan diskon untuk penurunan bobot berat lada saat pengeringan selama dua jam di bawah sinar matahari. Terdapat beberapa alasan yang mendukung kondisi diatas, selain karena mulai aktifnya perusahaan dagang Eropa seperti Internatio, Asosiasi Kredit, dan Perdagangan Internasional Rotterdam (perusahaan belanda yang didirikan tahun 1904 dan berkedudukan di Teluk

Betung), dengan keberadaannya, lada dari Lampung dapat langsung diekspor ke berbagai negara seperti Eropa, Amerika dan Singapura. Terlebih adanya kebijakan standarisasi yang ditetapkan di pasar-pasar negara-negara barat bahwa kadar air pada jenis rempah lada maksimal 15,5 dengan tingkat kekotoran tidak lebih dari 2% (Kristian, 2019:140).

Tabel 5.6 Perdagangan Lada Lampung selama Kurun waktu 1912-1930

Tahun	Produksi Lada (dalam Ton)
1912	2.350
1913	1.486
1914	1.148
1915	10.083
1923	17.762
1924	24.317
1925	14.862
1926	16.369
1927	9.396
1928	12.556
1929	14.685
1930	15.815

Sumber: De Bestuurzaken der Buitenbezittingen, 114

Sejumlah besar arus perdagangan melakukan transaksi melalui pembayaran di muka. Setidaknya terdapat sekitar dua

belas pembeli Cina dan dua puluh pedagang lokal begelar haji yang membeli lada di Telukbetung. Beberapa bekerja dengan uang hasil modal mereka sendiri, dan yang lain dengan modal yang diperoleh dari pedagang grosir. Transaksi pembelian yang paling sibuk berlangsung dari Agustus hingga Oktober, dan sebagian kecil pada bulan November.



Pasar Soekadana.

Pasar Sukadana di Kolonisasi Lampung

Sumber: Probonegoro, *Lampung Tanah lan Tinyangipun*, 1942: 45

Pembayaran uang muka yang dilakukan oleh perusahaan dagang besar kepada pembeli melibatkan sedikitnya 25 ribu gulden untuk setiap transaksi, dan meningkat sepuluh hingga lima belas ribu pada periode puncak panen lada (Broersma, 1916: 179). Mereka menyediakan asuransi atau jaminan lain

untuk ini dan kemampuan membayar bunga tahunan sebesar enam persen.

Pedagang di Telukbetung mendapatkan lada dari membeli lada langsung dari tempat budidaya terutama di daerah Wai Lima,. Selain itu, wilayah Lampung bagian Selatan mencakup daerah Kalianda mulai berkurang karena tanaman lada terserang penyakit tanaman. Dari Seputih juga terlibat dan banyak dari Rebang. Apa yang datang dari Semangka dibawa oleh perahu ke Teluk dan juga oleh *Paketvaart* ke Batavia. Pembeli, yang melakukan bisnis untuk pengumpul besar Cina di Batavia, adalah pesaing dari dua perusahaan Eropa di Teluk, tetapi kebetulan mereka, mengambil keuntungan dari itu, sekaligus mengirimkan ke pesaing mereka, yang, kebetulan, memiliki pembeli sendiri, termasuk kadang-kadang juga penduduk Lampung.

Pedagang lada Cina di Batavia memainkan peran utama dalam spekulasi harga lada. Lada selalu ada di sini dan juga di Barat. Produk, yang diterima oleh orang Cina di Batavia, diperdagangkan di sana beberapa kali sebelum dikirim ke Eropa atau Amerika. Orang-orang yang terlibat dalam tata niaga lada acapkali melakukan spekulasi tentang harga pasar, yang sangat tidak stabil karena ada juga spekulasi di Eropa. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu bahwa seorang pedagang di Batavia, yang menjual lada yang belum dimilikinya, harus

memanggil lada dari Eropa untuk memenuhi kewajiban pengirimannya. Itu lebih murah baginya daripada membeli di Batavia, dari mana orang menegosiasikan harga yang besar.

Ekspor komoditas lada di tahun 1912-1914 lebih banyak dilakukan untuk daerah Jawa, daripada wilayah lain di Hindia Belanda yakni sebanyak 10.918, sedangkan untuk wilayah lain hanya 1.148 yang diekspor. Dengan daerah luar Jawa yang menjadi tujuan ekspor antara lain: Singapura dengan jumlah ekspor sebanyak 10 ton, Penang dengan jumlah sebanyak 4 ton, Belanda dengan jumlah sebanyak 782 ton, Jerman sebanyak 5 ton, dan Amerika Utara dengan jumlah sebanyak 347 ton (*De Bestuurzaken der Buitenbezittingen*, 114).

Dapat dikatakan bahwa harga pasar untuk lada umumnya bergerak antara *f* 20 dan *f* 30 per pikul, dan harga ini akan menentukan harga jula lada di Batavia. Sebagian lada berasal dari berbagai pelabuhan dengan pengiriman menggunakan perahu ke Tandjong Priok, tetapi pelabuhan besar adalah daerah Menggala dan Telukbetung serta dari Kalianda dan Kota Agoeng ke Jawa (Broersma, 1916: 181). Pengangkutan dari Teluk dulu berada pada harga 30 sen per pikul, yang dapat ditambahkan biaya untuk tongkang ke jalan dari Teluk, sewa gudang di Batavia, sehingga bersama-sama 60 sen datang ke satu pikul.

Produksi lada Lampung baik dari segi kuantitas dan kualitas mampu menyumbang hingga 65% produksi lada dunia, dan total lebih dari 70% ekspor lada di wilayah Hindia Belanda (De Lampongsche Pepercultuur, 1973: 2). Dengan kualitas yang tetap terjaga, dan kemampuan memenuhi standar pasar dunia, lada Lampung mampu menembus pangsa pasar internasional di kota-kota Eropa seperti: London, Havre, Hamburg, Bordeaux, Marseille, Trieste, dan Amsterdam untuk Eropa; sementara untuk kawasan Amerika berhasil menembus perdagangan di San Francisco dan New York. Selain itu, perdagangan lada hitam juga mampu menembus kawasan Asia Pasifik seperti Pelabuhan Sydney dan Melbourne di Australia, dan pelabuhan Kobe di Jepang (De Pepercultuur, 312).

Gambaran perdagangan lada dimasa pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya melibatkan komoditas lada, tetapi juga terjadi pada komoditas yang dibudidayakan seperti kopi dan karet. Komoditas lada selama ini langsung dipasarkan oleh para tengkulak lada, maka saat Lampung berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial berusaha memonopoli semua perdagangan yang berkaitan dengan komoditas ekspor. Ini terbukti dengan dibukanya layanan KPM serta jalur distribusi lain seperti Jalur kereta api Lampung-Palembang.

### **5.7.2 Kondisi Sosial**

Kehadiran perkebunan akan mempengaruhi pembukaan daerah terpencil, membawa uang, kesempatan kerja, dan kesejahteraan (Soejono & Leirissa, 2010: 244). Di tempat lain, penduduk merespon secara positif terhadap kesempatan dalam ekonomi baru yang berkaitan dengan perkembangan perkebunan, seperti membuka pasar sebagai pusat pemasaran barang-barang industri rumah tangga, baik barang yang dibutuhkan oleh perkebunan maupun oleh para pekerjanya.

Masuknya buruh perkebunan atau buruh impor dari luar Lampung telah membawa masalah bagi daerah ini, antara lain masalah pemenuhan kebutuhan pangan akibat meningkatnya daya konsumsi pangan daerah, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Menurut Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991: 66-67), perkebunan sistem kolonial ini diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, adanya pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, adanya spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komediti ekspor dipasar dunia. Dalam menjalankan perkebunan, pemerintah kolonial juga memiliki konsep yang dianggap mampu mempermudah kontrol perkebunan.

Perubahan sistem sektor perkebunan tradisional ke sistem perkebunan modern di tangan pengusaha asing tidak hanya membawa perubahan teknologis, ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan kebijakan politik dan sistem kapitalisme kolonial yang menguasainya. Perubahan kebijakan ekonomi pemerintah seiring dengan semakin menguatnya kepentingan ekonomi para kapitalis barat dan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pulau-pulau lain setelah tahun 1870 merupakan salah satu tonggak penting dalam pertumbuhan yang semakin cepat usaha perkebunan masa Hindia Belanda. Pada tahun 1860, ekspor swasta dan pemerintah dari seluruh Indonesia kira-kira sama nilainya.

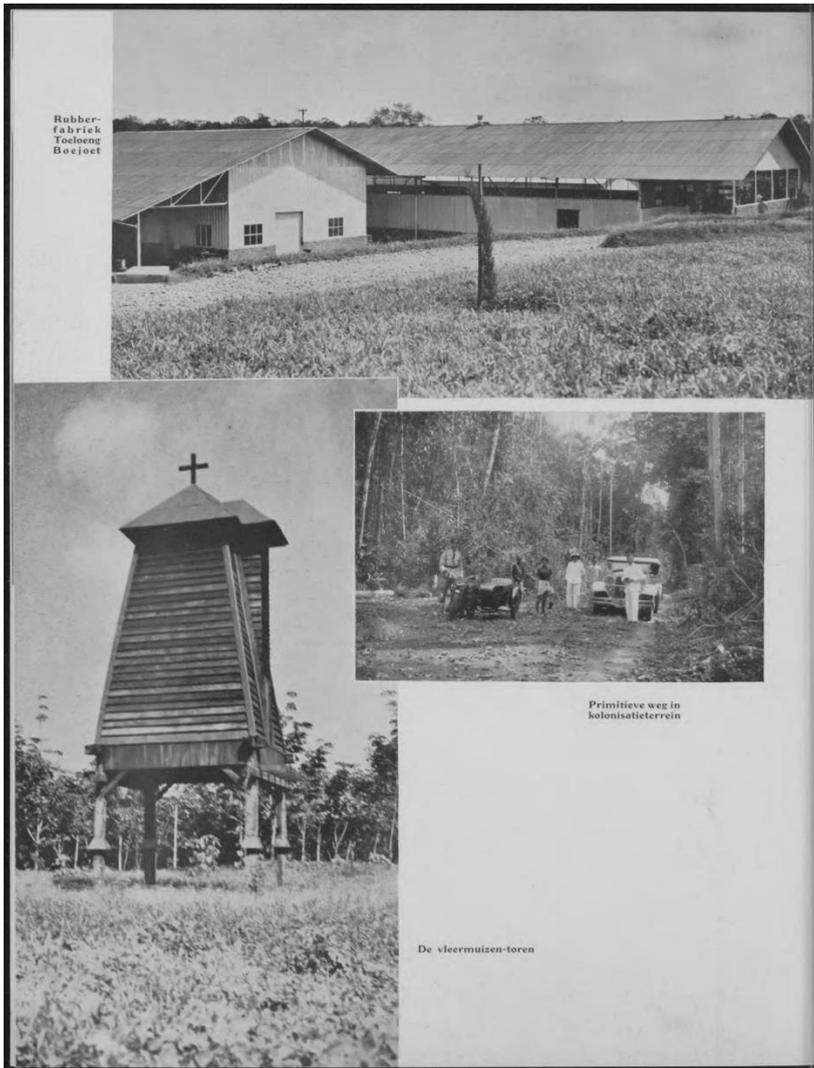


Sekolah di Kolonisasi Lampung

Sumber: Probonegoro, *Lampung Tanah lan Tinyangipun*, 1942: 55

Tetapi pada tahun 1885, ekspor swasta mencapai 10 kali lipat dari ekspor pemerintah (Hayati, 2000: 25). Pada akhir abad ke 19, eksploitasi kolonial muncul dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan baru yaitu aktifitas yang dilakukan di perkebunan. Dengan munculnya perkebunan swasta, para usaha perkebunan swasta ini, rakyat banyak yang mulai menanam komoditi dagang di samping bahan pangan, bahkan ada juga yang lebih mengutamakan tanaman komoditi dagang tersebut. Perkebunan dijadikan sebagai lahan pertanian utama dalam menghasilkan devisa negara (pemerintahan Hindia Belanda) saat itu.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Oktasari dan Agus Trilaksana (2014: 122-129), acuan pengertian di atas mengarah pada perkebunan besar yang merupakan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri dari perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta nasional atau asing. Perkebunan besar biasanya memiliki konsekuensi yang bersifat fungsional yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baru, menyokong perekonomian dan status sosial. Oleh karena itu, menurut pengertian Ritzer (2007:139) sebagai sebuah fungsi pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.



Perkebunan dan Pabrik Karet (*Sumatranjess*, hal. 27)

Pembukaan perkebunan karet dan kopi milik swasta di Lampung pada akhir abad ke 19 menandai sebuah era baru dalam usaha perkebunan, tidak hanya bagi daerah sekitarnya melainkan juga di seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda

selanjutnya. Pembukaan lahan ini akhirnya membutuhkan pasokan tenaga kerja dari luar, dan berujung pada sistem perburuhan di Lampung dan memunculkan apa yang dinamakan upah/gaji. Penghasilan masing-masing buruh selalu berbeda, baik buruh sukarela, maupun buruh kontrak, juga antara buruh laki-laki dan perempuan.

Penghasilan buruh selalu dibedakan karena adanya pandangan bahwa pekerjaan laki-laki selalu dianggap lebih berat daripada pekerjaan perempuan, sehingga gaji untuk buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan laporan Inspektorat Tenaga Kerja, bahwa sampai tahun 1919 di Lampung terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan dengan tanaman yang dibudidayakan berupa tanaman karet, kopi, dan kelapa. Perusahaan mampu melibatkan tenaga kerja hingga 7.263 yang kebanyakan orang Jawa dan Sunda. Sedangkan penduduk asli membuka kebun sendiri atau menyewakan tanahnya (Heiting, 1925: 31).

Peningkatan pendapatan yang diperoleh para buruh di Sumatra cenderung mengalami peningkatan meskipun secara umum relatif tetap. Hal ini terjadi karena kenaikan biaya hidupnya tidak sebanding dengan kenaikan upah. Upah ini tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena akan berkurang atau bahkan bisa habis pada saat gajian. Hal ini disebabkan oleh alasan potongan yaitu biaya

untuk membersihkan lahan, pembayaran pembelian peralatan pada alat kerja yang rusak, cicilan persekot uang saat menekan kontrak, biaya pengeluaran perusahaan berupa upah tukang cukur, juru masak, dan penjaga bangsal serta kongsi. Selain itu juga disebabkan oleh adanya kondisi yang dibuat oleh pihak perkebunan membuka arena judi dan hiburan tari-tarian disertai minum-minuman alkohol.

Keadaan seperti ini memang diharapkan oleh para pemerintah Hindia Belanda. Agar para pekerja tersebut terjerat hutang dan akhirnya tidak bisa kembali ke kampung asalnya. Perkembangan ini juga menuntut kebutuhan pegawai perkebunan, sehingga terjadi gejala peningkatan edukasi yang ditandai dengan lahirnya sekolah calon pegawai. Mata uang tembaga, yang sudah dicampur dengan timah dan timah putih, tersedia begitu murah serta meluas, boleh jadi sudah menjadi sumber utama untuk pembuatan barang-barang perunggu pada kurun niaga (Reid, 2011: 131).

### **5.7.3 Kondisi Ekonomi**

Sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ke Indonesia, sebenarnya menurut Lindayanti (1994: 34-35) masyarakat pribumi telah mengenal sistem bercocok tanam. Sektor perkebunan, menariknya dalam sejarah Indonesia masa kolonial tidak dapat dipisahkan dan memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat

di berbagai wilayah Indonesia. Sistem perkebunan yang dibawa oleh pemerintah kolonial pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa yang berbeda dengan sistem kebun yang telah lama berlaku di Indonesia pada masa pra kolonial.

Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan dan memperbaharui sistem perekonomian pertanian dan pada akhirnya memberikan dampak perubahan sosial yang penting terhadap perubahan masyarakat tanah jajahan. Kondisi ekonomi pada masa kolonial tidak hanya bergantung pada komoditas lada, tetapi juga terjadi pada komoditas yang dibudidayakan seperti kopi dan karet.

Produksi lada pada tahun 1912-1914 lebih banyak dikirim ke pulau Jawa daripada yang diekspor. Sebagai pembanding pada tahun 1914 lada yang berhasil dikirim ke Jawa sebesar 10.918, sedangkan untuk yang diekspor hanya 1.148. dengan rincian negara tujuan ekspor sebagai berikut: Belanda; 782 ton, Amerika Utara; 347 ton, Singapura; 10 ton, Jerman; 5 ton, dan Penang; 4 ton (*De Bestuurzaken der Buitenbezittingen*, 114).

Selain lada yang terus dilakukan budidaya, pemerintah kolonial mulai melakukan budidaya terhadap tanaman karet dan kopi. Ada beberapa jenis tanaman penghasil karet yang dikenal di Hindia Belanda, yaitu karet Kebo (*Ficus elastica*) dan Jelutung (*Dyera costulata*) yang merupakan tumbuhan

asli Sumatera, dan yang didatangkan dari luar Hindia Belanda yaitu *Castillo elastica* dan *Hevea brasiliensis* (Leemkolk, 1914: 8). Namun yang dikembangkan secara luas adalah jenis *hevea* di samping *ficus* dan *jelutung* yang telah lebih dulu dikenal budidayanya, yang awalnya diambil getahnya oleh masyarakat sebagai hasil hutan non-budidaya.

Untuk mendukung keberadaan perusahaan perkebunan dan budidaya tanaman ekspor. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan banyak bank, yang didirikan pada bagian kedua abad ke 19. Keberadaan bank pemerintah selain berfungsi sebagai lembaga kredit dan finansial untuk menuju ke arah sentralisasi modal, diantaranya sebagian dengan modal asing (Kartodirdjo, 1990: 22-23). Pada awalnya bank-bank kolonial itu memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk kredit dan finansial, akan tetapi pada akhirnya bank berhasil mengawasi dan menguasai, sekaligus mengakuisisi perusahaan-perusahaan kolonial.

Perusahaan karet yang melakukan budidaya tanaman karet di Lampung ialah *N.V. Sumatra Rubber Cultuur Mijnbouw* dengan area usaha di Kedaton. Pada Kedaton I dengan area 200 bau hanya 65 bau yang ditanami karet Kebo, sedangkan di Kedaton II dan III yang masing-masing memiliki area seluas 100 dan 250 bau hanya ditanami campuran kopi dengan *hevea* (Emissien, 1911: 1077). Dari sisi hasilnya di Lampung,

setelah terjadi ekspor yang mencapai lima ton pada tahun 1914, maka selanjutnya terjadi penurunan produksi. Welan mencatat dalam perbandingan ekspor karet Kebo di Sumatera Selatan, dari tahun 1925-1929, Lampung hanya pernah melakukan ekspor kembali pada tahun 1924-1927 masing-masing sejumlah satu dan dua ton, itupun merupakan angka terendah dibanding Bengkulu dan Palembang di tahun yang sama.

Di Lampung perusahaan perkebunan yang tercatat pertama kali didirikan tahun 1889 di daerah Way Lima, kemudian di Way Ratay dan Sungai Langka, masing-masing pada tahun 1893 dan 1899. Memasuki abad ke- 20, perusahaan kembali melakukan perluasan. Dengan dibukanya area perkebunan-perkebunan baru di Way Halim, Langkapura, Kedaton, Natar, dan Bekri, yang kesemuanya tak jauh dari ibu kota Karesidenan Lampung di Teluk Betung (Leemkolk, 1914: 37).

Selain karet, tanaman yang dibudidayakan selanjutnya ialah kopi. Upaya memperkenalkan budidaya kopi di Lampung sudah dimulai sejak tahun 1841 setelah dilakukan proses penyelidikan, identifikasi dan penelitian yang bersifat umum tentang karakteristik wilayah Lampung. Setelah dianggap layak kemudian pemerintah kolonial melakukan promosi budidaya yang bermanfaat untuk dikembangkan di wilayah ini. Realisasi dari penelitian itu ialah didatangkannya para mantri

dari Jawa untuk memberikan pendidikan dalam bidang pertanian, terutama padi dan kopi bagi masyarakat Lampung (Huitema, 1935: 74).

Komoditas kopi dilakukan budidaya di wilayah Lampung merupakan jenis kopi Robusta. Kopi jenis Robusta di Lampung meliputi tiga area utama:

1. Wilayah Kotabumi hingga perbatasan Bengkulu dan Martapura (Palembang). Seluruh daerah ditanami Robusta dengan variasi ketinggian 50-400 m. Area meliputi Olokrengas, Banjarmasin, Kasui, Blambangan Umpu, dan utara bukit Punggur.
2. Wilayah utara Talang Padang dengan dataran Ulu-Ulu dan Ulu Semuong hingga Way Tenong (perbatasan Bengkulu). Kopi Robusta menjadi tanaman penting, dengan sedikit pohon lada. Variasi ketinggian 500-800 m.
3. Wilayah sepanjang Teluk Betung, Kalianda, Batu Serampuh, hingga Rajabasa. Dengan ketinggian area hingga 300 m (Huitema, 1935: 98).

Meski demikian, proses permulaan budidaya ini tidak berlangsung mulus sesuai harapan. Bahkan disebut populasi kopi tidak pernah menjadi bagian budidaya yang besar sampai abad ke-20. Lahan pertanian yang ditanami khusus tanaman kopi sangat sedikit ditemui, kebun-kebun

yang dibuka dengan bantuan mantri Jawa gagal. Hal tersebut lantaran konstelasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, demografi yang rendah, dan infrastruktur yang sangat primitif (Huitema, 1935: 74). Gambaran kondisi ini dapat dilihat dari sangat rendahnya ekspor kopi dari Lampung jika dibandingkan dengan daerah lain, Sumatera Selatan walaupun memang tetap terjadi peningkatan.

Tabel 5.7 Perbandingan ekspor kopi dari residensi di Sumatera Selatan (dalam ton)

Tahun	Lampung		Bengkulu		Palembang	
	R	P	R	P	R	P
1923	172	1.310	2.863	2.294	12.026	1.149
1924	293	757	5.920	2.811	19.881	1.679
1925	683	1.459	4.894	2.157	20.981	1.354
1926	1.116	899	6.621	2.641	25.364	1.480
1927	2.142	1.136	11.328	1.783	23.407	1.594
1928	3.808	988	15.885	1.713	28.229	1.257
1929	5.080	1.446	11.679	2.208	17.818	1.676

Keterangan: (R): kopi rakyat (P): kopi perusahaan Sumber: W. Karst Huitema dalam *De Bevolkingskoffiecultuur* 1935: 73-76.

Dari tabel di atas terlihat bahwa ekspor kopi rakyat di wilayah Lampung merupakan yang terendah di Sumatera Selatan dengan perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan kopi dari perusahaan cenderung stabil dan tidak menunjukkan

perbedaan angka yang terlalu menganga. Di ketiga wilayah itu level ekspor rerata berada di rentang 1000-2000 ton.

Tabel 5.8. Sumbangsih perusahaan perkebunan di Lampung terhadap total Produksi Karet dan Kopi di Hindia Belanda

Tahun	Karet (ton)			Kopi (ton)		
	Lampung	Hindia B.	%	Lampung	Hindia B.	%
1924	1.986,7	90.034	2,21%	576,7	42.900	1,34 %
1925	2.399,3	106.047	2,26%	892,2	61.153	1,45 %
1926	2.854,7	122.831	2,32%	652,5	38.979	1,67 %
1927	3.368	130.895	2,57%	1.133,6	64.397	1,76 %
1928	3.760,3	140.928	2,66%	987,2	55.315	1,78 %

Sumber: Yuli Kristian, 2019: 164

#### 5.7.4 Kondisi Politik

Sistem penguasaan lahan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Lampung, termasuk di *Onderafdeeling Kotabumi en Telokbetung*, menurut Zed (2002: 294-312), menerapkan sistem dualisme sistem penguasaan lahan yakni sistem hukum Eropa dan sistem hukum adat. Pemerintah Kolonial Belanda, dalam sistem penguasaan lahan seperti ini, menggunakan dan memanfaatkan aturan penguasaan lahan dengan sistem kepala daerah, kepala marga, yang dipegang oleh *pasirah*. Dalam

sistem seperti ini, pasirah, sebagai kepala adat marga dikendalikan dalam mengatur tentang adanya pengakuan status lahan adat masyarakat, di mana syarat ada tanah adat yang diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Fokus utama kajian penelitian ini adalah pembukaan perkebunan dan dampaknya dalam masyarakat di *Onderafdeeling Kotabumi en Telokbetung* yang merupakan bagian dari suatu masyarakat perkebunan pada masa itu.

Menurut Purwanto (2015: 12), tanah yang merupakan salah satu alat produksi utama telah mengalami swastanisasi dan liberalisasi, sehingga menjadikan penguasaan tanah semakin terbuka seluas-luasnya bagi swasta untuk membuka perusahaan perkebunan.

Monopoli penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan berlangsung terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Maka, seperti halnya di Sumatera Timur, keberhasilan usaha perkebunan di Keresidenan Lampung, termasuk *Onderafdeeling Kotabumi en Telokbetung*, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa Asing lainnya dalam melakukan negosiasi dan mempengaruhi para penguasa lokal, terutama di daerah otonom dalam bentuk pemerintahan marga yang dipegang para pasirah. Melalui pemerintah kolonial Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa asing ini menjalin

perjanjian dan menandatangani kontrak jangka panjang dalam penyediaan lahan perkebunan dalam skala luas bagi perusahaan perkebunan asing.



Pembukaan Perkebunan Kopi di di Way Lima, Lampung

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berpindah dan menetap di Lampung menyebabkan naiknya jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan kekurangan beras semakin terasa. Para pekerja sangat bergantung pada beras impor. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk

dan penggunaan lahan untuk tanaman perkebunan, dan semakin berkurangnya lahan yang digunakan untuk memproduksi bahan pangan penduduk. Hal di atas berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial terhadap perkembangan perkebunan, yang tidak diimbangi dengan kebijakan penyediaan bahan pangan yang mampu dipenuhi sendiri (Hayati, 2000: 43).

Selain itu, sebelumnya proses agro industrialisasi juga melahirkan perkembangan komunikasi dan transportasi yang berguna bagi kegiatan tersebut. Distribusi minyak dilakukan melalui kereta api atau dengan pengangkutan beranting baik dengan sepeda maupun dengan tenaga pikulan. Selain itu dalam bidang perkebunan juga muncul pembagian pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar distribusi dapat dilakukan dan diatur dengan baik. Perekonomian pengolahan perminyakan mendorong pendirian usaha-usaha terkait, seperti pabrik asam sulfur, pengangkutan kapal tanker, pabrik kaleng, drum, dan perbengkelan perbaikan mesin (Soejono & Leirissa, 2010: 197).

## **5.8 Gambaran Perburuhan pada Masa Kolonial Belanda**

Sistem organisasi dan stratifikasi sosial telah menjadi sesuatu yang melembaga dalam organisasi pemerintahan dan organisasi perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta kolonial Belanda di Indonesia. struktur organisasi ini telah

menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan sosial dalam kehidupan kerja di perkebunan. Terlebih hanya orang-orang kulit putih, dan sedikit keturunan indo-Eropa yang dapat menduduki posisi atas dalam organisasi tersebut. Adapun susunan organisasi perkebunan tersebut antara lain: 1) Direksi, 2) Kepala Administrator (Orang Kulit Putih), 3) Administrator (Orang Kulit Putih), 4) Mandor (Orang Indo-Eropa, Asia) 5) Tandır (Orang Asia, ada juga orang Indonesia) 6) Buruh Laki-Laki (Orang Pribumi), 7) Buruh Perempuan (Baay, 2010: 132).



Gambar. 5.1 Struktur Organisasi Kerja di Perkebunan

Pada masa awal keberadaan pemerintah kolonial Belanda di Lampung sangat minim sekali data-data dan fakta terkait dengan praktek perburuhan di wilayah ini. Tahun 1811-1816, Thomas Stamford Raffles dalam memimpin pemerintahan pada saat pendudukan Inggris, mendirikan *The Java Benevolent Institution* dengan tujuan dan motivasi menghapus sistem perbudakan. Meskipun akhirnya cita-cita luhur ini

tidak terlaksana karena singkatnya pemerintahan Raffles di Sumatera dan diikuti penarikan Inggris dari wilayah Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahannya, Raffles mengeluarkan kebijakan sistem pajak bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah *lendrente*. Sistem pajak bumi diharapkan mampu menggantikan sistem perbudakan dengan asumsi bahwa para petani dapat bekerja maksimal dan menggantikan penyerahan dengan pajak hasil bumi (Wertheim, 1999: 188).

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1813 hingga akhir masa kolonial. Ketika Raffles berkuasa, ia mengeluarkan kebijakan dalam sebuah karangannya berjudul *Substance of a minute*, kebijakan ini diperkenalkan tidak hanya di pulau Jawa, namun juga daerah-daerah lainnya, termasuk wilayah Lampung. Prinsip dasar sistem ini adalah bahwa setiap penggarap akan dikenai pajak sesuai dengan kepemilikan tanah, jumlah dan kualitas tanah miliknya, karena semua tanah dianggap sebagai milik pemerintah (Boomgaard, 2004: 58).

Sistem *lendrente* ini merupakan perintah tentang aturan pemungutan pajak, dengan ketentuan antara lain sebagaimana dalam tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9 Pedoman pemungutan pajak

No	Jenis	Kategori	Pajak
1.	Sawah	Kelas I	½ dari hasil pajak
2.	Sawah	Kelas II	2/5 dari hasil pajak
3.	Sawah	Kelas III	1/3 dari hasil pajak
4.	Tegal	Kelas I	2/5 dari hasil pajak
5.	Tegal	Kelas II	1/3 dari hasil pajak
6.	Tegal	Kelas III	1/4 dari hasil pajak

Sumber: Boomgaard, 2004: 58.

Telah menjadi suatu hal yang umum dan jamak dilakukan bahkan sebelum masa kolonial Belanda berada, bahwa pajak hasil bumi masyarakat dikenakan pajak (*cuke*). Beberapa tuan tanah memaksa para penyewa untuk membayar biaya sewa menggunakan uang, hal ini tentunya menjadikan para petani penggarap terpaksa menjual sebagian hasil panen padinya untuk membayar pajak, sedangkan petani yang tidak memiliki memiliki tanah membayar pajak dengan cara bekerja.

Adapun kelompok masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan tanah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Petani dengan sebuah pondok berikut pekarangannya dengan status kepemilikan sebagai penyewa, dalam sumber-sumber yang ada kita menemukan istilah seperti *lindung*, *(ng)lindung*, *kuli karang*, dan *karang*

*kopek*;

2. Petani-petani yang tidak memiliki pekarangan, tetapi mempunyai status rumah sendiri, yang dibangun di halaman *sikep* (pondok tempel);
3. Keluarga petani yang tidak memiliki pekarangan, dan rumah, tinggal secara menumpang yakni sebagai penyewa pada rumah milik seorang *sikep*; dalam historiografi, petani semacam ini disebut Haushing (*pondok slesup* atau petani yang menumpang pada pemilik rumah).

Pada akhir abad ke 19, para petani desa khususnya kelompok petani numpang dituntut untuk menanggung beban kerja rodi seperti berdiri sepanjang malam dalam ronda, perbaikan jalan dan jembatan. Selain kondisi diatas, terdapat anggapan bahwa Pentingnya ikatan kerja antara pengusaha dan para pekerja (buruh) di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:

1. Pengusaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk dan gambaran kekuasaan seseorang dan pada gilirannya akan menentukan status pemiliknya, sebab tenaga kerja dipandang sebagai sumber daya yang langka pada masanya mengalahkan status kepemilikan tanah. Sebagaimana kaum elite Banten menganggap kekayaan mereka sepenuhnya terletak pada budak-

budak, sehingga apabila budak mereka terbunuh, maka mereka menjadi pengemis (Scoot, 1606: 142);

2. Transaksi manusia umumnya dinyatakan dalam hitungan uang. Perdagangan maritim selama berabad-abad telah memasuki kawasan Asia Tenggara, sehingga masyarakat tampaknya sudah terbiasa berfikir mengenai dirinya sendiri sebagai aset yang mempunyai nilai tunai;
3. Perlindungan hukum dan finansial dari negara atau kerajaan relatif masih sangat rendah, sehingga pelindung maupun yang dilindungi perlu saling membantu dan mendukung. Bangsa Cina melaporkan bahwa orang Melaka berkata bahwa lebih baik memiliki budak daripada tanah, sebab budak-budak dapat melindungi tuannya (Hwang Cung, 1537: 128).

Ketiga faktor ini telah menimbulkan suatu ikatan yang umumnya didasarkan atas utang piutang, yang ketaatannya bersifat kuat, akrab dan mengikat, namun juga sekaligus dapat berpindah atau diperjualbelikan (Reid, 2014: 149). Sehingga pada akhirnya praktek perburuhan dalam sistem ekonomi kolonial menjadi semakin mendapatkan tempatnya. Adapun kondisi para buruh dapat kita bagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### **5.8.1 Kehidupan Buruh**

Kontrak buruh yang telah habis masa berlakunya, semestinya membuat buruh dapat kembali ke kampung halamannya dengan membawa hasil dari bekerja di perkebunan. Namun kondisi berbeda dialami setiap buruh, mereka umumnya sulit kembali dengan berbagai alasan mulai dari kehabisan uang, terjerat hutang hingga kalah dalam perjudian. Hal ini terjadi karena menjelang habis kontraknya, setiap perusahaan mendadak menyediakan berbagai macam hiburan seperti pertunjukkan wayang, arena judi, hingga mengizinkan pekerja seks untuk masuk ke perkebunan (sebelumnya kegiatan ini amat dilarang) (Brand, 1992: 405-407).

Praktek-praktek semacam ini pada akhirnya memaksa setiap buruh untuk memperpanjang kontraknya di perkebunan karena hutang yang menumpuk akibat kalah dalam perjudian dan strategi perusahaan untuk menahan buruh untuk pulang kampung menemui kesuksesannya (Lulofs, 1932 dalam Baay, 2010: 135). Keadaan dan kehidupan para buruh pada masa kolonial Belanda dapat kita lihat pada sub bab berikut.

#### **a. Sistem Kerja di Perkebunan**

Organisasi kerja pada perusahaan dikuasai oleh mereka yang memiliki latar belakang budaya dan

bangsa yang sama, yakni ras kulit putih Eropa. Pengawas buruh Asia di kebun yang pada akhir abad 19 digantikan oleh pegawai Eropa dengan tujuan agar dapat memperkokoh penguasaan atas tenaga kerja jatuh pada mereka yang tidak punya kesabaran dan sulit dipuaskan. Buruh tidak boleh bekerja tanpa ikatan yang resmi. Mandor atau tandil memiliki peran sebagai pemimpin kelompok buruh, dengan tugas utama mengawasi kinerja dan hasil pekerjaan para buruh.

Selain itu, Mandor juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan asisten perkebunan dalam melaksanakan pengawasan buruh kerja. Mandor memiliki keleluasaan dalam bentuk perintah, ancaman dan larangan selama bekerja dengan menggunakan bahasa Melayu yang tentunya mudah dipahami para buruh daripada asisten perkebunan dengan gaya dan logat bahasa Belanda.

Keberadaan para mandor tentunya berkaitan erat dengan kharisma, wibawa dan citranya dimata para buruh, sehingga penting untuk selalu dijaga. Karisma para mandor yang tidak ada dimata burh tentunya amat membahayakan kinerja buruh diperkebunan, karena mandor adalah tumpuan utama

dalam keberlangsungan sebuah perkebunan.

Penghasilan mereka pun ditentukan dari hasil kerja keras buruh yang berada dalam regunya. Dari sini terlihat bahwa tuan kebun, kaki tangan kolonial yang bertugas mengawasi para pekerja sepenuhnya, dan asisten residen harus dapat menundukkan para buruh melalui mandor-mandor yang mereka tetapkan sebagai pemimpin regu para buruh. Sementara mereka (tuan kebun dan asisten) ini harus patuh pada manajemen dan petinggi perusahaan.

Campur tangan pemerintah kolonial ini ditandai dengan dibuatnya peraturan khusus yang ditujukan untuk melindungi buruh dari majikan yang jahat, dan melindungi majikan dari praktek jahat buruh. Setelah melalui berbagai perdebatan di kalangan pemerintah kolonial dan parlemen Belanda, Ordonansi Kuli pun akhirnya diberlakukan pada 1880, dimana isinya memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi buruh-buruh perkebunan pada saat itu, seperti tidak boleh melarikan diri dari pekerjaan, tidak boleh memberontak, menghina, menghasut orang lain untuk lari atau membangkang, dan sebagainya. Untuk menjamin agar Ordonansi Kuli pada waktu itu dilaksanakan secara wajar dan seimbang, maka pada

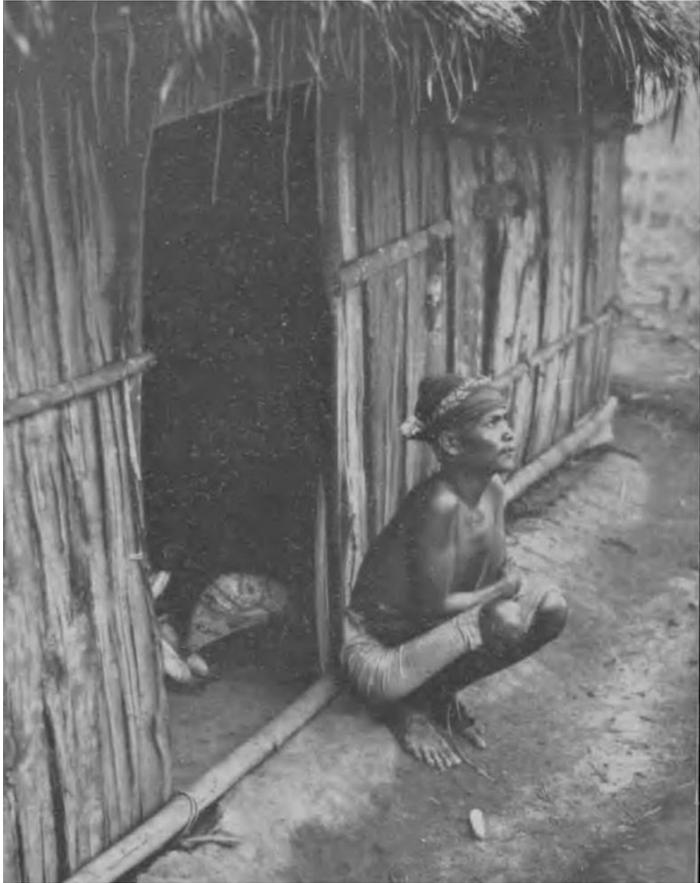
1904 didirikan badan Inspeksi Perburuhan di Sumatera Timur, yang ternyata hanya menjadi alat perusahaan perkebunan untuk menundukkan kaum buruh.

**b. Kondis Buruh Perkebunan**

Selain tanah, buruh atau tenaga kerja adalah faktor produksi terpenting yang sulit didapatkan. Atas dasar inilah, kemudian, menurut temuan Breman, diberlakukan sistem kontrak kerja yang memungkinkan setiap buruh terikat dan terbelenggu dengan perusahaan dengan berbagai cara seperti melalui uang panjar yang diberikan sebelum buruh bekerja dan kontrak kerja. Perjanjian kerja dalam bentuk kontrak kerja diberikan pada buruh menjadikan setiap buruh tidak bisa lari dari belenggu pekerjaan.

Pekerjaan buruh di perkebunan dirasaka begitu berat pada masa awal buruh bekerja dan menyesuaikan dengan iklim kerja dan lingkungan barunya. Untuk bisa hidup, mereka harus bertahan dengan uang panjar yang diberikan di awal kontrak. Kontrak kerja baru dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Sementara itu, buruh yang memutuskan hubungan kerja dianggap melakukan pelanggaran. Cara ini

dengan mudah dijadikan dalih bahwa buruh bekerja atas dasar kesukarelaan, dimana kesukarelaan ini kemudian menjadi dasar pembenaran bagi tuan kebun untuk memperlakukan buruh secara sewenang-wenang.



Gambaran Kehidupan Buruh di Perkebunan (Sumatranjjes, hal.21)

Setiap buruh yang bekerja di perkebunan, mendapatkan upah berupa uang panjar yang

diberikan di masa awal kontrak mereka jauh sebelum mereka bekerja. Uang panjar ini seperti hutang, sehingga para buruh yang bekerja di perkebunan tidak dapat berhenti bekerja hingga kontraknya selesai. Ketika buruh hendak mengundurkan diri di tengah jalan, buruh akan dihukum karena dianggap tidak mau dan mampu melunasi hutangnya berupa uang panjar, yang telah dibayarkan pengusaha di awal kontrak.

Sistem pembayaran upah berupa uang panjar ini bersifat stagnan, karena itu merugikan. Jika hasil panen melimpah atau memburuk, buruh tidak akan mendapatkan apapun lagi, selain uang panjar tersebut. Selain berupa uang panjar, bentuk-bentuk pembayaran upah lain pun diterapkan, seperti upah borongan. Seiring dengan munculnya tahap baru dalam kapitalisme pada waktu itu, buruh laki-laki pun mulai banyak diganti dengan banyak didatangkannya buruh perempuan.

**c. Keberadaan Buruh Perempuan**

Tidak hanya buruh laki-laki, pada prakteknya terdapat upaya dalam pemenuhan kebutuhan buruh perempuan. Perekrutan buruh perempuan untuk bekerja di sektor-sektor perkebunan dan budidaya

lada di Lampung mulai digalakkan. Perekrutan ini pada satu sisi guna memenuhi permintaan buruh kontrak yang makin meningkat seiring makin banyaknya perkebunan swasta yang di didirikan di Lampung. Selain itu, terdapat persoalan lain yang menghinggapi para buruh laki-laki baik aspek sosial maupun pada aspek kebutuhan biologis yang terus bertambah. Di perkebunan Deli Sumatera Utara, pertambangan Ombilin Sumatera Barat dalam banyak laporan telah terjadi banyak penyimpangan seksual berupa perilaku sodomi dan *pederasty* (Baay, 2010: 140).

Buruh perempuan kebanyakan didatangkan dari Jawa, dan biasanya mereka mau bekerja di Sumatera karena persoalan sosial dan ekonomi. Dalam stratifikasi sosial dalam dunia kerja, buruh perempuan menempati posisi yang paling rendah. Setiap buruh perempuan akan mendapatkan bayaran sebesar 2,5 gulden per bulan atau dengan kata lain mereka dibayar 8 sen sehari (Brand, 1992: 410).

Keadaan ini diperparah dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani buruh perempuan, bahwa setiap buruh perempuan tidak akan mendapatkan bayaran apabila tidak bekerja dan mereka juga tidak

diperbolehkan bekerja diluar perkebunan (Baay, 2010: 141). Dengan penghasilan yang begitu rendah, pada akhirnya banyak buruh perempuan terjebak dalam kehidupan malam untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan tambahan dari praktek pelacuran yang dijalankan sebagian buruh perempuan, membuat mereka mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 6 sen.

#### **d. Keberadaan Buruh Rumah Tangga**

Praktek perburuhan tidak hanya melibatkan buruh di perkebunan, tetapi juga dalam rumah tangga untuk orang Eropa khususnya Belanda. Para pekerja itu terdiri atas 1) *djongos* atau pelayan laki-laki di rumah, 2) *kebon* atau tukang kebun, 3) *baboe* atau pelayan perempuan di rumah, 4) *wasbaboe* atau tukang cuci, dan *kokkie* atau tukang masak (Baay, 2010: 29).

##### **1) *Djongos***

Umumnya *djongos* sudah melakukan kerja sejak pukul 06.00 pagi apabila tinggal bersama majikan. sedangkan *djongos* yang hidup tidak bersama majikan akan berangkat dari kampungnya sejak hari masih petang. *Djongos* mendapatkan upah terbesar diantara pembantu rumah tangga lainnya. Pekerjaan yang dilakukan hampir semua pekerjaan

rumah tangga kecuali membersihkan kamar majikan, seperti merapikan kursi serambi depan, membuat kopi, menyiapkan sarapan, dan menjadi pemimpin bagi para pembantu lain di rumah majikan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang *djongos* telah memiliki daftar pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan *djongos* sendiri baru berakhir setelah pukul 21.30 malam setelah acara makan malam, dan biasanya mereka baru bisa makan malam pukul 22.00. ini belum termasuk apabila majikan kedatangan tamu sesama orang kulit putih, *djongos* akan bertugas menyiapkan *splitjes* (sejenis minuman keras, campuran antara whisky dan air soda).

## 2) ***Kebon***

*Kebon* atau tukang kebun ialah orang yang mendamping *djongos* dalam melaksanakan kerja sehari-hari. Ia tidak hanya bekerja sebagai tukang kebun, *kebon* mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti menggosok dan membersihkan sepatu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, mengantar makan siang ke kantor majikan, serta merawat kebun bunga milik majikan.

### 3) *Baboe*

*Baboe* atau pelayan perempuan di rumah memiliki tugas khusus untuk membersihkan kamar tidur majikan, termasuk bebas dari keberadaan serangga seperti kecoa. Diakhir pekan, *baboe* melakukan pekerjaan mencuci pakaian, memperbaiki pakaian yang rusak, termasuk membersihkan sepatu majikan perempuan. Selain itu, *baboe* juga memiliki tugas untuk membereskan pakaian kotor yang akan dikerjakan para *wasboboe*.

### 4) *Wasbaboe*

*Wasbaboe* atau tukang cuci memiliki tugas khusus untuk mencuci semua pakaian kotor. Selain itu, *wasbaboe* juga berkewajiban melayani kebutuhan anak-anak majikan misalnya setelah bermain baju menjadi kotor, maka *wasbaboelah* yang mengganti dan mencucinya.

### 5) *Kokkie*

*Kokkie* atau tukang masak memiliki tugas khusus untuk menyiapkan makanan sehari-hari. *Kokkie* bisa disebut penguasa alam dapur di rumah seorang majikan kulit putih. Semua kebutuhan makanan, menu dan bahan-bahan makanan menjadi wilayah dimana para *kokkie* bisa membelinya di pasar

dengan persetujuan majikan. Pembelian bahan-bahan makanan sendiri seringkali menjadi ajang bagi setiap *kokkie* untuk mengambil keuntungan dalam setiap transaksinya bahan makanan, meskipun keuntungannya hanya beberapa sen saja, tetapi ini sudah cukup berarti bagi setiap *kokkie*.

**e. Kesehatan Buruh**

Retensi kuli sering kali merupakan retensi perusahaan dalam usaha perkebunan di luar Jawa dan tanpa ketersediaan pekerja dalam jumlah yang memadai, maka tidak ada perusahaan yang dapat eksis. Jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan di Lampung untuk mendapatkan kuli Jawa adalah sekitar 110 gulden per tahunnya. Pada tahun 1911, terdapat lebih dari 400 buruh dari 4000 buruh yang datang sebagai pekerja berakhir meninggal di Sumatera.

Perkembangan jumlah buruh yang semakin meningkat, dan tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana kesehatan dan rumah sakit tentunya berakibat buruk bagi kondisi para buruh. Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun-tahun awal maraknya kolonis yang datang ke Lampung. Berikut tabel perkembangan kondisi buruh yang meninggal sejak tahun 1911-1913 di Lampung akibat dari tidak

tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai:

Tabel 5.10 Kondisi Buruh yang Meninggal di Lampung sejak 1911-1913

Wilayah	Tahun (data dalam 1000 jiwa)		
	1911	1912	1913
Rotterdam I	-	-	120
Negararatu	50	160	120
Wai Halim	-	-	20
Langkapura	60	95	70
Egaharap	160	110	65
Tanjung Selatan	-	-	620
Hacienda del Coco	-	160	145
Sungailangka	190	50	40
Rejosari	190	90	35
Pitu Javanen		90	50
Pitu Chineezen	205	135	85
Negeria	-	125	130
Gadies	215	55	95
Kedaton	80	50	65
Wai Lima	115	70	75
Kedondong	55	40	70

Sumber: Broersma, 1916: 205

Tabel angka-angka ini membuktikan bahwa layanan kesehatan medis tidak mampu dan belum menjangkau serta mengendalikan kesehatan para buruh di tahun-tahun itu. Iklim di beberapa daerah di Lampung jelas kurang menguntungkan daripada di daerah lain, tetapi bukan karena ini perbedaan kuat dalam mortalitas

yang muncul dalam tabel dapat dikemukakan. Tetapi faktor yang signifikan adalah bahwa buruh tiba di wilayah Lampung dalam kondisi kelelahan atau sakit meskipun ada inspeksi yang harus dilakukan sebelum dikirim ke Jawa.



Pemeriksaan Kolonis di pelabuhan Teluk, Lampung (Sumatranjjes, hal.27)

Penderita dipaksa untuk beristirahat, tetapi majikan, yang tidak dicurigai memiliki penyakit, menegurnya dengan malas dan mendorongnya untuk bekerja dan justru karena pekerjaan ini penyakitnya menjadi lebih parah. Dalam sebuah ceramah penting, yang diadakan di hadapan petani Lampung pada tahun 1913, Dr. Schuffner, ahli kesehatan terkenal menyebutkan bahwa kondisi masyarakat Lampung hampir sama dengan keadaan masyarakat Senembah di Deli.

Schuffner mengatakan bahwa sekitar 100 persen populasi di Jawa terinfeksi penyakit cacing tambang, di mana obat umumnya adalah *oleum genopodium* (Broersma, 1916: 206). Tidak jarang orang kehilangan 300 hingga 600 cacing tambang setelah satu dosis minyak hewani. Dia menyebut rata-rata jumlah cacing untuk kuli 175. Kelelahan, dan kelesuan setiap buruh yang datang adalah gejala penyakit, dalam beberapa bulan pasukan telah dihancurkan, orang dengan kandungan darah hanya sepuluh persen masih diharuskan untuk bekerja, tanpa istirahat dan perlakuan medis yang memadai.

Perawatan di perusahaan itu sendiri adalah bagian yang paling penting. Sehingga diperlukan sebuah rumah sakit yang baik, tetapi lebih baik mencegah pekerja di luar Jawa dengan menjaganya dari infeksi. Sementara itu, sistem pelayanan rumah sakit di Lampung belum tertib, dan efisien, tetapi semakin buruk dalam menunjang keberhasilan dalam pelayanan kesehatan kaum buruh. Rumah sakit yang cukup memadai adalah rumah sakit pusat di Tandungkarang dan untuk mengantisipasi keadaan semakin memburuk, maka terdapat rumah sakit darurat di setiap perusahaan perkebunan.

Negosiasi telah lama dilakukan untuk mencapai hal ini. Layanan medis bagi masyarakat sipil sangat membantu setiap kolonis di Sumatera Selatan dan akan semakin banyak pula kolonisasi yang akan dilaksanakan, tetapi belum memungkinkan untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan. Sejauh ini mereka telah menyediakan layanan perawatan dengan terlebih dahulu membuat institusi kesehatan di Tanjung Karang. Setelah ditutup, beberapa perusahaan memiliki sebuah rumah sakit yang didirikan di Telukbetung, dan mereka sebut sebagai rumah sakit pusat. Seluruhnya tidak memadai, dan atas dorongan administrasi nasional dan inspektorat tenaga kerja, ketentuan baru dibuat, di mana sebuah rumah sakit harus dibangun untuk sejumlah dua perusahaan atau lebih.

Perusahaan lain bergabung dengan rumah sakit-rumah sakit itu, tetapi pengaturan itu tidak cukup. Rumah sakit tambahan juga menetapkan persyaratan, yang dalam banyak kasus tidak terpenuhi dengan baik dan masing-masing untuk dirinya sendiri untuk rumah sakit tambahan sederhana tetapi diatur dengan rapi, di mana ketentuan dibuat untuk transportasi tepat waktu dari sakit parah ke rumah sakit pusat, dapat menunjukkan deskripsi singkat dari suatu pendirian

seperti yang ditemukan di suatu perusahaan pada tahun 1913 (Broersma, 1916: 206)

Rumah sakit berdiri kokok dengan konstruksi bangunan di atas panggung, lantainya terdiri dari cabang-cabang, diletakkan berdampingan, dindingnya terbuat dari tikar, langit-langit atap dari anyaman. Rumah sakit ini terdiri atas sepuluh kamar, dan masing-masing kamar dipisahkan oleh tikar, yang kadang-kadang bergerak-gerak tertiuip angin kencang. Dapur, selokan drainase, telah tersedia di sana, termasuk obat-obatan, perban dan alat kesehatan lain meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas.

#### **f. Perjuangan Kaum Buruh**

Kemudian, salah satu aturan utama dalam mendisiplinkan buruh diantaranya adalah buruh dilarang meninggalkan perkebunan tanpa izin. Polisi dan pejabat pemerintah yang mengeluarkan aturan itu akan menghukum buruh yang melanggar. Dari sejumlah besar pelanggaran oleh majikan, hanya sebagian kecil yang sampai di kantor pemerintah kolonial di Sumatera Timur, apalagi yang sampai di Batavia. Dan walaupun sampai, tuan kebun/majikan jarang dituntut. Hukuman lebih banyak dan selalu menimpa para buruh. Hukuman para buruh pun

tidaklah ringan, melainkan berupa hukuman cambuk dengan rotan. Atas dasar laporan majikan/tuan kebun, buruh-buruh yang dianggap melanggar peraturan, memberontak, atau tertangkap saat berusaha lari, disiksa dengan dicambuk.

Organisasi perkebunan pada akhir abad 19 memberlakukan disiplin yang tinggi terhadap para buruh. Buruh yang dapat diandalkan, dipertimbangkan menjadi pengawas. Namun, mereka harus membayar harga yang mahal: kesetiaan tanpa syarat terhadap pemimpin perkebunan. Sistem kerja kontrak diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan perkebunan. Pengamanan atas jalannya produksi dimulai dan diakhiri di perusahaan itu sendiri.



Residen Rookmaker Meninjau daerah kolonisasi Lampung (Sumatranjjes, hal.27)

Bentuk hukuman lain yang paling lazim ialah pemotongan upah atau penambahan kerja untuk buruh yang tidak memperlihatkan semangat kerja, tidak menjalankan perintah, atau dianggap tidak tunduk. Penganiayaan terbuka dalam *peonale sanctie* sungguh menyengsarakan kaum buruh pada waktu itu. Pasal 10 dalam Ordonansi kuli, dimana pelanggaran seperti menolak kerja, memberontak dan sebagainya agar dikenai hukuman yang lebih berat, menambah berat penderitaan buruh. Di sisi lain, para majikan sangat gemar menggambarkan perkebunan sebagai perusahaan keluarga yang besar, dimana semua pihak merasakan adanya ikatan yang kokoh sesuai dengan hak dan kewajiban menurut kedudukan masing-masing.

Terhadap berbagai perlakuan buruk seperti yang telah dipaparkan di atas, para buruh pun tidak tinggal diam. Dalam bab 2 buku ini dijelaskan bahwa para buruh melakukan perlawanan, misalnya, dengan melarikan diri dari perkebunan. Para tuan kebun pun kemudian lebih menyukai buruh dari India yang lebih menguntungkan, karena lebih murah dan berwatak lebih tenang serta tak terlalu suka berkomplot seperti buruh-buruh yang berasal dari Cina. Namun, cara mengatur dan pola pembagian pekerjaan di

perkebunan tak memungkinkan kaum buruh memiliki kesadaran untuk melakukan perlawanan secara kolektif.

Intimidasi dan teror sistematis, perpecahan di antara buruh sendiri, semakin tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perlawanan secara kolektif. Namun, sayangnya, kurang sekali yang menjelaskan proses dimana buruh akhirnya melakukan perlawanan berupa kerusuhan. Perlawanan para buruh lebih banyak yang bersifat individual, contohnya, melarikan diri dari perkebunan. Breman juga menjelaskan bahwa para buruh yang berasal dari Jawa perilakunya tidak dapat diduga, mereka bisa marah membabi buta karena hal-hal yang bersifat sepele.

### **5.8.2 *Koeli Ordonantie***

Pemerintah kolonial Belanda dalam memastikan kesediaan tenaga kerja dilakukan dengan mengesahkan Peraturan Hukuman Pidana Umum bagi orang-orang pribumi di Hindia Belanda dalam *Staatsblad* Nomor 111 tahun 1872. Pasal 2 nomor 27 peraturan ini disebutkan bahwa pekerja kasar dari kalangan Bumiputera dapat diberikan sanksi apabila menolak bekerja hingga berusaha kabur dari perusahaan, ini belum termasuk dengan prosedur yang menyulitkan buruh apabila ingin

meninggalkan perkebunan harus mendapatkan izin dari pemilik perusahaan (Keizerina, 2004: 103).

Peraturan ini pada awalnya merupakan peraturan yang berlaku di Sumatera Timur, sebagai peraturan pengganti dari titah Sultan Deli dengan memberikan wewenang dan kekuasaannya untuk memutuskan dan mengadili terhadap persoalan tenaga kerja, termasuk kriteria buruh yang malas, melawan hingga kabur dari perkebunan. Pemberian wewenang dan kekuasaan ini mengakibatkan terjadinya kerja paksa di perkebunan dan menjadikan kekuasaan pengusaha semakin kuat mencengkeram para buruh.

*Poenale sanctie* atau sanksi hukum pada mulanya merupakan suatu aturan yang diadakan untuk pembantu rumah tangga di Jawa (1872). Namun, dengan dibukanya perkebunan di luar Jawa, aturan tersebut dilaksanakan juga di luar Jawa. Peraturan tersebut mengatur antara lain, apabila buruh telah setuju dan menandatangani kontrak kerja, kemudian melanggar perjanjian tersebut maka ia akan diberikan sanksi sesuai perjanjian tersebut (Waluyo, 2008: 179).

Para pekerja diwajibkan bekerja sejak pagi hari hingga sore untuk bekerja membuka hutan meskipun berbahaya dan penuh resiko seperti serangan hewan liar seperti

gajah, dan banyaknya sumber penyakit. Oleh sebab itu, buruh yang tidak sanggup bekerja akan berusaha kabur dari perusahaan, tetapi pihak kolonial Belanda telah mengantisipasi dengan membentuk satuan kepolisian. Buruh yang kabur umumnya dapat dikembalikan ke pihak perusahaan setelah tertangkap oleh pihak polisi perkebunan, dan sangsi hukuman berupa cambuk, penjemuran berhari-hari, denda ataupun hukuman penjara (Cahyono, 2004: 18). Hukuman ini seringkali mengahampiri para buruh dalam bentuk yang tidak manusiawi.

Pada tahun 1873, mulai berlaku peraturan kepolisian yang baru yaitu bahwa buruh bisa dihukum apabila memutuskan kontrak tanpa memperhatikan tenggang waktu yang pantas atau menolak bekerja. Pada saat itu sebenarnya secara resmi, tuan kebun telah kehilangan wewenang untuk menghukum sendiri buruh-buruh yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Rumusan peraturan ini, meskipun amat kabur dan sewenang-wenang, masih dirasakan kurang memenuhi kebutuhan para tuan kebun, sebab belum adanya ketentuan yang mengharuskan buruh yang melanggar perjanjian kerja untuk kembali kepada majikannya (Keizerina, 2004: 105).

Pemberlakuan ordonansi Kuli mengakibatkan setiap buruh bekerja selama 10 jam setiap harinya, meskipun pada prakteknya seringkali buruh bekerja lebih dari aturan yang ada, termasuk buruh yang bekerja dengan sistem borongan. Sistem kerja diperkebunan tidak memperdulikan kondisi buruh, termasuk apabila terdapat buruh yang sakit tetap diharuskan bekerja tanpa perawatan dan pelayanan medis dari pihak perkebunan.

Peran buruh Cina mulai digantikan dengan buruh asal Jawa, karena umumnya buruh Jawa mau dibayar lebih murah daripada buruh Cina, serta semakin meningkatnya jumlah buruh perempuan untuk mendukung kebijakan upah yang semakin murah (Fruin, 1920: 34). Setelah masa kontraknya berakhir, banyak dijumpai buruh yang keadaannya tidak lebih baik dari saat pertama kali datang bekerja bahkan cenderung lebih buruk dan melarat. Para buruh diperkebunan umumnya tidak pernah merasakan makan makanan dari daging.

Kehidupan para buruh semakin memburuk dengan keadaan tempat tinggal di bangsal yang tidak terawat, kumuh, dan cenderung kotor sehingga menyebabkan buruh semakin mudah terjangkit penyakit. Keadaan yang memilukan ini kelak menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyerang para buruh perkebunan.

Eksplorasi, diskriminasi, kemiskinan, dan penderitaan sering dialami para buruh di Hindia Belanda. Tidak hanya buruh laki-laki, buruh perempuan harus menghadapi diskriminasi sosial, ekonomi, bahkan kekerasan seksual secara terus menerus, dan keadaan ini terus berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Perbedaan stratifikasi sosial antara golongan Eropa dengan pribumi sangat mencolok, hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran para buruh akan diskriminasi belum begitu berkembang, sehingga menyebabkan penduduk pribumi menerima begitu saja keadaan ini.

Para buruh perempuan di Sumatera yang didatangkan dari Jawa bahkan ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, melayani para pegawai perkebunan yang memiliki jabatan tinggi (seperti mandor). Para perempuan tersebut terpaksa melakukan pekerjaan yang sangat hina tersebut demi mendapatkan uang untuk mencukupi kehidupan mereka.

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1888 mencanangkan suatu peraturan kuli atau yang disebut dengan *Koeli Ordonantie*, menempatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan (*ondernemingen*) menjadi seperti kerajaan kecil, lengkap dengan petugas keamanan. Para kuli kontrak tersebut hidup berada di tangan

penguasa orang kulit putih (Belanda). Semua penderitaan hanya dialami oleh kuli kontrak, sedangkan orang Eropa, hanya menganggap kaum pribumi ini sebagai biang pemalas yang wajar jika dicambuki dan dikasari, agar mereka tidak bermalas-malasan dalam bekerja.

Meskipun *koeli ordonantie* telah diubah dengan peraturan-peraturan pelengkap yang banyak sekali jumlahnya, namun inti dari *ordonantie* ini tetap tidak berubah, tetap menjalankan apa yang digariskan dalam *Staatsblad* 1889 No. 133 jo 1897 No. 46 (Keizerina, 2004: 105). Dalam peraturan tersebut tiga pihak yang diwajibkan mematuhi peraturan ini yaitu pengusaha, kuli dan pejabat pengawasannya tidak terbiasa dengan adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban itu.

Para pejabat tidak memiliki pandangan yang tetap mengenai isi dari peraturan tersebut. Namun pemerintah Hindia Belanda ketika itu berpendapat bahwa setelah peraturan ini dikeluarkan maka mereka berpandangan bahwa penanganan maupun kondisi tenaga kerja semakin membaik (Broersma, 1919: 110).

Sebagaimana diterangkan di atas, mulai tahun 1880, buruh yang bekerja di perkebunan di Sumatera terikat dengan sistem kontrak kerja. Hukuman pidana yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap para

buruh yang bermalas-malasan, mangkir dalam melakukan pekerjaannya di perkebunan ternyata mendapatkan respon dan pertentangan, meskipun dalam Majelis Rendah Negeri Belanda disebutkan bahwa:

*“Dasar tidak ditaatinya kontrak kerja oleh orang pribumi, di mana dia wajib melakukan pekerjaan bagi orang lain, memang tidak perlu harus menjadi kenyataan pidana, namun hal ini tidak dapat diterima bila diterapkan pada kuli yang didatangkan dari tempat lain. Bila kuli-kuli ini tidak menjalankan tugasnya, mak mereka bisa dikenakan tindakan pidan. Dalam hal pengecualian ini, harus dilaksanakan dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah. Mengingat perusahaan perkebunan di luar Jawa yang mengalami kesulitan dalam pengadaan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai dan cocok bagi kerja perkebunan. Untuk itu pekerja ditarik dari tempat lain dan diangkat ke perkebunan”* (Paulus dalam Keizerina, 2004: 113).

Setiap kontrak kerja yang disepakati diharuskan berisi sejumlah data seperti nama buruh, jenis perkebunan, nama perkebunan tempat akan bekerja, jenis pekerjaan, mekanisme pembayaran gaji, hak dan kewajiban dari para pekerja berikut majikan. Hal ini merupakan ketentuan dalam pasal 2 dan 3 dari *Staatsblad* 1880 No. 133 (Keizerina, 2004: 112).

Prinsip dasar aturan ini memberikan penjelasan dan batasan antara hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, baik pihak pekerja maupun perusahaan. Sistem

kerja para buruh diatur dalam kontrak dengan masa kerja buruh yakni sebanyak sepuluh jam kerja untuk setiap harinya, dengan ikatan kontrak kerja selama 3 tahun dan dapat diperbaharui menjelang berakhirnya perjanjian tersebut. Perjanjian kontrak antara pekerja dan pemberi kerja harus dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Di dalam kontrak itu juga tertulis dengan jelas mengenai kewajiban para buruh yang diharuskan untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan apa yang menjadi pekerjaannya, termasuk persoalan izin kerja, bahwa setiap buruh tidak diperbolehkan meniggalkan perkebunan tanpa izin tertulis, juga tertulis klausul bahwa izin tidak akan diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut (Keizerina, 2004: 113).

Buruh memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada tuan kebun dimana ia bekerja dapat dilihat dalam pasal 4, kemudian kewajiban pengusaha atas buruh dituangkan dalam pasal 5 dan pasal 7 (Keizerina, 2004: 114). Peraturan ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada para pengusaha perkebunan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, hanyalah hukuman denda, sedangkan bagi para buruh kontrak dikenakan hukuman berupa kerja paksa tanpa upah. Hukuman kerja paksa untuk buruh kontrak tercantum dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan 13. Hukuman terhadap tidak

dipatuhinya kontrak kerja ini kemudian diperketat, dituangkan dalam *Besluit* tanggal 11 Maret 1891 no. 17 (Keizerina Devi, 2004: 115)

Aturan-aturan dalam pasal diatas menunjukkan bahwa hukuman yang dikarenakan terhadap buruh adalah hukuman badan berupa kerja paksa dengan waktu dan kebijakan tertentu, sedangkan hukuman untuk pengusaha hanya berupa pengenaan denda dan atau hukuman kurungan. Hukuman kurungan terberat sendiri hanya berupa kurungan selama delapan hari. Peraturan ini juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang kewajiban majikan atas pembiayaan dan perawatan para buruh yang akan dikirim kembali setelah kontrak berakhir, termasuk apabila terdapat buruh yang sakit dalam proses kerja.

Koeli ordonantie yaitu peraturan kuli yang diterbitkan sebagai keputusan Gubernur Jenderal pada 13 Juli 1889. Perangkat aturan ini sangat membantu proses produksi perkebunan di Sumatra Timur (Soejono & Leirissa: 2010: 166). Koeli ordonnantie ini didalamnya mengatur tentang hukum, hak, dan kewajiban antara majikan dengan para buruh. Jadi apabila ada buruh yang melarikan diri namun dalam keadaan masih terikat kontrak maka akan dihukum selama dua bulan atau bahkan lebih. Para buruh kontrak

yang melanggar aturan tersebut akan dijebloskan ke dalam penjara tanpa diberikan hak untuk melakukan banding. Para buruh kontrak harus siap menerima segala konsekuensi hukuman akibat upaya mereka kabur dari perkebunan.

Selama mereka dipenjara, para buruh kontrak tersebut tetap disuruh untuk bekerja dengan kondisi kaki mereka diikat dengan rantai dengan bola besi. Dalam pasal 4 yang terdapat dalam koeli ordonantie ini seorang buruh hanya boleh meninggalkan perkebunan setelah ia melapor dulu kepada kontrolir atau pengawas perkebunan. Koeli ordonnantie ini pertama kali diterapkan di Sumatera Timur yang dalam perkembangan selanjutnya dipakai di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa. Di setiap perkebunan di Lampung terdapat mandor yang bertugas untuk mengawasi para pekerja buruh kontrak tersebut. Perlakuan para mandor terhadap buruh kontrak ini dapat dikatakan sangat kejam dan dianggap tidak manusiawi, karena saat buruh kontrak tersebut yang sakit, maka mereka tidak peduli, bahkan tetap dipaksa untuk bekerja.

Campur tangan penguasa terhadap pencarian tenaga kerja mulai muncul ketika pemerintah Belanda mendorong Bergeraknya modal swasta ke Hindia Belanda. Campur tangan ini semakin meluas dan persoalan tenaga kerja

murah juga menjadi salah satu yang terpenting di bidang politik dalam negeri.

### **5.8.3 Mekanisme Perekrutan Buruh**

Pada awalnya, pihak perkebunan mengandalkan para buruh yang pulang ke Kampung halaman di Jawa untuk ikut serta merantau ke Lampung untuk bekerja dengan berbagai iming-iming dan janji. Buruh lama akan mengajak mula-mula adik, kerabat dekat, masyarakat di kampungnya, hingga ke kampung lainnya. Konsekuensi dari ajakan untuk membawa buruh baru, maka para buruh lama akan mendapatkan komisi atas keberhasilannya mendatangkan buruh. Komisi yang didapatkan bergantung jumlah buruh yang berhasil didatangkan, semakin banyak maka akan berbanding lurus dengan komisi yang didapatkan.

Selain mekanisme diatas, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan propaganda dengan menggunakan iklan di berbagai media seperti brosur. Brosur pemerintah yang dirilis pada tahun 1889 oleh seorang kontrolir dari kalangan *Binnenlandsch Bestuur* bernama H.E.B Schmalhausen dengan isi saran pengentasan kemelaratan dan kemiskinan akibat ledakan penduduk di Jawa dengan melakukan migrasi kerja keluar Jawa mengingat semakin massifnya pembukaan areal perkebunan di Sumatra dan

Kalimantan. Selain itu, areal perkebunan baru di luar Pulau Jawa membutuhkan pasokan tenaga kerja yang banyak, sehingga sebaiknya dilakukan perpindahan penduduk. Direktur *Binnenlandsch Bestuur* menanggapi usulan itu kemudian membuat rekomendasi tentang perlunya kolonisasi tersebut (Dahlan, 2014: 338).

Para buruh yang didatangkan umumnya tidak betah bekerja di perkebunan karena para buruh sebelumnya telah biasa menggantungkan hidupnya dari pertanian padi di sawah semasa di Jawa. Kondisi berbeda di alami para buruh perkebunan karena daerah Lampung amat berbeda kultur budidaya padi, dan merupakan daerah yang menggantungkan hasil pertanian padi dengan sistem perladangan (*huma*). Keadaan ini diperparah dengan kondisi lingkungan di perkebunan yang kurang memadai baik tempat tinggal, sarana, pelayanan kesehatan dan upah, serta ketersediaan wanita mengingat para buruh umumnya datang tidak turut serta membawa pasangan mereka. Sehingga para buruh umumnya kabur dari kontrak perjanjian kerja yang telah dibuat, dengan demikian akan semakin membahayakan kepentingan perusahaan perkebunan swasta milik Kolonial Belanda.

Ketersediaan tenaga kerja secara langsung diharapkan mampu disuplai penduduk asli, namun penduduk asli

Lampung pada waktu itu masih sangat terbatas. Keadaan ini tentunya menggambarkan bahwa penduduk asli tidak dapat diharapkan dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Penduduk lampung umumnya merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada mereka, menikmati kemakmuran yang ada, puas dengan keberadaannya dan kondisi kehidupan Terlepas dari beberapa pengecualian, hingga abad ke 19, penduduk Lampung telah melakukan sedikit pekerjaan untuk perusahaan yang dibuka yang telah dibuka. Dengan proporsi bahwa penduduk Lampung mau berkerja untuk jenis pekerjaan yang ringan-ringan saja. Maka pemerintah kolonial Belanda mengadakan kolonisasi dengan maksud mendatangkan para buruh dengan biaya yang murah.

Para buruh kontrak ini awalnya diperoleh dengan cara tradisional yakni dibujuk dan dijanjikan oleh bangsa Eropa agar mau bekerja bersamanya dengan bantuan perangkat desa. Para buruh dijanjikan uang persekot (muka) yang akan diberikan sebelum mereka bekerja, dan serta mendapatkan fasilitas dan akomodasi di tanah seberang. Fasilitas dan akomodasi yang dimaksud yaitu seperti fasilitas tempat tinggal dan biaya transportasi secara cuma-cuma menuju tempat bekerja, selain itu setiap buruh akan memperoleh gaji bulanan atau upah harian. Pada awal melakukan pekerjaan umumnya setiap

buruh tidak terbiasa dan kaget dengan pekerjaan yang bagi mereka terasa sangat berat dan menyulitkan, bahkan dianggap menyengsarakan bagi kehidupan mereka, apalagi dengan kondisi yang jauh dari sanak keluarga di Jawa.

Pihak perkebunan melakukan berbagai cara dan upaya untuk mendatangkan para buruh kontrak agar bersedia bekerja di perkebunan seperti melalui pembentukan agen atau biro khusus pengerah tenaga kuli kontrak. Cara lain yang digunakan pihak perkebunan dalam merekrut buruh baru ialah dengan mengirimkan buruh kontrak yang hampir habis masa kerjanya untuk kembali ke daerah asalnya guna mencari buruh-buruh kontrak baru. Untuk memudahkan pengawasan para mandor, dan mencegah terciptanya solidaritas para buruh kontrak, pihak perkebunan mempekerjakan buruh dengan tugas-tugas tertentu berdasarkan kelompok etnisnya, dengan cara demikian persatuan para buruh dapat dicegah bahkan dihilangkan.

Para buruh dari Jawa bekerja di perkebunan, buruh asal Melayu dan Batak bekerja dengan tugas membuka hutan, buruh asal China bekerja dalam membangun Bangsal tempat tinggal buruh, buruh Keling bekerja membuka dan membangun jalan baru dan buruh asal India bekerja

sebagai kusir pada mode transportasi berupa pengendali gerobak sapi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan kolonial Belanda, pemerintah berupaya dengan beragam cara baik dengan memberikan iming-iming kemudahan, hadiah dan janji kehidupan yang lebih baik.

Sesampainya di perusahaan, setiap buruh akan bekerja di bawah sistem kontrak dengan *poenale sanctie* untuk mengikat keberadaannya. Di Lampung, bentuk yang demikian masih dipertahankan, yakni menggunakan tenaga buruh dari penduduk dari Jawa yang sudah sangat padat, namun dengan perbedaan pada pola rekrutmen dan kontrak kerja khususnya yang menyangkut sanksi apabila melanggar kerja. Hal ini terjadi dalam rangka mengantisipasi adanya rencana penghapusan *poenale sanctie* secara bertahap, sehingga dalam proses rekrutmen akan dilaksanakan oleh pihak yang mendapat legalisasi pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja dengan konsep yang lebih adil sesuai Staatsblad 1915 No. 693 yang berisi revisi hak dan kewajiban perusahaan dan buruh.

Salah satu butir perturan ini mencakup mekanisme perekrutan para buruh yang akan dipekerjakan. rekrutmen hanya boleh dilakukan oleh perseorangan,

badan hukum, atau asosiasi pengusaha yang memperoleh lisensi dari Direktur Kehakiman. Apabila pihak perusahaan akan menunjuk agen untuk merekrut tenaga kerja, maka agen tersebut pun wajib memperoleh izin tertulis dari lembaga pemberi lisensi itu. Salah satu syarat penting untuk memperoleh lisensi itu ialah bahwa dalam hal pekerja yang tiba dan meminta pembatalan perjanjiannya serta ingin kembali ke Jawa karena beberapa faktor, setelah diinvestigasi oleh Inspektorat Tenaga Kerja dan terbukti, maka perusahaan harus mengizinkannya

Tenaga kerja buruh yang dibutuhkan pihak perkebunan bukanlah sembarang buruh, tetapi buruh yang kuat dalam bekerja dan bersedia dibayar dengan gaji rendah, karena dengan kondisi seperti itu usaha perkebunan dapat sukses dalam artian ekonomi (Hayati, 2000: 28). Pekerjaan buruh di perkebunan dilakukan dengan sistem pembagian kerja yang jelas, yaitu ada buruh yang bertugas menanam saja, ada buruh yang memungut hasil, ada buruh yang bertugas mengirim hasil ke pusat-pusat pengumpulan, dan ada buruh yang bekerja di pabrik. Tujuan dari pembagian tugas ini adalah untuk menghindarkan agar tidak ada tenaga yang harus bekerja sepanjang tahun secara terus menerus.

Mekanisme perekrutan buruh sendiri terdiri dari beberapa mekanisme dalam melakukan perekrutan kaum buruh seperti, 1). Perekrutan berdasarkan pesanan pihak perusahaan, 2). Perekrutan secara mandiri, 3). Perekrutan dengan Mekanisme *Laukeh*.

**a. Perekrutan Berdasarkan Pesanan Pihak perusahaan**

Praktik-praktik, yang kadang-kadang menarik perekrut dan antek untuk membujuk orang Jawa untuk beremigrasi ke wilayah luar khususnya ke Lampung, berulang kali memicu kecaman. Pemerintah, setelah melakukan penyelidikan menyeluruh, memutuskan untuk mengeluarkan apa yang disebut Ordo Perekrutan, yang dikuatkan dengan statuta dalam *Statsblad* Tahun 1909 Nomor 123, yang kemudian diubah dengan *Statsblad* tahun 1914 Nomor 613, di mana cara berikut ini dicari untuk menjamin keadaan yang lebih baik.

Dilarang untuk bekerja sebagai agen situs tanpa lisensi, di bawah kewajiban untuk menyetor uang jaminan yang, ketika lisensi ditarik, dibatalkan atas kehendak pemegangnya. Itu dilarang untuk mengadakan kontrak dengan non-orang dewasa atau dengan wanita yang sudah menikah melawan

kehendak suami. Depot harus didirikan oleh kantor galangan kapal di pedalaman dan di tiga kota pesisir (Semarang, Batavia, dan Surabaya), yang hanya dapat didatangi oleh emigran.

Setiap buruh baru yang berhasil direkrut harus dibawa segera ke kantor Tata Kelola Dalam Negeri terdekat dan resmi, di mana kondisi-kondisi kontrak kerja yang harus diselesaikan disajikan kepada mereka (membuat apa yang disebut pernyataan awal). Kontrak kerja harus diselesaikan di pantai di depan komisariss rekrutmen, yang menginformasikan kepada emigran tentang isi kontrak. Melarang emigran yang direkrut tanpa kontrak dilarang. Pemeriksaan medis dipulihkan.

#### **b. Perekrutan Sendiri**

Meskipun pesanan perekrutan meningkat, tidak dapat dikatakan bahwa dengan dia praktik yang tidak sah hilang. Ketika peraturan tersebut membuat pemeriksaan yang, di satu sisi, tidak dapat mencegah pelanggaran dan, di sisi lain, hambatan yang tidak perlu untuk emigrasi, khususnya karena persyaratan deklarasi sementara di pedalaman, yang pejabat administratif sesuai dengan pemahaman pribadi mereka ketika merekrut atau menolak untuk

merekrut, perbaikan dalam perjalanan acara dicari.

Sejak tahun 1915 (Buletin Kisah Para Rasul dan Dekrit 693) pengumuman tentang apa yang disebut perintah perekrutan sendiri memberi pengusaha atau asosiasi pengusaha kesempatan untuk "bertindak sebagai manajer untuk dipekerjakan untuk keuntungannya sendiri. Diharapkan bahwa jika pengusaha dapat merekrut untuk perusahaan mereka sendiri di luar perekrutan profesional, di mana kondisi yang layak berlaku dan di mana, apalagi, inspektur Inspektorat Tenaga Kerja juga mengawasi campur tangan pegawai negeri sipil di pedalaman Jawa bisa dimatikan dan diganti dengan interogasi di pantai.

Dengan ini rekrutmen jatuh ke tangan orang-orang yang dipekerjakan oleh majikan, orang-orang yang menerima upah tetap untuk pekerjaan mereka yang dorongan untuk beremigrasi bukanlah bisnis, seperti dalam kasus rekrutmen profesional. Jaminan terhadap pelecehan juga dicari di sini dalam lisensi perekrutan itu sampai lagi atau untuk waktu yang ditentukan. Dalam wawancara dengan para emigran di kota-kota pesisir dan khususnya dalam kewajiban untuk mengembalikan para wanita, yang mungkin

telah disesatkan, bahkan jika mereka sudah dipekerjakan di perusahaan pada pengembangan kawasan diluar Jawa. Saat ini ada dua asosiasi di Jawa yang melakukan rekrutmen sendiri, yaitu Kantor Emigrasi Jenderal Delisch, yang berbasis di Medan, dan Asosiasi Industri dan Pertanian Sumatera Selatan. Itu yang pertama adalah yang terbesar.

### **c. Perekrutan dengan Mekanisme *Laukeh***

Selain memiliki rekrutmen dan rekrutmen profesional, ada juga emigrasi oleh para *laukeh*. Metode *laukeh* yakni suatu cara merekrut buruh dengan memanfaatkan para buruh sebelumnya sebagai agen. Buruh yang dimaksud ialah buruh yang kontraknya segera habis dan dikirim kembali pulang ke Jawa (umumnya di desa asal buruh tersebut) dengan cara melakukan propaganda kepada saudara, kerabat, tetangga, dan teman untuk ikut bekerja di tanah seberang. Setiap *laukeh* akan memperoleh imbalan dalam mencari buruh baru yang siap bekerja. Upah dalam melaksanakan tugasnya itu, setiap *laukeh* akan diberikan komisi sebesar  $f 10$  untuk masing-masing kepala, setiap buruh baru yang berhasil diperoleh, sedangkan untuk setiap calon buruh

akan memperoleh komisi sebesar *f* 25 masing-masing kepala (Vierhout, 1932: 82).

Perekrutan ini didasarkan atas fenomena kembalinya laukeh (tangan lama, veteran) ke Jawa, dengan tujuan agar mereka kembali sebanyak mungkin dengan kenalan yang baik dan kerabat desa. Kantor dan staf Eropa dan Inlandik di Jawa membantu laukeh ke desa-nya. Jika mereka ingin kembali ke tempat bekerjanya di Sumatera dengan atau tanpa singkeh (pendatang baru), mereka akan melapor ke kantor D.P.V, dan minta uang perjalanan baik untuk diri mereka sendiri, atau untuk anggota keluarga tunggal atau ganda (Fruin, 1911: 9).

Metode *laukeh* ini menawarkan manfaat besar bagi pekerja dan majikan. Laukeh tidak menerima premi apa pun untuk menerapkan singkeh. Karena itu ia tidak akan berusaha membawa serta para lajang, seperti perekrut dan makelar dalam perekrutan profesional, hanya semata-mata demi keuntungan. Jadi hanya hari ini yang akan pindah yang menginginkan hal yang sama dan yang ingin meningkatkan posisi mereka.

Pendatang baru mendaftar untuk perusahaan tertentu, pergi ke perusahaan yang ia pilih sendiri, di

mana ia memiliki kerabat atau kenalan disana. Dia akan merasa betah di perusahaan itu. Dalam kasus rekrutmen profesional, kontraktor sering pergi ke perusahaan, yang ditunjuk oleh agen situs. Laukeh dan singkeh dapat membuat perjanjian jangka pendek di tempat berkerja.

Ini sering merupakan daya tarik yang besar, misalnya untuk seorang singkeh, yang suka melihat ayah lamanya kembali dan oleh karena itu ingin mengikat diri tidak lebih dari selama 1 tahun, laukeh dan singkeh dapat membawa serta kerabat mereka, tidak hanya anak-anak, tetapi juga saudara dan saudari, ayah dan ibu. Dengan cara ini diharapkan pekerja yang tinggal di perusahaan di tengah-tengah kerabat dekatnya akan menjadi terikat pada perusahaan.

Selain itu, selalu merupakan keuntungan bagi perusahaan jika keluarga cocok untuk mereka, anak-anak dapat membantu tugas-tugas yang tentunya lebih ringan. Metode semacam itu tidak dapat didasarkan karena didasarkan pada kepercayaan yang dimiliki pendatang baru dalam usahanya yang akan datang. Nama perusahaan karenanya harus menerima suara yang bagus di desa dan baru

kemudian emigrasi yang signifikansi akan muncul untuk itu.

*Laukeh* juga harus dipilih dengan cermat. Mereka tidak boleh jauh dari Jawa terlalu lama, jika tidak mereka tidak akan lagi memiliki cukup kontak dengan anggota keluarga atau kenalan, mereka harus tinggal di kabupaten di mana mereka dapat dibantu dengan mudah, mereka harus cukup pintar untuk tidak jatuh ke tangan keluarga perekrut profesional dan mereka harus cukup layak untuk tidak tergoda oleh premi tinggi dari perekrut profesional untuk bekerja dibawah arahan dan kontrol mereka kepada pendatang baru yang mereka bawa.

Selain mengirim *laukeh*, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perkebunan dengan berusaha mempromosikan lapangan kerja di perkebunan dengan memberi orang Jawa di perusahaan kesempatan untuk mengirim surat kepada kerabat mereka di Jawa. dan untuk mentransfer sejumlah kecil uang dari waktu ke waktu. Dengan cara ini ikatan antara Jawa dan dan luar Jawa terus ada.

Berbagai pendatang baru telah tiba di Lampung dengan surat dari kenalan atau kerabat. Kasus itu sendiri tampaknya lebih sederhana daripada itu karena pengiriman surat dan pengiriman uang membutuhkan upaya besar. Melalui upaya ini, terjadi lonjakan tenaga kerja melalui metode ini, sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.11 Hasil Rekruten Metode *Laukeh*

Tahun	Jumlah Pekerja	Kerabat yang dibawa	Ket.
1913	1.410 pekerja	1-793 kerabat datang	
1914	799 pekerja	771 kerabat	
1915	1.045 pekerja	1.152 kerabat	
1916	2.336 pekerja	2.576 kerabat	
1917	3.441 pekerja	3.678 kerabat	
1918	5.296 pekerja	6.265 anggota keluarga	
1919	4.204 pekerja	4.933 anggota keluarga	

Sumber: R. Fruin. *Het Arbeidsvraadstuk In Verband Met De Noodzakelijke Ontwikkeling Der Buitengewesten.* hal. 11

Angka-angka diatas menunjukkan siklus perekrutan pekerja dan setiap tahun mengalami peningkatan teratur, kecuali terjadi pada tahun 1914, 1915 dan 1919 menunjukkan sedikit penurunan perpindahan tenaga kerja. Seseorang tidak boleh terlalu optimis mengenai angka-angka itu, karena jumlah hewan yang penting, yang disebut sebagai pekerja, adalah laukeh, yang khusus untuk mempromosikan emigrasi ke Jawa dikirim dan kalau tidak, tidak akan meninggalkan sebagian besar. Namun, ini dapat dianggap sebagai fenomena sambutan di mana berbagai perusahaan tembakau dapat menarik suplemen tahunan untuk tenaga kerja mereka sepenuhnya dari emigrasi ini.

### **5.8.3 Jenis Tenaga Kerja**

Praktek perburuhan selama masa pemerintahan kolonial Belanda di Lampung, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut Hoedt, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 kelompok secara garis besar, yaitu: 1) Tenaga Kerja Lepas, 2) Tenaga Kerja Bebas, dan 3) Tenaga Kerja Kontrak.

#### **a. Tenaga Kerja Lepas**

Pekerja lepas atau buruh harian lepas ialah mereka yang berasal dari wilayah Lampung meskipun dalam jumlah

yang sangat terbatas, maupun pendatang yang memang berniat untuk bekerja. Pekerja jenis ini berafiliasi dengan perusahaan untuk layanan tertentu, tetapi tidak berkewajiban menyediakan kapasitas kerja bagi pemberi kerja di luar layanan yang disepakati tersebut. Pekerja semacam itu umumnya digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu seperti pembangunan rumah, penebangan hutan, dan pembukaan lahan.

Para pekerja yang datang ke Lampung umumnya bekerja di sela-sela waktu penanaman padi, yakni jeda antara setelah penanaman padi dan menjelang panen kisarannya selama 3 bulan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan sambil menunggu waktu panen. Hingga bulan April 1927, jumlah pekerja lepas yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan tercatat mencapai sekitar 1.250, dan diperkirakan merupakan jumlah 8% dari total jumlah pekerja yang dipekerjakan di berbagai perusahaan perkebunan di Lampung.

#### **b. Tenaga Kerja Bebas**

Tenaga kerja bebas ialah pekerja dari luar wilayah tempat perusahaan berada, dan sengaja datang sebagai pekerja. Pekerja jenis ini terkait dengan perusahaan melalui perjanjian untuk waktu yang "pasti", biasanya selama enam bulan- dan jika terjadi pemutusan kontrak

oleh pekerja, perusahaan secara praktis tidak memiliki jalan lain untuk menentangnya, melainkan harus mematuhi kewajiban yang dikenakan padanya di pengadilan nasional.

Pasar tenaga kerja bebas ini sangat “menguntungkan” bagi pengusaha ini terdapat di Sumatera Selatan. Dengan keadaan kurangnya tenaga kerja, mereka jadi memiliki pemahaman bahwa sampai pada batas tertentu perusahaan cukup bergantung padanya, karena jika ia keluar, penggantinya tidak akan segera tersedia. Hal demikian menciptakan peluang besar bagi mereka untuk memutus kontrak jika ada peluang kerja yang menawarkan pendapatan lebih baik.

Permasalahan pada persediaan pekerja jenis ini, sepertinya Lampung memang mendapat perhatian khusus dengan dibuatnya peraturan melalui Staatsblad 1924 No. 433. Yang demikian itu karena besarnya jumlah emigran Jawa yang datang ke Lampung atas inisiatif mereka sendiri untuk mencari pekerjaan. Rekrutmen masih ditambah dengan tenaga kerja yang diperoleh dari program kolonisasi. Sehingga migran Jawa mandiri maupun kolonisasi merupakan pekerja yang menyebabkan jenis tenaga kerja kategori ini berjumlah sangat besar.

### c. Tenaga Kerja Kontrak

Tenaga kerja kontrak adalah pekerja yang berasal dari luar kawasan tempat perusahaan berada, dan telah menandatangani perjanjian kontrak kerja berdasarkan kuli ordonansi yang berlaku. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang ditetapkan dan diatur oleh hukum. Dengan peraturan kriminal diberlakukan atas ketidakpatuhan terkait ketetapan perjanjian, baik terhadap majikan maupun pekerja.

Hukuman yang ditujukan kepada pekerja biasa disebut "poenale sanctie". Kuli Ordonansi dengan *poenale sanctie* pertama kali diterapkan bagi perusahaan pertanian dan industri di Sumatera Timur berdasarkan Staatsblad 1880 No. 133 dan di Sumatera Selatan pada tahun 1887. *Poenale sanctie* dianggap sebagai satu-satunya cara yang tidak hanya untuk meyakinkan pemberi kerja yang telah membayar harga tinggi di muka dan dengan menjamin upah tertentu selama tiga tahun, tetapi juga cara untuk membuat pekerja mendapat untung dari keamanan keberadaan yang diberikan kepadanya selama tiga tahun dan mungkin lebih lama.



Penduduk Pribumi sebagai pekerja transportasi

Secara umum perusahaan di Sumatera Selatan tidak memiliki banyak tenaga kerja kontrak seperti yang diinginkan oleh perusahaan, hal demikian merupakan konsekuensi dari fakta bahwa hampir semua perusahaan dengan modal relatif kecil, sehingga untuk masa-masa panen yang membutuhkan tenaga lebih banyak kerap digunakan pekerja bebas untuk membantu. Di daerah Lampung, sumber pekerja bebas yang demikian itu kebanyakan orang Jawa dari program kolonisasi.

#### **d. Tenaga Kerja *Herendiesten***

Pekerjaan rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk melancarkan usahanya dalam mengeruk keuntungan dari rempah-rempah dan

perkebunan. Untuk memnuhi kepentingan politik dan imperialismennya, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dilakukan dengan sistem kerja rodi. Rodi dibagi tiga, yaitu rodi *gubernermen* (untuk kepentingan gubernemen dan pegawai), rodi perorangan (untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia), dan rodi desa (untuk kepentingan desa) (Soepomo,1985: 16). Rodi untuk pembesar dan *gubernermen* (disebut pancen) sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan kepada pejabat pemerintah.

Selain itu, para kolonis selama masa politi etis digalakkan, mendapatkan pekerjaan tambahan berupa kerja paksa (*Herendiesten*) yang diatur dalam lembaran negara. Keadaan ini memaksa setiap kolonis untuk melakukan kerja paksa dan dalam bahasa pemerintah menjadi kerja wajib. Beberapa faktor yang mempengaruhi *kerja wajib* dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk dan jumlah pemilik tanah di suatu daerah. Karena kewajiban *kerja wajib* hanya dibebankan kepada pemilik/pemakai tanah, maka jumlah pemilik yang banyak akan dapat membagi beban kwn hingga menjadi ringan daripada jumlah petani pemilik yang lebih sedikit. Namun dengan adanya jumlah penduduk yang banyak berarti mempunyai tenaga kerja yang banyak. Apabila

pekerjaan terlalu banyak seorang petani pemilik dapat meminta seorang tenaga kerja menggantikan dirinya (jagul), ini terjadi pada petani kaya biasanya.

2. Jarak tempat *kerja wajib* dari rumah pelaksana *kerja wajib*. Jarak yang jauh berarti memakan waktu yang banyak untuk perjalanan. Para petani lebih suka bekerja 4-5 jam sehari untuk *kerja wajib*, agar ia masih mempunyai waktu untuk mengerjakan atau menengak sawah/ladangnya, meskipun untuk itu ia harus datang 2 hari (misalnya memperbaiki jalan yang jam kerjanya 10 jam/hari). Jarak yang jauh akan menghilangkan kesempatan petani untuk bekerja pada usaha taninya. Seperti juga wajib kerja tanam paksa kopi yang dianggap oleh Pemerintah tidak berat karena merupakan kopi pagar yang ditanam di halaman rumah. Kenyataannya 860 desa kopi terletak pada jarak lebih dari 4 km dari rumah penduduk, karena 1/3 areal kopi berupa kebun-kebun yang jauh dari rumah. Hal ini turut menyebabkan makin beratnya *kerja wajib* tanaman perkebunana khususnya tanaman kopi.
3. Adanya proyek Tanam Paksa di daerah tersebut. Adanya proyek ini menyerap pelaksana kwn dalam jumlah yang sangat besar. Pekerjaan yang makin intensif di kebun-kebun mengakibatkan petani dibebaskan sebagian tugas *kerja wajib* atau diberi keringanan. Maka tugas yang seharusnya mereka

kerjakan terpaksa dibebankan kepada pelaksana lainnya. Ini berarti menambah beban kepada yang lain.

Sistem *kerja wajib* merupakan sistem hubungan kerja tradisional yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan keuntungan ekonomi. Sejak semula Pemerintah telah meletakkan kebijaksanaan keuangan yang ketat. Demi menghasilkan pemasukan Negara sebanyak mungkin, maka pengeluaran Pemerintah untuk daerah Koloni ditekan serendah-rendahnya, khususnya untuk pembiayaan pemerintahan pribumi. *Kerja wajib* merupakan penghematan yang sangat besar. Apalagi dipikul secara bersama-sama oleh penduduk Jawa yang padat ini terasa tidak begitu menindas.

Kepala-kepala/pejabat pribumi tidak digaji sepenuhnya dengan uang, karena akan sangat besar bila harus menyesuaikan dengan gaya hdiup kepala pribumi yang feodalistis daft sangat konsumtif. Maka tradisi memberikan tanah jabatan tetap dilanjutkan. Secara intensif dan menyeluruh mulai dibuat peraturan di seluruh Jawa pada tahun 1864. Mengapa justru wajib kerja untuk jalan dan pengairan yang tetap dipertahankan sampai awal abad ke 20 tidak lain karena merupakan pekerjaan yang paling penting, yang menyerap paling banyak tenaga dan beaya rutin yang banyak.



Pembukaan lahan dan pembuatan Jalan (Residen Rookmaker meninjau langsung di wilayah kolonisasi Lampung) (Sumatranjjes, hal. 21)

Penghapusan *kerja wajib* harus diganti dengan pendapatan Negara yang dipakai untuk membeayai tenaga upahan dan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Maka diciptakan pajak

baru, yaitu pajak kepala (*hoofdgeld*), sebesar f1,- per *kerja wajib* per tahun. Namun kenyataannya petani membayar pajak kepala dan masih tetap melaksanakan *kerja wajib*, karena baru sebagian yang dihapuskan. Pajak ini menambah berat petani yang telah dibebani pajak Tanah dan lain-lain berjumlah rata-rata f17,- (untuk Distrik Magelang, 1887). Pelaksanaan penghapusan *kerja wajib* berjalan cukup lama sampai Pemerintah merasa cukup mempunyai dana untuk menggantikannya dengan kerja bebas.

*Kerja wajib* zaman Kolonial sebaliknya merupakan pekerjaan tetap, rutin, seperti membersihkan jalan dan saluran air, pasar, gedung-gedung dinas, transport dan sebagainya, yang memerlukan sejumlah orang setiap hari atau hari-hari tertentu sepanjang tahun (*bijzonder diensten*). Disamping itu masih ada pekerjaan yang dilakukan secara insidental, misalnya perbaikan jalan dan jembatan setahun sekali atau perbaikan besar bila terdapat kerusakan, yang melibatkan semua pelaksana kerja wajib (*algemeene diensten*).

Kerja wajib pada zaman Mataram lebih dititik beratkan kepada pelayanan kepentingan pribadi sehingga tidak perlu melibatkan orang terlalu banyak, sedangkan kerja wajib Jaman Kolonial lebih mementingkan bidang

pekerjaan umum dan pelayanan umum. Karenanya menuntut jumlah orang yang jauh lebih banyak dan bersifat rutin. Hal ini saja telah jelas menunjukkan beban yang lebih berat bagi pelaksana *kwn* pada Jaman Kolonial. Dasar-dasar dan pelaksanaan *kwn* lebih jelas dan terperinci pada Jaman Kolonial abad 19, seperti yang terdapat di Karesidenan Lampung.

Kelompok masyarakat yang memikul beban *kerja wajib* adalah *kuli kenceng*, *kuli bakul*, yaitu orang yang memiliki hak untuk memperoleh bagian tanah desa. *Indung* atau *Pengindung*, adalah kelompok masyarakat/orang yang hanya memiliki rumah dan pekarangan, mereka hanya perlu membantu *kerja wajib* apabila dalam pengerjaan *kerja wajib* memerlukan tenaga lebih banyak dalam melaksanakan *kerja wajib*. Sedang *Tempel* ialah kelompok orang yang hanya memiliki rumah diatas tanah milik orang lain, tidak dikenakan *kerja wajib*.

Masing-masing golongan tersebut dikenakan *wajib kerja desa*, yaitu kewajiban untuk turut serta memelihara sarana dan prasarana di desanya, seperti memelihara jaringan irigasi untuk pengairan, dan juga gardu desa. Disamping itu ada sebagian kelompok masyarakat/penduduk desa yang memperoleh kebebasan dari *kerja wajib*, yaitu mereka yang termasuk kelompok yang terpandang di desa,

dan dianggap masuk golongan atas dan golongan yang memerintah Kepala Desa (*Bekel*), Pamong desa (prabot), para pegawai Negeri dan pensiunan pegawai negeri dan pensiunan militer, termasuk pensiunan Lurah, Haji dan guru agama.

Disamping para kelompok golongan atas, terdapat juga kelompok masyarakat yang dibebaskan dari kerja wajib karena dianggap tidak mampu baik secara fisik maupun ekonomis, seperti: *Mondok Glosor* (menumpang di rumah orang lain, tetapi mempunyai nafkah sendiri. *Mondok Menumpang* (menumpang dan bakerja untuk tuan rumah *Ngenger* (seluruhnya ditanggung tuan rumah, *Perjoko* (jejaka). Demikian pula yang tidak mampu secara fisik: anak-anak, orang jompo, orang cacat. Janda (kadang-kadang tidak dibebaskan). Dengan demikian beban paling berat dipikul oleh petani pemilik tanah desa. Yang meliputi sebagian besar petani di Kedu.

Jenis-jenis *kerja wajib* berkembang makin banyak pada zaman pemerintah Kolonial. Ini dikarenakan pemerintah Belanda berupaya memperluas sistem administrasi pemerintahan, mengintensifkan pajak dan pendapatan Negara menggunakan satu-satunya bentuk hubungan kerja yang sudah ada, yaitu kerja wajib.

Pada prinsipnya *kerja wajib* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu memelihara dan memperbaiki jalan jembatan dan bangunan pengairan, kerja menjaga lingkungan di gardu-gardu tepi jalan, di rumah-rumah pejabat, gedung-gedung kantor pemerintah, gudang-gudang, pabrik, pasar, stasiun dines angkutan, setasiun pos. Selanjutnya adalah dines pengawalan para tahanan, pengawalan angkutan, pengambilan uang negara dan lain-lain, bermacam-macam kerja kuli, baik di pabrik, pekerjaan bangunan, penebangan kayu dan sejenisnya.

Seisin itu *kerja wajib* juga dalam pelaksanaannya dibagi dalam pekerjaan-pekerjaan rutin setiap hari atau beberapa hari sekali (*bijzondere diensten*) seperti kerja pemeliharaan dan kerja jaga dimana sejumlah orang tertentu bekerja secara bergilir sepanjang tahun. Disamping itu ada pekerjaan yang dikerjakan secara serentak atau dalam jumlah besar dimana semua orang (sebagian besar, menurut kebutuhan) harus bekerja, seperti pembukaan dan perbaikan jalan serta jembatan, ini masih ditambah dengan pekerjaan saluran pengairan, pembuatan jalan baru, jembatan baru, gedung, penebangan pohon dan pengangkutannya dan sebagainya. Kerja pelayanan kepada pejabat (*pancendiensten*) sampai pertengahan abad 19 masih termasuk *kerja wajib*.

## Daftar Pustaka

- A.G.N. Swart, *Rubber Companies in the Netherland East Indies*, (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1911), hlm. 85.  
Departement van Binnenlandsch Bestuur,  
*Cultuuradresboek voor Indie*, (Batavia: Landsdrukkerij,  
1915), hlm. 130
- Advies Raad van Indie, 25 Maret 1904, no. 30; Eindresumé,  
Jilid I, Lampiran A; dan Booth, 1988
- Anhar Gonggong. 1993. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. hal. 43
- Ann Laura Stoler. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA
- Anthony Reid. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hal. 131
- Anthony Reid. *Sumatera Tempo Doeloe: dari Marcopolo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 149
- Bayu Suriadiningrat. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruci Press. Hal. 52
- Benoit, Daniel, et al. 1989. *Transmigration In Indonesia*. Departemen Transmigrasi RI : Jakarta. 103 halaman  
lihat juga H.G Heyting. 1938. *De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indiche Gids"*. Tahun ke-60, Jld. 2. Hal 106-117
- Besluit Pemerintah, 19 Oktober 1904; dan Kolonisatie

Bulletin, 1937: 4; Sayogyo, 1986: 32; Sri Edi Swasono, 1986: 70

Bukri, et.al. 1978-1979. *Sejarah Daerah Lampung*. Depdikbud: Jakarta. hal. 60

Clifford Geertz. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essay by Clifford Geertz*. New York: Basic Books, hal. 98-100; baca juga Hiroyoshi Kano, 1984: 51-52

Cornelis Fasseur. 1992. *The Politics of Colonial Exploitation, Java, The Dutch, and Cultivation System*. Cornel University Press dalam Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. hal. 60

Daliman, A. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012: 98

De Bestuurszaken der Buitenbezittingen. *De Buitenbezittingen 1904 tot 1914*. Afl. X, Deel 1. Hal. 114

De Lamongsche Pepercultuur, 1973. hal. 2

Devi T Keizerina. 2004. *Poenale Sanctie "Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)"*. Universitas Sumatera Utara & Universitas Indonesia, Jakarta *Loc cit Economisch-Statistische Berichten Woensdag 5 April 1922 No.327*. Online. ([www.delpher.nl](http://www.delpher.nl))

Edi Cahyono. 2005. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Hasta Mitra, Penerbit buku bermutu. Hal. 18

- George Ritzer. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Prenada Media Group. Hal. 139
- H.G Heyting. 1938. *De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indiche Gids"*. Tahun ke-60, Jld. 2. Hal. Lihat juga Joan Hardjono, 1977: 16
- Hall. 1964. *A History of South East Asia*. London: Macmillan hal. 516
- Hayati N. 2000. *Perkembangan Perkebunan dan Masalah Pangan di Sumatra Timur. Lembaran Sejarah. Volume 2*. hal. 25-28
- Heyting. 1938. *De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indiche Gids"*. Tahun ke-60, Jld. 2. Hal. Lihat juga Zwaal: 1936, dan baca juga Schalkwijk: 117
- Hilman Hadikusuma, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung. hal. 122).
- Huitema. *De Bevolkingskoffiecultuur* 1935. hal. 74
- Hwang Cung, 1537. *Hai Yu (Word about the Sea)*, dalam Groeneveldt 1880: hal. 128
- Indah Ningtyas Oktasari, dan Agus Trilaksana. 2014. Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal Avatara*. 2 (1) : 122-129
- J van den Brand. 1992. *De Millionen uit Deli* dalam Breman, Jan. 1992. *Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Het Arbeidresregime op De Grootlandbouwerdernemingen aan Sumatra's Oostkus in Het Begin van De Twintigste Eeuw*. Leiden. Hal. 410
- J.W.J. Wellan, 1932. *Zuid Sumatra*. hal: 108)

- Jan Breman. 2014 *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 304
- Jan Bremen. 1997. *Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust* (Menjinakan sang kuli Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20 diterjemkan oleh Koesalah Soebagyo Toer), Pustaka Utama Grafiti
- Kartodirdjo, Sartono & Djoko Suryo. 1990. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosio-Kultural*. Yogyakarta: Aditya Media. Hal. 22-23
- Lindayanti. 1994. *Perkebunan Karet Rakyat Jambi 1920-1928: Aspek Sosial Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 34-35
- M. Halwi Dahlan. 2014. Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, kokuminggakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung. *Jurnal Patanjala* Vo. 6 No. 3, September 2014. Bandung. hal. 338
- Mestika Zed. 2002. *Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir*. dalam J. Thomas Lindblad. eds. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 294-312
- Nieuwe Administratieve Indeeing van Genoemd Gewest*, Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No. 362
- P. Brooshooft, 1901: 134-135, dan Locher-Scholten, Elsbeth. 1996. *Etika Yang Berkeping-keping; Lima Telaah Kajian aliran Etis Dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Djambatan: Jakarta. hal. 306-340
- Paulus, J. 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* Jilid

7. Gravenghage: Martinus Nijhoff, dalam *T. Keizerina Devi, Poenale Sanctie "Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)*. Hal. 113
- Peter Boomgaard. 2004. *Anak Jajahan Belanda di Hindia Belanda*. Yayasan Obor: hal. 54
- Probonegoro. 1942. *Lampung Tanah lan Tiyangipun*. Jakarta: Bale Poestaka. hal. 17
- Purwanto, Bambang. *Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan tentang Sejarah Perkebunan Indonesia*. dalam website sejarah.fib.ugm.ac.id, diunduh 8 Agustus 2019. hal. 12
- R Broersma. 1916. *De Lampongsche Districten*. Batavia: De Jvasche Boekhandel Landsdrukkerij. hal. 47
- R Fruin. 1920. *Het Arbeidsvraadstuk In Verband Met De Noodzakelijke Ontwikkeling Der Buitengewesten*. hal 9
- Regee Baay. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu: Jakarta. hal. 132
- Regerings Almanak voor Nederlandsche Indie*, 1870: hal. 167
- Ricklefs. 1991. *Sejarah Indonesia Modern, terjemahan Dharmono H*. Yogyakarta: Gadjah Mada UP. hal. 190
- RZ. Leirissa. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. hal. 64
- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1990. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosio-Kultural*. Yogyakarta: Aditya Media. hal. 66-67

- Schalkwijk, 1918: 418; lihat juga Sartono Kartodirjo. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 32
- Scott, Edmund. 1606 *An Exact Discourse of the Subtilties, Fashions, Policies, Religion, And Ceremonies of the East Indians, as well Chyneses as Javans, there abyding and dwelling*, dalam *The Voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas*, ed. Sir William Foster. London, Hakluyt Society. 1943: hal.142
- Soejono & Leirizza. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 181
- Szekely-Lulofs, M.H. 1845. *Koeli*. Bussum dalam Regee Baay. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu: Jakarta. hal. 135
- T. Keizerina Devi. 2004. *Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)”*. Universitas Sumatera Utara & Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 103
- Vierhout, 1921. *Het Arbeidsvraagstuk in Verband met de Noodzakelijke Ontwikkeling der Buitengewesten*. Weltevreden: Albrecht & Co. hal. 82
- W. Karst Huitema dalam *De Bevolkingskoffiecultuur* 1935. hal. 73-76.
- Wertheim. *Masyrakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Tiara Wacana: Yogyakarta. hal. 188
- Yuli Kristian. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung pada Tahun 1800-1942*. Tesis: UIN Jakarta. hal. 164

## **BAB VI**

### **LADA DAN PERBURUHAN**

#### 6.1 Simpulan

Pada awalnya, masyarakat Lampung tidak mengenal kasta dalam masyarakatnya, apalagi praktek perburuhan. Mereka hidup secara komunal, bersifat tradisional, mereka hidup berkelompok dengan mata pencaharian berupa berburu dan tani. Pertanian yang diusahakan orang Lampung berbeda dengan masyarakat Jawa, apabila pertanian padi di Jawa dilakukan dengan mengolah tanah basah dalam bentuk persawahan, maka masyarakat Lampung mengupayakan budidaya tanaman padi dengan cara menanam di huma atau tegalan. Dimana proses penanaman padi dilakukan dengan cara memabat hutan, lalu dibersihkan baru kemudian ditanami padi. Sistem pertanian padi di huma ini mengharuskan masyarakat Lampung berpindah-pindah, karena huma hanya bisa ditanami padi sekali, lalu ditinggalkan, kemudian dibabat kembali untuk dijadikan perladangan lagi.

Budidaya lada di wilayah Lampung tersebar diberbagai lokasi mulai dari kawasan timur, utara, dan barat hingga selatan daerah Lampung seperti daerah Sekampung dan Sukadana di Lampung Timur, Katimbang di Kalianda Lampung Selatan, Tulang Bawang di Utara, Semangka, Tanggamus dan Teluk

Betung. Popularitas lada sebagai bumbu masakan dan tanaman obat yang berkhasiat menyebabkan harganya melambung tinggi di pasaran Eropa. Rempah yang dijuluki *King of Spices* ini pun menjadi salah satu komoditas yang diburu oleh penjelajah Eropa. Perburuan rempah-rempah oleh bangsa Eropa tersebut lantas berujung pada kolonialisme, perburuan dan monopoli perdagangan rempah.

Wilayah Lampung mampu mengekspor lada hitam ke berbagai wilayah di Hindia Belanda dengan total 2.894.973 kg. Apabila ditotal maka wilayah Lampung mampu mengekspor lada hitam baik ke luar ataupun di dalam negeri sebanyak 15.815.448 kg atau sebanyak 77% dari seluruh total ekspor. Fungsi lada pada masa kejayaannya menyebabkan Lampung menjadi daerah perebutan antara Kesultanan Banten, Kesultanan Palembang dan VOC. Hal ini karena selain bernilai ekonomis, lada juga memiliki beberapa fungsi seperti a) simbol persahabatan, b) alat Barter, c) politik diplomasi, d) simbol kejayaan suatu kekuasaan.

Sejak komoditas lada telah menjadi bagian komoditi ekspor yang penting, terutama sejak tampilnya Kerajaan Pasai dan kemudian Malaka hingga Banten. Kontrak kerja antara pemilik kebun dengan para buruh di Lampung, umumnya dilakukan secara lisan dengan upah harian pekerja umumnya terbagi atas dua, yang pertama berjumlah antara  $f$  0,60 hingga

$f$  0,75 tanpa makan dan minum ataupun tunjangan lainnya, sedangkan yang kedua antara  $f$  0,33 hingga  $f$  0,50 dengan biayanya tambahan seperti makanan, minuman dan kadang-kadang juga rokok pekerja, dan ini juga belum termasuk akomodasi bekerja di kebun petani Lampung di tempat terpencil.

Karena penduduk lokal tidak bersedia bekerja di perkebunan maka pada mulanya diusahakan tenaga kerja dari Cina. Tetapi kemudian tenaga kerja diperoleh dari Jawa. Sistem tenaga kerja paksa ini memang sangat menguntungkan sebab pemilik perkebunan diberi hak untuk menghukum Para Pekerja yang lalai melakukan pekerjaannya (*poenale sactie*). Baru pada tahun 1932 *poenale sanctie* terpaksa di hapus karena Amerika Serikat melarang impor barang-barang yang dihasilkan melalui tenaga kerja paksaan.

Praktek perburuhan selama masa pemerintahan kolonial Belanda di Lampung, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut Hoedt, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 kelompok secara garis besar, yaitu: 1) Tenaga Kerja Lepas, 2) Tenaga Kerja Bebas, dan 3) Tenaga Kerja Kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G.N. Swart. 1915. *Rubber Companies in the Netherland East Indies*, (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1911), hlm. 85. Departement van Binnenlandsch Bestuur, *Cultuuradresboek voor Indie*. Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 124-130.
- Alwasilah, A.C. 2012. *Pemertahanan Bahasa Ibu: Kasus Bahasa Sunda*. Dalam Pokoknya Rekayasa Literasi. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI bekerjasama dengan Kiblat.
- Arman, Dedi. 2017. *Dari Hulu Ke Hilir Batanghari: Aktivitas Perdagangan Lada di Jambi Abad XVI-XVII*. BPNB Kepulauan Riau. Direktorat Jendral Kebudayaan Jakarta.
- Arifin, Zainul Dkk. 1985. *Ragam dan Dialek Bahasa Lampung*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Arsandi, D. 2013. *Menggalakkan Bahasa lampung di Lingkungan Kampus*.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad ke XIX . Cetakan ke Empat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Atsushi, Ota. 2009. *Perubahan Rejim dan Dinamika Sosial di Banten: Masyarakat, Negara, dan Dunia Luar Banten 1750-1830*. Serang: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Press
- Baay, Regee. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu: Jakarta.

- Bastin, John. 1965. *The British in West Sumatra*. Kuala Lumpur
- Benoit, Daniel, et al. 1989. *Transmigration In Indonesia*. Departemen Transmigrasi RI : Jakarta. 103 halaman lihat juga H.G Heyting. 1938. *De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indiche Gids"*. Tahun ke-60, Jld. 2
- Boek, J.O.M. 1942. *The Economic Development of the Netherlands Indies*. New York.
- Brand van den, J. 1992. *De Millionen uit Deli dalam Breman, Jan. 1992. Koelies, Planters en Koloniale Politiek. Het Arbeidresregime op De Grootlandbouwerdernemingen aan Sumatra's Oostkus in Het Begin van De Twintigste Eeuw*. Leiden
- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- . 1997. *Koelies, Planters Enkoloniale Politiek, Het Arbeidsregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust (Menjinakan sang kuli Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20 diterjamkan oleh Koesalah Soebagyo Toer)*, Pustaka Utama Grafiti
- Braudel, Fernand. 1983. *Civilization and Capitalism 15th-18th Century: The Wheels of Commerce*, Vol. 2. London: William Collins Sons & Co. Ltd.
- Broersma, R. 1916. *De Lampongsche Districten*. Batavia: De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij.
- . 1919. *Oostkust van Sumatra*. Batavia: De Javasche Boekhandel Landsdrukkerij

- Bukri, et.al. 1978-1979. *Sejarah Daerah Lampung*. Depdikbud: Jakarta.
- Burger, DH dan Prayudi. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Pradnya Paramita: Djakarta.
- Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda di Hindia Belanda*. Yayasan Obor
- Cahyono, Edi. 2005. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Hasta Mitra, Penerbit buku bermutu.
- Collenbrader, HT. 1900. *Dagh Register Gebonden in Costed Batavia Anno 1641-1642*. S'Gravenhage.
- Cortesao, Armando. *The Suma Oriental of Tome Pires*. London: Hakluyt Society.
- Dahlan, M. Halwi. 2014. *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, kokuminggakari, dan Transmigrasi di Provinsi Lampung*. Jurnal Patanjala Vo. 6 No. 3, September 2014. Bandung
- Davison, G. dan C Mc Conville. 1991. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- De Pepercultuur in de Buitenbezittingen*. 1913. Batavia: Landsdrukkerij.
- Fasseur, Cornelis. 1992. *The Politics of Colonial Explotation, Java, The Dutch, and Cultivation System*. Cornel University Press dalam Leirissa. *Sejarah Perekonomian Indonesia*
- Fruin, R. 1920. *Het Arbeidsvraadstuk In Verband Met De Noodzakelijke Ontwikkeling Der Buitengewesten*. hal 1-59.

- Galvao, Antonio. 1544. *A Treatise on the Moluccas, Probably the Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost Histona das Molucas*, salinan, Hubert Jacobs S.J. Rome, Jesuit Historical Institute. 1971
- Gonggong, Anhar. 1993. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta
- Guillot, Claude. 2008. *Banten: Sejarah dan Perdaban Abad X – XVII*. Jakarta: KPG.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Depdikbud: Jakarta
- . 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung
- . 2014. *Kuntara Raja Niti*. Lampung: Tanpa Penerbit
- Hall. 1964. *History of South East Asia (Edisi Kedua)*. London: Macmillan.
- Hardiman. 2015. *Perkebunan Lada di Banten Tahun 1805-1816*. Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Hayati, N. 2000. *Perkembangan Perkebunan dan Masalah Pangan di Sumatra Timur. Lembaran Sejarah. Volume 2*.
- Hekmeijer, F.C. (ed.). 1917. *Verordeningen Inlandsch Grondbezit*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Heyting, H.G. 1938. *De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indiche Gids"*. Tahun ke-60, Jld. 2.
- Hoedt. 1930. *Indische Bergcultuurondernemingen*

*Voornamelijk in Zuid Sumatra: Gegeven en Beschouwingen.* Wageningen: H. Veenman & Zonen.

Huitema. 1935. *De Bevolkingskoffiecultuur.*

Hwang Cung, 1537. *Hai Yu (Word about the Sea)*, dalam Groeneveldt 1880: hal. 126-128

Ibrahim, Ibn Muhammad. 1688. *The Ship of Sulaiman*, terjemahan dari The Persian by J.O Kane. London. Routledge and Kegan Paul. 1972.

Izzati, Fathimah Fildzah. *Politik Buruh di Era Desentralisasi & Precariat : Studi Advokasi Perda “Anti-Outsourcing: Beberapa Serikat Buruh di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Karawang.* 2011. Skripsi. Dipublikasikan di Perpustakaan UI.

Janse, Dirk. *Het Koloniale Album Als Verhaal: Beeldvorming in foto albums uit Sumatera, 1860-1900, skripsi.* Dutch: Universiteit Utrecht. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019)

Galla, A. 2001. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation.* Brisbane: Hall and Jones Advertising.

Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essay by Clifford Geertz.* New York: Basic Books

Kaplan, R.B. and Baldauf-Jr, R. 1997. *Language Planning: From Practice to Theory.* Sydney: Multilingual Matters Ltd.

Kartodirdjo, Sartono & Djoko Suryo. 1990. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia : Kajian Sosio-Kultural.* Yogyakarta: Aditya Media.

- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- .2010. *Sejarah Nasional Jilid IV. Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Katubi, O. 2006. *Sikap Penutur Jati Bahasa Lampung*. Pusat Penelitian dan Kebudayaan (PMB)-LIPI. (sastra.um.ac.id)
- Katubi, O. 2007. *Lampungic Languages: Looking for New Evidence of Language Shift in Lampung and the Question of Its Reversal. Studies in Philippine Languages and Cultures* Vol. 16, 1-10.
- Keizerina Devi, T. 2004. *Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)”*. Universitas Sumatera Utara & Universitas Indonesia, Jakarta
- Kohler. J.E.H. 1874. *Tijdchrift Voor Nederlandsch Indie*.
- Kristian, Yuli. 2019. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung pada Tahun 1800-1942*. Tesis: UIN Jakarta.
- Leirissa, G.A. Ohorella, Yuda B. Tangkilisan. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Lindayanti. 1994. *Perkebunan Karet Rakyat Jambi 1920-1928: Aspek Sosial Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leirissa, R.Z, dkk. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 1996. *Etika Yang Berkeping-keping; Lima Telaah Kajian aliran Etis Dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Djambatan: Jakarta.

- Marsden, William. *Sejarah Sumatera*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Masroh, Laelatul. 2015. *Perkebunan dan Perdagangan Lada di Lampung Tahun 1816-1942*. Jurnal Sejarah dan Budaya. Universitas Negeri Malang
- Mbete, A.M. 2010. *Strategi Pemertahanan Bahasa-Bahasa Nusantara*. Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa Nusantara.
- Meilink Roelofsz, M.A.P. 2016. *Perdagangan Asia dan pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar 1630*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mok, A., Chow, A., Wong, W. 2006. Strengthening Language Arts in English Language Teaching in Hongkong. In Penny McKay (Ed). 2006. *Planning and Teaching Creatively within a Required Curriculum for School-Age Learners*. Virginia: TESOL, Inc.
- Nurhakim, Lukman & Moh. Ali Fadillah. 1989. *Lada: Politik Ekonomi Banten di Lampung dalam Prosedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi III: Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi*. Depdikbud: Jakarta. hal. 258-274.
- Oktasari, Indah Ningtyas dan Agus Trilaksana. 2014. *Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur*. Jurnal Avatara. 2 (1) : 122-129.
- Paulus, J. 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Jilid 7*. Gravenghage: Martinus Nijhoff dalam *T. Keizerina Devi*.
- Paulus, J. 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Jilid 7*. Gravenghage: Martinus Nijhoff, dalam *T. Keizerina Devi, Poenale Sanctie "Studi Tentang Globalisasi*

*Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950).*

Probonegoro. 1940. *Lampoeng Tanah Lan Tijangipoen*. Batavia: Bale Poestaka

Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Monografi Daerah lampung*. Jakarta.

Pudjiastuti, Susi. 1997. *Aksara dan Naskah Lampung Kuno dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kini*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Purwanto, Bambang. *Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan tentang Sejarah Perkebunan Indonesia*. dalam website sejarah.fib.ugm.ac.id, diunduh 8 Agustus 2015.

Putra, K.A. 2013. *Revitalisasi Bahasa Lampung*. *Lampung Post*, 13 Februari 2013.

Reid, Anthony. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jiid 1: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

———.2014. *Sumatera Tempo Doeloe: dari Marcopolo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.

*Regerings Almanak voor Nederlandsch Indië 1870*. Batavia: Lands-Drukkerij. 1870

Ricklefs. 1991. *Sejarah Indonesia Modern, terjemahan Dharmono H*. Yogyakarta: Gadjah Mada UP.

Ritzer, George. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Prenada Media Group

- Saptono, Nanang. 2010. *Perdagangan dan Pertukaran Masa Prasejarah- Kolonial*. Jatinangor: Alqo Print.
- Sayuti, Husin. *Daerah Lampung Pada Sisi Jalan Sutra Dari Awal Tarikh Masehi Sampai Abad Ke-16* dalam R.Z Leirissa (ed). *Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra*. 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Sayuti, Husin dkk. 1988. *Peta Sejarah Provinsi Lampung*. Depdikbud: Jakarta.
- Schalkwijk, W.C. 1918. *De Kolonisatieproeven in de Lampongsche Districten*. Dalam *Koloniale Studien*. Tahun Kedua, Jld. 2,
- Scott, Edmund. 1606 *An Exact Discourse of the Subtilties, Fashions, Policies, Religion, And Ceremonies of the East Indians, as well Chyneses as Javans, there abyding and dwelling*, dalam *The Voyage of Sir Henry Middleton to the Moluccas*, ed. Sir William Foster. London, Hakluyt Society. 1943: hal 81-176.
- Soedewo, Ery. 2007. *Lada Si Eman Panas: Dampaknya Bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten*. Jurnal Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Soejono & Leirizza. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soepomo, Iman. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta.
- Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA

- Sumatraantjes*, Reisbrieven van H.C Zentgraaff en W.A Van Goudoever
- Suriadiningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruci Press.
- Susanto, Budi. 2007. *Masihkah Indinesia*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Szekely-Lulofs, M.H. 1845. *Koeli*. Bussum dalam Regee Baay. 2010. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu: Jakarta
- T. Keizerina Devi. 2004. *Poenale Sanctie “Studi Tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatera Timur (1870-1950)”*. Universitas Sumatera Utara & Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tjandrasasmita, 1984: 174
- Turner, Jack. *Sejarah Rempah: Dari Erotisme Sampai Imperialisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Van der Tuk, H.N. 1884. *Lampongsche Pijagens Medegedeeld*. BKI, XXIX
- Van Royen, J. W. 1930. *Nota over de Lampongsche Merga’s*. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Vierhout, M. 1921. *Het Arbeidsvraagstuk in Verband met de Noodzakelijke Ontwikkeling der Buitengewesten*. Weltevreden: Albrecht & Co
- W.F. Wertheim. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Waluyo. 2008. *Gerakan Ilmu Pengetahuan Sosial: Kelas VII*

*untuk SMP/MTS.* Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Wiharyanto. 1990. *Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Yudianto. 2015. *Tanaman Lada dalam Perspektif Autekologi.* Bandar Lampung: Aura Publishing.

Zed, Mestika. 2002. *Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir.* dalam J. Thomas Lindblad. eds. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zoolinger, H. 1847. *The Lampongsch. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* 5 (1851).

## **Tentang Penulis**



Karsiwan, dilahirkan di Kemiling sebuah daerah di Provinsi Lampung, pada 16 September 1989 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Kusen dan Ibu Karsiyem. Menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di tanah kelahiran SD N 5 Sumberjo lulus 2002, SMPN 14 Bandar Lampung, dan SMAN 7 Bandar Lampung dan lulus tahun 2008.

Tahun 2009 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Pendidikan IPS di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

Menikah dengan Lisa Retno Sari tahun 2016, dan dikaruniai seorang putri bernama Ayra Ashalina Fauziah. Saat ini tercatat sebagai tenaga pengajar di jurusan S1 Tadris IPS IAIN Metro.



# KEJAYAAN LADA HINGGA PRAKTEK PERBURUHAN DI LAMPUNG ABAD KE XVI-XX

Pada awalnya, masyarakat Lampung tidak mengenal kasta dalam masyarakatnya, apalagi praktek perburuhan. Sejak tampilnya lada sebagai komoditi ekspor utama abad XVII-XVIII, sejak itulah wilayah Lampung menjadi perebutan kekuasaan mulai dari Kesultanan Banten, Palembang, VOC hingga EIC milik Inggris. Popularitas lada sebagai bumbu masakan dan tanaman obat yang berkhasiat menyebabkan harganya melambung tinggi di pasaran Eropa. Rempah yang dijuluki King of Spices ini pun menjadi salah satu komoditas yang diburu oleh penjelajah Eropa. Perburuan rempah-rempah oleh bangsa Eropa tersebut lantas berujung pada kolonialisme, perburuhan dan monopoli perdagangan rempah .

Budidaya lada di wilayah lampung tersebar diberbagai lokasi mulai dari kawasan timur, utara, dan barat hingga selatan daerah Lampung seperti daerah Sekampung dan Sukadana di Lampung Timur, Katimbang di Kalianda Lampung Selatan, Tulang Bawang di Utara, Semangka, Tanggamus dan Teluk Betung. Wilayah Lampung mampu mengekspor lada hitam sebanyak 15.815.448 kg atau sebanyak 77% dari seluruh total ekspor. Praktek perburuhan selama masa pemerintahan kolonial Belanda di Lampung, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut Hoedt, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 kelompok secara garis besar, yaitu: 1) Tenaga Kerja Lepas, 2) Tenaga Kerja Bebas, dan 3) Tenaga Kerja Kontrak.

ISBN 978-623-7092-39-1

9 786237 092391

